

**ANALISIS HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS ATAS BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Oleh :  
Fahri Eka Oktora  
Winston Pontoh**

***ABSTRACT***

*Local governments need to increase capital investment in fixed assets, such as: equipments, buildings, infrastructures, and other fixed assets. Capital expenditure allocation was based on the local needs for facilities and infrastructure. The higher level of capital investment expected to improve the quality of public services, because the fixed assets due to capital expenditure is a key for the implementation of governmental duties and provides services to the public.*

*This study was aimed at analyzing the corelations of local own revenues, general allocation funds, and specific allocation funds with capital expenditures at Tolitoli Regency in Central Sulawesi Province. Research design methods is the field research by correlation analysis.*

*Test results showed a lack relationship between local own revenues with capital expenditures by R value was 0,155. Meanwhile the relationship between general allocation funds with capital expenditures was 0,981 and special allocation funds with capital expenditures was 0,427. It shows the close relationship between the two variables with capital expenditures.*

**Keywords:** *Local Own Revenue, General Allocation Fund, Spesific Allocation Fund, Capital Expenditure.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Jika kita menelusuri sejarah, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal sebenarnya bukan merupakan konsep baru karena telah diatur sejak tahun 1903 dimana pemerintah kolonial mengeluarkan *Staatsblaad* Nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan dengan pengelolaan keuangan yang berdiri sendiri. Akan tetapi, desentralisasinya masih bersifat terbatas sehingga belum mampu mengurangi ketimpangan antar daerah (Zulyanto, 2010). Pada masa orde baru, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dilakukan pemerintah bersamaan dengan kontrol yang ketat terhadap militer dan birokrasi, sehingga pada akhirnya relasi pusat-daerah periode orde baru lebih cenderung bergerak ke arah kutub sentralisasi daripada desentralisasi. Kebalikannya, otonomi daerah yang dilahirkan orde reformasi terlibat lebih nyata namun cenderung membawa dampak negatif dibandingkan orde baru. otonomi daerah ala orde baru tidak memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah, sehingga tidak pernah terjadi sengketa antara pemerintah pusat dengan daerah.

Saat ini, otonomi daerah memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada daerah otonom, yang ditekankan pada kabupaten dan kota. Dampaknya, apabila merasa diambil haknya pemerintah daerah berani 'memberontak' kepada pemerintah pusat lewat pengadilan. Pada tahun 2003, Gelora Bung Karno (GBK), yang terletak di kawasan Senayan, disengketakan hak pengelolanya oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Sutiyoso, selaku Gubernur DKI Jakarta menganggap bahwa GBK harus dikelola oleh Pemda DKI Jakarta. Sementara Hari Sabarno, Menteri Dalam Negeri selaku Pemerintah, tidaklah demikian menafsirkannya. Dengan mengelola GBK, Sutiyoso menganggap bahwa Pemda DKI akan mendapatkan keuntungan ekonomis. Pernyataan Sutiyoso ini menanggapi pernyataan Mendagri Hari Sabarno, yang menyebutkan bahwa aset Pemerintah tidak dapat dimiliki oleh pemerintah daerah karena merupakan sumber pendapatan untuk pemerintah.

Implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah terjadi secara luas, tidak hanya terjadi pada daerah yang secara geografis kaya akan sumber daya alam ataupun memiliki potensi industri dan perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga terjadi pada daerah yang miskin sumber daya alam dan terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut menjadi beban fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, maka Pemerintah memberikan Dana Perimbangan. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. Hasil riset yang dilakukan oleh Adi (2006) mengindikasikan bahwa proporsi Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tingginya proporsi Dana Perimbangan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan bahwa penerimaan daerah sangat bergantung pada bantuan keuangan (transfer) pemerintah pusat. Fakta ini tidak mencerminkan timbulnya kemandirian sebagaimana tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus semakin kecil (Harianto dan Priyo, 2010).

Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik. Dalam kajian ilmu akuntansi sektor publik, kegiatan pembangunan

infrastruktur daerah tersebut dikenal dengan istilah belanja modal (Permendagri No. 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Berbagai fenomena yang terjadi seputar tarik-menarik aset antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat memotivasi untuk dilakukannya suatu riset dalam rangka mencari tahu apakah aset tetap pemerintah daerah selama ini telah dibelanjakan dengan ‘uang sendiri’ ataukah didanai oleh bantuan dari pemerintah pusat? Oleh karena itu, judul yang diangkat adalah: “Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk berikut ini.

1. Bagaimana hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana hubungan antara dana alokasi umum dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah?
3. Bagaimana hubungan antara dana alokasi khusus dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah?

Adapun tujuan penelitian adalah berikut ini.

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang hubungan antara dana alokasi umum dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang hubungan antara dana alokasi khusus dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian juga diharapkan dapat memberikan manfaat berikut ini.

1. Secara teoritis memberikan kontribusi positif dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sektor publik.
2. Secara praktis, memberi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola arus kas masuk dan arus kas keluar, terutama yang terkait dengan sumber pendanaan belanja modal (pengadaan aset tetap).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Tempat atau Obyek Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dengan kriteria SKPD yang memiliki alokasi Belanja Modal selama tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011.

#### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan teknik data yang dikumpulkan dalam penelitian terdiri dari berikut ini.

##### 1) Jenis Data

- (1) Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, seperti proses pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka, seperti realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

## 2) Sumber data

- (1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan obyek penelitian.
- (2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur serta informasi tertulis lainnya yang bersumber dari obyek penelitian ini.

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tolitoli.

## 2. LANDASAN TEORITIS

### 2.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yang berarti mekanisme teknik analisis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2002).

### 2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD adalah suatu anggaran daerah, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun (Halim, 2004).

### 2.3 Laporan Keuangan Sektor Publik

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### 2.4 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

### 2.5 Dana Alokasi Umum

DAU merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.

### 2.6 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

### **2.7 Belanja Modal**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005).

### **2.8 Barang Milik Daerah**

Menurut Abdullah (2010) Barang Milik Daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD.

### **2.9 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal**

Prakosa (2004) mengutip riset yang dilakukan oleh Aziz *et al.* (2000), Doi (1998), Von Furstenberg *et al.* yang mengajukan hipotesis bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah (*tax spend hypothesis*). Hoover & Sheffrin (1992) yang dikutip oleh Prakosa (2004) secara empiris menemukan bahwa pada pertengahan 1960-an pajak berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedang untuk sampel sesudah tahun 1960-an menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Penelitian Prakosa (2004) serta Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan jika PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

### **2.10 Hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal**

Dalam penelitiannya, Holtz-Eakin *et al.* (1994) yang dikutip oleh Abdullah dan Halim (2006) menyatakan terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dalam Halim dan Abdullah (2004) serta Prakosa (2004) menemukan bukti empiris bahwasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (dalam hal ini DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.

### **2.11 Hubungan antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal**

Riset Muis (2012) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta juga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

## **3. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN/KASUS**

Tolitoli merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang nampak memanjang dari timur ke barat Pulau Sulawesi, terletak di sebelah utara garis khatulistiwa dalam koordinat 0,35°-1,20° LU dan 120°-122,09° BT dengan luas 4.079,6 km<sup>2</sup> serta penduduk 210.000 jiwa (2008). Pada tahun 2011, kondisi perekonomian Kabupaten Tolitoli meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, serta terciptanya laju pertumbuhan PDRB yang positif.

Pengukuran dan Pelaporan PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas menuju akrual (*cash toward accrual based accounting*). Entitas akuntansi (*accounting entity*) adalah semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tolitoli, sedangkan entitas pelaporan (*reporting entity*) adalah Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tolitoli.

#### 4. ANALISIS DAN EVALUASI

##### 4.1 Analisis Data

##### 4.1.1 Analisis PAD Kabupaten Tolitoli

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran PAD berikut ini.

**Tabel 4.1 Perkembangan dan Pertumbuhan Realisasi PAD**

Tahun	PAD (Rp.)	Kenaikan (Penurunan) (Rp.)	%
2007	14.842.616.597,86	-	-
2008	14.402.120.403,95	(440.496.193,91)	(2,97)
2009	19.676.781.670,96	5.274.661.267,01	36,62
2010	13.131.984.312,31	(6.544.797.358,65)	(33,26)
2011	16.655.710.599,85	3.523.726.287,54	26,83
Rata-rata	15.741.842.717,00		

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2011)

Pada Tahun Anggaran 2010 PAD mengalami penurunan karena masih banyaknya potensi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tergali secara optimal, badan usaha milik daerah belum memberikan bagian laba kepada pemerintah daerah dan masih kurangnya kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, masih terdapat kebocoran-kebocoran yang disebabkan oleh lemahnya pemahaman atas penatausahaan penerimaan daerah oleh aparat pemungut karena belum memenuhi kompetensi yang disyaratkan.

Pada Tahun Anggaran 2011, realisasi PAD mengalami kenaikan dikarenakan adanya sarana mobilitas (kendaraan dinas) bagi petugas guna meningkatkan pembinaan kepada para wajib pajak daerah dan retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sehingga akan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

##### 4.1.2 Analisis DAU Kabupaten Tolitoli

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran DAU berikut ini.

**Tabel 4.2 Perkembangan dan Pertumbuhan Realisasi DAU**

Tahun	DAU (Rp.)	Kenaikan (Penurunan) (Rp.)	%
2007	274.713.000.000,00	-	-
2008	304.613.239.000,00	29.900.239.000,00	10,88
2009	307.431.914.000,00	2.818.675.000,00	0,93
2010	319.134.358.000,00	11.702.444.000,00	3,81
2011	351.739.677.810,00	32.605.319.810,00	10,22
Rata-rata	311.526.437.762,00		

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2011)

Realisasi DAU Kabupaten Tolitoli cenderung naik setiap tahunnya secara signifikan. Peningkatan ini terjadi karena Pemerintah Pusat memberikan dana yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

##### 4.1.3 Analisis DAK Kabupaten Tolitoli

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran DAK berikut ini.

**Tabel 4.3 Perkembangan dan Pertumbuhan Realisasi DAK**

Tahun	DAK (Rp.)	Kenaikan (Penurunan) (Rp.)	%
2007	41.638.325.274,00	-	-
2008	51.226.000.000,00	9.587.674.726,00	23,02

2009	47.440.000.000,00	(3.786.000.000,00)	(7,39)
2010	39.445.400.000,00	(7.994.600.000,00)	(16,85)
2011	47.497.500.000,00	8.052.100.000,00	20,41
Rata-rata	45.449.445.055,00		

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2011)

DAK mengalami penurunan pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009, namun mengalami kenaikan pada tahun 2011. Fluktuasi dana ini di luar kewenangan Pemerintah Daerah sebab penetapan besaran DAK dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

#### 4.1.4 Analisis Belanja Modal Kabupaten Tolitoli

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran belanja modal berikut ini.

**Tabel 4.4 Perkembangan dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal**

Tahun	Belanja Modal (Rp.)	Kenaikan (Penurunan) (Rp.)	%
2007	150.893.400.666,00	-	-
2008	148.234.903.652,00	(2.658.497.014,00)	(1,76)
2009	115.759.328.234,00	(32.475.575.418,00)	(21,91)
2010	56.727.557.270,00	(59.031.770.964,00)	50,99
2011	118.894.665.866,00	62.167.108.596,00	109,59
Rata-rata	118.101.971.137,60		

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2011)

Belanja modal mengalami penurunan dalam periode tahun 2009-2010 sebagai dampak dari pengalokasian hampir 75% dana yang ada untuk belanja operasi diantaranya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta pembayaran hutang kepada Pihak Ketiga. Namun pada tahun anggaran 2011 mengalami kenaikan karena dana yang tersedia pada APBD tahun berjalan diprioritaskan untuk pengadaan aset tetap.

#### 4.1.5 Analisis Korelasi Bivariate

Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS 19.0 diperoleh hasil uji korelasi *bivariate* antara PAD, DAU, DAK dengan Belanja Modal berikut ini.

##### Correlations

	PAD	DAU	DAK	BM
PAD Pearson Correlation	1	.522**	.646**	.340**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
N	255	255	255	255
DAU Pearson Correlation	.522**	1	.574**	.953**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
N	255	255	255	255
DAK Pearson Correlation	.646**	.574**	1	.545**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
N	255	255	255	255
BM Pearson Correlation	.340**	.953**	.545**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
N	255	255	255	255

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil uji korelasi, nilai R dari hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal adalah 0,340 (34%) sehingga terdapat hubungan yang kurang erat antara kedua variabel tersebut. Hubungan antara PAD dengan DAU memiliki nilai 0,522 (52,2%), sedangkan hubungan antara PAD dengan DAK sebesar 0,646 menunjukkan eratnya korelasi antara kedua variabel tersebut.

Hubungan DAU dengan Belanja Modal masuk dalam kategori kuat senilai 0,953 (95,3%). Di sisi lain, terdapat hubungan yang cukup erat antara DAU dengan PAD sebesar 0,522. DAU dengan DAK memiliki tingkat keeratan senilai 0,574 sebab kedua variabel ini bersumber dari pos yang sama, yaitu APBN.

Korelasi antara DAK dengan Belanja Modal senilai 0,545 (54,5%) sehingga terdapat hubungan yang erat antara kedua variabel tersebut. Selain itu, DAK berkorelasi dengan PAD sebesar 0,646 (64,6%), sedangkan hubungan antara DAK dengan DAU cukup kuat dengan nilai 0,574 karena kedua sumber dana ini berasal dari Pemerintah Pusat guna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.2 Evaluasi Data**

Hubungan antara PAD dengan Belanja Modal diklasifikasikan dalam kategori lemah. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian Hoover & Sheffrin (1992) dalam Prakosa (2004) yang secara empiris menemukan bahwa sesudah tahun 1960-an pajak tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Kebijakan alokasi wajib (*earmarking*) yang termuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat 'memaksa' daerah dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang tertentu. Akan tetapi, obyek penelitian belum menerapkan aturan tersebut pada tahun anggaran 2011. Misalnya, belanja pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan seharusnya dibiayai oleh 10% dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai komponen dari PAD.

Korelasi DAU dan Belanja Modal masuk dalam kategori kuat. Semakin besar DAU, maka Belanja Modal diprediksi akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Holtz-Eakin *et.al.* (1994), Legrenzi & Milas (2001) yang dikutip oleh Prakosa (2004), Abdullah dan Halim (2006), serta Susilo dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Hubungan antara variabel DAK dan Belanja Modal masuk dalam kategori kuat. Kenyataan ini mendukung riset Muis (2012) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berhubungan dengan Belanja Modal.

Hasil penelitian ini mendukung studi Abdullah dan Halim (2006) yang menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal terkait dengan sumber pendapatan atau pendanaan yang tersedia. Besaran belanja modal berasosiasi dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, tapi tidak dengan pendapatan sendiri (PAD).

Implikasi akuntansi dari hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) bahwa tiap-tiap dana harus ditempatkan pada laci (*cash drawer*) secara terpisah dimana beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lain dari laci lainnya. Langkah ini merupakan perwujudan dari salah satu teknik akuntansi keuangan yang diadopsi oleh sektor publik, yaitu akuntansi dana. Williams dalam Abdullah (2010) turut menegaskan bahwa salah satu tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan fleksibilitas dalam mencocokkan aliran masuk dengan aliran keluar kas sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, dokumen penganggaran dan penatalaksanaan keuangan daerah harus mencantumkan sumber pendanaan yang jelas dari setiap jenis belanja (termasuk belanja modal) guna menghindari ketekoran kas akibat pengeluaran yang tidak direncanakan dalam anggaran.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian, analisa hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan berikut ini.

1. Hasil uji korelasi PAD dengan Belanja Modal menunjukkan terdapat hubungan yang kurang erat akibat rendahnya proporsi PAD dalam komposisi Pendapatan Daerah. Kebijakan alokasi wajib



(*earmarking*) dalam UU No. 28 Tahun 2009 diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di bidang tertentu walaupun obyek penelitian belum menerapkan aturan tersebut.

2. Hubungan antara DAU dengan Belanja Modal adalah sangat erat. Hal ini ditunjang oleh pemberian DAU dalam jumlah banyak sehingga memiliki proporsi yang dominan dalam membiayai belanja modal.
3. DAK dengan Belanja Modal menunjukkan hubungan yang erat. Realita ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer, khususnya dalam pengadaan aset tetap pada proyek tertentu yang urusannya diserahkan oleh Pemerintah Pusat.

Hasil penelitian berimplikasi teoritis pada studi Abdullah dan Halim (2006) bahwa pembuatan kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal terkait dengan sumber pendanaan yang tersedia. Implikasi akuntansi dari hasil penelitian ini sejalan pula dengan pendapat Mardiasmo (2009) bahwa tiap-tiap dana harus ditempatkan pada laci (*cash drawer*) secara terpisah dimana beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lain dari laci lainnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan perbandingan antara kondisi ideal pada landasan teori dengan kondisi nyata sesuai pembahasan hasil penelitian maka disarankan hal-hal berikut ini.

1. Pemda Kab. Tolitoli hendaknya meningkatkan realisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah sehingga dapat digunakan untuk membiayai belanja modal.
2. Pemda Kab. Tolitoli seyogyanya mengimplementasikan amanat UU No. 28/2009 untuk mengalokasikan 10% dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor guna membiayai belanja modal pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dilakukannya generalisasi atas hasil penelitian tersebut. Penelitian berikutnya juga diharapkan menggunakan variabel yang lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain (ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan lainnya), maupun variabel nonkeuangan, seperti kebijakan pemerintah dan kondisi makroekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2010. Manajemen Kas Daerah. diakses dari <http://syukriy.word-press.com> pada tanggal 9 Juli 2012.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* (Vol. 2 No. 2 November 2006) Halaman 17-32.
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal* disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX di Padang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi IV). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2002. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-UGM dan Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Universitas Gadjah Mada.
- Badan Pusat Statistik. 2011. Kabupaten Tolitoli dalam Angka Tahun 2011.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal* disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25*.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2010. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Jurnal yang disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik Edisi Keempat. Yogyakarta: Andi.
- Muis, Noni Hilwa. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI Vol. 8 No. 2, Hal. 101-118*.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- \_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
- \_\_\_\_\_. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo Hari Adi. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah). Surabaya: Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama.
- Zulyanto, Aan. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

**FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH (BD) PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Adventinus Kristanto Lambut  
Novi Budiarmo**

***ABSTRACT***

*Decentralization leads the broad impact of accounting for local governments. Among other is the separation of powers from the centre, which has been handed to the local (including state, province, county, and town). Even so, the Central Government does not immediately fully release the local governments. But the Central Government still needs to transfers intergovernmental grants to the local. One of the funds transfer is General Allocation Fund which can need by the local government freely for either operational expenditure or capital expenditure. The General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum) and the Original Region Revenue (Pendapatan Asli Daerah) are several income account for local governments to be used as Local Expenditure (Belanja Daerah). One example of the waste in the BD can be seen through a phenomenon called the flypaper effect. Where DAU lag 1 is more significantly influential to BD than PAD lag 1. However, in this research gives empirical evidence that in North Sulawesi Province Government for the realization of the budget for the years 2001 until 2010, the flypaper effect phenomenon does not occur. This demonstrated by statistic tool, multiple regression generates the coefficient PAD lag 1 influences significantly to BD with 0.006 on a 0.05 whereas DAU lag 1 does not influence significant.*

*Keywords: General Allocation Fund, Origin Region Revenue, Local Expenditure, Flypaper Effect.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Alasan Pemilihan Judul

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menjadi dasar lahirnya otonomi daerah yang di dalamnya terkandung hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur (mengorganisir), serta mengurus sendiri kegiatan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun istilah dekonsentrasi dan desentralisasi tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi *the founding father* negara ini tampaknya menginginkan kedua azas tersebut digunakan sebagai jembatan untuk mempertemukan antara kepentingan pemerintahan pusat dan daerah (Sarundajang, 2011). Sebagai konsekuensi dari desentralisasi daerah, pemerintah pusat tidak dapat serta-merta melepaskan tanggungjawab secara menyeluruh kepada pemerintah daerah. Ini berarti, pemerintah daerah tidak langsung bisa untuk mandiri. Dengan demikian diperlukan bantuan dana pemerintah pusat bagi pemerintah daerah. UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat menyalurkan dana pemerimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain itu, sebagai daerah yang telah terotonomi, daerah memiliki sumber dana lain dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapat lain-lain yang sah. Untuk itu, diharapkan dana transfer dari pemerintah pusat dapat digunakan oleh pemerintah daerah secara efektif dan efisien demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal. Perlu juga pemerintah daerah untuk transparan dan akuntabel dalam mengungkapkan kebijakan daerah atas penggunaan dana tersebut. Dalam UU No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan dana perimbangan adalah untuk mengurangi (bila tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah dana perimbangan merupakan salah satu pos pendapatan yang sangat signifikan, hal ini nampak pada prakteknya bahwa transfer dari pusat merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai keperluan operasional dan wajib dilaporkan dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer dari pemerintah pusat, maka stimulus yang ditimbulkan berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Saat respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatan asli daerahnya sendiri, maka disebut *flypaper effect* (Hines, 1995).

Untuk membangun kemandirian suatu daerah maka perlu adanya pengeluaran-pengeluaran yang kita sebut sebagai Belanja Daerah (BD). Belanja daerah secara umum diatur dalam APBD terdapat dua yakni, Belanja Operasional dan Belanja Modal. Kecenderungan saat ini dalam prakteknya, DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Daerah, baik belanja operasional maupun belanja modal. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah daerah lebih banyak memanfaatkan DAU untuk belanja operasional ketimbang belanja modal. Hal ini dapat dilihat juga dalam penelitian Heng-Fu Zao, 1994 di Amerika Serikat, dimana pemerintah pusat telah meningkatkan dana transfernya ke daerah akan tetapi, infrastruktur di daerah justru kian memburuk.

Melihat penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang mengangkat secara khusus fenomena ini di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara peneliti tertarik untuk melengkapi penelitian-penelitian tersebut. Atas dasar pemikiran ini maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul, "*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara".

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah DAU *lag 1* berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah PAD *lag 1* berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara?
3. Apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh DAU *lag 1* dan PAD *lag 1* terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara?

Berdasar pada rumusan masalah di atas maka, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_1$  : DAU *lag 1* berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

$H_2$  : PAD *lag 1* berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

$H_3$  : Pengaruh DAU *lag 1* terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD *lag 1* terhadap Belanja Daerah.

Untuk *flypaper effect* tidak digunakan hipotesis karena *flypaper effect* merupakan sebuah fenomena yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan DAU daripada PAD.

Berdasar pada rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada:

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) *lag 1* terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) *lag 1* terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; artinya pengaruh DAU *lag 1* lebih besar dari pada PAD *lag 1* terhadap BD.

Dalam penelitian ini, penulis menentukan obyek penelitian adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Alasan penulis memilih Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara karena pertumbuhan ekonomi di daerah ini secara umum cukup menjanjikan dan menarik untuk dicermati.

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2001 – 2010 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Oleh karena jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder maka, metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian berupa, *library research* atau studi kepustakaan dengan melihat teori-teori ataupun studi empiris yang sudah ada sebelumnya.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regression*). Hasil analisis adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Regresi sederhana dan berganda yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan hipotesis dijabarkan di bawah ini dalam bentuk persamaan-persamaan. Berikut persamaan-persamaan yang digunakan dalam pengujian hipotesis 1, 2, dan 3.

$$Y_1 = a + b_1 DAU_{lag\ 1} + e \quad (1)$$

$$Y_1 = a + b_2 PAD_{lag\ 1} + e \quad (2)$$

$$Y_1 = a + b_1 DAU_{lag\ 1} + b_2 PAD_{t-1} + e \quad (3)$$

dimana  $Y_1$  adalah jumlah belanja (BD) tahun berjalan,  $a$  konstanta,  $b_1$ ,  $b_2$  koefisien regresi,  $DAU_{lag\ 1}$  jumlah DAU tahun sebelumnya,  $PAD_{lag\ 1}$  jumlah PAD tahun sebelumnya, dan  $e$  adalah variable error.

Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect* dalam Maimunah, 2006 dijelaskan bahwa efek DAU terhadap BD dibandingkan dengan efek PAD terhadap BD (pada hipotesis 3). Dalam regresi tunggal, koefien regresi, nilai *t-statistic*,  $R$ ,  $R^2$ , dan *adjusted R^2* masing-masing variabel (regresi) dibandingkan antara DAU dan PAD. Untuk regresi berganda, dibandingkan koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Syarat terjadinya *flypaper* adalah:

1. Apabila efek (nilai koefisien) DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau
2. PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*.

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No.33 Tahun 2004 berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

**2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah secara jelas diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB V tentang Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2.3. Belanja Daerah (BD)**

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan.

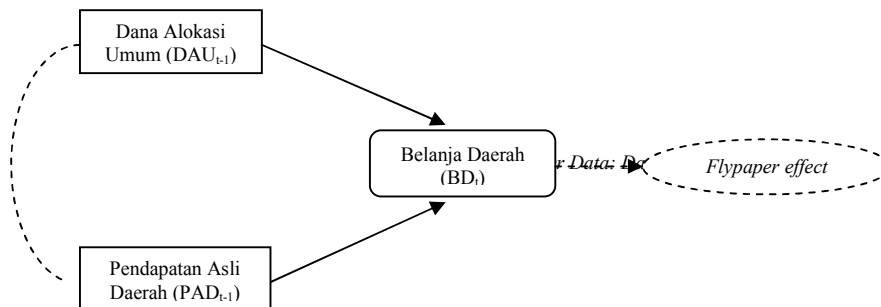
**2.4. Penelitian Terdahulu**

Heng-Fu Zao pada tahun1994 menyimpulkan bahwa dana transfer pemerintah pusat Amerika Serikat (seperti DAU) memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah baik operasional maupun belanja modal, dan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Hal yang sama juga didukung oleh Dahlberg et al, 2007 yang menyatakan bahwa peningkatan dalam dana transfer secara positif berpengaruh pada belanja daerah di kabupaten/ kota Amerika Serikat. Grossman, 1988 menyimpulkan adanya pengaruh signifikan antara DAU dengan belanja daerah.

Kusumadewi & Rahman, 2007 yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Lebih spesifik, Maimunah;2006 untuk Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra, Prakosa;2004 untuk Provinsi Jawa dan DIY, Sudjrajat;2010 untuk Provinsi Lampung, dan Kuncoro;2007 menyepakati hal yang sama bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

**2.5. Kerangka Konseptual**

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Berdasarkan gambar di atas penulis meneliti hubungan antara Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen ( $X_1$ ) dan mencari pengaruhnya terhadap Belanja Daerah sebagai variabel dependen (Y). Hal yang sama pula diujikan pada Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel independen ( $X_2$ ) untuk pengaruhnya terhadap Belanja Daerah. Fokus utama dalam penelitian ini adalah fenomena *flypaper effect* sebagai variabel moderating (Z). Hasilnya secara jelas akan ditentukan apakah dalam realisasi tahun anggaran 2001 – 2010 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan suatu pemborosan yang tidak semestinya (fenomena *flypaper effect*).

Fokus utama dalam penelitian ini adalah fenomena *flypaper effect*. Hasilnya secara jelas akan ditentukan apakah dalam realisasi Tahun Anggaran 2001 - 2010 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan suatu pemborosan yang tidak semestinya/ merespon secara berbeda belanja yang berasal dari dana transfer DAU lag 1 dan dari PAD lag 1 sendiri (fenomena *flypaper effect*). Secara garis besar

manfaat dari pengetahuan akan fenomena *flypaper effect* ini adalah adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk membelanjakan secara boros dana transfer dari pemerintah pusat. Karena hal inilah penulis tertarik untuk lebih fokus pada fenomena *flypaper effect*.

Pengujian secara statistik menggunakan data dengan *lag* 1 tahun. Artinya, belanja daerah tahun berjalan diujikan dengan DAU dan PAD tahun sebelumnya (*lag 1*). Hal ini bertujuan untuk secara jelas melihat fenomena *flypaper effect* selama Realisasi Tahun Anggaran 2001 hingga 2010. Karena penelitian ini melihat respon Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap DAU yang diterima pada tahun sebelumnya dan kemudian terlihat dampak pada Belanja Daerah tahun berjalan.

**3. Gambaran Umum Objek Penelitian**

**3.1. Visi Provinsi Sulawesi Utara 2010 – 2015**

Dalam tahun periode 2010-2015, visi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara adalah “MENUJU SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”.

**3.2. Misi Provinsi Sulawesi Utara 2010 – 2015**

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Rakyat Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera”.

**4. ANALISIS DAN EVALUASI**

**4.1. Analisis Umum**

Tabel 4.1 – Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BELANJA DAERAH DAU LAG 1	9	39863137809 3	113742344459 8	688002475055.56	289641975866.9 46
PAD LAG 1	9	75581122000	558634931000	333237450277.78	160989726261.0 96
Valid N (listwise)	9	77988242747	331083667840	196109308314.67	92302748789.90 1

Catatan: dalam Rupiah.

Sumber: Data Olahan

Dalam tabel di atas tampak jelas bahwa nilai terendah dari setiap variabel terjadi pada tahun 2001 untuk DAU dan PAD serta pada tahun 2002 untuk Belanja Daerah sebagai tahun awal dalam pengujian ini (lihat tabel 4.2). Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun hingga tahun 2009/ 2010 nilai variabel terus meningkat. Hal ini terkait dengan peningkatan asumsi inflasi yang merupakan gejala umum di setiap tahunnya dalam rangka penyusunan anggaran (*budget*) dan kemudian senada dengan hal tersebut maka, jelas bahwa nilai tertinggi dari setiap variabel terjadi pada tahun 2010.

Tabel 4.2 – Data DAU, PAD, dan Belanja Daerah

Tahun	BELANJA DAERAH	Tahun	DAU	PAD
2002	398,631,378,093	2001	75,581,122,000	77,988,242,747
2003	410,361,620,056	2002	269,758,774,500	104,668,999,589
2004	407,432,467,868	2003	242,328,520,000	119,691,243,270

2005	465,353,219,941	2004	220,626,000,000	147,139,837,668
2006	649,758,172,461	2005	247,873,000,000	198,270,258,129
2007	774,651,376,365	2006	404,324,000,000	211,236,498,158
2008	913,982,714,336	2007	447,094,538,000	252,324,235,147
2009	1,034,427,881,782	2008	532,916,167,000	322,580,792,284
2010	1,137,423,444,598	2009	558,634,931,000	331,083,667,840

Catatan: dalam Rupiah.

Sumber: BPKBMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Secara rata-rata nilai variabel berada di antara tahun 2006 hingga tahun 2007. Adapun hal yang perlu dicermati adalah adanya penurunan jumlah belanja daerah yang mengalami penurunan pada tahun 2004 yang disertai penurunan nilai DAU pada tahun 2003 dan 2004 namun PAD mengalami peningkatan.

**4.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah**

Tabel 4.3 - Coefficients<sup>(a)</sup> A

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	12807705129	890094115		1.439	.193
	DAU LAG 1	4.223	00.857	.934	6.912	.000

a Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Dari nilai t statistic tampak bahwa DAU lag 1 berpengaruh signifikan positif terhadap BD yakni sebesar 6,912 pada alpha 5%. Hal ini bermakna bahwa semakin besar DAU lag 1 maka semakin besar pula BD. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa DAU lag 1 berpengaruh positif terhadap BD diterima. Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi & Rahman, 2007; Maimunah, 2006; Prakosa, 2004; Sudrajat, 2010; dan Kuncoro, 2007.

**4.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah**

Tabel 4.4 - Coefficients(a) B

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	8286647	46242425326.7		1.792	.116
	PAD LAG 1	1059.902	87	.983	14.317	.000

a Dependent Variable: BELANJA DAERAH



Dari nilai t statistic tampak bahwa PAD lag 1 berpengaruh signifikan positif terhadap BD yakni sebesar 14,317 pada alpha 5%. Hal ini bermakna bahwa semakin besar PAD lag 1 maka semakin besar pula BD. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa PAD lag 1 berpengaruh positif terhadap BD juga diterima. Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi & Rahman, 2007; Maimunah, 2006; Prakosa, 2004; Sudrajat, 2010; dan Kuncoro, 2007.

**4.4. Flypaper Effect Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara**

Tabel 4.5 - Coefficients(a)

Mo del	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolera nce
1 (Constant)	81001009317	49484666455962		1.637	.153		
DAU LAG 1	.156	.384	.087	.407	.698	.118	8.502
PAD LAG 1	2.830	.670	.902	4.226	.006	.118	8.502

a Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Dari tabel di atas hasil yang diperoleh adalah DUA lag 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap BD dengan nilai koefisien t statistic 0,698 atau >  $\alpha$  0,05 sedangkan PAD lag 1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BD dengan nilai t statistic sebesar 0,006 atau lebih kecil dari  $\alpha$  0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas Realisasi Tahun Anggaran 2001 – 2010 flypaper effect tidak terjadi.

Untuk lebih memudahkan dalam menentukan dan memberi keyakinan bersama bahwa flypaper effect tidak terjadi maka, lihat tabel berikut.

Tabel 4.6 – Pengambilan Keputusan

Variabel	T	Sig.	$\alpha$ 5%	Keputusan
(constant)	0,407	0,153	-	-
DAU lag 1	0,407	0,698	> 5%	tidak Signifikan
PAD lag 1	4,226	0,006	< 5%	Signifikan

Sumber: Data Olahan

Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Pengaruh DUA lag 1 lebih besar terhadap BD daripada Pengaruh PAD lag 1 terhadap BD ditolak. Hasil ini memberikan suatu bukti empiris bahwa data yang diambil secara data panel dan dengan menggunakan lag 1 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk Realisasi Tahun Anggaran 2001 – 2010 tidak terjadi fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah di periode yang diteliti.

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan hasil pengujian atas pengaruh DUA lag 1 dan PAD lag 1 terhadap Belanja Daerah guna membuktikan terjadi atau tidaknya fenomena flypaper effect, maka dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum *lag 1* terhadap Belanja Daerah menghasilkan adanya pengaruh positif dan signifikan. Artinya DAU *lag 1* berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Sehingga semakin besar DAU *lag 1* maka semakin besar pula Belanja Daerah untuk realisasi Tahun Anggaran 2001 – 2010 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hipotesis pertama diterima.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah *lag 1* terhadap Belanja Daerah menghasilkan adanya pengaruh positif dan signifikan. Artinya PAD *lag 1* berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Sehingga semakin besar PAD *lag 1* maka semakin besar pula Belanja Daerah untuk realisasi Tahun Anggaran 2001 – 2010 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hipotesis kedua diterima.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadi fenomena *flypaper effect* menghasilkan hipotesis ketiga ditolak. Artinya Belanja Daerah lebih dipengaruhi oleh PAD *lag 1* daripada DAU *lag 1*. Dimana pengaruh PAD *lag 1* lebih signifikan terhadap BD untuk realisasi Tahun Anggaran 2001 – 2010 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

## 5.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang memiliki ketertarikan dalam berkecimpung membahas masalah anggaran dalam hal ini APBD. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengundang para peneliti berikutnya untuk dapat membahas lebih dalam lagi informasi yang terkandung dan dihasilkan dari sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berikutnya. Dan penelitian ini pula dapat dikaitkan dengan disiplin ilmu atau cabang ilmu lainnya seperti ilmu akuntansi keprilakuan (*accounting behavior*).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan untuk perlu dikembangkan atau bahkan perbaikan yang dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian berikutnya. Sehingga penulis memberikan saran terkait dengan keterbatasan yang disadari oleh penulis sebagai berikut:

1. Tidak dilakukannya penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui perilaku *agents* atau politisi dalam membuat keputusan alokasi sumber dana yang diperoleh baik dari pemerintah pusat (dalam hal ini DAU) maupun dari Pendapatan Asli Daerahnya sendiri.
2. Data *panel lag 1* yang digunakan untuk periode 10 tahun yakni 2001 – 2010 tidak secara menyeluruh menggambarkan pada 1 periode tertentu dan sama mengenai hubungan penggunaan dana untuk belanja periode terkait. Sehingga perlu dibuat penelitian dengan menggunakan data *cross section non-lag*.
3. Penelitian ini tidak menguji dan menganalisis efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendapatan. Dalam hal ini tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan jumlah belanja, struktur belanja, jumlah penduduk, dan dampak tidak terjadinya *flypaper effect*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acosta, Pablo. *The "Flypaper Effect" In Presence of Spatial Interdependence: Evidence from Argentinean Municipalities*. Springer-Verlag. 2008.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. 2001. Yogyakarta.
- Bergstrom C. Theodore. & Deacon T. Robert, *Private Demands for Public Goods*. The American Economic Review, Vol. 63, 280-296. J Stor. 1973.
- Borcherding E. Thomas, & Goodman P. Roberts. *The Demand for The Services of Non-Federal Governments*. The American Economic Review, Vol. 62, No. 5, 891-901. J Stor. 1972.
- Bastian, Indra. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Ed 2. Salemba Empat. 2007. Jakarta.
- Bradford F. David, & Oates E. Wallace. *Towards a Predictive Theory of Intergovernmental Grants*. The American Economic Review. Vol. 61, No. 2, 440-448. J Stor. 1971.
- Choi, Ho-Taek. *The effect of Central Grants on Local Authorities' Expenditures in South Korea*. Chungbuk National University. 1997.

- Choi, Luibson, & Madrian. *Mental Accounting in Portofolio Choice: Evidence From a Flypaper Effect*. American Economic Review. 2009.
- Dahlberg M, Mork, Rattso, & Agren. *Local Taxes and Spending: Estimating the Flypaper Effect Using a Discontinuous Grants Rule*. 2007.
- Deller S, Maher, Lledo. *Winconsin Local Government, State Shared Revenues And The Illusive Flypaper Effect*. Staff Paper No. 451. 2002.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010*. <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Fisher C. Ronald. *The Effects of State and Local Public Services on Economic Development*. New England Economic Review. 1997.
- Gemmel N. Morrissey, & Pinar. *Fiscal Illusion and The Demand For Local Government Expenditure in England and Wales*. Discussion Paper. 1998.
- Gordon, Nora. *Do Federal Grants Boost School Spending? Evidence from Title I*. Journal of Public Economics 88, 1771-1792. 2004.
- Grossman J. Phillip. *The Impact of Federal and State Grants on Local Government Spending: A Test of The Fiscal Illusion Hypothesis*. Discussion Paper. 1988.
- Hines R. James, & Thaler H. Richard. *Anomalies: The Flypaper Effect*. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4. J Stor. 1995.
- Kuncoro, Haryo. *Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 10. 2007. Makassar.
- Kusumadewi A. Diah, & Rahman. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Indonesia*. JAAI Vol. 11, No. 1, 67-80. 2007.
- Litschig, Stephan. *Money Matters: Estimating The Effect of Federal Transfer on Local Education Spending and Schooling Using on RD Design*. 2007.
- Lubis, Arfan. *Akuntansi Keprilakuan*. Ed 2. Salemba Empat. Jakarta. 2010.
- Maimunah, Mutiara. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra*. Simposium Nasional Akuntansi 9. 2006. Padang.
- Pemerintah Propinsi Jawa Barat. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/ 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sekaran, Uma. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 2. Ed 4. Salemba Empat. 2006. Jakarta.
- Suara Pembaharuan. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010 Sebesar 6,1 Persen*. 7 Pebruari 2011.
- Sudrajat. *Fenomena Flypaper Effect Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Lampung*. Jurnal ESAI Vol. 4, No. 3. 2010.
- Turnbull K. Geoffrey. *The Overspending and Flypaper Effect of Fiscal Illusion: Theory and Empirical Evidence*. Journal of Urban Economics 44, 1-26. 1998.
- Young T. Andrew. *Tax-Spend or Fiscal Illusion?* Cato Journal Vol. 29. No. 3. 2009.
- Zou, Heng-Fu. *Dynamic Effects of Federal Grants on Local Spending*. Journal Urban Economics 36, 98-115. 1994

**PENGARUH RESPON PERUSAHAAN DALAM INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN FINANCE DI MANADO****Imelda Anggereiny Dajoh****Heince Wokas*****ABSTRACT***

*Financing companies are companies that provide or lend funds to consumers for the purchase of goods - goods such as vehicles, machinery, tools - and other heavy equipment - Other items purchased with a guarantee. Information technology investment is one of the company's assets that could improve the performance of the company in order to achieve company goals. Where technology is defined as the development and application of combining resources and knowledge that can help people solve the problem, while the information is a very important resource as a staple in maintaining the continuity of the company. So the information technology communication lines that carry data, voice and video that have been processed, so it is useful to take a decision that has meaning and is useful to achieve certain goals. Object of this study is a company - a finance company that is in Manado. Study authors are conducting the research is that information technology investments made by finance companies can improve the performance of the company. Based on the research results obtained by a simple linear regression equation between the value of information technology on performance is  $Y = 0.987 X + \varepsilon$ . This equation gives the sense that if the investment company's response to Information Technology (IT) increases 1 unit, then the performance of the company will increase by 0.987 units .. If the value of  $\beta$  which is the correlation coefficient of the variable response to the company's IT investment (X) of 0.987 means that if the response to the company's IT investment increase by 1 unit then the performance of the company will increase by 0.987 units*

*Keywords : system information, technology information investment, performance, finance company.*

## 1. PENDAHULUAN

Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai tujuan – tujuan yang ingin dicapai. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang sedang dijalankan. Untuk mencapai tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang sedang dijalankan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peningkatan efisiensi kerja serta pemilihan strategi yang diterapkan sesuai dengan kemampuan inti yang dimiliki serta kondisi eksternal perusahaan. Selain itu usaha yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan investasi pada teknologi informasi. Mulyadi (1997) mengatakan bahwa teknologi maju, khususnya teknologi informasi, akan menyebabkan perubahan radikal maupun berkelanjutan pada organisasi. Dengan aplikasi teknologi maka organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer.

Kinerja organisasi selalu menjadi ukuran keberhasilan kegiatan organisasi sehingga diperlukan metode yang dapat mengukur kinerja tersebut (Kaplan dan Norton, 1996). Pentingnya pengukuran kinerja secara tepat, menurut Keats dan Hitt (1988) dikarenakan kinerja merupakan sebuah konsep yang sulit, baik definisi dan pengukurannya. Dengan mengetahui kondisi kinerja maka organisasi dapat melakukan revisi atas kebijakan-kebijakan yang tidak relevan sehingga pencapaian dimasa yang akan datang akan lebih baik. Sementara itu, Li dan Simerly (1998) mengatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan sesuatu yang kompleks dan merupakan tantangan besar bagi para peneliti karena sebagai sebuah konstruk, kinerja bersifat multidimensional. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dengan menggunakan dimensi pengukuran tunggal tidak mampu memberikan pemahaman yang komprehensif.

Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal di Indonesia akan sangat mudah membantu pengembangan industri disektor keuangan ini, seperti perluasan cakupan usaha dengan membuka cabang usaha dengan membuka cabang usaha di daerah serta pertukaran informasi sesama perusahaan asuransi, perbankan, serta lembaga pembiayaan lainnya.

Masyarakat khususnya di Indonesia di bidang perniagaan atau perdagangan dan lembaga pembiayaan pada umumnya merupakan suatu kekuatan ekonomi yang ditunjang oleh kualitas sumber daya dalam meningkatkan produktivitas usaha dalam menghadapi persaingan di era globalisasi yang kompetitif. Tujuan akhir dari lembaga – lembaga ekonomi dalam masyarakat yaitu untuk membangun fondasi perekonomian dengan menghasilkan barang maupun jasa perusahaan sebagai salah satu komponen lembaga ekonomi, yang memiliki berbagai bentuk atau jenis, diantaranya perusahaan pembiayaan. Teknologi informasi akan membawa perusahaan pada kondisi yang menguntungkan yaitu kemudahan memasuki pasar, kemudahan dalam pelayanan terhadap konsumen dan terutama bagi kegiatan intern perusahaan itu sendiri. Dengan kemudahan tersebut maka perusahaan akan mampu meningkatkan kinerjanya. Investasi dalam teknologi informasi yang tepat akan menghasilkan suatu keunggulan kompetitif sehingga akan mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam bentuk output perusahaan, efisiensi, efektivitas, dan nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai investasi perusahaan.

## 2. LANDASAN TEORI

Teknologi adalah satu ciri yang mendefinisikan hakikat manusia yaitu bagian dari sejarahnya meliputi keseluruhan sejarah. Teknologi, menurut Djoyohadikusumo (1994, 222) berkaitan erat dengan sains (*science*) dan rekayasa (*engineering*). Dengan kata lain, teknologi mengandung dua dimensi, yaitu *science* dan *engineering* yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sains mengacu pada pemahaman kita tentang dunia nyata sekitar kita, artinya mengenai ciri-ciri dasar pada dimensi ruang, tentang materi dan energi dalam interaksinya satu terhadap lainnya.

Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas,

istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Ada yang membuat perbedaan yang jelas antara sistem informasi, dan komputer sistem TIK, dan proses bisnis. Sistem informasi yang berbeda dari teknologi informasi dalam sistem informasi biasanya terlihat seperti memiliki komponen TIK. Hal ini terutama berkaitan dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi juga berbeda dari proses bisnis. Sistem informasi membantu untuk mengontrol kinerja proses bisnis.

### **3. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **3.1 Tanggapan Perusahaan Terhadap Investasi Teknologi Informasi**

Saat ini penggunaan teknologi informasi di perusahaan semakin meningkat tidak hanya untuk operasional sehari-hari tetapi sudah pada proses membantu pengambilan keputusan namun demikian, perusahaan juga tidak bisa gegabah mengeluarkan investasi untuk mengimplementasikan teknologi informasi karena tentu saja harus memperhitungkan *cost* dan *benefit* yang dihasilkannya.

Dengan adanya perencanaan yang jelas, perusahaan bisa mengelola perusahaannya dengan baik sejak awal. Informasi memiliki nilai strategis guna memacu perkembangan bisnis dalam upaya unggul di dalam kompetisi. Kegiatan analisis bisnis yang akurat dan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi semakin menentukan keberhasilan suatu dunia usaha.

Teknologi informasi sangat diperlukan dalam mewujudkan nilai strategis tersebut, akan tetapi biaya yang dibutuhkan biasanya tidaklah sedikit. Dengan demikian dalam menghitung biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapat dari suatu investasi teknologi informasi harus dilakukan dengan cermat.

Investasi teknologi informasi bukan sekedar untuk menunjukkan *prestise* sebuah perusahaan. Memang kebutuhan teknologi informasi dalam perusahaan amat luas. Aplikasi yang dibutuhkan amat beragam. Namun, bukan berarti semua kebutuhan tersebut harus dipenuhi dalam waktu yang bersamaan. Karenanya investasi informasi disetiap perusahaan haruslah menggunakan skala prioritas. Pilih kebutuhan mana yang dirasakan paling mendesak dan paling penting untuk jangka pendek dan menengah terlebih dahulu.

Perusahaan sangat merespon akan adanya investasi teknologi informasi karena teknologi informasi sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Informasi juga memiliki nilai strategis guna memacu perkembangan bisnis dalam upaya unggul di dalam kompetisi.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Evaluasi Kinerja**

Oleh Mangkunegara (2006:10) menyatakan bahwa tujuan evaluasi kinerja adalah “untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dan sumberdaya organisasi”. Sasaran evaluasi kinerja yang dikemukakan oleh Anwar Membuat analisis kinerja dan waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja karyawan maupun kinerja organisasi ; (2) Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari pada karyawan melalui audit keterampilan dan pengetahuan ; (3) Menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawaban perorangan serta kelompok ; (4) Menemukan potensi karyawan yang berhak memperoleh promosi.

### **4. METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan dengan menggunakan skala Likert Menurut Kuncoro (2003:124) jenis data dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut: (a) Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kuantitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat di proses lebih lanjut. Data yang diambil meliputi sejarah

perusahaan, profil sumber daya manusia yang dimiliki, struktur organisasi, dan kegiatan sumber daya manusia; (b) Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Data yang diambil meliputi jumlah karyawan dan jumlah nasabah.

#### 4.1 Sumber Data

Sumber data adalah data primer yang diambil dari 50 responden. Menurut Indriantoro (2002:146) sumber data dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu : Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

#### 4.2 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Sebagai alat ukur variabel (x) dan (y) yang digunakan adalah variabel skala likert. Respon strategi perusahaan berupa investasi teknologi informasi yaitu dicerminkan dalam keinginan perusahaan untuk melakukan penambahan investasi dalam teknologi informasi. Firm Performance merupakan suatu ukuran yang menunjukkan output perusahaan, efisiensi, efektivitas; kekuatan dan kelemahan perusahaan; dan nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai saham perusahaan. Variabel ini diukur dengan *objective measures* yaitu nilai ROI dan ROA perusahaan yang diperoleh dan laporan keuangan.

#### 4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yaitu data-data yang dikumpulkan dan tempat atau lapangan yang diselidiki yaitu di Kota Manado. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode di antaranya sebagai berikut: (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Kuesioner

#### 4.4 Metode Analisis

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh digunakan metode analisis data dalam penelitian yaitu analisis regresi linear sederhana. Menurut Dajan Anto (2002:315) bentuk persamaan regresi linear sederhana adalah:  $Y = a + b X + e$

Dimana:

X = Variabel yang digunakan untuk menunjukkan investasi dalam teknologi informasi

Y = Variabel yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kinerja perusahaan

a = Bilangan konstanta

b = Koefisien berganda

besar nilai a dan b dapat dihitung dengan cara :

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X)^2 - (\sum Y)^2}$$

Kriteria pengujian yang digunakan adalah :

Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau signifikan  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima

Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau signifikan  $> \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak.

#### 4.5 Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut : (1) Mempelajari struktur organisasi dan pembagian kerja dalam perusahaan ; (2) Melakukan wawancara dengan pihak pimpinan perusahaan, manajer, dan staf di bidang teknologi informasi tentang penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan ; ( 3) Mengetahui gambaran umum responden terhadap penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis perusahaan ; (4) Menguji hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) ; (5) Membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan kemudian memberikan saran-saran bagi kemajuan perusahaan.

## 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep. 122/MK/2/1974, No. Kep-32/M/SK/2/1974 dan No. 30/Kep/1/74 tanggal; 7 Februari 1974 tentang “Perizinan Usaha Leasing”. Sejak saat itu dan khususnya sejak tahun 1980 jumlah perusahaan sewa guna usaha, transaksi sewa guna usaha makin bertambah pesat dan meningkat dan tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia usaha.

Hadirnya perusahaan sewa guna usaha patungan (*joint venture*) bersama perusahaan swasta nasional telah mampu mempopulerkan peran kegiatan sewa guna usaha sebagai alternatif pembiayaan barang modal yang sangat dibutuhkan para pengusaha sebagai alternatif pembiayaan barang modal yang sangat dibutuhkan para pengusaha di Indonesia, disamping cara-cara pembiayaan konvensional yang lazim dilakukan melalui perbankan.

Sebelum dilakukan analisis regresi maka terlebih dahulu akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Berikut akan disajikan hasil perhitungan uji validitas dan reliabilitas variabel Investasi Teknologi (X) dan uji validitas variabel kinerja perusahaan (Y) yang terdiri dari 10 pertanyaan. Dari uji reliabilitas variabel Investasi Teknologi (X) diperoleh Alpha Cronbach = 0,861 atau berada di atas nilai kritis yang disarankan sebesar 0,6 sehingga variabel Investasi Teknologi dinyatakan reliabel. Sedangkan dari uji reliabilitas variabel kinerja perusahaan (Y) diperoleh *Alpha Cronbach* = 0,897 atau berada di atas nilai kritis yang disarankan sebesar 0,6 sehingga variabel kinerja perusahaan dinyatakan reliabel.

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan untuk memastikan pengaruh respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) terhadap kinerja perusahaan. Analisis yang digunakan untuk hasil penelitian ini adalah statistik inferen berupa regresi linear sederhana, yaitu alat analisis peramalan nilai pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi sederhana diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b X + \epsilon$$

Dimana Y = Kinerja Perusahaan

a = Konstanta

b = Slope/koeffisien regresi

X = Respon Perusahaan Terhadap Investasi Teknologi Informasi (TI). Nilai b yang merupakan koeffisien korelasi sederhana dari variabel respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) (X) sebesar 0,987 mempunyai arti bahwa jika respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) bertambah 1 satuan, maka kinerja perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,987 satuan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap kali terjadi perubahan jumlah respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan.

Analisis koeffisien korelasi (R) ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), dalam hal ini mengukur kuat lemahnya hubungan respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) sebagai variabel X dengan kinerja perusahaan sebagai variabel Y, sedangkan koeffisien determinasi ( $R^2$ ) diperlukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) (X) terhadap kinerja perusahaan (Y).

Hasil analisis regresi menghasilkan koeffisien korelasi (R) sebesar 0,905 atau 90,5% dan ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) dengan kinerja perusahaan.

Nilai Koeffisien Penentu atau Koeffisien Determinasi sebesar 0,818216 atau 81,821 % ini memberikan pengertian bahwa variasi (naik/turunnya) kinerja perusahaan yang disebabkan oleh



investasi Teknologi Informasi (TI) adalah 81,821 %, sedangkan selebihnya disebabkan oleh faktor-faktor lain (variabel lain) diluar model ini.

Hasil analisis regresi menggunakan  $t_{hitung} = 14,694 > t_{tabel} = 2,92$  dengan signifikan =  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Ini berarti bahwa respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Dalam penelitian ini yang ditekankan oleh penulis adalah peningkatan kinerja perusahaan dalam bentuk organisasi melalui penggunaan dan investasi dalam teknologi informasi. Menempatkan profesionalisme sebagai upaya untuk memenangkan persaingan, dengan meningkatkan kualitas dan seluruh personil atau karyawan dari semua level.

Anggapan umum selama ini aset perusahaan yang berharga adalah gedung kantor, investasi dan sumber daya manusia terutama dalam perusahaan finance. Namun persepsi ini telah bergeser seiring dengan era globalisasi yang sebentar lagi akan kita masuki. Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh bahwa daya manusia yang bermutu akan semakin berkualitas apabila didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Teknologi informasi perusahaan muncul sebagai salah satu aset perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pada dasarnya setiap perusahaan pasti menginginkan kinerja terbaik dari seluruh karyawan. Dengan adanya teknologi informasi akan mempermudah para karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Perusahaan Finance harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam teknologi informasi terhadap peningkatan kinerja. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linear sederhana antara nilai teknologi informasi terhadap kinerja adalah  $Y = 0,987 X + \epsilon$ . Persamaan ini memberi arti bahwa jika respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) bertambah 1 satuan, maka kinerja perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,987 satuan. Dengan demikian diketahui bahwa setiap kali terjadi perubahan jumlah respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI), maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Hasil analisis regresi menghasilkan koefisien korelasi (R) sebesar 0,905 atau 90,5 % ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) dengan kinerja perusahaan. Besarnya kinerja perusahaan yaitu respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) ditunjuk oleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,81821 atau 81,821 %, dan sisanya 18,2 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana di atas yang memberi arti bahwa setiap penambahan teknologi informasi sebesar 1 akan meningkatkan kinerja sebesar 0,987 dan hasil tersebut, maka hubungan antara nilai teknologi informasi dan kinerja adalah kuat positif. Pernyataan ini lebih jelas lagi didukung dan dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang diperoleh  $t_{hitung} = 14,694 > t_{tabel} = 2,92$  dengan tingkat signifikan =  $0,05$  maka,  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Secara jelas telah diperoleh bahwa respon perusahaan terhadap investasi teknologi Informasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan finance maka dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut : Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji regresi linear sederhana dapat diketahui bahwa apabila respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) bertambah 1 satuan, maka kinerja perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,987 satuan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap kali terjadi perubahan jumlah respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Dari hasil uji koefisien korelasi (R) sebesar 0,905 atau 90,5 % ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) dengan kinerja perusahaan. Sedangkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,81821 ini menggambarkan bahwa besarnya kinerja perusahaan yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu respon perusahaan terhadap investasi

Teknologi Informasi (TI) adalah sebesar 81,8 %, sementara sisanya di jelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

Hasil analisis regresi menggunakan uji t didapat  $t_{hitung} = 14,694 > t_{tabel} = 2,92$  dengan tingkat signifikan  $= 0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Ini berarti bahwa respon perusahaan terhadap investasi Teknologi Informasi (TI) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Gitasudarmono I, *Pengantar Bisnis*, Gelora Aksara Pertama, Jakarta, 2000. hal.71  
Jumaili Salman, *Kepercayaan Terhadap Teknologi Sistem Informasi Baru dalam Evaluasi Kinerja Individual*, SNA VIII, Solo, 2005. hal. 109  
Kadir A, *Pengenalan Sistem Informasi*, Andi, Yogyakarta, 2003. hal. 36  
Kristanto A, *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*, Gava Media, Yogyakarta, 2003. hal. 77  
Ladyamudin, *Analisis Sistem Informasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005. hal. 42  
Luthan F, *Perilaku Organisasi*, Edisi 10 Andi, Yogyakarta, 2006  
Mangkunegara A, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005. hal. 31  
Purwanto Djoko, *Komunikasi Bisnis*, Erlangga, Jakarta, 2003. hal.101  
Riduwan dan Akdon, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*, Alfabeta, Bandung, 2010. hal.133  
Romney B dan Steibert Paul , *Accounting Information System*, Salemba Empat, Jakarta, 2003. p.56  
Siagian P, *Teori Pengembangan Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hal. 123  
Simamora H, *Akuntansi Bisnis Pengambilan Keputusan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002. hal.102  
Suliyanto, *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*, Ghalia Indonesia, Purwokerto, 2005. hal.62  
Wahana, *Panduan Aktif Sistem Informasi Akuntansi Online Berbasis Komputer*, Andi, Yogyakarta, 2003. hal.84  
Nugroho W, *Sistem Informasi Akuntansi*, Erlangga, Jakarta, 2001. hal.86  
Witarto, *Memahami Sistem Informasi*, Informatika, Bandung, 2004. hal.91

**Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya  
Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan  
Kabupaten Kepulauan Talaud**

**Dedy Aries Poae  
David P. E. Saerang**

***ABSTRACT***

*At the time of onset of regional autonomy in the hope that emerges is more independent local governments in the implementation of government activities and conduct development in their respective areas. Government Regulation Number 24 of 2005 Government Accounting Standards neighbor besides achieving good governance is also the answer to anticipation the financial reporting guidelines that can be generally accepted.*

*The research was conducted at the head and the staff involved in the process of financial management in the Government District Talaud Islands. This study aimed to determine the effect of financial statement presentation and accessibility to transparency and accountability in government financial management government Talaud Islands.*

*Data analysis method used is the method of multiple linear regression, descriptive statistics test, test validity and reliability testing, test assumptions of classical, hypothesis testing (F test and t test), the coefficient of determination ( $R^2$ ). To complete the overall data analysis used SPSS 20.0 software.*

*The results show the financial statement presentation and accessibility significantly affect the transparency and accountability of financial management. It can be seen from the equation  $Y = 5,425 + 0.579X1 + 0.094X2$ . Of multiple linear regression equation shows that the financial statement presentation and accessibility positive effect on transparency and accountability in the management of the financial statements. The correlation coefficient (R) obtained for 65.3% and the coefficient of determination ( $R^2$ ) of 42.7% and the remaining 57.3% or other variables not examined in this study. Results of hypothesis testing (F test) showed a significance value of 0.000 at the significant level  $\alpha = 0.05$  level test results mean F states  $H_0$  rejected  $H_a$  accepted. And (t test) showed for the variable  $X_1$  (Regions Financial Statements) significant value for 0000 with a significant level of  $\alpha = 0.05$  then  $H_0$  is rejected means- $H_a$  is accepted, it means the area of financial statement presentation variables significantly affect the transparency and accountability of financial management. For the variable  $X_2$  (Aksesibilitan Regional Financial Statements) significant value of 0.526 with a significant level of  $\alpha = 0.05$  then  $H_0$  is accepted means  $H_a$  rejected, meaning that the variable with Regional Financial Statements do not significantly affect the Transparency and Accountability of Financial Management.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat di dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

Pada saat dimulainya otonomi daerah harapan yang muncul adalah pemerintah daerah semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Oleh karena itu daerah juga diberi kebebasan dalam hal penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah serta alat pemotivasi.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membuat menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang telah disampaikan dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, Mulyana (2006) dengan judul Pengaruh Penyajian Neraca dan Aksesibilitasnya terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah menyatakan bahwa Penyajian Neraca dan Aksesibilitas berpengaruh pada Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Nasution (2009) dengan judul Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di pemerintahan Propinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas berpengaruh pada Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. Hartina (2009) dengan judul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat menyatakan bahwa Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh.

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Penyajian laporan Keuangan dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud”.

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang diuraikan pada sub bab sebelumnya, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat di rumuskan adalah Apakah Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud?

Analisis data menggunakan *software SPSS* dengan lima tahap, pertama statistik deskriptif. Tahap kedua, pengujian kualitas data. Tahap ketiga, melakukan uji penyimpangan asumsi klasik. Tahap keempat, melakukan analisis kuantitatif. Dan tahap kelima, melakukan uji hipotesis.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Mardiasmo (2009), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana. Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (a) meningkatkan akuntabilitas untuk paramanager (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola; (b) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. (c) memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban; (d) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009).

### 2.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones et al, 1985) dalam Budi (2008). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004).

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

### 2.3 Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Reformasi dalam pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari semangat penegakan demokrasi. Istilah 'demokrasi' mengisyaratkan setidaknya tiga elemen esensial: transparansi, akuntabilitas dan keadilan (Shende dan Bennett dalam Budi 2006). Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholders* dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggungjawaban) periode yang lalu. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum, dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahannya.

Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi.

Sementara itu, Mohamad dalam Budi (2006) menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah keterbukaan (transparansi).

Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari: (1) akuntabilitas vertikal, dan (2) akuntabilitas horizontal.

### **3. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **3.1 Sekilas tentang Kabupaten Kepulauan Talaud**

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan bagian integral dari Propinsi Sulawesi Utara, beribu kota Melonguane yang berjarak sekitar 271 mil laut dari Ibukota Propinsi Sulawesi Utara yaitu Manado. Terletak antara 3° 38' 00" - 5° 33' 00" Lintang Utara dan 126° 38' 00" - 127° 10' 00" Bujur Timur, berada diantara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao (Republik Philipina), sehingga Kabupaten Kepulauan Talaud, bersama dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebut "Daerah Perbatasan". Kemudian disamping Daerah Perbatasan, karakteristik lain yang cukup signifikan membedakan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Kabupaten/Kota lain yakni : Daerah Kepulauan dan Daerah Tertinggal.

Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan pembagian wilayah administratif Pemerintahan Daerah keadaan tahun 2010 dibagi dalam 19 Kecamatan dan 142 Desa dan 11 Kelurahan. Hingga saat ini dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas Bupati. Pada tingkat Kecamatan dipimpin oleh Camat dan pada tingkat Desa/Kelurahan dipimpin seorang Kepala Desa/Lurah.

#### **3.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.**

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kepl. Talaud sesuai dengan peraturan daerah no.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kab. Kepl Talaud, bahwa Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kepl Talaud Mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

**Tugas Pokok**, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan dibidang Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah.

**Fungsi**, dalam melakukan tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

#### 4. ANALISIS DAN EVALUASI

##### 1. Hasil Penelitian

Dari semua kuesioner yang dibagikan yaitu sebanyak 71 kuesioner, yang dapat diolah dan ditabulasi untuk tujuan analisis data yaitu sebanyak 50 kuesioner. Data yang ditabulasi adalah semua tanggapan atau jawaban responden atas setiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan variabel Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas laporan Keuangan, serta Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian ini ditabulasi dengan menggunakan *software SPSS 20.0* dan hasil penelitian menunjukkan untuk pengujian kualitas data, setiap pertanyaan dan jawaban dalam penelitian ini menyatakan Valid dan Reliabel sesuai dengan standar  $0.05$  dan *cronbach alpha*  $> 0.6$ . Untuk uji asumsi klasik, yang terdiri dari Uji Multikolinearitas, menyatakan bahwa tidak ada multikolinearitas dengan hasil perhitungan *tolerance*  $> 0.10$  atau *VIF*  $< 10$  yaitu  $0.688 > 0.10$  atau  $1.453 < 10$ , Uji Heteroskedastisitas, menunjukkan diagram *scatterplot* tidak membentuk suatu pola tertentu atau posisinya dalam keadaan menyebar.

Hasil Uji Normalitas menyatakan bahwa pada grafik data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa distribusi data residual normal. Hasil uji Autokorelasi dengan melihat *Uji Durbin Watson* adalah  $1.654$  sehingga dapat kesimpulannya tidak dapat disimpulkan terjadi autokorelasi.

Pengujian Statistik terdiri dari Analisis regresi berganda dengan rumus  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$ , Dimana :  $Y$  = Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah,  $\alpha$  = Konstanta,  $\beta_1$  = Koefisien regresi untuk  $X_1$ ,  $\beta_2$  = Koefisien regresi untuk  $X_2$ ,  $\varepsilon$  = Error term,  $X_1$  = Penyajian Laporan Keuangan (PLK),  $X_2$  = Aksesibilitas Laporan Keuangan (ALK). Sehingga didapat  $Y = 5.425 + 0.579 \text{ PLK} + 0.094 \text{ ALK}$ , Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai  $\beta_1$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_1$  (Penyajian Laporan Keuangan) sebesar  $0.579$  mempunyai arti bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap variabel Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah ( $Y$ ).
2. Nilai  $\beta_2$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_2$  (Aksesibilitas laporan Keuangan) sebesar  $0.094$  mempunyai arti bahwa variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap variabel Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( $Y$ ).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang kuat dan searah antara variabel bebas  $X_1$  dan  $X_2$  dengan variabel terikat  $Y$ , dimana angka koefisien regresi yang diperoleh semuanya menunjukkan angka positif (+).

Hasil uji koefisien korelasi ( $R$ ) menunjukkan hasil  $0.653$  atau  $65.3\%$  yang memberi arti bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitasnya terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Uji koefisien Determinasi menunjukkan hasil  $0.427$  atau  $42.7\%$ , dapat disimpulkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( $Y$ ) mendapat kontribusi dari Penyajian Laporan keuangan ( $X_1$ ) dan Aksesibilitasnya ( $X_2$ ) sebesar  $42.7\%$  sedangkan sisanya  $57.3\%$  mendapat kontribusi dari faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil Uji  $t$  menunjukkan sebagai berikut.

1. Pengujian Hipotesis Pertama ( $H_1$ )

Dari Tabel 4.15, Hasil uji  $t$  untuk variabel komitmen Organisasional ( $X_1$ ),  $t_{hitung} = 4.520$  dan  $t_{tabel} = 1.677$  dan nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $< 0.05$  dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Hal ini menjelaskan tentang berpengaruh positif antara variabel Penyajian Laporan Keuangan terhadap variabel Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah.

2. Pengujian Hipotesis Kedua ( $H_2$ )

Dari Tabel 4.15, Hasil uji  $t$  untuk variabel Peran Manajer pengelolaan Keuangan Daerah ( $X_2$ ),  $t_{hitung} = 0.639$  dan  $t_{tabel} = 1.677$  dan nilai signifikansi  $0.526 > 0.05$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $> 0.05$  dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak. Hal ini menjelaskan

tentang tidak pengaruh antara variabel Aksesibilitas Laporan keuangan Terhadap variabel Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah.

Hasil uji F menunjukkan bahwa Dari uji ANOVA didapat nilai  $F_{hitung}$  sebesar 17.483 dan  $F_{tabel}$  sebesar 3.68 dengan nilai signifikansi 0.000. Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $< 0.05$ , maka variabel Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitasnya berpengaruh signifikan terhadap variabel Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Komitmen Organisasi dan peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **2. Pembahasan**

### **1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif sebesar 4.520 pada tingkat signifikansi 0.000, yang berarti signifikan karena berada dibawah nilai signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menyajikan laporan keuangan secara wajar, mengungkapkan secara lengkap dan aktivitas dari pemerintah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) serta menentukan dan membuktikan kesesuaian dengan peraturan keuangan yang terkait dan syarat-syarat kontraktual agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna.

### **1. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.639 pada tingkat signifikansi 0.526, yang berarti tidak signifikan karena berada diatas nilai signifikansi yang disyaratkan yaitu 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak membuka akses kepada *stakeholde* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya. Hal ini disebabkan karena masih adanya informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah yang menjadi rahasia negara/daerah/SKPD tidak disajikan dalam laporan keuangan yang dibuatnya. Sehingga aksesibilitas laporan keuangan daerah masih sangat sulit untuk didapat dan diterima oleh masyarakat.

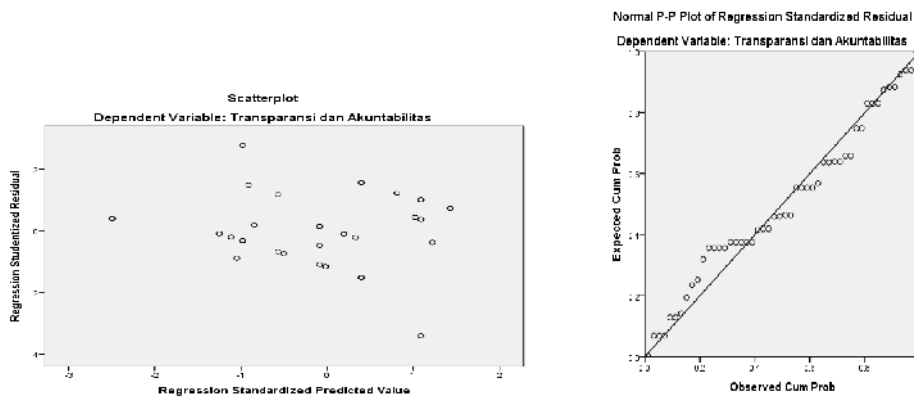
### **2. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitasnya terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitasnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti bila laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan secara lengkap mudah didapat dan diterapkan secara bersama-sama maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik serta terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Adanya laporan keuangan lengkap dan akses laporan keuangan yang baik dibuat pemerintah maka informasi akan laporan keuangan semakin mudah didapat dan diterima oleh *stakeholder*, sehingga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan semakin baik.



**Tabel 1**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	.688	1.453
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.688	1.453



**Tabel 2**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.653 <sup>a</sup>	.427	.402	1.65498	1.654

**Tabel 3. Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.425	2.127		2.550	.014
1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah	.579	.128	.602	4.520	.000
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.094	.148	.085	.639	.526

**Tabel 4. ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

Regression	95.768	2	47.884	17.48 3	.000 <sup>b</sup>
<sup>1</sup> Residual	128.732	47	2.739		
Total	224.500	49			

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai Pengaruh penyajian Laporan keuangan daerah dan aksesibilitasnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pembahasan hasil analisa dalam penelitian ini maka persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 5.425 + 0.579X_1 + 0.094X_2$$

Hasil analisa regresi linier berganda menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah ( $X_1$ ) dan Aksesibilitasnya ( $X_2$ ), secara bersama-sama atau serentak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud

2. Secara parsial variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh positif terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud, dan dapat di katakan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang kuat. Sedangkan variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah ( $X_2$ ) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0.653 yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki hubungan yang kuat sebesar 65.3%. Sedangkan nilai R square atau nilai koefisien determinan sebesar 0.427 yang berarti bahwa variabel dependen (Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independen (Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya) sebesar 42.7% dan selebihnya 57.3% ( $100\% - 42.7\% = 57.3\%$ ) dapat dijelaskan oleh faktor – faktor lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah yang lebih dominan dibandingkan Aksesibilitasnya. Karena itu, Pemerintah Daerah diharapkan bisa lebih terbuka lagi kepada masyarakat atas laporan keuangan yang dibuat agar masyarakat dapat mengakses dan mengetahui semua pendapatan, belanja daerah dan aset yang dimiliki oleh daerah sehingga Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat tercipta di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya hendaknya Pemerintah Daerah dapat menyajikan Laporan Keuangan Daerah yang lebih baik lagi dan secara lengkap dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan dapat di akses oleh penggunaannya/masyarakat.
3. Dengan adanya tuntutan agar pemerintah daerah dapat membuat laporan keuangan dengan baik dan secara lengkap setidaknya pemerintah daerah lebih teliti lagi dalam perekrutan pegawai yang memiliki latar belakang di bidang akuntansi dan keuangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, Indra, (2008), *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Halim, Abdul, (2008), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Halim, A, dan T. Damayanti, (2011), *Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 3, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, (2009), *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Hartina, Silka, (2009), Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, *Skripsi S1*, Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Lembaga Administrasi Negara, (2003), *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Nasution, Saufi, (2009), Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, *Skripsi S1*, Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Mulyana, Budi, (2006), "Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Volume 2 No.1, Mei 2006.
- Mardiasmo, (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Mardiasmo, (2011), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2006). "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, Suatu Sasaran Good Governance", *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Volume 2 No.1, hal 1-17.
- Mulyana, Budi, (2006). "Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Volume 2, No.1, Mei 2006.
- Renyowijoyo, Muindro, (2008), *Akuntansi sektor Publik Organisasi Non Laba*, Jakarta, Penerbit Citra Wacana Media.
- Darise, N, (2008), *Akuntansi Keangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, Jakarta, Penerbit PT.Macanan Jaya Cemerlang.
- Republik Indonesia.Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 TentangPerbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia,PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, PeraturanPemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Santosa, Purbayu Budi, dan Ashari, (2005), *Analisis Statistik denganMicrosoft Excel dan SPSS*, Edisi II, Yogyakarta, PenerbitAndi.
- Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit: Alfabeta, Yogjakarta.
- Sugiyono, (2008), *Statistik untuk Penelitian, cetakan kesembilan*, Alfa Beta, Bandung
- Wijaya, Toni, (2010), *Analisis Statistik Multivariat*, Bandung, Alfabeta.
- <http://www.google.co.id>: Jurnal Akuntansi Pemerintahan
- <http://www.wikipedia.co>: Jurnal Akuntansi Pemerintahan.

**Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah  
di Kabupaten Kepulauan Sangihe**

**Deifi Sari Maindoka  
Heince.Wokas**

***ABSTRACT***

*Budget is needed to reveal what it will do in the future. Budgets are usually only focused for a certain period or a period of 1 year. With a good budget, it can be easily obtained information in decision-making. Therefore, it is necessary to have an effective budget allocation to balance the various demands in achieving the desired objectives.*

*The objectives of this research was to determine the effect of the application of performance-based budgeting to performance work unit in the islands of Sangihe regency government. The research was done by conducting a survey to the Echelon II and Echelon III and data collection is done by distributing questionnaires to 60 respondents.*

*The analytical method used is simple linear regression analysis, and hypothesis testing is used for testing statistical t-test. With the help of a computer software program SPSS Version 2.0 for windows. Simple linear regression analysis results obtained equation  $Y=5,134+0.748X$ . coefficient for variable X (Performance-based budgeting) is equal to the positive (0.748), this means that the variable performance-based budgeting or direct positive effect on the variable Y (Performance on education). The contribution of performance-based budgeting to the rise and fall of variation of performance variables on education government in Sangihe regency indicated by the coefficient of determination of 57.3% while the remaining 43.7% is explained by other factors not examined in this study include reporting information system finance.*

*Key Word: Performance-based budgeting, Performance on education*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Alasan Pemilihan Judul**

Mengacu pada undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang Tahun 33 tahun 2004 tentang perimbangan antar keuangan pusat dan daerah tersebut dalam mengukur pengelolaan keuangan daerah, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan dan memberlakukan suatu keputusan menyangkut keuangan daerah, yang disebut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun Anggaran 2007. Dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006, daerah dapat lebih memperhatikan akuntabilitas, konsistensi, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti dalam penyusunan APBD.

Sebelum berlakunya anggaran berbasis kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja dan dalam perkembangannya, muncullah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan.

Pengelolaan keuangan daerah menetapkan kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah sebagai bendahara umum daerah, maka fungsi pembendaharaan akan dipusatkan di satuan kerja pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dibentuk kas kecil pada satuan kerja pengguna anggaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku penjabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas berdasarkan pertimbangan tingkat daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, lokasi, kompetensi dan /atau tentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dapat melimpahkan sebagai kewenangannya kepala unit kerja SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang. Pelimpahan wewenang sebagaimana yang dimaksud ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Kabupaten Kepulauan Sangihe dituntut untuk mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja untuk mencapai pendekatan berbasis kinerja dan juga dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisien dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Manfaat anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja setiap komponen pelayanan pada masing-masing urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh SKPD dalam rangka penilaian kinerja, harus ditetapkan oleh masing-masing daerah. Dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan setiap SKPD di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih belum maksimal, baik dalam penerapan maupun pelaksanaan. Penerapan Anggaran berbasis kinerja sangat penting dilakukan karena dengan adanya sistem anggaran berbasis kinerja dapat mengukur bagaimana kinerja yang dihasilkan. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan evaluasi kinerja dengan menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena ekonomis dan efisiensi terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan sedangkan, efektivitas akan selalu terkait dengan pelaksanaan suatu program.

Dasar ini yang menjadikan penulis ingin melakukan penelitian terhadap Kinerja Pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe penulis membahasnya dalam laporan akhir yang berjudul "Pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe".

Populasi dalam penelitian ini adalah 153 orang pejabat eselon dua dan eselon tiga di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah populasi sebanyak 153, jumlah minimum sampel yang dibutuhkan sebanyak 60, Kuesioner yang disebarakan adalah sebanyak 60 kuesioner dan yang kembali adalah 60 kuesioner.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1. Anggaran Secara Umum**

“National Commite On Govermental Accounting (NCGA)” Atau yang saat ini “Govermental Accounting Standar Boards” mendefinisikan anggaran sebagai berikut, yaitu rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Anggaran pemerintah merupakan pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan dan didalam anggaran disajikan rencana-rencana penerimaan dan sistemaris.

### **2.2. Anggaran Berbasis Kinerja**

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau *item line budget*. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak.

Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas.

### **2.3 Kinerja SKPD**

Kinerja mengacu pada suatu hasil yang dicapai atas kerja atau kegiatan yang telah dilakukan. Dalam konteks pemerintahan, kinerja akan dinilai sebagai suatu prestasi manakala dalam melaksanakan suatu kegiatan dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku, tidak melanggar hukum atau tidak sesuai moran dan etika.

### **2.4 Laporan Keuangan**

Menurut Erlina (2008:18) dikutip dari Hartina (2009), Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang telah disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 2005. Laporan keuangan daerah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya.

## **3. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

### **3.1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe**

Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian integral dari Propinsi Sulawesi Utara, dengan ibukota Tahuna. Terletak antara 2°52'47" - 4°44'22" lintang utara dan 125°9'28" - 125°56'57" bujur timur berada diantara Pulau Sulawesi dan Pulau Mindanao (Republik Filipina) sehingga Kabupaten Kepulauan Sangihe disebut Daerah Perbatasan. Bagian utara berbatasan dengan Republik Filipina, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Talaud dan laut Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sitaro dan bagian barat berbatasan dengan laut Sulawesi.

#### 4. PEMBAHASAN

##### 4.1 Analisis Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan hasil perhitungan data dengan menggunakan bantuan *program SPSS*, maka hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana dapat dilihat dalam Tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.5**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.134	1.485		3.457	.001
	ABK	.748	.083	.762	8.953	.000

a. Dependent Variable: KINERJA SKPD

##### Sumber : Hasil Olahan Data 2012

Dari Tabel 4.5 di atas, maka dapat diketahui bahwa model regresi yang diperoleh adalah :

$$Y = 5.134 + 0.748X$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

3. Konstanta  $\alpha$  sebesar 5.134 mempunyai arti bahwa jika Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja atau sama dengan nol (0), maka besarnya variabel Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) sebesar 5.134.
4. Nilai  $\beta_1$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_1$  (Penerapan anggaran berbasis kinerja) sebesar 0.748 mempunyai arti bahwa jika variabel Penerapan anggaran berbasis kinerja mengalami peningkatan 1% maka besarnya variabel Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) juga akan ikut mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar 0.748.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y, dimana angka koefisien regresi yang diperoleh semuanya menunjukkan angka positif (+). Ini berarti variabel anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh positif atau searah terhadap variabel kinerja SKPD, Jika nilai X meningkat maka Y meningkat sebaliknya jika nilai X turun maka Y juga turun.

##### 4.2 Pengujian Hipotesis

Perumusan hipotesis yang diuji, telah dikemukakan pada Bab sebelumnya dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 5 % atau  $\alpha = 0,05$  maka hasil pengujian hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

##### Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi yang sudah dihasilkan. Maka digunakan uji t untuk menguji masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan bantuan *program SPSS* maka hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.5 Untuk variabel  $b_1$  anggaran berbasis kinerja ( $X_1$ ) = 8.953 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000. Karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini diterima. Hal ini menjelaskan tentang pengaruh positif antara variabel anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja SKPD.

##### 4.3 Pembahasan

##### 4.3.1 Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja SKPD

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berpengaruh positif sebesar 8,953 pada tingkat signifikansi 0.000, yang berarti signifikan karena berada di bawah nilai signifikan yang dipersyaratkan

yaitu 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hasil pengujian hipotesis ini menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip dari anggaran berbasis kinerja perlu dilaksanakan serta penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal. Hasil pengujian untuk variabel anggaran berbasis kinerja menunjukkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Kinerja SKPD. Dalam penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Jadi, apabila kita menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja, maka *mindset* kita harus fokus pada *apa yang ingin dicapai*. Kalau fokus ke *output*, berarti pemikiran tentang *tujuan* kegiatan harus sudah tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Dengan demikian apabila pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik berdasarkan anggaran berbasis kinerja, output dan feedback maka akan menghasilkan output/outcome serta kinerja yang baik. Hal ini konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Syahputra (2010) yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan berdasarkan capaian kerja. Capaian kerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan pertimbangan faktor ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu SPSS yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja adalah anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Hal ini menunjukkan apabila pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik berdasarkan anggaran berbasis kinerja, output dan feedback maka akan menghasilkan output/outcome serta kinerja yang baik.

### 5.2 Saran

1. Di Pemerintah Kabupaten Sangihe prinsip dari anggaran berbasis kinerja perlu dilaksanakan serta Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal.
2. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan sampel yang lebih besar dan mencakup pada seluruh pengelola keuangan daerah serta bisa menambah variabel-variabel yang lain yang dapat meningkatkan kinerja SKPD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brownel, P. dan McInnes M. 1986. "*Budgetary Participation, Motivation, and Managerial Performance*", *The Accounting Review*, Vol. LXI, No. 4. Milani, K. 1975. "*The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes : A Field Study*", *The Accounting Review* 50.
- Darise Nurlan (2009), *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Buku Edisis 2, Gorontalo.
- Ismail dan Rahim. 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BLU*, Edisi Kedua, Gorontalo.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja sektor Publik*. Yogyakarta : BPF
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yokyakarta : Penerbit Andi.



- Matheos,2009. “*Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Manado.*”
- Poae, 2011. “*Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud.*”
- Putra,2010. “*Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Simalungu.*”
- Republik Indonesia,2003. ***Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.***
- Republik Indonesia,2004. ***Undang- undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah.***
- Republik Indonesia,2005. ***Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.***
- Republik Indonesia,2006. ***Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.***
- Rohman, A. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Telaah dari Dimensi : Pengelolaan Keuangan Daerah, Good Governance, Pengendalian, Pengawasan dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sabeni dan Ghozali, 2008. *Akuntansi Pemerintahan.* Edisi 4, Semarang
- Setyanto, A. 2008. “*Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Profesionalisme, Komitmen Organisasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Akuntansi (Survey Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Wilayah Kota Madya Surakarta).*” Skripsi Tidak Dipublikasikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Tawera, 2011. “*Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kota Kotamobagu*”
- Tuasikal, A. 2007. “*Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku).*” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 08, No. 01, pp.1466-148
- <http://www.kabupatensangihe.go.id>
- <http://www.anggaranberbasiskinerja.html>
- <http://satuan.kerja.perangkat.daerah.kabupatensangihe.com>
- <http://www.pengertian.akuntansi.pemerintah.go.id>

**Analisis Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 (Studi Kasus pada Dinas PPKAD selaku SKPKD)**

**Deasy Anastasia Mogi**

**Jenny Morasa**

***ABSTRACT***

*Local governments are required to make accountability reports that use accounting system that is set by the central government in the form of law – laws and regulations that are binding on all Government local government. Therefore, each Regional Financial Management Unit (SKPKD) must prepare its financial statements based on the government regulation number 24 of the Minister of home affairs Number 59 year 2007, which is an amandement to Permendagri NO. 13 year 2006 on guidelines financial Management.*

*The research was conducted in Sangihe regency, which in this study, analyzed fixed asset Recording and Reporting on Local Government in this case the Departement of finance and revenue management as a Regional Asset SKPKD for fiscal year 2011.*

*The purpose of this study is to analyzed the suitability of the recording and reporting of fixed assets in Sangihe regency government especially the Departement of revenue in the finance and asset management areas as SKPKD to financial statements in financial report balance Sangihe islanda District government with government regulation No. 24 year 2005 on standards government accounting and No. 13 year 2006 on Regional Financial Management Guidelslines.*

*The study uses a descriptive research design in the form of case studies. Type of data used is quantitative data that figures-figures in the Balance sheet. The author uses the method library research, field surveys, and documentation required for data collection.*

*The results showed that, Sangihe regency government has done the recording and reporting of fixed assets with good, though not fully in accordance with government Regulation No. 24 year 2005 regarding the Regulation of the minister and the government accounting standards of 2007 because the 2011 financial statements opinion gets no opinion (Disclaimer Opinion) by CPC caused by asset accounting. However, the financial statements have been prepared in time to be used for the users as decision makers and as refence for the preparation of financial statements with fiscal year 2012 and in accordance with government accounting standards.*

*Key Word: Fix Asset*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sebelum era reformasi dapat dinilai kurang pesat. Pada waktu itu, akuntansi sektor publik kurang mendapat perhatian yang serius. Orientasi pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan sektor industri (bisnis) dan cenderung mengarahkan pembangunan sektor publik.

Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi Tahun 1998. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam upaya mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan yang terdapat dalam ruang entitas pemerintahan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan Nomor 07, menjelaskan aset tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah bukan budaya.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk aset tetap pemerintah yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, kontraktor, hak atas tanah. Tidak termasuk definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku pengelola keuangan daerah harus membuat laporan pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya kepada Kepala Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 59 Tahun 2007, yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari alasan pemilihan judul di atas maka penulis ingin menganalisis tentang Pencatatan dan Pelaporan Keuangan yang dalam hal ini mengenai Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang dituangkan dalam bentuk laporan akhir yang berjudul "Analisis Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 (Studi Kasus pada Dinas PPKAD selaku SKPKD)".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan aset tetap keuangan dengan baik, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif dalam bentuk studi kasus yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dengan membandingkan antara sistem pelaporan keuangan aset tetap yang dilaksanakan di SKPKD dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1 Konsep Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

### **2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

### **2.3 Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)**

Dalam konstruksi keuangan daerah terdapat dua jenis satuan kerja yaitu:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

### **2.4 Aset Tetap**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah :

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya.
- b. Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

## **3. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

### **3.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan aset Daerah (DPPKAD) selaku SKPKD yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

## **4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Analisis**

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakupkan oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berdasarkan data penelitian, Neraca Pemerintah Kabupaten Sangihe untuk Tahun Anggaran 2011, menunjukkan bahwa :

Tahun 2011, Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe senilai Rp 999.452.205.988,98 yang terdiri dari :

- a. Aset Lancar Rp. 48.557.782.857,81



2.	Tanah Kantor	xxx			
	Diinvestasikan Dalam Aser Tetap		xxx		
3.	Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah			xxx	
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap				xxx
4.	Tanah Sarana Umum Pasar	xxx			
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		xxx		
5.	Tanah Kantor	xxx			
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		xxx		
6.	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan			xxx	
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap				xxx

**Tabel 4.4**  
**BUKU BESAR**

**PEMRINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**Urusan Pemerintahan** : Urusan Wajib  
**Bidang Pemerintahan** : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian  
**Unit Organisasi** : Sekretariat Daerah  
**Sub Unit Organisasi** : Bagian Administrasi dan Umum  
**Kode Rekening Buku besar** :  
**Nama Rekening Buku Besar** :

Tanggal	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
xx/xx/20xx	Saldo Awal	1			xxx
xx/xx/20xx	Jurnal Umum-Korolari	1	xxx		
xx/xx/20xx	Jurnal Umum-Korolari	1	xxx		
xx/xx/20xx	Jurnal Umum-Korolari	1	xxx		
xx/xx/20xx	Jurnal Umum-Korolari	1	xxx		
xx/xx/20xx	Jurnal Umum-Korolari	1	xxx		
xx/xx/20xx	Jurnal Umum-Korolari	1	xxx		
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp. xxx</b>	<b>Rp. -</b>	<b>Rp. xxx</b>

Hasil olahan data DPPKAD

**Tabel 4.5**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**BUKU BESAR PEMBANTU**

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib  
 Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi  
 Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian  
 Unit Organisasi : Sekretariat Daerah  
 Kode rekening buku besar :  
 Nama rekening buku besar pembantu:

No	Tgl	Referensi		Uraian	Debet	Kredit	Saldo
		No. Bukti	Kode Rek. Lawan				
				Saldo awal	xxx		
				Diinvestasikan dalam aset tetap		xxx	
				Diinvestasikan dalam aset tetap		xxx	
				Diinvestasikan dalam aset tetap		xxx	
				Diinvestasikan dalam aset tetap		xxx	
				Diinvestasikan dalam aset tetap		xxx	
				<b>Jumlah</b>	xxx	xxx	

Hasil olahan data DPPKAD

**Tabel 4.6**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**NERACA SALDO**  
**31 DESEMBER 20xx**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
		Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Aset Tetap- Tanah	xxx	
	Dinvestasikan dalam Aset Tetap		xxx
	<b>Jumlah</b>	xxx	xxx

Hasil olahan data DPPKAD

Untuk Tahun Anggaran 2011, akuntansi aset untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diberi opini tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*) oleh BPK, karena adanya penyalahgunaan sejumlah aset tetap oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2010, tanah yang belum memiliki sertifikat sebanyak 107 jenis tanah dengan nilai sebesar Rp. 16.399.005.936,00 dan 32 jenis tanah telah didukung dengan sertifikat atas 119 bidang tanah dengan nilai sebesar Rp. 22.908.661.426,00. Pada tahun 2011 pemerintah daerah melalui sekretariat Daerah mengadakan pengadaan dua bidang tanah kantor senilai Rp. 17.100.000,00, atas pembelian tersebut belum didukung dengan sertifikat tanah. Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan tanah diketahui bahwa selama tahun 2011 belum ada penambahan sertifikat tanah hal ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 paragraf 72

**Tabel 4.7**  
**Ringkasan Hasil Analisis Pencatatan Aset Tetap-Tanah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (yang dilakukan oleh Dinas PPKAD selaku SKPKD) untuk Laporan Keuangan Tahun 2011**

No	Prosedur	Pencatatan PPKD Kab. Kep Sangihe (contoh jurnal yang ada)	SAP PP No 24 Tahun 2005	Permendagri No. 59 tahun 2007	Ket
1	Akuntansi Aset	Belanja Modal-Tanah Kas di Kas Daerah  <u>Jurnal Korolari (pengakuan aset tetap) :</u> Aset tetap – Tanah Diinvestasikan pd aset tetap	Tidak sepenuhnya sesuai	Tidak sepenuhnya sesuai	Aset tetap tanah tidak sesuai dengan ketentuan yaitu terdapat tanah yang belum didukung oleh bukti kepemilikan (SAP NO. 7)

Sumber : Hasil Data Olah Tahun 2011

#### 4.2.2 Analisis Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada umumnya telah menyusun Laporan Keuangan tahunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007, yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada umumnya telah melakukan pencatatan akuntansi aset dalam hal ini akuntansi aset tetap yang baik, sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, Pada Tahun 2011 belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 paragraf 72 (dalam aset tetap tanah, masih banyak tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan/sertifikat dan juga aset tetap yang diserahkan pada pemerintah pusat masih tercatat sebagai aset pemerintah daerah dan adanya penyalahgunaan sejumlah aset di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe) tetapi karena minimnya informasi yang diberikan maka tidak diketahui bahwa aset tetap apa yang disalahgunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menyebabkan laporan keuangan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*).
2. Untuk Laporan Keuangan Tahun 2011 karena pada akuntansi aset, aset tetap tanah, masih banyak tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan/sertifikat dan juga aset tetap yang diserahkan pada pemerintah pusat masih tercatat sebagai aset pemerintah daerah, sehingga laporan audit oleh BPK tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*), maka Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### 5.2 Saran

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih memperhatikan lagi mengenai aset tetap, sehingga untuk tahun anggaran berikutnya, penggunaan aset tetap dapat menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA



- Arif, Bahtiar, dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : PT. Indeks.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Hartina, Silka, 2009. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data dan Penelitian dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hidayah, Nurul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah dan Swasta*. Modul Universitas Mercu Buana. Jakarta.
- Horngren T, Charles, dkk. 2006. *Akuntansi, jilid 1, Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Indrianto, N, Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPF.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

**Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Politik terhadap Kinerja DPRD  
dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah/APBD**

**Ferdinant Nuru  
Lidya Mawikere**

***ABSTRACT***

*This study aimed to examine the effect of level of education and political experience to Performance Oversight Council in Financial Management / Budget.*

*The data used in this study is primary data and instruments in this study is a questionnaire that is processed using SPSS 19. The subjects were Sorong legislators who were 30. Of the 30 questionnaires distributed, returned and can be evaluated in a total of 29 questionnaires. The method used in this study is a multiple linear regression. To test the hypothesis used simultan eously F test and used partial eously t test.*

*The results and hypothesis testing shows that the variables together education and political experience influence the performance of Parliament in monitoring the financial management area / budget. Partially only political experience that affect the performance of Parliament in monitoring regional financial management / budget, while the level of education does not affect the performance of the Council in the area of supervision of financial management / budget. Educational level was not affected due to lack of competence backed by councilors.*

*Keywords: Level Of Education, Political Experience And Performance Oversight Council In Financial Management / Budget*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dikeluarkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal dilakukannya desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Peran lembaga eksekutif bagi pelayanan publik terus meningkat setiap tahun, hal ini tentunya akan menuntut lembaga legislatif dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi. Untuk mendapatkan kinerja yang baik dituntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Indikator sumber daya manusia yang berkualitas diantaranya adalah pendidikan dan pengalaman. Latar belakang pendidikan yang tinggi akan mampu membantu seseorang menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kesesuaian latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Setiap orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaan atau tugasnya akan lebih mengerti tentang masalah atau pekerjaan yang sedang dihadapinya. Masa kerja yang lebih lama bagi anggota legislatif juga akan berdampak pada pengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh masa kerja atau lamanya menjabat sebagai pengurus partai ataupun sebagai anggota legislatif bagi para anggota dewan.

Berdasarkan uraian serta penjelasan di atas, maka sangat jelas bahwa peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun kenyataan yang terjadi selama ini, bahwa masih banyak permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan lembaga eksekutif yang tidak dapat dikontrol dengan baik oleh lembaga legislatif karena masih rendahnya peranan DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. Rendahnya peran legislatif ini terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah diuraikan di atas antara lain yaitu, latar belakang pendidikan dan pengalaman politik. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kinerja dewan dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang akan berdampak pada program kerja yang ada dalam anggaran daerah belum dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah. Dari uraian faktor-faktor di atas, maka peneliti memutuskan untuk meneliti dua faktor yang merupakan variabel independen (X) yaitu latar belakang pendidikan dan pengalaman politik; dengan variabel dependen (Y) yaitu Kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (penelitian Kepustakaan) dan *Field Research* (penelitian lapangan), yang dilakukan dengan cara survey atau kuesioner. Objek atau lokasi penelitian pada DPRD Kota Sorong dengan jangka waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2012 sampai dengan November 2012. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu: Survey pendahuluan, Observasi/Studi lapangan, Wawancara dan kuesioner.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (PP Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 1 : 5). Sedangkan pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Deddi Nordiawan, dkk, 2012, 39).

### **2.2. Manajemen Keuangan Daerah**

Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (Darise, N, 2009 : 18). Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kepala Daerah mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.
3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang.
4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran
5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya Kepada Kepala Daerah
2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD, dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
3. Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/barang daerah.

Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengguna anggaran dibantu oleh :

- 1) Pejabat kuasa pengguna anggaran (KUA)
- 2) Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
- 3) Pejabat piñata usaha keuangan (PPK)
- 4) Bendahara penerimaan dan pengeluaran.

### **2.3. Hubungan Latar Belakang Pendidikan Dengan Kinerja DPRD Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah/APBD**

Pendidikan merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang. Pendidikan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yakni pendidikan persekolahan berupa jenjang pendidikan yang telah baku mulai dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan anggota dewan sangat penting diperhatikan karena pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu aktivitas. Sedangkan pendidikan non formal yakni pendidikan yang diperoleh melalui pelatihan/seminar. Anggota DPRD akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai pengawas pengelolaan keuangan daerah apabila memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai penganggaran dan pengawasan anggaran. Oleh karena itu penting bagi anggota DPRD untuk mengikuti pelatihan/seminar mengenai penganggaran dan pengawasan anggaran untuk meningkatkan kinerjanya. Jika pendidikan yang dimiliki tidak sesuai dengan bidang tugasnya, maka pelatihan/seminar yang diikuti akan memberikan nilai tambah bagi anggota DPRD dalam memahami tugas dan fungsinya, dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

### **2.4. Hubungan Pengalaman Politik Dengan Kinerja DPRD Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah/APBD**

Pengalaman politik adalah pengalaman yang diperoleh seseorang dari menjadi anggota/pengurus suatu partai politik. Berapa pun lama menjabat di Partai Politik merupakan lama anggota dewan memegang jabatan dalam kepengurusan partai. DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal dalam arti memahami dengan benar hak, tugas dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang baik (Sari, 2010).

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mohamad Mahsun, 2012, hal 25). Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah/APBD adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai oleh anggota dewan dalam melaksanakan kegiatan atau tindakan pengawasan terhadap penggunaan APBD dengan kuantitas dan kualitas yang terukur yang didasarkan atas kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan tersebut.

## **3. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH KOTA SORONG**

Kota Sorong pada mulanya merupakan salah satu kecamatan yang dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Sorong. Namun dalam perkembangannya telah mengalami perubahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1996 tanggal 3 Juni 1996 menjadi Kota Administratif Sorong. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Kota Administratif Sorong ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom sebagai Kota Sorong. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 bertempat di Jakarta dilaksanakan pelantikan Pejabat Walikota Sorong Drs. J. A. Jumame dan selanjutnya secara resmi Kota Sorong terpisah dari Kabupaten Sorong pada tanggal 28 Februari 2000 dengan ibu kota di Sorong.

#### 4. ANALISIS DAN EVALUASI

##### 4.1. Analisis Data

Lokasi penelitian ini adalah Kantor DPRD Kota Sorong yang beralamat di Jln. Sungai Maruni KM 10, Distrik Sorong Timur, Provinsi Papua Barat. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Sorong untuk masa bhakti 2009-2014 sebanyak 30 orang. Kuesioner yang dibagikan kepada anggota dewan sebanyak 30 eksemplar sesuai dengan jumlah anggota dewan. Dari jumlah kuesioner yang dibagikan satu kuesioner tidak dapat terkumpul kembali dan 29 kuesioner yang terkumpul dapat dipergunakan sebagai data dalam penelitian ini. Analisis data selengkapnya adalah sebagai berikut :

##### 1. Karakteristik responden

Karakteristik responden dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, bidang pendidikan, pekerjaan sebelum menjadi anggota dewan, asal partai, pengalaman di partai, pengalaman sebagai anggota dewan dan asal komisi.

##### 2. Pembagian Kelas Interval

Pembagian kelas berguna untuk menentukan seberapa banyak pilihan jawaban yang muncul atas kuesioner yang dikaitkan dengan hasil pengolahan data/tabulasi. Riduwan & Sunarto, (2010 : 62) merumuskan panjang kelas sebagai berikut :  $i = R/BK$ , dimana :  $i$  = Interval (Panjang Kelas),  $R$  = Rentangan (skor terbesar – skor terendah) dan  $BK$  = Banyaknya Kelas. Maka didapat hasil selisih dibagi jumlah 5 kelas adalah :  $5-1/5 = 0,8$ .

Pembagian kelas sesuai rumus tersebut di atas dengan jarak antar kelas (interval) sebesar 0,8 seperti pada table 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Pembagian interval kelas

No.	Kelas	Interval	Keterangan
1	I	1,0 - 1,8	Sangat tidak setuju
2	II	1,9 - 2,6	Tidak setuju
3	III	2,7 - 3,4	Tidak Tahu
4	IV	3,5 - 4,2	Setuju
5	V	4,3 - 5,0	Sangat setuju

Sumber : Data olahan 2013

Tabel 4.2  
Total dan rata-rata jawaban responden  
Atas Pengukuran variabel dengan kelas interval

Variabel dan Ukuran Variabel	Total	Rata-rata	Kelas	Keterangan
Tingkat Pendidikan (X1)				
X1.1	106	3.7	IV	Setuju
X1.2	122	4.2	IV	Setuju
X1.3	124	4.3	V	Sangat setuju
X1.4	124	4.3	V	Sangat setuju
X1.5	123	4.2	IV	Setuju
X1.6	122	4.2	IV	Setuju
X1.7	128	4.4	V	Sangat setuju
Pengalaman Politik (X2)				

X2.1	133	4.6	V	Sangat setuju
X2.2	133	4.6	V	Sangat setuju
X2.3	127	4.4	V	Sangat setuju
X2.4	129	4.4	V	Sangat setuju
X2.5	126	4.3	V	Sangat setuju
X2.6	124	4.3	IV	Sangat setuju
X2.7	127	4.4	V	Sangat setuju
Kinerja Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah/APBD (Y)				
Y.1	121	4.2	IV	Setuju
Y.2	123	4.2	IV	Setuju
Y.3	125	4.3	V	Sangat setuju
Y.4	121	4.2	IV	Setuju
Y.5	126	4.3	V	Sangat setuju
Y.6	124	4.3	IV	Sangat setuju
Y.7	127	4.4	V	Sangat setuju

Sumber : Data olahan 2013

3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 4.3  
Uji Validitas dan Reliabilitas Data

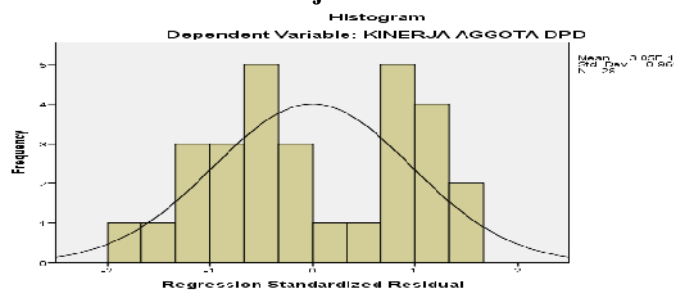
	(X <sub>1</sub> )	(X <sub>2</sub> )	(Y)
Corrected Item-Total Correlation P1	.373	.632	.746
Corrected Item-Total Correlation P2	.700	.860	.826
Corrected Item-Total Correlation P3	.753	.817	.713
Corrected Item-Total Correlation P4	.805	.757	.845
Corrected Item-Total Correlation P5	.860	.917	.767
Corrected Item-Total Correlation P6	.732	.863	.755
Corrected Item-Total Correlation P7	.735	.804	.647
Cronbach's Alpha	.784	.798	.792

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS

Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk pertanyaan 1-7 untuk variabel X<sub>1</sub> X<sub>2</sub> dan Y, mempunyai nilai korelasi di atas 0,30 dan rata-rata nilai *cronbach alpha* 0,791. Semua dinyatakan reliabel dan valid.

4. Uji Asumsi Klasik  
1) Uji Normalitas

Gambar 4.1 Uji Normalitas



Gambar 4.1 menunjukkan kurva normal pada histogram maka dapat diambil kesimpulan bahwa model memiliki distribusi normal, hal ini diperlihatkan oleh bentuk kurva yang menyerupai lonceng, *bell shaped*.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4  
Hasil uji multikolinearitas  
Coefficientsa

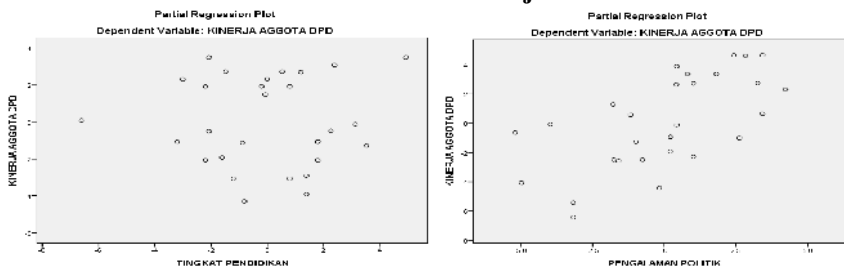
Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)					
Latar Belakang Pendidikan	.614	.013	.008	.411	2.431
Pengalaman Politik	.794	.638	.504	.411	2.431

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS, 2013

Suatu model dapat dikatakan tidak terjadi Multikolineritas, jika nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10. Berdasarkan hasil *coefficients* yang terdapat pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa *output coefficients* model tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas



(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik data tidak membentuk suatu pola yang jelas, serta titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas

4) Uji Autokorelasi

Tabel 4.5  
Hasil uji autokorelasi  
Model Summaryb

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.631	22.228	2	26	.000	1.664

a. Predictors: (Constant), Pengalaman Politik, Latar Belakang Pendidikan  
b. Dependent Variable: Kinerja DPRD Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah/APBD

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS, 2013



Suatu model dapat dinyatakan tidak terjadi gejala autokorelasi, jika probabilitas nilai Durbin-Watson > 0,05. Nilai Durbin Watson pada tabel 4.21 adalah 1,664, dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa model tersebut tidak mengalami gejala autokorelasi.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.6  
Koefisien Regresi  
Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Politik  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound
1 (Constant)	5.171	3.938		1.313	.201	-2.923
Latar Belakang Pendidikan	.013	.195	.012	.064	.949	-.388
Pengalaman Politik	.786	.186	.785	4.226	.000	.404

Sumber : Data Hasil Olah SPSS, 2013

Persamaan regresi berdasarkan hasil perhitungan software SPSS 19 pada tabel 4.6, adalah sebagai berikut :

$$Y = 5,171 + 0,13X_1 + 0,786 X_2 + e$$

Dengan interpretasi bahwa :

Konstanta  $\alpha$  sebesar 5,171 memberikan pengertian bahwa jika pendidikan ( $X_1$ ), dan pengalaman politik ( $X_2$ ), sama dengan nol (0), maka kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD di DPRD Kota Sorong adalah 5.171 satuan skor.

Variabel latar belakang pendidikan ( $X_1$ ), memiliki nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar 0,013, ini berarti bahwa jika variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin (1%) variabel latar belakang pendidikan ( $X_1$ ), akan meningkatkan nilai kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD sebesar 0,013 dari kondisi sebelumnya. Koefisien variabel latar belakang pendidikan ( $X_1$ ), bernilai positif, artinya terdapat hubungan positif antara ( $X_1$ ) latar belakang pendidikan dengan ( $Y$ ) kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD. Artinya bahwa semakin meningkat nilai latar belakang pendidikan ( $X_1$ ), maka akan meningkatkan kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD ( $Y$ ) di DPRD Kota Sorong.

Variabel pengalaman politik ( $X_2$ ), memiliki nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar 0,786, ini berarti bahwa jika variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin (1%) variabel pengalaman politik ( $X_2$ ), akan meningkatkan nilai kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD sebesar 0,786 dari kondisi sebelumnya. Koefisien variabel pengalaman politik ( $X_2$ ), bernilai positif, artinya terdapat hubungan positif antara ( $X_2$ ) pengalaman politik dengan ( $Y$ ) kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD. Artinya bahwa jika pengalaman politik ( $X_2$ ) semakin meningkat maka akan meningkatkan kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD ( $Y$ ) di DPRD Kota Sorong.

6. Pengujian Hipotesis dengan Uji t

Menggunakan tabel 4.6 dapat diketahui hasil uji t untuk masing-masing variabel secara parsial yaitu nilai koefisien regresi  $X_1$  memiliki tingkat signifikansi 0,949, nilai ini lebih besar dari 0,05 ( $\text{sig} > \alpha$  atau  $0,949 > 0,05$ ); apabila menggunakan nilai t-hitung dibandingkan dengan t-tabel dapat diketahui bahwa nilai t- hitung sebesar 0,064 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 2,056 (t-hitung <

t-tabel atau  $0,064 < 2,056$ ). Hal ini berarti bahwa Variabel Latar Belakang Pendidikan (X1) tidak berpengaruh terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah/APBD di DPRD Kota Sorong.

Nilai koefisien regresi X2 memiliki tingkat signifikansi 0,000, nilai ini lebih kecil dari 0,05 ( $\text{sig} < \alpha$  atau  $0,000 < 0,05$ ); apabila menggunakan nilai t-hitung dibandingkan dengan t-tabel dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 4,226 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,056 ( $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  atau  $4,226 > 2,056$ ). Hal ini berarti bahwa Variabel Pengalaman Politik (X2) berpengaruh terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah/APBD di DPRD Kota Sorong.

#### 7. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Tabel 4.23  
Hasil uji koefisien korelasi dan determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.794 <sup>a</sup>	.631	.603	2.484

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS, 2013

Tabel 4.23 menunjukkan bahwa koefisien korelasi linier  $R$  yang dihasilkan diantara variabel bebas adalah sebesar 0,794. Nilai korelasi ( $R$ ) sebesar 0.794 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Sedangkan nilai Adjusted R Square atau koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.603 menunjukkan bahwa kontribusi variabel X1 dan X2 untuk menjelaskan model variabel Y adalah sebesar 60,3% sedangkan sisanya sebanyak 39,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

#### 4.2. Evaluasi Data

##### 1. Latar Belakang Pendidikan terhadap kinerja DPRD dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah/APBD pada DPRD Kota Sorong

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD. Latar Belakang Pendidikan tidak berpengaruh, karena kurang didukung oleh tingkat kompetensi dan ketidakkesesuaian bidang pendidikan yang dimiliki anggota dewan dengan bidang tugasnya. Anggota dewan sebagian besar berasal dari bidang pendidikan diluar bidang ekonomi secara khusus bidang akuntansi. Oleh karena itu untuk meningkatkan pemahaman tentang pengawasan keuangan daerah/APBD agar kinerja semakin baik, maka selain pengalaman anggota dewan diharapkan dapat mengikuti pelatihan/seminar mengenai penyusunan anggaran dan pengawasan anggaran.

##### 2. Pengalaman Politik terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD pada DPRD Kota Sorong.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ke dua dapat dilihat bahwa Pengalaman Politik berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD. Pengalaman merupakan modal yang sangat berharga bagi seseorang untuk meningkatkan kompetensinya. Berbekal pengalaman seseorang akan lebih memahami tugas dan tanggungjawabnya dan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya ia akan melaksanakannya lebih baik bila dibandingkan dengan mereka yang belum berpengalaman.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uji t Latar Belakang Pendidikan ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD (Y).
2. Sedangkan pengalaman politik ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD (Y).

### 5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan agar supaya sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu bahan kajian bagi anggota DPRD untuk meningkatkan kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat diperlukan pengetahuan dan kemampuan tentang anggaran, maka disarankan agar seluruh anggota DPRD yang berkaitan dengan pengawasan dan anggaran diberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah/APBD. Pelatihan merupakan salah satu faktor dari pendidikan yakni pendidikan non-formal.
2. Guna memudahkan fungsi pengawasan, sebaiknya DPRD dapat menyelenggarakan kerja sama dengan institusi di luar DPRD seperti perguruan tinggi, yang memiliki tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Tenaga ahli ini bertugas melakukan pengkajian guna memberikan masukan bagi DPRD. Dengan menggunakan hasil kajian ini diharapkan DPRD tidak salah dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya pada saat pengambilan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

BAPEDA Kota Sorong, Profil Kota Sorong, 2010

Darise, N., *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU, Edisi Kedua*, dicetak dan dijilid oleh PT. Mancanan Jaya Cermelang, Indeks, Jakarta 2009

Mahsun, Moh., *Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Edisi Pertama*, Penerbit BPFE Yogyakarta., Cetakan Ketiga Januari 2012

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi IV, Penerbit ANDI Yogyakarta, 2009.

Masyhuri, Zainuddin, M., *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Cetakan kedua, Penerbit PT. Refika Aditama Bandung, 2009.

Nordiawan D. Putra I.S dan Rahmawati M., *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat, 2012

Nordiawan D. dan Hertianti A., *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, 2012

Riduwan & Sunarto, *Pengantar Statitika, untuk penelitian Pendidikan, Sosial, Komnikasi dan Bisnis*, Penerbit ALFABETA, Bandung, Cetakan ketiga 2010

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, 1999

Republik Indonesia, *Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, 1999

Republik Indonesia, *Keputusan Presiden No.74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2001

Republik Indonesia, *Kepmendiknas nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*, 2002

Republik Indonesia, *Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, 2003

- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cq. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, 2004
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*, 2004
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.*, 2005
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 13 Tahun 2006, tentang , Pedoman Penelolaan Keuangan Daerah.*, 2006
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.*, 2007
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tetang MPR, DPR, DPD dan DPRD.*, 2009
- Sari I., *Pengaruh Personal Background dan Political Background Serta Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah/APBD.*, 2010
- Sarjono, Haryadi & Winda Julianita... ***SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset.*** Jakarta : Salemba Empat., 2011
- Wahjono, S. I., *Perilaku Organisasi*, Penerbit : Graha Ilmu, 2006.
- Wardayani, *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Profesional Sebagai Variabel Moderasi.*, 2010,
- Winarna J dan Murni, S., *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar., 2007
- Wibowo. A.E., *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian*, Penerbit Gava Media Yogyakarta., 2012.
- Yacob A, *Pengaruh Pengetahuan Anggaran dan Jenjang Pendidikan Serta Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kinerja Panitia Anggaran-DPRD.*, 2007

**PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN ETIKA TERHADAP KUALITAS  
AUDITOR PADA APARAT INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH KOTA BITUNG**

**Lidya Anggiline Maramis  
Heince Wokas**

**ABSTRACT**

*The increasing demands of the community for clean governance, fair, transparent, and accountable should be taken seriously and systematically. All levels of state officials, both at the level of the executive, legislative, and judicial branches must have a shared commitment to uphold good governance and clean government. The study was conducted in the supervision of Government Internal City officials in this regard Inspectorate Bitung in Bitung City. In the present study investigated the influence of competence, independence and ethics for auditors in monitoring the quality of financial management. The purpose of research is to determine how much influence the competence, independence, and ethics to the quality of the personnel inspectorate auditors in financial management oversight Bitung City.*

*Data analysis methods used are descriptive statistics, the classical assumption test, test correlation coefficient, coefficient of determination test, hypothesis testing (test f and t test). to complete the overall data analysis used SPSS software version 20. The results showed the equation  $Y = 6.882 - 0.019 + 0.437 X1 - 0.300 X2 + X3$ . Of multiple linear regression equation shows a constant value of 6.882 gives the sense that if competence (X1), independence (X2), and ethics (X3) constant perceived or equal to zero (0), then the magnitude of the variable quality of the auditor on the apparatus inspectorate (Y) amounted to 6.882. Correlation coefficient obtained for the coefficient of determination of 0.700 and 0.490, while the remaining 51% of other variables not examined in this study. Results of hypothesis testing (test f) indicates the level of significance is less than 0.05 is 0.000 thus, the study received  $H_{A4}$  hypothesis, and hypothesis testing (t test) showed for the variable (X1) = 0.864 competence as such, this study rejected  $H_{A1}$  hypothesis which states that competency variable does not affect the quality of the auditors, it can be seen from a greater significance level of 0.05 is 0.864. These results contrast with previous research that states that affect the quality of the auditor's competence. This is due to the lack of training in research or no education system appropriate competency and followed by the Inspectorate in the auditor oversight of financial management in the city of Bitung, (X2) = 0.05 ie 0.001 independence as such, this study received a hypothesis  $H_{A2}$ , and (X3) = 0.05 ie 0.008 ethics as such, this study received  $H_{A3}$  hypothesis.*

## 1. PENDAHULUAN

Kondisi saat ini, masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya.

Mengapa hal ini terjadi? Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Disamping itu, akibat lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada sebagian oknum di lingkungan pemerintahan daerah yang tidak atau belum siap dengan berlakunya otonomi daerah, terutama berkaitan dengan masalah etika dan moral dari oknum pejabat pemerintahan daerah tersebut yang rendah. Disisi lain, masih menjadi tanda tanya besar di kalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran serta dari fungsi pengawasan termasuk para pejabat pengawas yang berada di lingkungan fungsi pengawasan atau inspektorat daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, terutama dalam upaya untuk mengawal berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Pengawas Daerah atau yang sekarang ini lebih dipopulerkan dengan sebutan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat dengan Inspektorat) merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis menentukan obyek penelitian yaitu pemerintahan Kota Bitung. Alasan penulis memilih pemerintah Kota Bitung karena pertumbuhan serta perkembangan ekonomi di daerah ini secara umum cukup menjanjikan dan menarik untuk dilakukan penelitian. Sekitar tahun 2008 Kota Bitung mengalami perubahan besar baik dari sektor sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya Manusia (SDM) maupun penataan kotanya dari beberapa sektor yang menguntungkan daerah ini hingga tahun 2012 ini banyak prestasi, penghargaan yang diraih oleh Kota Bitung terlebih hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan keuangan (BPK) yang mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kota ini.

Data kuantitatif adalah data yang disajikan dan diukur dalam bentuk skalanumeric atau angka-angka. Dalam hal ini merupakan pengukuran terhadap variable kompetensi (X1), independensi (X2), dan etika (X3) terhadap kualitas auditor pada aparat inspektorat Kota Bitung (Y). Data kualitatif, adalah data yang bersifat deskriptif atau berbentuk uraian-uraian atau penjelasan serta tidak diukur dalam skala numeric.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 *Pengertian Akuntansi Pemerintahan*

Revrison baswir (1998:12) “Akuntansi pemerintahan (termasuk didalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan untuk mendapatkan atau mencari laba), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan yang tidak bertujuan untuk mencari laba”.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi pemerintahan juga mempunyai pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memberikan informasi pada para pengambil keputusan dalam suatu entitas yang berlandaskan kompetensi, independensi, serta motivasi.

#### 2.1.1 *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai “ semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik dalam berupa uang atau barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah

sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain yang sesuai ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku (Abdul Halim2007:23).

### **2.1.2 Pengawasan intern pemerintah**

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional.

Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas :

- 1) BPKP;
- 2) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- 3) Inspektorat provinsi; dan
- 4) Inspektorat Kabupaten/Kota

### **2.1.3 Audit dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Salah satu bagian yang harus direformasi mengikuti paradigma baru tersebut adalah sitem pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Sistem lemah dalam masa orde baru harus direformasi agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. Sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang baru diharapkan akan mampu mencegah atau menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang akan mengganggu proses kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

## **2.2 Pengertian Audit**

Nurlan Darise (2009: 310) audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audi, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisien dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

### **2.2.1 Perencanaan Audit Sektor Publik**

Pada Audit Sektor Publik, Perencanaan merupakan tahap yang vital dalam audit meliputi tahap – tahap yakni:

- (1) Pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik,
- (2) Penentuan tujuan dan lingkup audit yang ditetapkan sesuai dengan mandat dan wewenang lembaga audit dan pengawas,
- (3) Penilaian resiko atas resiko pengendalian, resiko bawaan, resiko deteksi.
- (4) Penyusunan rencana audit,
- (5) Penyusunan program audit

### **2.2.2 Pelaksanaan Audit Sektor Publik**

Dalam pelaksanaan audit sektor publik, terdapat definisi struktur pengendalian internal. Ada 3 golongan tujuan yang terdiri atas

- (1) Keandalan laporan keuangan,
- (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan
- (3) Efektivitas dan efisiensi operasi. Pada jenis pengendalian internal juga meliputi atas organisasi, pemisahan tugas, fisik, persetujuan dan otorisasi, akuntansi, personel, supervisi dan manajemen

### **2.2.3 Proses Audit Sektor Publik**

Langkah – langkah dalam proses audit (Indra Bastian,2001) adalah :

- (1) Perencanaan (PLANNING) yang di dalamnya meliputi (a) Deskripsi system akuntansi keuangan sektor publik, (b) Menyusun tujuan dan lingkup audit, (c) Menilai resiko, (d) Rencana audit
- (2) Pelaksanaan (EXECUTING) yang di dalamnya meliputi (a) Mengembangkan program audit, (b) Sistem pengendalian internal, (c) Melakukan pengujian prosedur analitik pengujian substantif (jika

buruk), (d) Melakukan pengujian bersandar pada pengendalian internal pengujian substantif (jika baik)

- (3) Pelaporan (REPORTING) yang di dalamnya meliputi (a) Review kertas kerja dan kesimpulan, (b) Analisis hasil audit, (c) Laporan audit dan LHP bawasda pemda

#### **2.2.4 Pelaporan**

Pada tahapan akhir dari audit sektor publik yakni pelaporan, pada pelaporan ini, perlu diperhatikan beberapa item diantaranya yakni

- (1) Tinjauan kertas kerja dan kesimpulan. Kertas kerja merupakan media penghubung antara catatan klien dengan laporan audit. Kepemilikan kertas kerja sepenuhnya ada ditangan auditor
- (2) Kertas kerja dan standar pelaporan. Kertas kerja berhubungan erat dengan standar pelaporan dimana diperlukan untuk berjaga-jaga terhadap tuntutan pemakai laporan keuangan dan sanksi lembaga profesi.
- (3) Isi kertas kerja. Kertas kerja merupakan bukti dilaksanakannya standar auditing dan program audit yang telah ditetapkan.

#### **2.3 Kualitas Auditor**

Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai apa dan bagaimana kualitas audit yang baik itu. Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas audit secara obyektif dengan beberapa indikator. Hal ini dikarenakan kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian yang menggunakan dimensi kualitas audit yang berbeda-beda.

Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh *auditee*. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit antara lain kualitas proses, apakah audit dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptis.

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

##### **2.3.1 Kompetensi**

Sri Lastanti (2005) mendefinisikan kompetensi sebagai ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman dan juga mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Hayes-Roth mendefinisikan keahlian sebagai pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dari lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

##### **2.3.2 Independensi**

Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Auditor harus objektif dalam melaksanakan audit. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor dalam melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya.



### 2.3.3 Etika

Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu pada standar audit ini, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etika ini dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antara :

- (1) Auditor dengan rekan sekerjanya,
- (2) Auditor dengan atasannya, dan
- (3) Auditor dengan auditan (objek pemeriksanya) serta
- (4) Auditor dengan masyarakat.

### 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh inspektorat dikoordinasikan oleh Kepala Inspektorat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 23 Tahun 2007, Kepala Inspektorat, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota disebut dengan Inspektur Provinsi, dan Inspektur Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilakukan oleh inspektorat adalah kegiatan pemeriksaan (audit), yang meliputi:

1. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan.
2. Pemeriksaan dana dekonsentrasi.
3. Pemeriksaan tugas pembantuan.
4. Pemeriksanaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri. Selain pemeriksaan tersebut, auditor Inspektorat dapat juga melakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai indikasi kemungkinan terjadinya tindak penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan kegiatan pengawasan ini dikoordinasikan oleh Kepala Inspektorat, yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 23 Tahun 2007, kepala Inspektorat, baik ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota disebut dengan Inspektur Jenderal, Inspektur Provinsi, dan Inspektur Kabupaten/Kota.

### 4. ANALISIS DAN EVALUASI

#### 4.1 Hasil Penelitian

**Tabel 4.1**  
**Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Pria	17 Orang	40%
Wanita	25 Orang	60%
Jumlah	42 Orang	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2012

**Tabel 4.2**  
**Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
Magister (S2)	4	9%
Sarjana (S1)	24	57%
Diploma	2	5%
SLTA/SMA	12	29%
Jumlah	42 Orang	100%

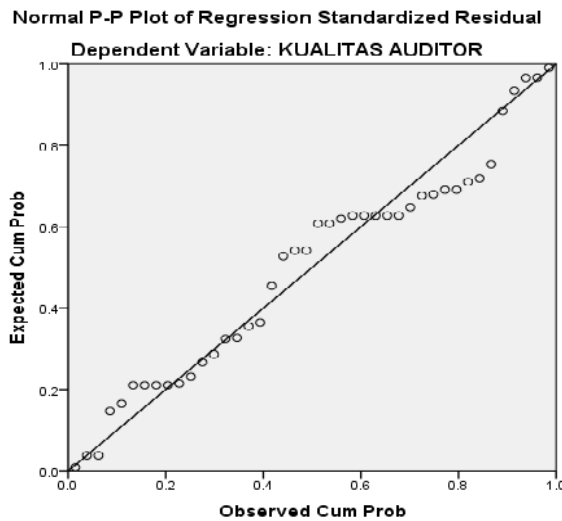
Sumber: Data Olahan Tahun 2012

**4.3 Uji Asumsi Klasik**

**4.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* melalui SPSS versi 20 dengan menggunakan taraf signifikansi 0.05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0.05.

**Gambar 4.1 Uji Normalitas**



*Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garisdiagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi dengan normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

**4.3.2 Uji Multikolinieritas**

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinieritas. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 KOMPETENSI	.739	1.353
INDEPENDENSI	.819	1.221
ETIKA	.722	1.385

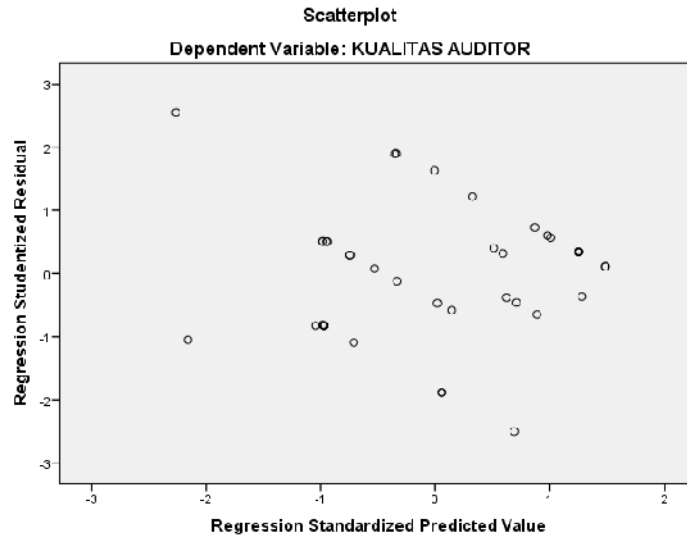
*Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Dari tabel 4.12 terlihat bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil uji VIF juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam persamaan regresi.

**4.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot*. Jika grafik *Scatter Plot* tidak membentuk atau menggambarkan pola tertentu, berarti dapat dikatakan model regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : *Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Dari gambar diatas terlihat bahwa dalam persamaan regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari penyebaran titik-titik yang tidak memiliki pola yang jelas, serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dalam persamaan ini

**4.3.4 Uji Autokorelasi**

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.700 <sup>a</sup>	.490	.450	1.55143	1.648

Sumber : *Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Dari pengujian Durbin-Watson dalam penelitian ini dihasilkan nilai DW sebesar 1,648. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah data 42 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka terletak diantara batas atas (du=1,6017) dan batas bawah (dl=1,357). Oleh karena nilai DW 1,648 lebih besar dari batas atas (du) 1,6017 dan kurang dari 2,3383 (4-du) maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi ini tidak terdapat autokorelasi

**4.5 Analisis Regresi Linear Berganda**

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menggunakan *program SPSS*, maka hasil perhitungan dan persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.14.

**Tabel 4.14**  
**Regresi Liner berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.882	2.778		2.477	.018
1 KOMPETENSI	-.019	.109	-.023	-.173	.864
INDEPENDENSI	.437	.118	.473	3.694	.001
ETIKA	.300	.107	.381	2.796	.008

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012

Berdasarkan tabel diatas, apabila diperlihatkan dalam modal persamaan statistik diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 6,882 - 0,019 X_1 + 0,437 X_2 + 0,300 X_3 + \epsilon$$

Untuk kompetensi menunjukan hasil negatif, untuk itu kompetensi tidak searah dengan kualitas auditor atau dengan kata lain kompetensi yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas auditor yang baik pula, demikian sebaliknya bila kompetensi rendah/buruk maka kualitas auditor akan rendah/buruk. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa kompetensi mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas auditor.

Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh etika adalah searah dengan kualitas auditor atau dengan kata lain keahlian yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap kualitas auditor yang baik/tinggi, demikian sebaliknya bila etika rendah/buruk maka kualitas auditor akan rendah/buruk. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa etika tidak mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas auditor.

Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh independensi adalah searah dengan kualitas auditor atau dengan kata lain keahlian yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap kualitas auditor yang baik/tinggi, demikian sebaliknya bila independensi rendah/buruk maka kualitas auditor akan rendah/buruk. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa independensi mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas auditor.

Dalam hasil penelitian ini menunjukan Konstanta  $\alpha$  sebesar 6,882 memberikan pengertian bahwa jika sikap kompetensi, independensi, dan etika yang dipersepsikan konstan atau sama dengan nol (0), maka besarnya variabel kualitas auditor (Y) sebesar 6,882

Selanjutnya nilai  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel X1(Kompetensi), X2(Independensi), dan X3(Etika) mempunyai arti bahwa jika variabel kompetensi, independensi, dan etika mengalami peningkatan 1%, maka besarnya kualitas auditor (Y) juga akan mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar 0,019, sebesar 0,437 dan sebesar 0,300 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan

Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang tidak searah antara variabel bebas X1, X2, dan X3 dengan variabel terikat Y atau kualitas auditor dimana angka koefisien yang diperoleh variabel X1 kompetensi tidak mempengaruhi kualitas auditor dan menunjukan angka Negatif (-) berbeda dengan independensi dan etika. Berdasarkan nilai koefisien regresi tersebut, dapat diketahui pula bahwa ternyata pengaruh independensi mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap kualitas auditor pada aparat inspektorat kota bitung

**4.6 Pengujian Hipotesis**

**4.6.1 Koefisien Korelasi**

**Tabel 4.15**  
*Koefisien Korelasi*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.700 <sup>a</sup>	.490	.450	1.55143

Sumber : *Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Dapat dilihat bahwa koefisien korelasi linear nilai R yang diperoleh sebesar 0,700 Angka ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) cukup kuat yaitu 0,70% serta angka korelasi yang dihasilkan menunjukkan angka positif (+) yang berarti bahwa hubungan kedua variabel searah.

**4.6.2 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 4.16**  
*Koefisien determinasi (r<sup>2</sup>)*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.700 <sup>a</sup>	.490	.450	1.55143

Sumber : *Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Dapat dilihat nilai R<sup>2</sup> adalah sebesar 0,490 atau 49%. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas auditor sebesar .450 dipengaruhi oleh faktor-faktor kompetensi, independensi dan etika sebesar 49% sedangkan sisanya sebesar 51% dijelaskan oleh factor-faktor lain atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**4.6.3 Uji t Statistik**

**Tabel 4.17**  
*Uji t Statistik*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.882	2.778		2.477	.018
KOMPETENSI	-.019	.109	-.023	-.173	.864
INDEPENDENSI	.437	.118	.473	3.694	.001
ETIKA	.300	.107	.381	2.796	.008

Sumber : *Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,864 dengan demikian, penelitian ini menolak hipotesis H1 yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas auditor pada aparat Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Bitung dan Menerima Hipotesis H<sub>01</sub> yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor pada aparat Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Bitung

Variabel Independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis H2 yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor pada aparat Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Bitung dan menolak Hipotesis

$H_02$  yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor pada aparat Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Bitung

Variabel Etika berpengaruh terhadap kualitas auditor, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,008 dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis  $H_3$  yang menyatakan bahwa etika berpengaruh terhadap kualitas auditor pada aparat Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Bitung dan menolak Hipotesis  $H_03$  yang menyatakan bahwa etika tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor pada aparat Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Bitung.

#### 4.6.4 Uji F statistik

**Tabel 4.18**  
**Uji F Statistik**  
*ANOVA<sup>a</sup>*

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	87.870	3	29.290	12.169	.000 <sup>b</sup>
	Residual	91.464	38	2.407		
	Total	179.333	41			

Sumber : *Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Berdasarkan table 4.18 diatas, secara bersama-sama Variabel kompetensi, Independensi, dan etika berpengaruh terhadap kualitas auditor, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis  $H_4$  yang menyatakan bahwa kompetensi, independensi dan etika berpengaruh terhadap kualitas auditor pada aparat Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Bitung dan menolak Hipotesis  $H_04$  yang menyatakan bahwa kompetensi, independensi dan etika tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor pada aparat Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Bitung

#### 4.7 Pembahasan

Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi dengan hasil negatif (-) pada pengujian regresi linear berganda. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas auditor. Hal ini diakibatkan oleh situasi yang ada dengan tidak adanya perhatian dari pemerintah dengan kualitas auditor sehingga kurangnya pelatihan, kemampuan/pemahaman, pengetahuan yang tinggi, bahkan keterampilan serta tidak mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh auditor pada aparat Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Bitung

Variabel independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi yang lebih dominan. Dengan situasi yang ada pada inspektorat Kota Bitung para auditor memiliki sikap yang netral dan tidak bias dan juga dituntut harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen dan juga menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan audit. Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap independen merupakan hal yang melekat pada diri auditor, sehingga independen seperti telah menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki.

Untuk variabel etika menunjukkan berpengaruh terhadap kualitas auditor, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi yang menunjukkan dengan situasi yang ada. Sebagai seorang auditor, etika professional memang harus selalu dipegang teguh agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan tuntutan profesi.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Kualitas auditor adalah probabilitas seorang auditor atau akuntan pemeriksa menemukan penyelewengan dalam sistem akuntansi suatu unit atau lembaga, kemudian melaporkannya dalam laporan audit.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi yang lebih besar sehingga tidak searah atau bernilai negatif dengan demikian, penelitian ini menolak hipotesis H1 yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas auditor pada aparat Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Bitung
2. Variabel Independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi yang lebih dominan dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis H2 yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor pada aparat Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Bitung
3. Variabel Etika berpengaruh terhadap kualitas auditor, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi dengan situasi yang ada dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis H3 yang menyatakan bahwa etika berpengaruh terhadap kualitas auditor pada aparat Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Bitung
4. nilai  $R^2$  adalah sebesar 0,490. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor kompetensi, independensi dan etika sebesar 49% sedangkan sisanya sebesar 51% dijelaskan oleh faktor-faktor lain atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
5. nilai R yang diperoleh sebesar 0,700. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) cukup kuat yaitu 0,70% serta angka korelasi yang dihasilkan menunjukkan angka positif (+) yang berarti bahwa hubungan kedua variabel searah.

### 5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini sangat diharapkan untuk instansi yang berkaitan, dalam hal ini Inspektorat Kota Bitung agar dapat lebih memperhatikan serta memberikan penyuluhan atau pelatihan secara berkala kepada anggota atau pegawai tentang bagaimana kualitas auditor sebagai pelaksana agar lebih bisa dipahami para pegawai yang ada guna menunjang pemerintahan yang sedang berjalan dan menunjang pengambilan keputusan serta memberikan kontribusi dan implikasi pada pengembangan akuntansi pada pemerintahan dan juga dengan penelitian yang ada agar pemerintah Kota Bitung terlebih khusus Inspektorat Kota Bitung lebih memperhatikan ketrampilan tertentu dalam suatu pengetahuan agar lebih mudah, cepat, dan tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam pemeriksaan atau pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam melihat kompetensi anggota pegawai yang ada agar perkembangan kualitas auditor di bidang kompetensi lebih baik dan ada peningkatan pemahaman tentang kualitas auditor pada sektor akuntansi. Dan juga meningkatkan pendidikan profesionalnya, mempertahankan independensi dan sikap mental, mampu menggunakan kemahiran dengan cermat dan seksama, melakukan perencanaan audit dengan baik, memperoleh bukti yang cukup dan kompeten dan membuat laporan auditor sesuai kejadian yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A.A., J.K. Loebbecke. 2000. *Auditing: An Integrated Approach. Edisi 9*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Afiah, Nunuy Nur. 2009. *Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi. October 2009 Research Days*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.

- Arumi Savitri Fatimaningrum, Aini Mahabbati, (2006), FIP Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Baswir, Revrison, 1999. *Ekonomi Kerakyatan: Amanat Konstitusi Untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Indonesia*, Penerbit: Sugeng Sarjadi, Jakarta.
- Bodnar H, Hopwood Wiliam. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi*, Penerbit: Andi, Yogyakarta.
- Boyton C. William, Kell. G Walter dan Johnson N Raymond, 2003. *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh. Jilid I Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Cahyat, A. 2004. *Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan*. *Governance Brief Number 3*
- Darise Nurlan, 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, edisi 2. Penerbit PT Indeks, Jakarta.
- Darise Nurlan, 2008. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah (SPKD)*. Penerbit PT Indeks, Jakarta.
- Deis, D.R dan G.A. Groux. (1992). *Determinasi Kualitas Audit Dalam Sektor Publik*. *The Accounting Review*.
- Elfarini, E.C. 2005. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit*. *Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas Negeri Semarang
- Firdaus A, 2005. *Ikhisar Lengkap Pengantar Akuntansi, Edisi 2*, Penerbit FE UI, Jakarta. FE USU, 2007
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi 3. BPUndip. Semarang
- Goleman, D. 2001. *Working White Emotional intelligence*. (terjemahan Alex Tri Kantjono W). Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama



## **Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Manado**

**Raykes H Tuerah  
Jenny Morasa**

### ***ABSTRACT***

*Enactment of Law No. 32 of 2004 on regional government and Law No. 33 On financial balance between central and regional governments, bringing fundamental changes in the relationship Governance Government Relations and Finance, as well as bringing significant changes in the management of the Regional Budget. Budget and Expenditure (Budget) approach is based on performance. Clarity describes the breadth budget budget stated clearly and in detail, and understood by the parties responsible for its achievement.*

*The purpose of this study was to determine the effect of budgetary goal characteristics include budgetary participation (X1) and clarity of purpose budget (X2), the performance of government officials (Y). While the object is examined in this study was 25 Unit (SKPD) in Manado City Government Environment.*

*The study population was a Regional Working Units government Manado samples in this study were taken by using purposive sampling method obtained a sample of 60 respondents in the study by using multiple regression analysis and tested first by using the classical assumption and test the validity and reliability of data tool SPSS version 14.0.*

*Characteristics of the test results budgetary purposes simultaneously have an influence on the performance of Manado city government. It is known to result  $F_{hitung} = 80.393$  and  $F_{table} = 2.37$  and sig.  $0,000 < \alpha: 5\% (0.05)$  so that  $H_a$  is accepted. As for the partial test (t test) budget participation, budget goal clarity, feedback, evaluation and budget difficulties budgetary purposes a significant effect on performance. From the calculation (PA)  $t 2.697 > 2.000$  with significant ttable  $0.009 < \alpha: 5\% (0.05)$  then  $H_0$  is rejected and  $H_a$  accepted means calculation (KJA)  $t 2.541 > 2.000$  with significant ttable  $0.014 < \alpha: 5\% (0.05)$  then  $H_0$  is rejected means that  $H_a$  is accepted. Based on the survey results revealed that the factors characteristic of the budget goal Budget Participation and Budget Clarity of purpose affect the performance of Manado City Government Officials. And suggestions for government officials in this study should be further studied using objective characteristics of the budget in order to guide, reference or benchmark for every budget.*

*Keywords: Participation Budget, Budget Clarity, and Performance*

## 1. PENDAHULUAN

Pemahaman tentang anggaran menjadi modal bagi pimpinan dalam hal ini pejabat struktural yang menangani anggaran dan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado dalam menjalankan perencanaan dan pengendalian sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Kinerja manajerial yang diperoleh dari upaya aparat merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan Pemerintah Daerah Kota Manado secara efektif. Michael dan Troy (2000) mengatakan bahwa kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi, dan representasi. Dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara RI memberikan pengertian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Penelitian ini akan mengkaji apakah Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Manado berpengaruh terhadap beberapa karakteristik tujuan anggaran yang sudah disebutkan, dan dari keseluruhan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka judul penelitian ini adalah “*Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Manado*”.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “apakah partisipasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah ?”

Dengan hipotesis:

Ha1 : Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado.

H01: Partisipasi Anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado.

Ha2 : Kejelasan Tujuan Anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado.

H02: Kejelasan Tujuan Anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado.

Sugiyono (2007 : 55) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. populasi dari penelitian ini adalah seluruh aparat SKPD yang ada di Kota Manado. SKPD yang ada di Kota Manado berjumlah 130 terdiri dari 18 Dinas, 14 Badan dan lembaga teknis daerah, Sekertariat daerah dan sekertariat DPRD, 9 Kecamatan, dan 87 Kelurahan. Untuk kelurahan dengan jumlah 594 aparat tidak dijadikan populasi oleh karena masih merupakan SKPD dengan alokasi anggaran yang terbatas, sehingga populasi yang digunakan berjumlah 7.811 aparat yang ada di 43 SKPD.

Sugiyono (2007:56) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Mudrajad Kuncoro (2003) Sampel adalah suatu himpunan bagian dari populasi. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006). Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*. Metode ini dipilih karena sampel akan diambil berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, dimana kriteria pemilihan sampel adalah pejabat struktural dan staff di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado yang memiliki peran dalam proses penyusunan anggaran (RKA-SKPD) dan memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan

anggaran, adapun kriteria peneliti untuk penelitian ini adalah pejabat yang terlibat dalam penyusunan anggaran yaitu sekretaris, kepala bagian, kepala sub bagian dan staff. Berdasarkan kriteria tersebut di atas maka jumlah sampel penelitian sebanyak 78 orang dari populasi 25 SKPD Kota Manado (17 Dinas, 7 Badan dan 2 Bagian Adminitrasi).

Untuk mencapai tujuan penelitian seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka digunakan metode analisa regresi linear berganda. Menurut Agus Irianto (2004:101), analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) dengan menggunakan formula.

Untuk menyelesaikan analisis data ini secara keseluruhan, peneliti akan menggunakan bantuan teknologi komputer. Aplikasi statistik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Software SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) Program Version 18.0 for Windows* dimana telah ditetapkan tingkat keyakinan sebesar 95% dan tingkat signifikan sebesar 5%. Semua hasil *output* data yang dihasilkan kemudian diinterpretasikan satu per satu termasuk didalamnya menentukan koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Secara keseluruhan, analisis data ini menggunakan bantuan komputer dengan *software program SPSS for windows* tanpa menggunakan perhitungan manual. Sebelum melakukan analisis data, penulis terlebih dahulu melakukan pengujian kualitas data yang diperoleh. Uji kualitas data dilakukan untuk meyakinkan kualitas data yang akan diolah yang terdiri dari pengujian validitas dan reliabilitas.

Berbeda dengan alat analisis lainnya, regresi linear ganda memerlukan uji persyaratan yang ketat. Uji persyaratan pada regresi linear ganda biasa disebut dengan istilah uji asumsi klasik. Dalam melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik parametrik, khususnya dalam penggunaan statistik regresi linear ganda diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan awal, untuk menggunakan regresi sebagai salah satu alat analisis yaitu variabel penelitian harus diukur paling rendah dalam bentuk skala interval (Gunawan, 2005). Apabila variable-variabel penelitian tersebut diukur dalam bentuk skala interval, maka telah memenuhi salah satu persyaratan awal untuk menggunakan statistik parametrik. Tentu saja timbul pertanyaan, mengapa data harus minimal berskala interval. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa dalam statistik parametrik penghitungan-penghitungan yang dilakukan tidak hanya sekedar menghitung berapa besarnya frekuensi, seringnya sesuatu terjadi dan yang sejenisnya, akan tetapi lebih dari itu, yaitu dilakukan juga penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Data yang dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan dan juga dibagi hanyalah data yang minimal berskala interval. Data yang berskala ordinal bahkan berskala nominal tidak dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan dan juga dibagi. Hal inilah yang menyebabkan mengapa statistik parametrik memerlukan data minimal berskala interval atau yang lebih tinggi lagi, yaitu data yang berskala rasio.

Selain data harus berskala interval, beberapa persyaratan berikutnya yang juga harus dipenuhi antara lain berupa persyaratan untuk analisis regresi linear ganda, antara lain terdiri dari (a) normalitas (b) tidak terjadi adanya heteroskedastisitas (c) tidak terdapat saling hubungan antara variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya (uji multikolinearitas) dan (d) tidak terdapat autokorelasi antar data pengamatan. Oleh karena itu, sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan untuk menggunakan regresi linear ganda (Gunawan, 2005). Menurut Gunawan (2005), beberapa hal yang mendasari tentang perlunya melakukan uji asumsi klasik atau uji persyaratan tersebut yaitu agar besaran atau koefisien statistik yang diperoleh benar-benar merupakan penduga parameter yang memang dapat dipertanggungjawabkan atau akurat.

Selanjutnya untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka digunakan statistik uji F dan uji t. Uji F adalah untuk menguji pengaruh variabel bebas secara simultan atau bersama-sama.

Dengan kriteria pengujian, jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak berarti  $H_a$  diterima atau dengan menggunakan kriteria lain yaitu apabila signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima dan apabila

signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak. Uji  $t$  adalah untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri.

Dengan kriteria pengujian, jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak berarti  $H_a$  diterima atau dengan menggunakan kriteria lain yaitu apabila signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima dan apabila signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Partisipasi Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Menyatakan bahwa partisipasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Sehingga partisipasi dapat diartikan sebagai berbagi pengaruh, pendelegasian prosedur-prosedur, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan suatu pemberdayaan. Partisipasi yang baik membawa beberapa keuntungan sebagai berikut: (1) member pengaruh yang sehat terhadap adanya inisiatif, moralisme dan antusiasme, (2) memberikan suatu hasil yang lebih baik dari sebuah rencana karena adanya kombinasi pengetahuan dari beberapa individu, (3) dapat meningkatkan kerjasama antar departemen, dan (4) para karyawan dapat lebih menyadari situasi di masa yang akan datang yang berkaitan dengan sasaran dan pertimbangan lain Irvine (1978) dalam Nor (2007). Partisipasi penyusunan anggaran yang begitu luas menunjukkan betapa luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah untuk memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya sehingga berpengaruh terhadap tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka.

Partisipasi anggaran yaitu tingkat pengaruh dan keterlibatan yang dirasakan oleh individu dalam proses perencanaan anggaran (Bastian, 2006). Partisipasi anggaran tersebut menunjukkan pada luasnya partisipasi aparat pemerintah daerah dan merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.2 Kejelasan Tujuan Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rencana kerja pemerintah daerah merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah. Jika kualitas anggaran pemerintah daerah rendah, maka kualitas fungsi-fungsi pemerintah cenderung lemah anggaran daerah seharusnya tidak hanya berisi mengenai informasi pendapatan dan penggunaan dana belanja, tetapi harus menyajikan informasi kondisi kinerja yang ingin dicapai. Anggaran Pemerintah Daerah harus menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran pemerintah daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas

Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Manajer memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran. Manajemen tingkat atas dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya manajer tingkat bawah secara signifikan meningkatkan kejelasan dan ketegasan tujuan anggaran mereka

## 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian dalam hal ini adalah pejabat struktural SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Manado yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Jumlah SKPD di Kota Manado sebanyak 130 SKPD yang terdiri dari 18 dinas, 14 lembaga teknis (badan, kantor, inspektorat) 3 sekretariat (9 bagian) sekretariat DPRD, 9 kecamatan, 87 kelurahan dan 2 perusahaan daerah pasar dan air minum. Sampel penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria pejabat struktural SKPD Pemerintah Kota Manado yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran (RKASKPD). Kuesioner dibagikan kepada 25 SKPD (17 dinas, 7 badan dan 2 bagian Administrasi

Umum) Pemerintah Kota Manado dengan jumlah 78 kusioner, namun ada SKPD yang menolak dan tidak merespon untuk mengisi kuesioner dengan alasan kesibukan SKPD tersebut. SKPD yang bersedia mengisi kuesioner sebanyak 22 SKPD (60 orang). Kuesioner dibagikan kepada pejabat struktural yaitu sekretaris, kepala bagian, kepala sub bagian dan staff dari masing-masing SKPD yang terlibat dalam proses penyusunan RKA-SKPD.

#### 4. HASIL PENELITIAN

Dari hasil perhitungan pengujian statistik deskriptif yang dilakukan pada Tabel 4.3 dapat diartikan sebagai berikut.

1. Rata-rata partisipasi anggaran (dengan jumlah data 60) adalah sebesar 20.1167 dengan standar deviasi 3.49863 dengan range 14.00
2. Rata-rata partisipasi anggaran (dengan jumlah data 60) adalah sebesar 20.500 dengan standar deviasi 3.49863 dengan range 13.00
3. Rata-rata kinerja (dengan jumlah data 60) adalah sebesar 20.7833 dengan standar deviasi 3.66889 dengan range 15.00

#### Uji Validitas dan Reliabilitas

##### Uji Validitas

Pengujian validitas dengan menggunakan software statistic, nilai validitas dilihat dari kolom *Corrected Item Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ) maka instrument dapat dikatakan valid. Sampel sebanyak 60 responden dan  $r_{tabel}$  adalah 0,254 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini

	r hitung	r tabel	Keterangan
Partisipasi anggaran	.913	.254	Valid
Kejelasan tujuan anggaran	.913	.254	Valid
Kinerja	.859	.254	Valid

##### Uji Reliabilitas

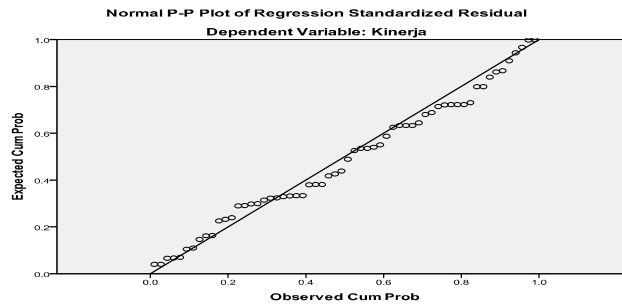
Uji reliabilitas menunjukkan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.6 maka dapat dinyatakan instrument maka dapat dinyatakan instrument tersebut reliable. Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya. Koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,6, hal ini menunjukkan bahwa data penelitian dinyatakan reliable.

##### Uji Reliabilitas

Variable	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Partisipasi anggaran	.909	0,6	Reliabel
Kejelasan Anggaran	.914	0,6	Reliabel
Kinerja Aparat	.954	0,6	Reliabel

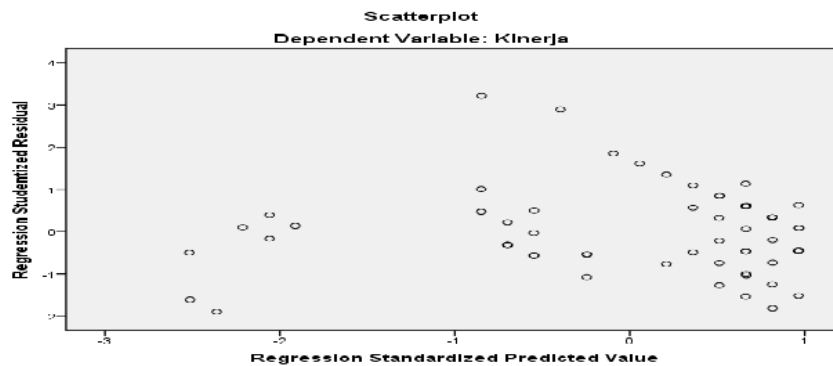
**Pengujian Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**



Dari Gambar dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi layak dipakai untuk memprediksikan kinerja aparat berdasarkan variable independennya yaitu karakteristik tujuan anggaran

**2. Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas**



Dari Gambar 4.2. Nampak bahwa diagram pencar residual tidak membentuk suatu pola tertentu atau posisinya dalam keadaan menyebar serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kesimpulannya, model regresi terbebas dari kasus heteroskedastisitas dan memenuhi persyaratan asumsi klasik tentang heteroskedastisitas sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja aparat pemerintah berdasarkan variable independennya.

**3. Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 P.angg	.163	6.120
K.angg	.163	6.120

a. Dependent Variable: Kinerja

Dari Tabel 4.7 nilai VIF menunjukkan angka sebesar 6,120 ; 6.120 yang menyatakan bahwa nilai VIF untuk variabel X secara keseluruhan < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

**4. Uji Asumsi Klasik Autokorelasi**

Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1.909461	1.737

Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Watson (DW)* sebesar **1,737** atau menunjukkan bahwa nilai  $1,65 < DW < 2,35$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

**Koefisien Korelasi dan Determinasi**

**1. Koefisien Korelasi (R)**

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dalam hal ini mengukur kuat atau lemahnya hubungan antara karakteristik tujuan anggaran (X) dengan kinerja aparat Pemerintah (Y).

**Tabel 4.9**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square
1	.859(a)	.738	.729

Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa koefisien korelasi linear yang diperoleh adalah sebesar 0,859. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) sangat kuat karena hampir mendekati angka satu (1), serta angka korelasi yang dihasilkan menunjukkan angka positif (+) yang berarti bahwa hubungan kedua variabel searah.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi diperlukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh karakteristik tujuan anggaran yang meliputi partisipasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah (Y). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan *program SPSS Version 14.0* seperti yang nampak pada Tabel, maka dapat diketahui nilai *Adjusted R square* yang diperoleh adalah sebesar 0,729 atau 72,9%. Adapun nilai ini memberikan arti bahwa kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado dipengaruhi oleh faktor karakteristik tujuan anggaran yang meliputi partisipasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran sebesar 72,9%, sedangkan sisanya sebesar 27,1% dijelaskan faktor-faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Analisis Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.401	1.585		.884	.381
P.angg	.474	.176	.452	2.697	.009
K.angg	.480	.189	.426	2.541	.014

a. Dependent Variable: Kinerja

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa model regresi yang diperoleh adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 1.401 + 0.474X + 0.480$$

Hasil konstanta a sebesar 1.401 memberikan pengertian bahwa jika keseluruhan karakteristik tujuan anggaran yang meliputi partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran konstan atau sama dengan nol (0), maka besarnya kinerja aparat Pemerintah Kota Manado sebesar 1,401 satuan.

Selanjutnya nilai b<sub>1</sub> yang merupakan koefisien regresi dari variabel X<sub>1</sub>(partisipasi anggaran) sebesar 0,474 mempunyai arti bahwa semakin banyaknya pengambilan partisipasi anggaran dalam suatu penyusunan atau penetapan rencana anggaran dalam setiap SKPD, maka kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado akan mengalami peningkatan sebesar 0,474 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.

Nilai  $b_2$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_2$  (kejelasan tujuan anggaran) sebesar 0,480 mempunyai arti bahwa semakin jelasnya tujuan anggaran yang dibuat oleh setiap SKPD, maka akan membuat kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado menjadi meningkat sebesar 0,480 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.

### Hasil Pengujian

#### 1. Uji

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	586.327	2	293.163	80.393	.000 <sup>a</sup>
	Residual	207.857	57	3.647		
	Total	794.183	59			

a. Predictors: (Constant), K.angg, P.angg

b. Dependent Variable: Kinerja

#### Sumber : *Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Dari Tabel 4.11 dapat diketahui hasil  $F_{hitung} = 80,393$  dan  $F_{tabel} = 2,37$ . Jadi nampak bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak berarti  $H_a$  diterima. Atau dapat juga dilihat bahwa signifikan  $F_{\alpha,0,05}$  sebesar 0,000 ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Dengan demikian hasil uji F menyatakan bahwa  $H_0$  ditolak berarti  $H_a$  diterima, artinya secara keseluruhan faktor-faktor karakteristik tujuan anggaran yang meliputi partisipasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado.

#### Uji t

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui hasil  $t_{hitung}$  untuk variabel  $X_1$ (partisipasi anggaran) = 2.697 dan  $t_{tabel} = 2,000$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak berarti  $H_a$  diterima. Atau dapat juga dilihat signifikan t untuk partisipasi anggaran sebesar  $0,009 < \alpha: 5\% (0,05)$  ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya faktor partisipasi anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado.

Selanjutnya hasil  $t_{hitung}$  untuk variabel  $X_2$ (kejelasan tujuan anggaran) = 2,541 dan  $t_{tabel} = 2,000$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak berarti  $H_a$  diterima. Atau dapat juga dilihat signifikan t untuk kejelasan tujuan anggaran sebesar  $0,014 < \alpha: 5\% (0,05)$  ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya faktor kejelasan tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado.

#### Evaluasi Data

Penelitian atas pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja kinerja aparat pemerintah kota Manado menggunakan data kualitatif yang dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert dan bersumber dari data primer. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengedarkan kuisioner oleh peneliti kepada responden yang ada di kantor pemerintah kota Manado. Kuisioner yang diedarkan mulai awal bulan November 2011 dan dikumpulkan pada pertengahan Januari 2012.

Sebelum kuisioner diedarkan telah dilakukan uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas melalui *Software SPSS Version 18.0* menunjukkan nilai tertinggi data yang terdapat pada kuisioner untuk variable partisipasi anggaran ( $X_1$ ) 0,913, kejelasan tujuan anggaran ( $X_2$ ) 0.913 dan kinerja (Y) adalah 0.859. Hal ini dapat dikatakan seluruh data yang terdapat pada variable bebas dan terikat adalah valid karena nilai *Pearson Correlation* lebih besar dari 0,254. Hasil uji reliabilitas melalui metode *Cronbach Alpha* dalam *Software SPSS Version 18.0* menunjukkan nilai data yang terdapat pada kuisioner untuk variable partisipasi anggaran ( $X_1$ ) 0,909, kejelasan tujuan anggaran ( $X_2$ ) 0.914 dan kinerja (Y) 0,954. Nilai tersebut berada pada kelompok Alpha 0,60 s.d 0,80 dengan kategori reliabel. Hal ini dapat



dikatakan seluruh data yang terdapat pada variable bebas dan terikat adalah reliabel karena nilai *Pearson Correlation* lebih besar dari 0,60.

Sehubungan dengan penggunaan metode analisis regresi sederhana, maka dilakukan pengujian asumsi klasik melalui uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Dari hasil uji normalitas Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi layak dipakai untuk memprediksikan kinerja aparat berdasarkan variable independennya yaitu karakteristik tujuan anggaran. Pada uji heteroskedastisitas. Dari Gambar 4.2. Nampak bahwa diagram pencar residual tidak membentuk suatu pola tertentu atau posisinya dalam keadaan menyebar serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kesimpulannya, model regresi terbebas dari kasus heteroskedastisitas dan memenuhi persyaratan asumsi klasik tentang heteroskedastisitas sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja aparat pemerintah berdasarkan variable independennya. Hasil uji multikolinearitas Dari Tabel 4.7 nilai VIF menunjukkan angka (X1) sebesar 6,120 dan (X2) sebesar 6,120 yang menyatakan bahwa nilai VIF untuk variabel X secara keseluruhan  $< 10$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Untuk uji autokorelasi Dari Tabel 5.10 dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Watson (DW)* sebesar **1,737** atau menunjukkan bahwa nilai  $1,65 < DW < 2,35$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

Dari hasil pengujian koefisien dapat dilihat pada Tabel 4.9 bahwa koefisien korelasi linear yang diperoleh adalah sebesar 0,859. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) sangat kuat karena hampir mendekati angka satu (1), serta angka korelasi yang dihasilkan menunjukkan angka positif (+) yang berarti bahwa hubungan kedua variabel searah dan Koefisien determinasi diperlukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh karakteristik tujuan anggaran yang meliputi partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah (Y). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan *program SPSS Version 14.0* seperti yang nampak pada Tabel, maka dapat diketahui nilai *Adjusted R square* yang diperoleh adalah sebesar 0,729 atau 72,9%. Adapun nilai ini memberikan arti bahwa kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado dipengaruhi oleh faktor karakteristik tujuan anggaran yang meliputi partisipasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran sebesar 72,9%, sedangkan sisanya sebesar 27,1% dijelaskan faktor-faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Adapun nilai  $b_1$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_1$  (partisipasi anggaran) sebesar 0,474 mempunyai arti bahwa semakin banyaknya pengambilan partisipasi anggaran dalam suatu penyusunan atau penetapan rencana anggaran dalam setiap SKPD, maka kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado akan mengalami peningkatan sebesar 0,474 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan. Hasil ini didukung dengan pengujian hipotesis t yang menunjukkan hasil  $t_{hitung}$  untuk variabel  $X_1$  (partisipasi anggaran) = 2,697 dan  $t_{tabel} = 2,000$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak berarti  $H_a$  diterima. Atau dapat juga dilihat signifikan t untuk partisipasi anggaran sebesar 0,009  $< \alpha$ : 5% (0,05) ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya faktor partisipasi anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado.

Hasil temuan pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel partisipasi anggaran terhadap variabel kinerja aparat pemerintah daerah kota Manado, ini berarti bahwa peningkatan atas partisipasi aparat Pemda dalam pembuatan tujuan anggaran akan meningkatkan kinerja aparat Pemda, sebaliknya jika partisipasi aparat Pemda dalam pembuatan tujuan anggaran turun maka kinerja aparat Pemda juga akan turun. Oleh karena itu hipotesis  $H_a$  dalam penelitian ini diterima. Argyris (1952) dan dikembangkan oleh Nor (2007) yang telah menemukan partisipasi dari bawahan memegang peran sentral dalam pencapaian tujuan. Dengan adanya keterlibatan manajer atau kepala unit organisasi dalam proses penganggaran, akan memberikan

implikasi terhadap kejelasan tugas dan target yang dicapai, sehingga membantu manajer mencapai tujuan organisasi sebagaimana dalam perencanaan anggaran.

Hasil ini juga semakin memperkuat penelitian Munawar (2006), yang menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kab.Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibuat oleh aparat pemerintah daerah adalah spesifik dan jelas, sehingga meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Begitu juga penelitian Sardijo (2007), Frisilia Harfiz (2007) dan Istiyani (2009) yang menemukan dalam penelitiannya partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah.

Selanjutnya Nilai  $b_2$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_2$  (kejelasan tujuan anggaran) sebesar 0,480 mempunyai arti bahwa semakin jelasnya tujuan anggaran yang dibuat oleh setiap SKPD, maka akan membuat kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado menjadi meningkat sebesar 0,480 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan. Selanjutnya hasil  $t_{hitung}$  untuk variabel  $X_2$  (kejelasan tujuan anggaran) = 2,541 dan  $t_{tabel} = 2,000$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak berarti  $H_a$  diterima. Atau dapat juga dilihat signifikan  $t$  untuk kejelasan tujuan anggaran sebesar  $0,014 < \alpha: 5\%$  (0,05) ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya faktor kejelasan tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Manado.

Hasil temuan kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel kejelasan tujuan anggaran terhadap variabel kinerja aparat Pemda, ini berarti bahwa semakin jelas kejelasan tujuan anggaran dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi kinerja aparat pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebaliknya jika tujuan anggaran kurang jelas maka kinerja aparat Pemda juga akan turun. Oleh karena itu hipotesis  $H_a$  dalam penelitian ini diterima. Bastian (2006) yang menyimpulkan bahwa salah satu kunci kinerja yang efektif adalah kejelasan tujuan penganggaran memegang peran sentral dalam pencapaian tujuan. Dengan tujuan yang jelas dalam proses penganggaran, akan memberikan implikasi terhadap kejelasan tugas dan target yang dicapai, sehingga membantu manajer mencapai tujuan organisasi sebagaimana dalam perencanaan anggaran.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Istiyani (2009) studi kasus Pemerindah Daerah Kabupaten Temanggung menemukan kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Temanggung. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Mochamad Solicin (2009) yang meneliti pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja dengan subjek penelitian Aparat Pemerintah Kota Yogyakarta menemukan bahwa kejelasan tujuan anggaran memiliki pengaruh kuat terhadap kinerja penganggaran, berbeda dengan penemuan Agus Setiawan (2010) yang menemukan bahwa kejelasan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerinah Daerah Sukoharjo.

Peneliti menyimpulkan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif daripada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki dan menemukan bahwa kejelasan tujuan berhubungan dengan kinerja.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitian ini penulis bertujuan apakah variable karakteristik tujuan anggaran antara lain partisipasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Manado.

Dari hasil pengujian dan analisis statistik dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian bersama-sama simultan atau uji F karakteristik tujuan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Manado. Pengaruh

- ini di tinjau dari koefisien determinasi dimana angka yang di peroleh 80.3% Sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain atau variable-variable lain yang tidak diteliti.
2. Hasil pengujian uji parsial atau uji t partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintahan. Partisipasi adalah tahap partisipasi pengurus dalam menyusun anggaran pengaruh partisipasi anggaran tersebut terhadap pusat pertanggungjawaban. mendefinisikan bahwa anggaran adalah suatu proses partisipasi individu akan dinilai dan mungkin diberi penghargaan atas prestasi mereka pada tujuan yang dianggarkan, dan mereka terlibat dalam proses tersebut dan mempunyai pengaruh pada penentuan tujuan tersebut. Dengan banyaknya partisipasi individu anggaran maka kinerja yang dihasilkan akan lebih mudah tercapai.
  3. Hasil pengujian uji parsial atau uji t kejelasan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintahan. Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan sejauhmana tujuan anggaran program dan kegiatan SKPD dinyatakan secara spesifik, jelas dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab terhadap anggaran dan juga merupakan perbandingan antara efisiensi rencana dan efisiensi aktual yang masing-masing dihasilkan dari perbandingan *output* dan *input* suatu kegiatan. Oleh sebab itu semakin jelasnya sasaran anggaran terhadap kinerja maka penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja.

#### Saran

1. Memberikan tambahan informasi dan menimbulkan inisiatif untuk melakukan penelitian pada masa akan datang yang menjadi salah satu sumber dalam pengembangan Ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik
2. Difokuskan pada bidang anggaran, maka pada saat pengambilan data sebaiknya di saat pemerintah daerah sedang menyusun anggaran sehingga informan yang diperoleh bukan hanya pada aparat pemerintah daerah dan DPRD saja tetapi dapat diperoleh dari masyarakat
3. Bagi aparat pemerintah dalam penelitian ini sebaiknya lebih lagi mendalami menggunakan karakteristik tujuan anggaran agar menjadi pedoman, acuan atau tolok ukur dalam setiap penyusunan anggaran

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aimee, F dan Carol E, 2004. *Aligning Priorities In Local Budgeting Processes*. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Boca Raton Summer 2004 Vol. 16, Iss. 2 ; page 210.
- Agus, A. Setiawan (2010) Pengaruh Umpan Balik Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Kabupaten Sukoharjo. (*tesis*).
- Bastian, Indra.2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi I, BPFE UGM, Yogyakarta
- Bastian, Indra.2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, *Salemba Empat Jakarta*.
- Frisilia, Hafiz (2007) Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial PT. Cakra Compact Industries Allmuniun. (*tesis*)
- Gunawan. R Sudarmanto.2005. Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS, *Graha Ilmu, Yogyakarta*.
- Graffiratna Cristie (2009) Pengaruh Partisipasi Anggaran, Tingkat Kesulitan Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Majerial pada PT. PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. (*tesis*)
- Handoko, T. Hani, (2000)Manajemen, Edisi 2, BEFE, Yogyakarta.
- Istiyani (2009) Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung, (*Tesis*)
- Irianto H. Agus, 2004. *Statistik : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Cetakan Kedua. Penerbit : PT. Prenada Media, Jakarta

- Joko Susilo. 2008. Regresi Linear Dengan Variabel Moderating, <http://jonikriswanto.blogspot.com/2008/08/html>
- Kim, Jay S., Effects of Behavior Plus Outcome Goal Setting and Feedback on Employee Satisfaction and Performance. *The Academy of Management Journal (Maret 1984) Hal 139-149.*
- Kenis, I., Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review (Oktober 1979). Hal 707-721*
- Libby, T. (2000) The Influence of Voice and Explanation on Performance in a Participativ Budgeting Setting. *Accounting, OrganizationsThe Accciety). Hal 125-137*
- Mardiasmo.2002. Akuntansi Sektor Publik. *Andi Yogyakarta.*
- Maryanti, H., A., 2002. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur. *(Tesis)*
- Mulyadi. 2001. *Total Quality Management*. Edisi II. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.
- Munawar,2006. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang. *(Tesis).*
- Michael, W. S dan Troy A, 2000. ***Financial Performance Monitoring and Customer Oriented Government : A Case Study***. *Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management*. 12 (1), 87-105.
- Nor, Wahyudin.2007. Desentralisasi dan Gaya Kepemimpina Sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial, *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar.*
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. *Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan Jakarta.*
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, *Jakarta.*
- Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, *Jakarta.*
- Sadjiarto Arja,2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah, *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol 2,Nopember 2000: 138-150*
- Sarjito, Bambang. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Budaya organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating, *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar.*
- Sartje, Prang (2010) Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara. *(tesis)*
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business : A Skill Building Approach*. Four Edition. *New York : John Willey & Sons, Inc.*
- Sugiyano. (2007). *Statistika untuk penelitian*, CV Alvabeta, Jakarta
- Suryaningsih, (2007) Partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap prestasi manajer pusat pertanggungjawaban. *(tesis)*
- Supranto, J. 2000. *Statistik Teori dan Aplikasi*, Edisi Enam. Jakarta: Erlangga

---

**PENGARUH TABUNGAN DAN DEPOSITO TERHADAP RENTABILITAS BANK  
PEMERINTAH PERIODE 2008-2011**

**Yuniarti  
Herman Karamoy**

***ABSTRACT***

*In Indonesia, banks are important in supporting economic development. It is given that the banking relation with bank institutions have a strategic function primarily as an institution that bridges the parties who have surplus funds to those who need funds. Funds raised from the public in the form of savings and deposits. Banking sector is one factor that the government's attention because the bank is one of the sources of capital that is needed by the community in running its operations. Bank as one of the government's workers are required to successfully develop its participation.*

*This study uses secondary data published financial statements quartely satae owned banks during the period 2008-2011. This study uses a population of 4 state banks in Indonesia, BNI, BRI, BTN and Bank Mandiri.*

*The analytical method used was multiple linear regression analysis, and hypothesis testing used for statistical testing of the F test dan t test. By using SPSS Software Version 20.0 for windows.*

*The results showed that simultaneous saving and deposit significant effect on the rentability of state-owned banks the period 2008-2011. Partially shows that savings variables affect the rentability of state-owned banks. In partial deposit no significant effect on the rentability of state owned banks.*

*Keywords: savings, deposits, and rentability.*

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, perbankan memiliki arti penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa perbankan kaitannya dengan lembaga bank memiliki fungsi yang strategis terutama sebagai lembaga yang menjembatani pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan dari waktu ke waktu menunjukkan adanya berbagai peningkatan baik dari segi kelembagaan dan operasional. Himpunan dana masyarakat pun mengalami peningkatan peran ini tentu saja tidak terlepas dari adanya serangkaian kebijakan pemerintah sehingga dapat tercipta kondisi yang dapat memungkinkan perbankan untuk meningkatkan pergerakan dana dari masyarakat.

Sumber dana perbankan yang sebagian besar dihimpun dari dana masyarakat dan merupakan sumber dana yang paling diandalkan oleh bank. Sebagian besar seluruh dana yang dikelola oleh bank merupakan dana pihak ketiga baik berasal dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya, sedangkan sisanya merupakan modal sendiri dan cadangan modal. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat biasanya dalam bentuk giro (dana murah) tabungan dan deposito (dana mahal). Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito disebut dana mahal, hal ini disebabkan bunga yang dibayar kepada pemegangnya relatif lebih tinggi, jika dibandingkan dengan jasa giro sehingga banyak masyarakat yang menanamkan dananya dalam bentuk tabungan dan deposito.

Bank pemerintah memiliki peran ganda yaitu selain untuk memperoleh keuntungan (*Profit Oriented*) juga sebagai agen pembangunan (*social oriented*). Oleh karena itu, bank pemerintah dituntut agar dapat mengelola asset Negara dengan baik. Jika dilihat dari jumlah asset, dapat dikatakan bahwa bank pemerintah merupakan bank dengan jumlah asset terbesar. Aset bank merupakan salah satu indikasi besarnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut karena aset adalah kumpulan dana dari masyarakat yang ditempatkan di bank dan kemudian disalurkan sebagai pinjaman dan aset produktif lainnya. Sedangkan laba merupakan salah satu indikasi untuk menilai pengelolaan bank. Dengan adanya rentabilitas yang merupakan kemampuan dari bank untuk memperoleh laba dari aktivitas usahanya yaitu dengan menggunakan asset yang dapat dihitung dengan perbandingan relatif antara laba dan asset yang di gunakan untuk memperoleh laba tersebut yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA) atau *Return On Investmen* (ROI) sehingga bank dapat menilai kinerja melalui rentabilitas.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Bank

Menurut Kasmir (2001:25) bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mentarafkan kehidupan dan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sementara menurut Rindjin (2003:13) dalam Undang-Undang No.14 pasal 1 bahwa: Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dendawijaya (2005:14) menjelaskan, Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*idke fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu tertentu.

Terdapat tujuan bank yang dikemukakan oleh Verryn Stuart dalam buku *Bank Politics* dikutip oleh Frianto dkk (2004:11), yaitu:

1. Sebagai perantara kredit yakni bank memberikan kredit kepada pihak ketiga atau debitur yang berasal dari simpanan pihak ketiga (masyarakat).
2. Menciptakan kredit yakni meminjamkan dana yang tidak berasal dari dana masyarakat.

Menurut Kasmir (2008:34) bank dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari: Bank umum dan bank BPR

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bank milik pemerintah adalah bank yang dalam akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
2. Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya sahamnya dimiliki oleh swasta
3. Bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
4. Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing.

Bank milik campuran, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional.

c. Dilihat dari segi status

1. Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit* (LC) dan transaksi lainnya.

2. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa dan hanya dilakukan dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- a) Menentukan bunga sebagai harga (*spread based*) untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito.
- b) Menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu (*fee based*) untuk jasa-jasa lainnya.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau perbankan lainnya. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan produknya dengan bunga tertentu karena diartikan sebagai riba.

## 2.2 Pengertian Rentabilitas

Menurut Harahap (2009:304) rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, asset, modal. Sementara menurut Mamduh dan Halim (2007:83) profitabilitas atau rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Ada pun pengertian secara umum yang dikemukakan oleh Sujana (2006), yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan jumlah modal yang digunakan, dinyatakan dalam persentase.

**a. Tabungan**

Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang diuraikan oleh Kasmir (2001:79) tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

**b. Deposito**

Dalam Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 yang diuraikan Kasmir tentang perbankan (2001:85), Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi simpanan deposito atau lebih dikenal dengan deposito berjangka adalah simpanan dari masyarakat atau perusahaan yang pencairannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disetujui berakhir.

**3. ANALISIS EVALUASI****3.1 Uji Asumsi Klasik Tabungan dan Kredit terhadap Rentabilitas****1. Uji Normalitas**

Ghozali (2009:107) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas dengan menggunakan analisa statistik uji Kolmogorov Smirnov Asymp sig > 0.05 maka residual error data adalah normal sehingga model regresi telah memenuhi asumsi uji normalitas.

**2. Uji Multikolinearitas**

Ghozali (2009:25) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas/independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas, maka terdapat problem multikolinearitas (multiko) pada model regresi tersebut. Tidak ada variabel bebas yaitu tabungan dan tabungan kredit yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil uji VIF juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam persamaan regresi.

**3. Uji Autokorelasi**

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu atau tersusun dalam rangkaian ruang. Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi problem autokorelasi (Ghozali, 2009:79). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test).

Dari pengujian Durbin-Watson dalam penelitian ini dihasilkan nilai DW sebesar 1.935. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah data 64 ( $n$ ) dan jumlah variabel independen 2 ( $k=2$ ), maka terletak diantara batas atas ( $du=1,65$ ) dan batas bawah ( $dl=1,51$ ). Oleh karena nilai DW 1.935 lebih besar dari batas atas ( $du$ ) 1,65 dan kurang dari 2,3383 ( $4-du$ ) maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi ini tidak terdapat autokorelasi.

**4. Uji Heteroskedastisitas**

Ghozali (2001: 69) Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau



tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Terlihat bahwa dalam persamaan regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari dengan menggunakan Uji Glesjer maka varians data tidak terjadi heteroskedastisitas

### 3.2 Analisis Regresi

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh tabungan dan tabungan kredit terhadap rentabilitas Bank Pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel tabungan sebesar -3.0, variabel tabungan dan kredit sebesar 0.254, dan konstanta sebesar -13.265 dari koefisien-koefisien tersebut diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = -13.265 - 3.0X_1 + 0.254X_2$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

1. Tabungan mempunyai pengaruh negatif terhadap rentabilitas bank. Setiap peningkatan satu satuan, maka akan berdampak pada penurunan rentabilitas bank sebesar 3.0.
2. Tabungan dan kredit mempunyai pengaruh positif terhadap rentabilitas bank. Setiap peningkatan satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan rentabilitas bank sebesar 0.254.

### 3.3 Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji Simultan

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan data pengolahan variabel penelitian, uji F dengan probabilitas value dapat dilihat dari probabilitas value dibandingkan dengan 0,05 hipotesis diterima jika probabilitas < 0,05.

Pada tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 13.305 dengan signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0.05 hal ini berarti secara bersama-sama tabungan dan tabungan kredit mampu mempengaruhi tinggi rendahnya rentabilitas.

#### 2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama, yaitu tabungan dan deposito terhadap Rentabilitas. Nilai koefisien determinasi sebesar 0.304 atau 30.4%, yang berarti bahwa rentabilitas mampu dijelaskan oleh tabungan dan tabungan kredit sedangkan sisanya sebesar 69.6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

#### 3. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1$ , dan  $X_2$ ) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Dalam hal ini mengukur hubungan antara variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Dari tabel 4.6 di atas nilai R sebesar 0.551 yang berarti arti bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tabungan dan tabungan kredit terhadap rentabilitas Bank Pemerintah.

### 3.4 Uji Asumsi Klasik Deposito dan Kredit terhadap Rentabilitas

#### 1. Uji Normalitas

Ghozali (2009:107) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan analisa statistik uji Kolmogorov Smirnov Asymp sig > 0.05 maka residual error data adalah normal sehingga model regresi telah memenuhi asumsi uji normalitas.

## 2. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2009:25) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas/independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas, maka terdapat problem multikolinearitas (multiko) pada model regresi tersebut.

Tidak ada variabel bebas yaitu tabungan dan tabungan dan kredit yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil uji VIF juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam persamaan regresi.

## 3. Uji Autokorelasi

Dari pengujian Durbin-Watson dalam penelitian ini dihasilkan nilai DW sebesar 1.935. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah data 64 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2), maka terletak diantara batas atas (du=1,65) dan batas bawah (dl=1,51). Oleh karena nilai DW 2.040 lebih besar dari batas atas (du) 1,65 dan kurang dari 2,3383 (4-du) maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi ini tidak terdapat autokorelasi.

## 4. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2001: 69) Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

### 3.5 Analisis Regresi

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh tabungan dan tabungan dan kredit terhadap rentabilitas Bank Pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel sebesar sebesar 0.181, variabel tabungan dan kredit sebesar 1.79, dan konstanta sebesar -7.772 dari koefisien-koefisien tersebut diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = -7.772 + 0.181X_1 + 1.79X_2$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

1. Tabungan mempunyai pengaruh positif terhadap rentabilitas bank. Setiap peningkatan satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan rentabilitas bank sebesar 0.181.
2. Tabungan dan kredit mempunyai pengaruh positif terhadap rentabilitas bank. Setiap peningkatan satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan rentabilitas bank sebesar 1.79.

### 3.6 Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji Simultan

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan data pengolahan variabel penelitian, uji F dengan probabilitas value dapat dilihat dari probabilitas value dibandingkan dengan 0,05 hipotesis diterima jika probabilitas < 0,05.

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 13.305 dengan signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0.05 sehingga hipotesis  $H_{a3}$  dapat diterima, hal ini berarti secara bersama-sama deposito dan deposito kredit mampu mempengaruhi tinggi rendahnya rentabilitas.

## 2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama, yaitu deposito dan deposito kredit terhadap Rentabilitas.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0.319 atau 31.9%, yang berarti bahwa rentabilitas mampu dijelaskan oleh tabungan dan tabungan kredit sedangkan sisanya sebesar 69.1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

## 3. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi ( $R$ ) digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1$ , dan  $X_2$ ) terhadap variabel dependen ( $Y$ ) secara serentak. Dalam hal ini mengukur hubungan antara variabel independen ( $X_1$ , dan  $X_2$ ) secara serentak terhadap variabel dependen ( $Y$ ). Nilai  $R$  berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Dari table 4.14 di atas nilai  $R$  sebesar 0.565 yang berarti arti bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tabungan dan deposito terhadap rentabilitas Bank Pemerintah.

## 4 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil uji  $t$  menunjukkan nilai  $t$  hitung untuk variabel tabungan sebesar 3.290 dengan nilai signifikansi 0.002. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_1$  yang menyatakan bahwa tabungan berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas pada bank pemerintah diterima. Hal ini menjelaskan bahwa variabel tabungan berpengaruh dalam meningkatkan rentabilitas pada bank pemerintah. Sedangkan hasil uji  $t$  untuk variabel deposito menunjukkan nilai  $t$  hitung sebesar 1.903 dengan nilai signifikansi 0.062. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_{a2}$  yang menyatakan bahwa deposito berpengaruh signifikan terhadap bank pemerintah ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa variabel deposito tidak berpengaruh dalam meningkatkan rentabilitas pada bank pemerintah.

Hasil uji  $F$  menunjukkan nilai  $F$  hitung sebesar 13.305 dengan signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0.05 sehingga hipotesis  $H_{a3}$  dapat diterima, hal ini berarti secara bersama-sama deposito dan deposito kredit mampu mempengaruhi tinggi rendahnya rentabilitas.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan mengenai pengaruh tabungan dan deposito terhadap rentabilitas Bank Pemerintah sebagai berikut :

1. Secara parsial menunjukkan bahwa variabel tabungan berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas Bank Pemerintah.
2. Secara parsial terhadap variabel deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas Bank Pemerintah.
3. Secara simultan tabungan dan deposito berpengaruh signifikan terhadap Rentabilitas Bank Pemerintah.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut di atas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan variabel tabungan dan deposito dalam mempengaruhi Rentabilitas Bank Pemerintah masih kurang oleh karena itu diperlukan pengujian lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain seperti kebijakan perusahaan dalam hal pemberian pinjaman, tingkat pengembalian pinjaman dan lain-lain untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat dalam memprediksi tingkat Rentabilitas Bank Pemerintah.

2. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara parsial Tabungan tidak memiliki pengaruh terhadap Rentabilitas Bank Pemerintah, jadi bagi pengembangan penelitian selanjutnya agar memperpanjang periode penelitian dan tolak ukur, sehingga dapat diketahui pengaruh Tabungan secara lebih rinci.
3. Diharapkan informasi ini dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga Rentabilitas Bank Pemerintah dapat lebih ditingkatkan.

#### DAFTAR PUTAKA

- Amin Widjaja Tunggal, 2000. *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Arif Sogiono dkk, 2010. *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Untuk Bisnis Skala Kecil dan Menengah*, Edisi Pertama, Penerbit PT. Grasindo Anggota Ikapi. Jakarta
- Bambang Riyanto, 2001. *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty, 2005. *Analisi Laporan Keuangan Aplikasi*, Edisi kedua, Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Frianto dkk, 2004. *Lembaga Keuangan*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Fariana Kusumawaji, 2008. *Pengaruh Risiko Bank dan Profitabilitas terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan*. Jurnal Akuntansi, Manajemen bisnis, ISSN 1829-9857.
- H. Malayu S.P. Hasibuan, 2006. *Dasar-dasar Perbankan*. Penerbit PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Imam Ghozali. 2009. *Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Intan Cynara Valentina Putri, 2006. *Pengaruh Tabungan dan Deposito Terhadap Rentabilitas 2003-2005*. TESIS. Universitas Widyatama Bandung (Tidak Dipublikasi)
- Kasmir, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2001. *Bank dan lembaga Keuangan lainnya*. Penerbit PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Ketut Rindjin, 2003. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Lukman Dendawijaya, 2005. *Manajemen Perbankan*. Edisi Kedua Penerbit Ghalia Indonesia
- Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, 2005. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi kedua, Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Martono dan Agus Harjito, 2005. *Manajemen Keuangan*, Penerbit EKONISIA. Yogyakarta
- Mudrajad Kuncoro dan suharjono, 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikaki*. Penerbit BPFE. Yogyakarta
- Suharyadi dan Purwanto, 2007. *Statistika Bisnis*. Buku II. Salemba Empat. Jakarta
- Sunjana Ismaya, 2006. *Kamus Akuntansi*, Penerbit Pustaka Grafik
- Sumarto, Nurmadi H, Yogiarto, *Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Thailand*, Buletin Ekonomi Perbankan, Volume 3 No. 2 September 2000, hal. 187-207.
- Sofyan Syafri Harahap, 2009. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Penerbit PT. Rahagrafindo Persada. Jakarta
- S. Munawir. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit Liberty Yogyakarta
- Syamsu Iskandar. 2008, *Bank dan Lembaga keuangan*. Penerbit PT. Semesta Asa Bersama. Jakarta
- Taswan, 2005. *Akuntansi Perbankan*, Edisi Kedua. Penerbit
- Zaki Baridwan, 2004, *Intermediate Accounting*, Edisi VIII, Penerbit BPFE. Yogyakarta
- Website : <http://www.idx.co.id>. Perusahaan Perbankan Tahun 2008-2011

**Pengaruh Gaya Kepemimpinan, *Locus of Control* Terhadap Kinerja Internal Auditor“  
(Penelitian pada PT. BankSULUT dan PT. BNI, Tbk)**

**Aileen Janet Mogi  
Sifrid Pangemanan**

***ABSTRACT***

*In facing the environment change, a company should level up the effectiveness of management control to achieve the final goal between the individual and the organization. That is why a leader should be able to motivate the subordinates so the goal can be achieved. Besides leadership style, locus of control also affects the internal auditor performance. Internal Auditor performance is one of the important indicators to reach the banking company success that is the reason why the researcher is interested with the title of this final task.*

*This research is aimed to know the influence of leadership style and locus of control on the internal auditor performance. This research was done at 2 (two) banking companies, those are PT. Bank SULUT and PT. BNI, Tbk. In this research the independent variable (X) are the leadership style ( $X_1$ ) and locus of control ( $X_2$ ); meanwhile the dependent variable (Y) is performance (Y).*

*The data collection method used is through survey and questioner with a list of questions. It would be answered by the respondents and those are the internal auditors. The technique used in data analysis to test the hypothesis was done by using the double linear regression analysis and processed through SPSS program Version 19.0.*

*The result shows that the leadership style partially does not have an effect on the performance of internal auditor but the locus of control has an effect on the internal auditor performance. But simultaneously, the leadership style and locus of control influence the performance of internal auditor.*

*Key words: Leadership style, Locus of control, and The Performance of Internal Auditor.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Dalam menghadapi era globalisasi, dimana persaingan dalam dunia usaha semakin ketat, suatu perusahaan diharuskan membuat kebijakan serta strategi yang tepat untuk memanfaatkan secara optimal penggunaan berbagai sumber daya yang ada. Untuk mencapai keselarasan tujuan, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi anggota organisasinya agar tujuan individu konsisten dengan tujuan organisasi itu sendiri (Anthony dan Govindarajan, 2004).

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok demi pencapaian tujuan (Robbins, 2008). Gaya kepemimpinan dipandang sebagai salah satu prediktor penting dalam mencapai kesuksesan suatu organisasi, karena untuk memimpin suatu kelompok audit diperlukan seseorang yang berkompeten dibidang audit, berpengalaman, bijaksana dan dapat memotivasi bawahannya agar dapat mencapai tujuan perusahaan.

Selain gaya kepemimpinan, penelitian ini ingin mengetahui apakah *locus of control* (lokus pengendalian) merupakan indikator yang mempengaruhi kinerja internal auditor. Sikap seorang auditor terhadap pekerjaan yang ditekuninya, secara potensial juga dipengaruhi oleh bagaimana persepsi internal auditor tersebut terhadap pekerjaannya. *Locus of control* merupakan salah satu aspek karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu dan dapat dibedakan atas *locus of control internal* dan *locus of control eksternal*.

Kinerja sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan motivasi. Kinerja yang dimiliki seorang internal auditor baru merupakan potensi, sehingga belum dapat menjamin tercapainya tingkat kinerja yang tinggi. Kinerja atau *performance* merupakan tolak ukur karyawan dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditargetkan pada karyawan, sehingga upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal penting.

Internal auditor berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud seperti mesin dan lahan maupun yang tidak berwujud seperti reputasi, dan sebagainya. Terbentuknya seorang internal auditor yang handal belum tentu karena kepandaian dan kemampuannya sendiri, namun masih perlu dibekali pelatihan, pengetahuan/*produk knowledge* dan pendorong agar seseorang mau menggunakan seluruh kemampuannya untuk bekerja. Yang menjadi alasan tertarik dengan judul laporan ini yaitu peneliti ingin mengetahui apakah didalam aktivitas perbankan variabel Gaya Kepemimpinan dan *Locus of Control* memiliki pengaruh terhadap Kinerja Internal Auditor.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja internal auditor?
2. Apakah *Locus of Control* berpengaruh terhadap kinerja internal auditor?

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Internal auditor.

H<sub>2</sub>: *Locus of control* berpengaruh terhadap Kinerja Internal auditor.

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Internal Auditor dan Untuk mengetahui pengaruh *Locus of control* terhadap Kinerja Internal Auditor. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Dapat memberikan masukan bagi perusahaan khususnya bidang perbankan agar perusahaan dapat mengambil strategi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja internal auditor.
2. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu, khususnya mengenai kinerja internal auditor yang dipengaruhi oleh Gaya Kepemimpinan dan *Locus of Control*.

3. Penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan empiris terhadap pengembangan teori tentang karakteristik internal auditor dalam hubungannya dengan kinerja.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, menurut Kuncoro (2003) data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden yaitu dari seluruh internal auditor yang ada di PT. Bank Sulut dan PT. BNI, Tbk. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2003:17). Dengan kata lain data yang diperoleh tidak diusahakan dengan sendirinya melainkan diperoleh dari objek penelitian yaitu PT. Bank Sulut dan PT. BNI, Tbk yang meliputi informasi tentang sejarah perusahaan, data tentang staff divisi audit intern, dokumen, dan sejenisnya. Untuk menguji hipotesis, sebelumnya akan dilakukan survei kepada internal auditor sebagai responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah staf internal auditor pada Satuan Kerja Audit Internal pada PT. Bank SULUT yang jumlahnya 31 (tiga puluh satu) orang dan Staf Auditor pada PT. Bank BNI, Tbk yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Unit analisis yang digunakan adalah internal auditor.

Sugiyono (2006:56) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Kuncoro (2003:111) bahwa secara umum jumlah sampel untuk studi korelasional, dibutuhkan minimal 30 (tiga puluh) sampel untuk menguji ada tidaknya hubungan. Karena populasi dalam objek penelitian ini hanya berjumlah 56 (lima puluh enam) orang sehingga sampel dalam penelitian ini diambil secara keseluruhan atau dengan metode sensus. Kuisisioner akan dibagi pada setiap internal auditor pada PT. Bank Sulut dan PT. BNI, Tbk.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu.

1. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan atau orang yang diwawancarai.
2. Observasi langsung untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian.
3. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan untuk dijawab atau pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini menggunakan metode *personally administered questionnaires*. Dengan metode ini paket survei disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti, sehingga peneliti berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya mengenai tujuan survei dan pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden. Hasil tersebut dibahas lebih lanjut dalam rangka penarikan kesimpulan serta memberikan saran.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan, pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Menurut Thoha (2007) gaya kepemimpinan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Kepemimpinan yang direktif (mengarahkan) : memberikan panduan kepada para karyawan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, menjadwalkan pekerjaan, dan mempertahankan standar kinerja.
2. Kepemimpinan yang suportif (mendukung) : menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan karyawan, bersikap ramah dan dapat didekati, serta memperlakukan para pekerja sebagai orang yang setara dengan dirinya.
3. Kepemimpinan yang parsipatif : berkonsultasi dengan para karyawan dan dengan serius mempertimbangkan gagasan mereka pada saat mengambil keputusan.

4. Kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian: mendorong para karyawan untuk berprestasi pada tingkat tertinggi mereka dengan menetapkan tujuan yang matang, menekankan pada kesempurnaan dan memperlihatkan kepercayaan diri atas kemampuan karyawan.

Dari beberapa definisi tentang gaya kepemimpinan dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu perwujudan perilaku atau tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin suatu perusahaan khususnya dalam dunia perbankan. Seorang pemimpin dalam lingkungan audit alangkah baiknya memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang audit bahkan memiliki gaya kepemimpinan yang tidak arogan atau otoriter agar para karyawan tidak merasa tertekan dalam bekerja bahkan bisa termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi.

### **2.2 Definisi *Locus of Control***

*Locus of Control* atau lokus pengendalian yang merupakan kendali individu atas pekerjaan mereka dan kepercayaan mereka terhadap keberhasilan diri. Lokus pengendalian ini terbagi menjadi dua yaitu lokus pengendalian internal yang mencirikan seseorang memiliki keyakinan bahwa mereka bertanggung jawab atas perilaku kerja mereka di organisasi. Lokus pengendalian eksternal yang mencirikan individu yang mempercayai bahwa perilaku kerja dan keberhasilan tugas mereka lebih dikarenakan faktor di luar diri yaitu organisasi.

Contoh sederhananya adalah seorang karyawan dalam memandang karirnya di sebuah perusahaan. Jika ia memiliki *internal locus of control* maka dia akan menyatakan kegagalannya meraih suatu jabatan lebih dikarenakan dirinya sendiri, sementara karyawan yang memiliki *external locus of control* akan menyalahkan keadaan seperti kurang beruntung, atasan yang kurang adil, dsb.

### **2.3 Kinerja Internal Auditor**

Gibson, dkk (2003: 355) *job performance* adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan kinerja lainnya. Kinerja seorang internal auditor juga seringkali identik dengan kemampuan seorang auditor bahkan berhubungan dengan komitmen terhadap suatu profesi akuntan. Yang dikategorikan sebagai individu yang tergolong *Locus of Control Internal* melakukan pekerjaan lebih baik, dengan mengendalikan sendiri. Kebalikannya, yang tergolong *Locus of Control Eksternal* berkinerja baik pada partisipasi dalam penyusunan anggaran yang kurang atau rendah.

### **2.4 Pengertian Internal Auditor**

Internal auditor merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Seorang internal auditor harus memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang audit, jujur, menjunjung tinggi independensi, patuh terhadap peraturan yang berlaku, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, dan mau mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Jadi pemeriksaan intern yang dilakukan oleh internal auditor adalah merupakan suatu alat pengawasan yang penting untuk mengukur dan menilai keefektifan pengawasan-pengawasan yang ada di dalam perusahaan.

### **2.6 Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja**

Gaya kepemimpinan pada hakikatnya bertujuan untuk mendorong gairah kerja, kepuasan kerja, dan produktivitas kerja karyawan yang tinggi, agar dapat mencapai tujuan organisasi yang maksimal, Hasibuan (2001 : 170). Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa pemimpin yang efektif ditentukan oleh kemampuannya membaca situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan menggunakan ciri-ciri kepemimpinan sedemikian rupa agar sesuai dan mampu memenuhi tuntutan situasi yang dihadapi, sehingga para auditor junior mampu dimotivasi dengan baik, dan mampu melaksanakan program kerjanya yang telah ditetapkan. Pada umumnya bila seseorang akan melakukan sesuatu jelas ada tujuan tertentu yang hendak dicapainya. Demikian juga halnya dengan perusahaan, tujuan yang hendak dicapai salah satunya adalah kinerja yang optimal.



## 2.7 Hubungan Antara *Locus of Control* terhadap Kinerja

Patten (2005) menunjukkan hasil bahwa “auditor dengan *Locus of Control internal* akan merasakan kinerja yang lebih tinggi daripada auditor dengan *Locus of Control eksternal*”. Mereka yang memiliki *Locus of Control internal* akan menghasilkan kinerja yang baik untuk perusahaan.

Jika seorang auditor cenderung memiliki *internal locus of control* diyakinkan kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka akan meningkatkan kinerja internal auditor. Namun apabila seorang auditor mempunyai kecenderungan mempercayai faktor-faktor di luar dirinya sebagai penentu keberhasilannya, dapat dikatakan dia memiliki *external locus of control*, hal ini justru akan mengakibatkan menurunnya kinerja dari internal auditor.

## 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti langsung datang ke perusahaan untuk observasi langsung untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan menyebarkan kuesioner. Kuesioner yang didistribusikan kepada sampel terpilih sebanyak 56 (lima puluh enam) buah. Jumlah kuesioner yang kembali dan yang memenuhi persyaratan serta layak untuk dipakai dalam penelitian ini sebanyak 50 (lima puluh) buah. Tabel 3.2 dibawah ini menunjukkan rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner.

**Tabel 3.2**  
**Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner**

Total Pengiriman Kuesioner	56
Kuesioner yang dikembalikan	50
Kuesioner yang tidak dikembalikan	6
Kuesioner yang tidak terpakai	0
Kuesioner yang terpakai	50
Tingkat pengembalian ( <i>response rate</i> ) $50/56 * 100\% = 89.29\%$	

## 4. ANALISIS DAN EVALUASI

### 4.1 Analisis Data

Sebelum melakukan pengolahan data, data yang diperoleh melalui kuesioner perlu diuji kesahihan dan keandalannya terlebih dahulu. Untuk itu perlu dilakukan analisis dari keseluruhan pertanyaan pada kuesioner dengan uji reliabilitas dan uji validitas dengan menggunakan SPSS Ver.19.00. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha* dengan nilai *cronbach alpha* > 0,60 dan uji validitas dengan melihat *Corrected item-Total Correlation* > r tabel *product moment* dengan signifikansi 5%.

#### 4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel (lihat r tabel *Product Moment* dengan uji dua sisi pada lampiran). Jika r hitung > r tabel dan nilai positif maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

#### 4.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari pernyataan satu ke pernyataan yang lain. Analisa reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Uji reliabilitas pada penelitian ini telah memberikan hasil yang memuaskan yaitu dari seluruh pertanyaan yang diuji ternyata reliabel dimana:

*Cronbach Alpha*  $X_1 = 0,613 > 0,60$ .  
*Cronbach Alpha*  $X_2 = 0,602 > 0,60$ .  
*Cronbach Alpha*  $Y = 0,715 > 0,60$ .

Tabel 4.1 Uji Reliabilitas Variabel Gaya Kepemimpinan ( $X_1$ )


Tabel 4.2 Uji Reliabilitas Variabel Locus of Control ( $X_2$ )


Tabel 4.3 Uji Reliabilitas Variabel Prestasi Kerja ( $Y$ )


**4.2 Uji Asumsi Klasik**

**4.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel memenuhi persyaratan distribusi normal. Persyaratan data disebut normal jika probabilitas atau  $p > 0,05$  pada uji normalitas dengan kolmogorovsmirov. Untuk variabel kinerja, terdistribusi normal dengan nilai  $p = 0,087 > 0,05$  maka data variabel kinerja pada 50 (lima puluh) sampel adalah normal, atau memenuhi persyaratan uji normalitas.

**Tabel 4.4**


**4.2.2 Uji Multikolinieritas**

Hasil pengujian menunjukkan tidak ada efek multikolinieritas karena masing-masing VIF variabel bebas  $< 5$  dan nilai *tolerance*  $> 0.10$

**Tabel 4.5**


**4.2.3 Uji Autokorelasi**

Berdasarkan kriteria penentuan Uji Autokorelasi-Durbin Watson, nilai 1.68-2,32 dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Dan hasil dalam penelitian ini yaitu 1,672 sehingga dinyatakan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.6


**4.2.4 Uji Heteroskedastisitas**

Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil dalam penelitian ini dengan Uji Heteroskedastisitas-Uji Glesjerdinyatakan tidak terjadiheteroskedastisitas.

Tabel 4.7

**Coefficients<sup>a</sup>**

Mdel		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.330	4.358		.993	.325
	X1	-.29	.113	-.257	-1.944	.057
	X2	.141	.083	.223	1.688	.097

a. Dependent Variable: AR

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian pada tabel di atas menyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi > 0.05

**4.3 Pengujian Hipotesis**

**4.3.1 Uji F**

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variable independen gaya kepemimpinan (X<sub>1</sub>) dan locus of control (X<sub>2</sub>) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja internal auditor (Y).

Pada tabel 4.8 disajikan hasil uji bersama-sama dan uji kecocokan model.

**Tabel 4.8**


Pengujian hipotesis pada uji F untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan menggunakan kriteria yaitu apabila signifikan < 0.05 maka H<sub>0</sub> ditolak, H<sub>a</sub> diterima dan apabila signifikan > 0.05 maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak. Berdasarkan nilai statistik pada tabel hasil analisis regresi linier berganda, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi = 0.000 < α = 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>a</sub> diterima, variabel bebas X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

**4.3.2 Uji t**

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Tabel 4.9 adalah tabel hasil analisis regresi linier berganda.

**Tabel 4.9**


Pengujian hipotesis pada uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (parsial) dengan menggunakan kriteria yaitu apabila signifikan < 0.05 maka H<sub>0</sub> ditolak, H<sub>a</sub> diterima dan apabila signifikan > 0.05 maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak. Berdasarkan nilai statistik pada tabel hasil analisis regresi linier berganda, dapat dilihat bahwa variabel X<sub>1</sub> memiliki nilai signifikansi = 0.129 > α = 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak, maka variabel bebas X<sub>1</sub> secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Dan berdasarkan nilai statistik pada tabel hasil analisis regresi linier berganda, dapat dilihat bahwa variabel X<sub>2</sub> memiliki nilai signifikansi = 0.000 < α = 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima variabel bebas X<sub>2</sub>, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 1.524 + 0.217 X_1 + 0.696 X_2$$

**4.4 Pengujian Pengaruh X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> terhadap Y**

Koefisien Korelasi & Determinasi

**Tabel 4.10**


Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0.494 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel bebas X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> terhadap perubahan variabel terikat Y adalah sebesar 49.4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Koefisien korelasi (R) sebesar 0.703 menunjukkan bahwa hubungan variabel bebas X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> terhadap variabel terikat Y adalah kuat. Berdasarkan nilai statistik pada tabel hasil analisis regresi linier berganda, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi = 0.000 < α = 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas X<sub>1</sub>, dan X<sub>2</sub> secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

**4.5 Pengujian Pengaruh X<sub>1</sub> terhadap Y**

Berdasarkan nilai statistik pada tabel hasil analisis regresi linier berganda, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi = 0.129 > α = 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial (variabel X<sub>1</sub>) gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja internal auditor (variabel Y).

**4.6 Pengujian Pengaruh X<sub>2</sub> terhadap Y**

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk membuktikan secara empiris apakah *locus of control* (X<sub>2</sub>) mempunyai pengaruh terhadap kinerja (Y). Berdasarkan nilai statistik pada tabel hasil analisis regresi linier berganda, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi = 0.000 < α = 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial (variabel X<sub>2</sub>) *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap kinerja internal auditor (variabel Y).

## 4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.7.1 Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan *Locus Of Control* terhadap Kinerja Internal Auditor.

Berdasarkan nilai statistik pada tabel hasil analisis regresi linier berganda, dapat dilihat nilai signifikansi  $= 0.000 < \alpha = 0.05$ . Maka dapat disimpulkan gaya kepemimpinan ( $X_1$ ) dan *locus of control* ( $X_2$ ) sebagai variabel bebas, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja ( $Y$ ) sebagai variabel terikat. Hasil studi ini sesuai dengan hasil studi Sarita (2009) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap kinerja internal auditor.

### 4.7.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Internal Auditor

Hasil dalam penelitian ini variabel gaya kepemimpinan ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikansi  $= 0.129 > \alpha = 0.05$ . Maka disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan ( $X_1$ ) secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja ( $Y$ ). Hasil studi ini tidak dapat membuktikan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja internal auditor. Hasil studi ini sesuai dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Sarita (2009) bahwa variabel gaya kepemimpinan situasional ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikansi  $= 0.859 > \alpha = 0.05$ . Maka disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan situasional ( $X_1$ ) secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja ( $Y$ ).

Efektivitas pencapaian tujuan perusahaan bukan saja ditentukan oleh seorang pemimpin akan tetapi justru merupakan hasil bersama antara pimpinan dan orang yang dipimpinnya. Pemimpin tidak akan dapat berbuat banyak tanpa partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Untuk itu dibutuhkan karyawan yang mempunyai sifat dan sikap membanggandan aktif berdaya tanggap tinggi, inisiatif, dan memiliki kemampuan dan kemauan serta kepekaan beradaptasi.

### 4.7.3 Pengaruh *Locus of Control* terhadap Kinerja

Variabel *locus of control* ( $X_2$ ) nilai signifikansi  $= 0.000 < \alpha = 0.05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa *locus of control* secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja ( $Y$ ). Hasil studi ini membuktikan bahwa *locus of control* berpengaruh terhadap kinerja internal auditor. Hasil studi ini berbeda dengan hasil studi sebelumnya oleh Iswati (2003) bahwa *locus of control* tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Seorang internal auditor cenderung memiliki *internal locus of control* sehingga dia yakin akan kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka akan menimbulkan kepuasan kerja dan diharapkan akan meningkatkan kinerja internal auditor.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil studi menunjukkan tidak terdapat pengaruh gaya kepemimpinan secara parsial terhadap kinerja internal auditor, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi  $= 0.129$  lebih besar dari *level of significant*  $= 0.05$  (5%). Dalam hal ini persepsi responden menunjukkan gaya kepemimpinan seorang pimpinan tidak mempengaruhi kinerja internal auditor.
2. Dan hasil studi secara parsial menunjukkan terdapat pengaruh *locus of control* terhadap kinerja internal auditor, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi  $= 0.000$  lebih kecil dari *level of significant*  $= 0.05$  (5%). Artinya bahwa internal auditor yang memiliki *Locus of Control* (dia yakin akan kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan) menunjukkan kinerja lebih tinggi dari internal auditor yang tidak memiliki *Locus of Control*.
3. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan *locus of control* memiliki pengaruh terhadap kinerja internal auditor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi  $= 0.000$  lebih kecil dari *level significant*  $= 0.05$ . Hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti apapun tidak dapat mempengaruhi kinerja seorang internal auditor yang memang memiliki *locus of control intern* yaitu seorang auditor yang mempunyai sikap dan cara pandang/persepsi yang meyakini bahwa mereka dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi kepadanya sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor tersebut. Namun dalam hasil penelitian ini, sebagian responden memiliki

persepsi bahwa jika memiliki seorang pemimpin bijaksana yang bisa memotivasi bahkan menjadi panutan bagi bawahannya yaitu para internal auditor maka akan memberikan pengaruh positif dan dapat meningkatkan kinerja para internal auditor.

## 5.2 Saran

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini, dan bisa diperbaiki oleh peneliti yang akan datang, yaitu:

1. Penelitian berikutnya harus mempertimbangkan karakteristik atau variabel lain yang mempengaruhi kinerja internal auditor dan profesi lainnya selain auditor.
2. Bagi para pemimpin tim audit di bidang perbankan diharapkan memiliki gaya kepemimpinan yang bijaksana, menjunjung tinggi independensi, menjadi contoh dan panutan bagi para auditor junior yang dipimpinya, dan dapat memotivasi bawahannya agar dapat mencapai tujuan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, Dian. 2005. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, dan Prestasi Kerja serta *Turnover Intentions* di Jawa dan Bali. *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya*
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. 2006. Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif. Surabaya : Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
- Buku Pedoman Tata Cara Penulisan Praproposal, Proposal Penelitian, Skripsi, Pembimbingan dan Pengujian Skripsi. 2003. Surabaya : Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
- Citra, Kurnia Wanodya. 2006. Pengaruh Faktor Motivasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada Sentral Pengolahan Pos Surabaya. *Skripsi Universitas Airlangga Surabaya*
- Engko, Cecilia dan Gudono. 2007. Pengaruh Kompleksitas Tugas dan *Locus of Control* Terhadap Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Auditor. *Simposium Nasional Akuntansi 10*. Makassar. (AMKP-08)
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, and James H. Donnely. Jr. 2003. *Organisasi, Perilaku, Struktur, dan Proses*. Edisi Kelima. Terjemahan. Jakarta : Erlangga. Jilid
- Halim, A. (2004), "*Auditing dan Sistem Informasi*", Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta
- Hasibuan, M. 2003. Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara
- Hyatt, T.A. and Prawitt, D.F. (2001), "Does congruence between audit structure and auditors locus-of-control affect job performance?", *The Accounting Review*, Vol. 76 No. 2, pp.263-74.
- Iswati, Sri. 2003. Pengaruh Penganggaran Partisipatif, *Locus of Control*, Imbalan, Persepsi tentang Imbalan terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Ketua Jurusan pada Perguruan Tinggi di Jawa Timur. *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya*
- Kartika, I. and Wijayanti P. (2007), "*Locus of Control Sebagai Antecedent hubungan Kinerja dan Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit*". *SNA X. Makassar*
- Kreitner dan Kinicki. 2005. Perilaku Organisasi, buku 1 Jakarta : Salemba Empat
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi 10. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Made Sinta. 2007. Pengaruh Faktor-Faktor Kepuasan Kerja terhadap Prestasi Kerja Perawat Bagian Bedah pada Rumah Sakit Surabaya Internasional. *Skripsi Universitas Airlangga Surabaya*
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2005), "*Evaluasi Kinerja SDM*". Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Martoyo, S. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.

- Maryanti, Puji. 2005, "*Analisis Penerimaan Auditor Atas Dysfunctional Audit Behavior: Pendekatan Karakteristik Personal Auditor*". Tesis Program Pasca Sarjana UNDIP (tidak dipublikasikan)
- Menezis, Alvaro Amaral (2008), "*Analisis Dampak Locus Of Control Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Internal Auditor*" *Tesis Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang*
- Patten, M. Dennis. (2005), "*An Analysis of The Impact of Locus of Control on Internal Auditor Job Performance and Satisfaction*", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 20 No. 9, pp. 1016-1029.
- Prasetyo, P. Puji, 2002, "*Pengaruh Locus Of Control Terhadap Hubungan Antara Ketidakpastian Lingkungan Dengan Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen*", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.5, No.1, Januari :119-136
- Prayitno Duwi, 2008, *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Robbins, Stephen P. 2007. *Perilaku Organisasi*. Prentice Hall; New Jersey.
- Robbins, Stephen P dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi : Organizational Behaviour*. Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat. Buku 2
- Stephen P dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi : Organizational Behaviour*. Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat. Buku 1
- Sarita Jena 2009. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional, Motivasi kerja, *locus of control* terhadap kepuasan dan prestasi kerja auditor. *Skripsi Universitas Airlangga Surabaya*
- Sawyer, B. Lawrence. (2003) "*Internal Auditing*", Edisi Lima. Penerbit Salemba Empat.
- Setiawan, Ivan Aries dan Imam Ghozali. 2006. *Akuntansi Keperilakuan : Konsep dan Kajian Empiris Perilaku Akuntan*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Subiyanto, Ibnu. 2000. *Metodologi Penelitian : Manajemen dan Akuntansi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Suartana, I Wayan. (2000), "*Anteseden dan Konsekuensinya Job Insecurity dan Intensi Keluar pada Internal Audit*". Tesis Program Pasca Sarjana UGM (tidak dipublikasikan).
- Sugiarto. (2002). *Pengantar Akuntansi*. Pusat Penerbitan Universitas terbuka, Jakarta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sumiati. 2000. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan Bagian Produksi pada PT. Tirta Widya Mukti di Gresik. *Skripsi Universitas Airlangga Surabaya*
- Taurisia, Tita. 2004. Pengaruh Motivasi Kerja dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Kantor Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur di Surabaya. *Skripsi Universitas Airlangga Surabaya*
- Thoha, Miftah. 2007. *Kepemimpinan dalam Manajemen: Suatu Pendekatan Perilaku*. edisi 1. Jakarta : Fisipol-Universitas Gadjah mada
- Wijaya, Eny. 2001. Hubungan Gaya Kepemimpinan Situasional dengan Prestasi Kerja Karyawan CV. DELTA PRIMA TRAVEL. *Skripsi Universitas Airlangga Surabaya*

## Analisis Laporan Keuangan PT. Smartfren Telecom Tbk Pra dan Pasca Akuisisi

Stevani Fransy Gillis Kaparang  
Agus Tony Poputra

### ABSTRACT

*The rapid development of telecommunications industry has changed people's views of the services communications. This is challenge for telecommunication providers so they must perform a variety ways that makes their company still exist in this industry. One way to do is by restructuring through acquisitions.*

*This research aims is to analyzing the financial performance of PT. Smartfren Telecom Tbk pre and post acquisition. Data used in this research is secondary data that the company's financial statement in 2010-2011. Method of analysis used in is financial ratio analysis such as liquidity ratio, leverage ratio, asset management ratio, and profitability ratio.*

*The research find that financial performance of PT. Smartfren Telecom Tbk shows the positive impact that can be seen from: (i) level of liquidity and profitability has improved to the post acquisition, (ii) level of leverage has improved because until 2011 experienced a significant decline, (iii) level of assets management is not good because it has decreased in 2011. Thus it can be concluded that the decision to carry out the acquisition demonstrate a positive impact for the company.*

*Keywords: pre and post acquisiton, financial performance analysis, liquidity ratio, leverage ratio, assets management ratio, profitability ratio.*

### 1. PENDAHULUAN

Revolusi komunikasi yang signifikan, variatif dan berkelanjutan membuat perusahaan (entitas) penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan berbagai cara agar tetap eksis dalam industri jasa telekomunikasi. Salah satu pilihan yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan penyelenggara jasa komunikasi agar tetap eksis adalah melaksanakan restrukturisasi dengan cara penggabungan usaha. Restrukturisasi dengan cara penggabungan usaha dapat dilakukan pada suatu entitas dengan melaksanakan akuisisi. Akuisisi dilakukan oleh entitas yang mengakuisisi (*bidding firm*) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan umum pelaksanaan akuisisi adalah untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan hasil penggabungan. Akuisisi juga diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan entitas, meningkatkan dana, mensinergikan proses operasi, pemanfaatan sumber daya manusia, serta meningkatkan likuiditas pemilik.

PT. Smartfren Telecom Tbk adalah salah satu perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada bulan Januari 2011 Perseroan melakukan suatu transformasi yaitu PT Mobile-8 Telecom Tbk (FREN) mengakuisisi 57% saham PT. Smart Telecom senilai Rp 3 Triliun. Pelaksanaan akuisisi ini berupaya untuk memperkuat posisi finansialnya dan merevitalisasi produk penawaran dan citra Perseroan untuk meningkatkan posisi di pasar.

Peningkatan kinerja keuangan PT Smartfren Telecom Tbk yang telah melakukan akuisisi tercermin dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan setiap periode tahun yang bersangkutan. Dengan menganalisis laporan keuangan PT Smartfren Telecom Tbk maka dapat diketahui dampak akuisisi yang telah dilakukan perusahaan terhadap kinerja keuangannya. Jika terjadi peningkatan kinerja dalam hal ini kinerja keuangan maka keputusan management untuk melaksanakan penggabungan usaha dengan cara akuisisi adalah keputusan terbaik bagi kelangsungan hidup perusahaan.



Berdasar hal tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam laporan akhir ini adalah bagaimana kinerja pra dan pasca akuisisi pada PT. Smartfren Telecom Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan PT. Smartfren Telecom Tbk pra dan pasca akuisisi. Dengan demikian maka manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) sebagai pertimbangan bagi perusahaan untuk menilai keefektifan pelaksanaan penggabungan usaha dan sebagai pertimbangan bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang; (2) sebagai bahan referensi bagi pihak lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis tentang kinerja keuangan.

### 1.1 Metode Penelitian

1. Unit analisis obyek penelitian ini adalah individual yaitu PT. Smartfren Telecom Tbk.
2. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan analisa-analisa yang dilakukan terhadap data-data keuangan perusahaan.
3. Penulis melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk memperoleh data-data yang relevan sebagai bahan penulisan laporan akhir seperti buku-buku, internet, dan sumber-sumber lainnya.
4. Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah secara tidak langsung, dimana penulis mengumpulkan data-data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan.

### 1.2 Metode Analisis

Analisis laporan keuangan pada PT. Smartfren Telecom Tbk menggunakan empat rasio keuangan per tahun yakni pada tahun 2010 dan tahun 2011. Rasio-rasio keuangan yang digunakan adalah: (i) Rasio Likuiditas yang terdiri dari Rasio Lancar dan Rasio Cepat, (ii) Rasio Manajemen Aset yang terdiri dari Perputaran Total Aset dan Perputaran Modal Kerja, (iii) Rasio Manajemen Utang yang terdiri dari Rasio Utang dan *Long-term Debt to Equity Ratio*, (iv) Rasio Profitabilitas yang terdiri dari *Return on Total Assets (ROA)* dan *Return on Total Equity (ROE)*.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Analisis Laporan Keuangan

Mengacu pada pendapat Palepu, Healy dan Peek (2010) analisis laporan keuangan dikemukakan sebagai suatu aktivitas yang berguna. Keberagaman faktor-faktor kelembagaan membuat manajer tidak mungkin menyajikan informasi mengenai strategi perusahaan secara lengkap. Sehingga penganalisa akan menciptakan informasi mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa depan yang berasal dari kegiatan menganalisa laporan keuangan. (Palepu, dkk., 2010:4).

Salah satu teknik analisa yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah analisa rasio. Dengan analisa rasio penganalisa dapat mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

### 2.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

1. Rasio Likuiditas (Modal Kerja) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Irham, 2012). Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau pada saat ditagih. Rasio likuiditas yang digunakan adalah sebagai berikut.
  - a. Rasio Lancar (*Current Ratio*), adalah perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar dimana rasio ini menunjukkan bahwa nilai kekayaan lancar (yang segera dapat diuangkan) ada sekian kalinya hutang jangka pendek.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

- b. Rasio Cepat (*Acid test atau Quick Ratio*), merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisasi menjadi uang kas.

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

2. Rasio Manajemen Aset, disebut juga rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan (Irham, 2012). Rasio manajemen aset ini terdiri atas
- a. Perputaran Total Aset (*Total Assets Turnover*), adalah rasio yang mengukur perputaran dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan.

$$\text{Perputaran Total Aset} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

- b. Perputaran Modal Kerja (*Working Capital Turnover*), menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan. Dengan demikian rasio ini dapat menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja.

$$\text{Perputaran Modal Kerja} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}}$$

3. Rasio Manajemen Utang (*Leverage*), dihitung untuk mengetahui seberapa jauh sebuah perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang. Rasio manajemen utang yang disebut juga rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola utangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali utangnya (Irham, 2012). Beberapa rasio manajemen utang adalah sebagai berikut.
- a. Rasio Utang (*Debt Ratio*), adalah rasio yang mengukur persentase dari dana yang diberikan oleh para kreditor. Rasio utang yang tinggi berarti perusahaan menggunakan utang dengan jumlah yang besar untuk mendanai perusahaan.

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

- b. Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Ekuitas (*Long-term debt to equity ratio*), mengukur sampai sejauh mana komponen hutang jangka panjang dalam struktur modal perusahaan.

$$\text{Longterm debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

4. Rasio Profitabilitas, bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan (Irham, 2012). Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan karena investor mengharapkan deviden dan harga pasar dari sahamnya.

- a. Tingkat Pengembalian Total Aset (*Return on Total Assets / ROA*), mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan.

$$\text{Tingkat Pengembalian Total Aktiva} = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

- b. Tingkat Pengembalian Ekuitas Saham Biasa (*Return on Common Equity / ROE*), mengukur tingkat pengembalian atas investasi dari pemegang saham biasa.

$$\text{Tingkat Pengembalian Ekuitas Saham Biasa} = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih}}{\text{Ekuitas Biasa}}$$

### 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 3.1 Sejarah Dan Informasi Umum Perusahaan

PT Smartfren Telecom Tbk didirikan pada bulan Desember 2002. Pada tahun 2003, Perseroan mengakuisisi dua operator telepon selular berlisensi, yaitu Komselindo dan Metrosel, dan mulai beroperasi sebagai penyelenggara jasa selular dengan menggunakan basis teknologi CDMA (*Code Division Multiple Access*). Layanan yang pertama kali diluncurkan adalah Layanan Selular Prabayar dengan brand “Fren” yang dioperasikan pada bulan Desember 2003 dengan berbasis jaringan CDMA 2000-1X.

Pada awal tahun 2011, Perseroan melakukan aksi korporasi yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh untuk mengakuisisi PT SmartTelecom (Smartel). Aksi korporasi ini bertujuan untuk melakukan sinergi dengan Smartel dalam berbagai hal, di antaranya pengembangan infrastruktur jaringan, peningkatan efisiensi operasional, perluasan jaringan pemasaran dan penggabungan merek dagang menjadi “smartfren”. Perseroan kemudian melakukan perubahan nama dari sebelumnya PT Mobile-8 TelecomTbk menjadi PT Smartfren Telecom Tbk. Pada akhir 2011, Perseroan kembali meluncurkan gebrakan baru dengan mengusung teknologi CDMA EVDO Rev. B yang menghadirkan layanan internet super cepat dengan kecepatan *download* mencapai 14,7 Mbps. Hal ini semakin memperkuat posisi Perseroan di mata pelanggan sebagai operator nomor satu di layanan data. Pada akhir 2011, jangkauan layanan Perseroan telah mencakup seluruh pulau Jawa–Bali, sebagian wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, Sulawesi, serta Kalimantan. Perseroan memiliki kurang lebih 7,6 juta pelanggan dengan sekitar 16% pelanggan data, dengan di dukung oleh lebih dari 140 galeri yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

#### 3.2 Visi Dan Misi Perusahaan

Visi PT Smartfren Telecom Tbk adalah *To Become A Leading Operator That Provides Sustainable Return To All Stakeholder*. Misi PT Smartfren Telecom Tbk adalah *Provide Best-Value-For-Money Data And Voice Service Propositions To Our Subscribers While Maintaining Technological Leadership And Excellent Customer Experience*.

**Ringkasan Keuangan**

**Tabel 3.1**  
**Ikhtisar Keuangan Neraca Konsolidasi PT. Smartfren Telecom Tbk**

PT. SMARTFREN TELECOM Tbk NERACA KONSOLIDASI 31 Desember 2010– 2011		
	2010	2011
Total aset lancar	446.530.789.820	794.529.242.937
Total aset tidak lancar	4.037.079.091.723	11.502.049.407.801
<b>TOTAL ASET</b>	<b>4.483.609.881.543</b>	<b>12.296.578.650.738</b>
Total kewajiban jangka pendek	2.075.185.359.585	3.099.633.529.663
Total kewajiban jangka panjang	2.527.907.395.435	5.927.973.226.410
<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	<b>4.603.092.755.020</b>	<b>9.027.606.756.073</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>(119.482.873.477)</b>	<b>3.268.971.894.665</b>
Total Kewajiban dan Ekuitas	4.483.609.881.543	12.296.578.650.738

*Sumber: data olahan*

**Tabel 3.2**  
**Ikhtisar Keuangan Laporan Laba Rugi PT. Smartfren Telecom Tbk**

PT. SMARTFREN TELECOM Tbk LAPORAN LABA RUGI 31 Desember 2010 - 2011		
	2010	2011
Jumlah pendapatan usaha	376.511.377.567	954.331.088.460
Jumlah beban usaha	1.244.775.882.804	3.175.959.127.642
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>(868.264.505.237)</b>	<b>(2.221.628.039.182)</b>
(Beban) Penghasilan lain-lain bersih	( 495.499.439.642)	( 427.866.978.343)
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>(1.363.763.944.879)</b>	<b>(2.649.495.017.525)</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>(1.401.813.486.084)</b>	<b>(2.400.247.590.614)</b>
Laba bersih per saham dasar	( 38,89)	( 15,89)

*Sumber: data olahan*

**4. PEMBAHASAN PENELITIAN**

Ringkasan perhitungan rasio PT Smartfren Telecom Tbk tahun 2010 dan 2011 adalah:

<b>Keterangan</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>1. RASIO LIKUIDITAS</b>		
Rasio Lancar	21,52%	25,63%
Rasio Cepat	11,11%	19,61%
<b>2. RASIO MANAJEMEN ASET</b>		
Perputaran total aset	0,839 kali	0,07 kali
Perputaran modal kerja	-0,231 kali	-0,414 kali
<b>3. RASIO MANAJEMEN UTANG</b>		
Rasio hutang	102,66%	73,42%

Rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas	80%	85%
<b>4. RASIO PROFITABILITAS</b>		
ROA	-31,27%	-19,52%
ROE	-44,42%	-34,57%

### 1. Analisis Rasio Likuiditas

#### a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Pada tahun 2010, rasio lancar PT Smartfren Telecom Tbk adalah sebesar 21,52% atau 0,21 kali. Hal ini berarti setiap Rp 1,- hutang lancar dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp 0,21. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 4,11%, yang berarti rasio Lancar perusahaan meningkat menjadi sebesar 25,63%. Hal ini menunjukkan setiap Rp 1,- hutang lancar dijamin dengan Rp 0,25 aset lancar. Dapat disimpulkan bahwa PT Smartfren Telecom Tbk berada pada keadaan illikuid yakni tidak mampu memenuhi liabilitas lancar tepat pada waktunya karena perusahaan memiliki liabilitas lancar yang lebih besar dari aset lancarnya.

#### b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat PT Smartfren Telecom Tbk pada tahun 2010 adalah sebesar 11,11% atau 0,11 kali, yang berarti setiap Rp 1,- hutang lancar dijamin oleh Rp 0,11 aset lancar. Pada tahun 2011 rasio cepat mengalami peningkatan 8,5%. Sehingga rasio cepat PT Smartfren Telecom Tbk menjadi 19,61%, yang berarti setiap Rp 1,- hutang lancar dijamin oleh Rp 0,20 aset lancar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT Smartfren Telecom Tbk menggunakan aset lancar diluar persediaan untuk memenuhi kurang lebih seperempat dari kewajiban lancarnya.

### 2. Analisis Rasio Manajemen Aset

#### a. Perputaran Total Aset (*Total Assets Turnover*)

Perputaran total aset PT Smartfren Telecom Tbk pada tahun 2010 adalah 0,839 kali. Pada tahun 2011 mengalami penurunan 0,769 kali sehingga perputaran total aset tahun 2011 adalah sebesar 0,07 kali. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan total aset yang dimiliki perusahaan cukup signifikan, yang tidak sesuai dengan besaran kenaikan total pendapatan.

#### b. Perputaran Modal Kerja (*Working Capital Turnover*)

Perputaran modal kerja PT Smartfren Telecom Tbk pada tahun 2010 adalah -0,231 kali. Pada tahun 2011 mengalami penurunan 0,183 kali sehingga perputaran modal kerja tahun 2011 adalah sebesar -0,414 kali. Penurunan ini disebabkan karena terjadi peningkatan yang cukup besar yakni Rp. 1,024,448,170,078,- pada liabilitas lancar yang dimiliki perusahaan. Selain itu aset lancar perusahaan juga mengalami peningkatan yakni sebesar Rp. 347,998,453,117,-. Peningkatan pada liabilitas lancar dan aset lancar yang total kenaikannya keduanya sebesar Rp. 1.372.446.623.195,- ini tidak sejalan dengan peningkatan pada total pendapatan PT Smartfren Telecom Tbk hanya sebesar Rp.577,819,710,893,-. Hal inilah yang mengakibatkan perputaran modal kerja PT Smartfren Telecom Tbk adalah negatif.

### 3. Analisis Rasio Manajemen Utang (*Leverage*)

#### a. Rasio Utang (*Debt Ratio*)

Pada tahun 2010 rasio hutang pada PT Smartfren Telecom Tbk mencapai 102,66%. Hal ini berarti semua pendanaan PT Smartfren Telecom Tbk yaitu mencapai 102,66% berasal dari kreditor. Pada tahun 2011 rasio hutang pada PT Smartfren Telecom Tbk mengalami penurunan yang cukup besar yakni mencapai 29,24% dibandingkan tahun 2010, sehingga mencapai rasio hutang sebesar 73,42%. Namun penurunan capaian rasio hutang pada tahun 2011 ini masih menunjukkan bahwa kreditor menyediakan dana yang lebih besar untuk pendanaan dibandingkan dana dari PT Smartfren Telecom Tbk sendiri. Hal ini menunjukkan

bahwa PT Smartfren Telecom Tbk hanya menggunakan sedikit dananya untuk kegiatan pendanaan karena sebagian besar pendanaan disediakan oleh kreditor.

- b. Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Ekuitas (*Long-term Debt to Equity Ratio*)  
Pada tahun 2010 rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas pada PT Smartfren Telecom Tbk mencapai 80%. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan sehingga rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas mencapai 85%. Peningkatan rasio ini pada PT Smartfren Telecom Tbk disebabkan oleh total kewajiban jangka panjang dan ekuitas perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan nilainya.

#### 4. Analisis Rasio Profitabilitas

- a. Tingkat Pengembalian Total Aset (*Return on Total Assets*)  
Pada tahun 2010 tingkat pengembalian total aset PT Smartfren Telecom Tbk mencapai 31,27%. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan 11,75% hingga tingkat pengembalian total aset PT Smartfren Telecom Tbk mencapai 19,52%. Peningkatan ini disebabkan karena terjadi peningkatan nilai pada total aset perusahaan walaupun perusahaan tetap mengalami kerugian. Pada tahun 2011 tingkat pengembalian total aset PT Smartfren Telecom Tbk mengalami peningkatan yang disebabkan karena perusahaan tetap menderita kerugian bahkan lebih merugi, yang untungnya diikuti dengan peningkatan pada total asetnya.
- b. Tingkat Pengembalian Ekuitas Saham Biasa (*Return on Common Equity*)  
Pada tahun 2010 tingkat pengembalian ekuitas saham biasa PT Smartfren Telecom Tbk adalah sebesar -44,42. Pada tahun 2011 tingkat pengembalian ekuitas saham biasa PT Smartfren Telecom Tbk meningkat sehingga mencapai 34,57%. Peningkatan tingkat pengembalian ekuitas saham biasa tahun 2010 hingga 2011 disebabkan karena adanya perubahan yakni peningkatan pada total ekuitas yang dimiliki PT Smartfren Telecom Tbk. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ekuitas atau modal pemegang saham yang diikuti juga dengan peningkatan pada laba (rugi) bersih.

#### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. PT Smartfren Telecom Tbk memiliki kinerja keuangan yang cukup baik karena mengalami peningkatan pasca akuisisi yang dilakukan pada awal tahun 2011 walaupun PT Smartfren Telecom Tbk mengalami kerugian. Hal ini tercermin pada analisis keuangan sebagai berikut.
  - a. PT Smartfren Telecom Tbk memiliki tingkat likuiditas dan profitabilitas yang semakin membaik hingga tahun 2011. Peningkatan pada rasio profitabilitas mencerminkan bahwa PT Smartfren Telecom Tbk berusaha untuk memperbaiki keadaan walaupun Perusahaan masih dalam kondisi merugi. PT Smartfren Telecom Tbk melakukan perbaikan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya baik yang berasal dari pendapatan usaha, total aset, dan ekuitas. Sedangkan peningkatan pada rasio likuiditas mencerminkan bahwa Perusahaan berusaha untuk memperbaiki tingkat likuiditasnya walaupun hingga tahun 2011 Perusahaan masih berada dalam kondisi illikuid.
  - b. PT Smartfren Telecom Tbk memiliki tingkat *leverage* yang kurang baik. Namun jika diperhatikan, rasio utang Perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan pada rasio utang ini menunjukkan bahwa perusahaan mengurangi pendanaan dalam bentuk utang walaupun jumlahnya masih cukup besar. Jumlah yang masih cukup besar ini terlihat pada *Long-Term Debt To Equity Ratio* yang mengalami peningkatan sebagai akibat dari meningkatnya total liabilitas tidak lancar Perusahaan.
  - c. PT Smartfren Telecom Tbk memiliki tingkat manajemen aset yang kurang baik karena mengalami penurunan hingga tahun 2011. Hal ini tercermin pada rasio manajemen aset Perusahaan yang terus mengalami penurunan hingga tahun 2011. Penurunan ini menunjukkan bahwa Perusahaan tidak efektif dalam pengelolaan aset yang dimiliki.

2. Keputusan PT Smartfren Telecom Tbk (dahulu PT Mobile-8 Telecom Tbk) mengakuisisi 57% saham PT. Smart Telecom pada awal tahun 2011 menunjukkan dampak yang positif bagi kinerja keuangan perusahaan. Hal ini terlihat dalam posisi keuangan Perusahaan yang semakin menunjukkan peningkatan untuk perbaikan yang terlihat dalam hal-hal berikut.
  - a. Peningkatan dalam total pendapatan yang diperoleh. Walaupun pendapatan lebih sedikit daripada total beban yang mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian, namun tingkat profitabilitas yang mampu dimiliki Perusahaan berdasarkan rasio profitabilitas menunjukkan suatu tanda perbaikan yakni mengalami peningkatan.
  - b. Meningkatnya total aset yang dimiliki Perusahaan sebagai akibat dari proses akuisisi yang telah dilakukan. Total aset lebih khusus aset lancar yang mengalami peningkatan ini mengakibatkan tingkat likuiditas Perusahaan juga mengalami peningkatan.
  - c. Bertambahnya total aset ini juga diikuti dengan bertambahnya total liabilitas yang dimiliki perusahaan. Namun berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rasio manajemen utang mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan Perusahaan dengan menggunakan utang mengalami penurunan.

Saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan jumlah aset lancar yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian akan meningkatkan likuiditas perusahaan yaitu kemampuan dalam memenuhi kewajiban lancarnya.
2. Memperhatikan komposisi rasio antara hutang dan ekuitas dengan cermat agar perusahaan dapat mencapai struktur modal yang optimal. Pencapaian struktur modal yang optimal dapat dilakukan dengan pengurangan terhadap total hutang baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek agar memperbaiki posisi hutang yang dimiliki perusahaan.
3. Menerapkan *cost discipline* yaitu efisiensi biaya secara terus-menerus. Dengan perusahaan melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya yang digunakan maka total beban perusahaan dapat dikendalikan dan akibatnya dapat meningkatkan laba bersih yang diperoleh perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Gibson, C. H. (2009). *Financial Reporting and Analysis: Using Financial Accounting Information*. 11<sup>st</sup> editon. South Western: Cengage Learning.
- Hery. (2013). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, D. E., Kimmel, P. D., & Weygandt, J. J. (2010). *Accounting Principles*. 9<sup>th</sup> edition. Asia: John Wiley & Sons Inc.
- Peek, E., Healy. P. M., & Palepu, K. G. (2010). *Business Analysis and Valuation*. 2<sup>nd</sup> edition. China: South Western Cengage Learning.
- Setyani, A. Y., & Meriewaty, D. (2005). *Analisis Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Kinerja Pada Perusahaan di Industri Food and Beverages Yang Terdaftar di BEJ*. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 8, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Swain, M. R., Stice, J. D., Stice, E. K., Albercht, W. S. (2008). *Accounting: Concepts and Applications*. 10<sup>th</sup> edition. USA: Thomson South Western.
- PT Smartfren Telecom Tbk. *Laporan Keuangan Tahunan 2010-2011*. <http://www.smartfren.com/>

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PEMILIHAN KARIR  
SEBAGAI AKUNTAN PADA MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK)  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**Oleh :**  
**Elisa Levina Rorong**  
**Jullie J. Sondakh**  
**Heince Wokas**

*ABSTRACT*

*This research aims to know the influence of financial respect, professional training, professional recognition, social values, working environment, job market considerations and personality partially or together against the accountant career selection by students of University of Sam Ratulangi PPAk*

*The object of this research is the accounting profession education student University of Sam Ratulangi active registered as a student with a total population of 80 people. The data collected is classified as primary data which is obtained by questionnaires distribution. Data Processing is conducted by using Multiple Regression Analysis.*

*The result of this research indicate that financial respect, profesional training, profesional recognition, social values, working environment, job market considerations and personality to career choice on Accounting either it is partially and simultaneously influence, but partially Accounting, while financial respect, professional training, social values, working environment and personality have the significantly influence on career choice of accounting. From the ANKOVA test there is a different factor influence accountant career selection by students who already work and not yet working*

*Keyword : financial respect, professional training, professional recognition, social values, working environment, job market considerations, personality and Accounting Career.*



## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wie Shi Wudjud (2010) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir menjadi akuntan oleh mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) Universitas Sumatera Utara. Dimana perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Wie Shi Wudjud (2010) adalah penelitian ini melakukan uji tambahan dengan membagi sampel penelitian menjadi mahasiswa yang sudah bekerja dan belum bekerja untuk melihat apakah terdapat perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa dalam pemilihan karier sebagai akuntan, dengan menggunakan variabel independen berupa penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas setelah mengembangkan instrumen kuesioner yang digunakan oleh Wie Shi Wudjud (2010).

Dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi persepsi pemilihan karir sebagai akuntan diantaranya penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, personalitas, nilai intrinsik pekerjaan, kesetaraan gender, jumlah tawaran lowongan kerja dan keamanan kerja. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemilihan karir sebagai akuntan tersebut, diketahui bahwa penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas merupakan variabel yang paling banyak di gunakan sehingga penulis tertarik untuk memilih ketujuh faktor tersebut karena dianggap telah mewakili faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemilihan karir sebagai akuntan. dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pemilihan Karir Sebagai Akuntan pada Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Universitas Sam Ratulangi".

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karir menjadi akuntan oleh mahasiswa PPAk Universitas Sam Ratulangi? Apakah terdapat perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemilihan karir sebagai mahasiswa pada mahasiswa yang sudah bekerja dan yang belum bekerja pada mahasiswa PPAk Universitas Sam Ratulangi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap persepsi pemilihan karir menjadi akuntan oleh mahasiswa PPAk Universitas Sam Ratulangi
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemilihan karir sebagai mahasiswa pada mahasiswa yang sudah bekerja dan yang belum bekerja pada mahasiswa PPAk Universitas Sam Ratulangi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademik, khususnya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Unsrat dan Pendidikan Profesi Akuntansi Unsrat dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran dalam rangka menambah mutu lulusan sebagai pekerja intelektual yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar dan membantu membuat kurikulum dalam sistem pendidikan akuntansi yang relevan dalam dunia kerja.

2. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam memahami persepsi mahasiswa akuntansi dalam minat sebagai akuntan.
3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga yang telah mempekerjakan tenaga akuntan sehingga mereka dapat mengerti apa yang diinginkan calon akuntan dalam memilih karir/profesi dan untuk lebih memotivasi mereka yang sudah bekerja di lembaganya.
4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji masalah yang sama di masa yang akan datang.

## **2 TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Jenis-Jenis Akuntan**

Profesi akuntan pada umumnya dapat dibedakan menjadi empat yaitu profesi akuntan publik akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik.

#### **1. Akuntan Publik**

Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan kantor akuntan publik adalah pemeriksaan laporan keuangan dan konsultasi dibidang keuangan. Jenis pekerjaan tersebut mencerminkan bahwa seorang akuntan akan selalu berhubungan dengan klien, yaitu perusahaan yang meminta jasa kantor akuntan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa jenis pekerjaan profesi akuntan publik adalah pekerjaan yang tergantung pada jasa yang diminta kliennya. Tanggung jawab utama auditor independen atau lebih umum disebut akuntan publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan (Jusup, 2001).

Peranan akuntan publik sangat penting dalam perkembangan dunia usaha karena akuntan publik satu-satunya profesi yang berhak untuk memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan yang disusun manajemen. Oleh karena itu hal ini akan menarik minat mahasiswa akuntansi untuk memilih profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik merupakan profesi yang independen dan dipercaya sebagai perantara yang menghubungkan kepentingan antara pihak manajemen dan luar perusahaan.

#### **2. Akuntan Perusahaan**

Akuntan perusahaan menjalani jenis pekerjaan yang berbeda tergantung pada tugas yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Meskipun jenis pekerjaan di dalam perusahaan bervariasi, namun tujuan utama perusahaan mempekerjakan akuntan adalah untuk mendapatkan informasi keuangan dalam perusahaannya. Sehingga akuntan perusahaan tugasnya utamanya adalah menyediakan informasi keuangan. Menurut Hansen dan Mowen dalam Setiyani (2005), akuntansi dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen berguna untuk menghasilkan informasi khusus bagi pengguna internal seperti manajer, dan karyawan yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam pembuatan perencanaan, pengendalian dan keputusan. Sedangkan akuntansi keuangan berguna untuk menghasilkan informasi bagi pihak internal maupun eksternal, seperti manajer, karyawan, investor, kreditur maupun pemerintah, yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan.

#### **3. Akuntan Pemerintah**

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada instansi pemerintah. Sarjana akuntansi yang berprofesi sebagai akuntan pemerintah mempunyai status pegawai negeri. Instansi pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah instansi-instansi seperti departemen keuangan, kantor pajak, BPKP dan BPK. Pada lembaga-lembaga tersebut akuntan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan keahlian yang telah diperoleh dari lembaga pendidikan akuntansi. Lembaga-lembaga pemerintah tersebut biasanya sudah diatur dengan undang-undang, sehingga tugas dan kewajiban akuntan pemerintah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Mahasiswa yang memilih profesi akuntan pemerintah mengharapkan gaji awal yang lebih tinggi dan memiliki jaminan hari tua yang lebih baik dibandingkan dengan profesi akuntansi lainnya (Haswell dan Holmes, Harowitz dan Riley) dalam Setiyani (2005). Menurut Rahayu dalam Setiyani (2005), mahasiswa akuntansi yang memilih profesi akuntan pemerintah mengharapkan pekerjaan yang lebih bersifat rutin sehingga tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, dan mempunyai keamanan kerja yang tinggi

#### 4. Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang pekerjaan utamanya mengajar pada perguruan tinggi atau disebut dosen. Dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tri dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pengajaran merupakan tugas utama seorang pendidik, pengajaran dilakukan dengan tatap muka dikelas. Proses pengajaran diharapkan menjadi sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada anak didiknya. Tugas penelitian juga merupakan tugas bagi seorang akuntan pendidik, sehingga disamping melakukan pekerjaan mengajar, seorang pendidik juga dituntut untuk mampu melakukan penelitian sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dalam praktek yang sesungguhnya. Selain dua tugas itu seorang akuntan pendidik juga harus mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar seorang pendidik tidak hanya berkomunikasi dengan bidang ilmunya sendiri, namun juga harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat luas.

### 2.2 Pengertian dan Persepsi Tentang Karir

Surya dalam Sunardi (2008) menegaskan bahwa karir erat kaitannya dengan pekerjaan, tetapi mempunyai makna yang lebih luas dari pada pekerjaan. Karir dapat dicapai melalui pekerjaan yang direncanakan dan dikembangkan secara optimal dan tepat, tetapi pekerjaan tidak selamanya dapat menunjang pencapaian karir. Dengan demikian pekerjaan merupakan tahapan penting dalam pengembangan karir. Sementara itu, perkembangan karir sendiri memerlukan proses panjang dan berlangsung sejak dini serta dipengaruhi oleh berbagai faktor kehidupan manusia. Tujuan karir adalah posisi di masa mendatang yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Jadi, keberhasilan karir tidak lagi diartikan sebagai penghargaan intitusional dengan meningkatnya kedudukan dalam suatu hirarki formal. Apalagi pada saat ini karir telah mengalami pergeseran menuju karir tanpa batas (*the boundaryless control*). Kunci keberhasilan karir pada masa yang akan datang lebih dicerminkan dari pengalaman hidup seseorang daripada posisi yang dimilikinya. Jadi disimpulkan bahwa karir adalah suatu rangkaian posisi, jabatan atau pekerjaan yang dipegang karyawan selama masa karirnya yang meliputi gerakan/mobilitas dalam organisasi. Menurut Rivai dalam Sembiring (2009), tahapan-tahapan karier dan kebutuhan individu dapat dibedakan atas empat tahapan yaitu :

#### 1. Fase Awal

Fase awal atau fase pembentukan menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan dalam tahun-tahun awal pekerjaan.

#### 2. Fase Lanjutan

Fase lanjutan dimana pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang, namun lebih menitikberatkan pada pencapaian, harga diri dan kebebasan

#### 3. Fase Mempertahankan

Pada fase mempertahankan, individu berusaha mempertahankan pencapaian keuntungan atau manfaat yang telah diraihinya sebagai hasil pekerjaan di masa lalu. Individu telah merasa terpuaskan, baik secara psikologis maupun finansial.

#### 4. Fase Pensiun

Pada fase pensiun, individu telah menyelesaikan satu karir dan akan berpindah ke karir yang lain serta individu memiliki kesempatan untuk mengekspresikan aktualisasi diri yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.

Persepsi adalah proses di mana kita mengorganisasi dan menafsirkan pola stimulus di dalam lingkungannya. Persepsi dapat dipandang sebagai proses mengetahui atau mengenali objek dan

kejadian objektif dengan bantuan indra. Persepsi karir adalah suatu proses kognitif dan afektif karyawan untuk melakukan pemilihan, pengaturan dan pemahaman serta penginterpretasian terhadap reaksi-reaksi inderawi mengenai gambaran pengembangan karir secara utuh dalam organisasi.

### 2.3 Teori Pengharapan

Teori dasar konsep pemilihan profesi dalam penelitian ini adalah teori motivasi khususnya *Expectancy Theory*. Chung & Megginson dalam Gomes (2003) menyatakan bahwa *Motivation is defined as goal directed behavior. It concerns the level of effort one exerts in pursuing a goal....it is closely related to employee satisfaction and job performance* (Motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan....motivasi berkaitan erat dengan kepuasan pekerja dan performa pekerjaan)

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan, dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian dalam Oetomo, 1998). Motivasi merupakan variabel yang mempengaruhi perilaku individu dalam perilaku kerjanya. Motivasi merupakan konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan individu untuk memulai dan mengarahkan perilakunya terhadap pekerjaan tertentu.

Salah satu teori motivasi yang paling terkenal adalah *Maslow's Need Hierarchy Theory*. Maslow dalam Gomes (2003) berpendapat bahwa kebutuhan manusia dapat disusun menurut hierarki, dimana kebutuhan paling atas akan menjadi motivator utama jika kebutuhan tingkat bawahnya sudah terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi :

1. kebutuhan fisik
2. kebutuhan keamanan yang diperlukan bagi berlanjutnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisik dan keamanan psikologis
3. hak memiliki dan kebutuhan akan cinta kasih
4. kebutuhan-kebutuhan harga diri
5. kebutuhan akan aktualisasi diri.

### 2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karier sebagai akuntan

Beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pemilihan profesi sebagai akuntan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Penghargaan Finansial/ Gaji

Saat ini penghargaan finansial/ gaji masih dipandang sebagai alat ukur untuk menilai pertimbangan jasa yang telah diberikan karyawan sebagai imbalan yang telah diperolehnya. Seseorang yang bekerja tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi saja, akan tetapi alasan kuat yang mendasar sampai sekarang mengapa seseorang bekerja hanya untuk alasan faktor ekonomi, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisiologi. Penghargaan finansial/gaji adalah sebuah penghargaan yang berwujud finansial. Penghargaan finansial/gaji dipertimbangkan dalam pemilihan profesi karena tujuan utama seseorang bekerja adalah memperoleh penghargaan finansial/ gaji. Menurut penelitian Stolle dalam Setiyani (2005) yang termasuk dalam penghargaan finansial/ gaji adalah penghargaan finansial/gaji awal, dana pensiun, dan potensi kenaikan penghargaan finansial/gaji. Wheeler dalam Setiyani (2005) menemukan bahwa orang-orang bisnis, psikologi, dan bidang pendidikan selain akuntansi beranggapan bahwa akuntansi menawarkan penghasilan yang lebih tinggi daripada pekerjaan dalam bidang pemasaran, manajemen umum, keuangan dan perbankan.

#### 2. Lingkungan Kerja

Wijayanti dalam Setyani (2005) menunjukkan bahwa lingkungan kerja dipertimbangkan dalam pemilihan profesi mahasiswa terutama pada sifat pekerjaan rutin dan pekerjaan cepat diselesaikan. Menurut hasil penelitian Stolle dalam Setiyani (2005) menunjukkan bahwa semua mahasiswa

menganggap profesi akuntan perusahaan akan menghadapi pekerjaan yang rutin dan dapat diselesaikan di belakang meja, sedangkan profesi akuntan publik akan menghadapi banyak tekanan dan tingkat kompetisi yang tinggi.

### 3. Pelatihan Profesional

Menurut Bernandian & Joice dalam Gomes (2003) pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Gomes (2003) menyatakan bahwa para pekerja menyukai pelatihan karena pelatihan membebaskan dari pekerjaan mereka (jika mereka tidak suka pada pekerjaannya) atau meningkatkan kecakapan yang bisa digunakan untuk menguasai kedudukan yang sedang mereka duduki. Pelatihan juga dianggap sebagai imbalan dari organisasi, suatu simbol status, atau suatu liburan dari kewajiban kerja sehari-hari. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelatihan dapat memperbaiki kepuasan kerja. Meningkatnya kepuasan kerja di harapkan dapat pula meningkatkan motivasi. Stolle dalam Setiyani (2005) mengungkapkan pelatihan profesional dipertimbangkan oleh mahasiswa yang memilih profesi akuntan publik. Hal ini berarti bahwa dalam memilih profesi, tidak hanya bertujuan mencari penghargaan finansial, tetapi juga ada keinginan untuk mengejar prestasi dan mengembangkan diri. Beberapa elemen dalam pelatihan profesional antara lain: pelatihan sebelum bekerja, mengikuti pelatihan di luar lembaga, mengikuti pelatihan rutin lembaga, dan variasi pengalaman kerja.

### 4. Pengakuan Profesional

Salah satu kebutuhan dasar manusia menurut Maslow dalam Gomes (2003) adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dimana kebutuhan jenis ini merupakan kebutuhan yang tertinggi, untuk menunjukkan prestasinya yang maksimal tanpa terlalu banyak menuntut imbalan dari organisasi. Pengakuan profesional meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan terhadap prestasi. Pengakuan profesional ini dapat juga dikategorikan sebagai penghargaan yang tidak berwujud finansial. Menurut Stolle dalam Setiyani (2005) pengakuan profesional dipertimbangkan oleh mahasiswa yang memilih profesi akuntan publik. Hal ini berarti bahwa memilih profesi, tidak hanya bertujuan mencari penghargaan finansial, tetapi juga ada keinginan untuk pengakuan berprestasi dan mengembangkan diri. Elemen-elemen dalam pengakuan profesi yaitu kesempatan untuk berkembang, pengakuan berprestasi, kesempatan untuk naik pangkat, serta menghargai keahlian tertentu.

### 5. Nilai-Nilai Sosial

Dalam salah satu teori perkembangan karir yang dikenal dengan teori sosiologi, Osipow dalam Sunardi (2008) menyatakan bahwa secara fundamental pemilihan karir didasarkan kepada pemikiran bahwa elemen-elemen di luar individu memiliki pengaruh kuat terhadap individu sepanjang hidupnya, termasuk pendidikan dan keputusan pekerjaan. Para pendukung teori ini juga berpandangan bahwa derajat kebebasan individu dalam pilihan pekerjaan/jabatan adalah jauh dari apa yang semula diasumsikan dan harapan diri seseorang tidaklah bebas dari harapan masyarakatnya. Sebaliknya, masyarakat menyajikan peluang pekerjaan/jabatan dalam suatu pola-pola yang berhubungan dengan keanggotaan kelas sosial.

### 6. Pertimbangan Pasar Kerja

Hasil penelitian Felton dalam Sembiring (2005) menjelaskan bahwa pertimbangan pasar kerja merupakan faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk memilih berprofesi sebagai akuntan publik. Akan tetapi pertimbangan pasar kerja bukan merupakan faktor yang mempengaruhi mahasiswa yang memilih berprofesi akuntan diluar profesi akuntan publik. Pertimbangan pasar kerja menempati peringkat tinggi diantara faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan profesi mahasiswa. Pertimbangan pasar kerja berhubungan dengan pekerjaan yang dapat diakses di masa yang akan datang.

### 7. Personalitas

Dalam teori kepribadian yang dikembangkan oleh Gibson dan Mitchell dalam Sunardi (2008) dijelaskan bahwa pilihan jabatan/pekerjaan merupakan ekspresi dari kepribadian. Dinyatakan bahwa perilaku mencari pekerjaan hakekatnya adalah upaya mencocokkan antara karakteristik individu

dengan lapangan pekerjaan khusus. Rahayu dalam Wudjud (2010) mengatakan bahwa, personalitas merupakan salah satu determinan yang potensial terhadap perilaku individu saat berhadapan dengan situasi/kondisi tertentu. Hal ini membuktikan bahwa personalitas berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Personalitas menunjukkan bagaimana mengendalikan atau mencerminkan kepribadian seseorang dalam bekerja.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **1.1 Jenis dan Sumber Data**

Menurut Kuncoro (2003), data adalah sekumpulan informasi yang di perlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data terbagi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak bisa diukur dalam skala numerik (angka) sedangkan data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi data tersebut berupa angka-angka absolut dari hasil analisis kuesioner yang diisi oleh sampel penelitian.

Berdasarkan Sumbernya, data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga pengumpul data atau pihak-pihak lain yang datanya telah diolah terlebih dahulu (Kuncoro, 2003). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer tersebut diperoleh dari kuesioner yang di bagikan kepada sampel penelitian.

#### **1.2 Populasi dan Sampel**

##### **4.2.1 Populasi**

Menurut Kuncoro (2003) populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan profesi akuntansi yang masih aktif terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun penelitian berjumlah 80 orang.

##### **4.2.2 Sampel**

Menurut Kuncoro (2003) sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling dimana, sampel penelitian diambil secara acak dari 80 orang mahasiswa yang masih terdaftar sebagai mahasiswa. Dari 80 kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali berjumlah 58 kuesioner.

#### **1.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- a. Kuesioner; pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis guna menunjang wawancara untuk mendapatkan data yang akurat.
- b. Studi kepustakaan (data sekunder) ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan erat dengan penelitian, yang akan dibahas atau untuk digunakan sebagai dasar teori yang melengkapi proses penyusunan.

#### **1.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen (X) terdiri dari:

1. Penghargaan Finansial (X1)

Penghargaan finansial adalah hasil yang diperoleh sebagai kontra prestasi dari profesinya. Penghargaan finansial diukur dengan 5 (Lima) butir pernyataan yaitu: gaji awal yang tinggi, potensi kenaikan gaji, tersediannya dana pensiun, mendapatkan uang lembur dan mendapatkan bonus akhir tahun yang besar. Skala pengukurannya adalah menggunakan skala interval.

2. Pelatihan Profesional (X2)

Pelatihan profesional adalah pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk meningkat tingkat profesionalisme karyawan. Pelatihan profesional meliputi hal-hal yang berhubungan dengan

peningkatan keahlian. Pelatihan profesional diukur dengan 4 (empat) pernyataan mengenai pelatihan sebelum mulai bekerja, pelatihan profesional, pelatihan kerja rutin dan pengalaman kerja. Skala pengukurannya adalah menggunakan skala interval.

3. Pengakuan Profesional (X3)

Pengakuan profesional adalah pengakuan terhadap prestasi yang dicapainya. Pengakuan profesional ini dinilai dari profesionalisme atas pelayanan dan prestasi yang telah diberikan untuk perusahaan. Pengakuan profesional diukur dengan 4 (empat) pertanyaan mengenai kesempatan berkembang, pengakuan prestasi, cara naik pangkat dan keahlian untuk mencapai sukses. Skala pengukurannya adalah menggunakan skala interval.

4. Nilai-nilai Sosial (X4)

Nilai-nilai sosial diukur dengan 4 (lima) pertanyaan mengenai kesempatan untuk melakukan pelayanan sosial, kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, kesempatan untuk menjalankan hobi di luar pekerjaan dan gengsi pekerjaan di mata orang lain. Skala pengukurannya adalah menggunakan skala interval.

5. Lingkungan Kerja (X5)

Lingkungan kerja diukur dengan 7 (tujuh) pertanyaan mengenai sifat pekerjaan (rutin, atraktif, cepat selesai, sering lembur), lingkungan kerja dan tingkat kompetensi karyawan, tekanan kerja. Skala pengukurannya adalah menggunakan skala interval.

6. Pertimbangan Pasar Kerja (X6)

Pertimbangan pasar kerja diukur dengan 4 (empat) pertanyaan mengenai kenyamanan kerja, kemudahan mengakses lowongan kerja, memperluas akses dan jaringan dengan dunia bisnis, memperluas akses dan pengetahuan isu-isu dunia bisnis dan akuntansi terkini. Skala pengukurannya adalah menggunakan skala interval.

7. Personalitas (X7)

Personalitas diukur dengan 4 (empat) pertanyaan mengenai kesesuaian pekerjaan dengan kepribadian yang dimiliki seseorang, keyakinan klien, keyakinan atasan, dan profesionalisme. Skala pengukurannya adalah menggunakan skala interval.

Variabel dependen (Y) terdiri dari pemilihan karir sebagai akuntan yaitu keinginan yang kuat menjadi praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa akuntansi yang profesional kepada klien dan juga minat untuk menjalani profesi akuntan yang lain yaitu sebagai akuntan pendidik, akuntan perusahaan dan akuntan pemerintah. Minat menjadi akuntan diukur dengan indikator akuntan dapat menjadi konsultan bisnis yang terpercaya, Akuntan dapat memperluas wawasan dan kemampuan akuntansi, akuntan dapat menjanjikan lebih profesional dalam bidang akuntansi, sebagai akuntan mudah mendapat promosi jabatan, imbalan yang diperoleh sesuai dengan upaya yang diberikan, kepuasan pribadi dapat dicapai atas tahapan karir, keamanan kerja lebih terjamin dan memperoleh penghargaan yang tinggi di masyarakat (Wie Sie Wudjud, 2010). Skala pengukurannya adalah menggunakan skala interval.

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada program pendidikan profesi akuntansi (PPAK) Universitas Sam Ratulangi dengan alamat Jl. Kampus Bahu UNSRAT. Dengan kurun waktu penelitian 3 Bulan (Oktober-Desember 2012)

### 4.6 Metode Analisis Data

#### 4.6.1 Uji kualitas data

Uji kualitas data dilakukan untuk meyakinkan kualitas data yang akan diolah yang terdiri dari pengujian validitas dan reliabilitas.

#### 4.6.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
2. Uji Autokorelasi
3. Uji Heteroskedastisitas

4. Multikolineritas

**4.6.3 Analisis data**

1. Regresi Linear Berganda

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + bX_5 + bX_6 + bX_7$$

Keterangan:

Y = Pemilihan karir sebagai akuntan

X<sub>1</sub> = Penghargaan Finansial

X<sub>2</sub> = Pelatihan Profesional

X<sub>3</sub> = Pengakuan Profesional

X<sub>4</sub> = Nilai-Nilai Sosial

X<sub>5</sub> = Lingkungan Kerja

X<sub>6</sub> = Pertimbangan Pasar Kerja

X<sub>7</sub> = Profesionalitas

a = Nilai Intercept (Konstan)

b = Koefisien arah regresi

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Statistik t

b. Uji Statistik F

3. Koefisien Korelasi dan Determinasi

**4.6.4 Uji Ankova**

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemilihan karir pada mahasiswa yang sudah bekerja dan belum bekerja maka dilakukan uji ankova atau analisis kovarians. **Analisis Kovarians (ANCOVA)** merupakan model linier dengan satu variabel dependen kontinu dan satu atau lebih variabel independen. Jikalau kalimat tersebut mengingatkan anda kepada regresi linier berganda, yap, anda betul, karena **ANCOVA** merupakan penggabungan antara ANOVA dan regresi linier yang lazimnya menggunakan variabel kontinu (kuantitatif).

**5. HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHSAN**

**Uji Validitas**

**Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas  
Hasil Pengujian Validitas (X<sub>2</sub>)**

Pertanyaan	Person	
	Corelation	Signifikansi
P1	0.705	.000
P2	0.702	.000
P3	0.672	.000
P4	0.630	.000

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012

Berdasarkan Tabel 5.5 diketahui bahwa hasil uji validitas untuk variabel X<sub>2</sub> dengan 4 (Empat) butir item pertanyaan ternyata semua pertanyaan dinyatakan valid karena tingkat signifikansi di bawah 0,05

**Tabel 5.3  
Hasil Pengujian Validitas (X<sub>3</sub>)**

Pertanyaan	Person Corelation	Signifikansi
P1	0.543	.000
P2	0.805	.000
P3	0.570	.000
P4	0.687	.000

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012



Berdasarkan Tabel 5.6 diketahui bahwa hasil uji validitas untuk variabel  $X_3$  dengan 4 (Empat) butir item pertanyaan ternyata semua pertanyaan dinyatakan valid karena tingkat signifikansi di bawah 0,05

**Tabel 5.4**  
**Hasil Pengujian Validitas ( $X_4$ )**

Pertanyaan	Person Corelation	Signifikansi
P1	0.782	.000
P2	0.683	.000
P3	0.791	.000
P4	0.686	.000

*Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Berdasarkan Tabel 5.7 diketahui bahwa hasil uji validitas untuk variabel  $X_4$  dengan 4 (Empat) butir item pertanyaan ternyata semua pertanyaan dinyatakan valid dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05.

**Tabel 5.5**  
**Hasil Pengujian Validitas ( $X_5$ )**

Pertanyaan	Person Corelation	Signifikansi
P1	0.471	.000
P2	0.569	.000
P3	0.438	.000
P4	0.517	.000
P5	0.555	.000
P6	0.580	.000
P7	0.579	.000

*Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Berdasarkan Tabel 5.8 diketahui bahwa hasil uji validitas untuk variabel  $X_5$  dengan 7 (Tujuh) butir item pertanyaan ternyata semua pertanyaan dinyatakan valid dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05

**Tabel 5.6**  
**Hasil Pengujian Validitas ( $X_6$ )**

Pertanyaan	Person Corelation	Signifikansi
P1	0.807	.000
P2	0.751	.000
P3	0.543	.000
P4	0.569	.000

*Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Berdasarkan Tabel 5.9 diketahui bahwa hasil uji validitas untuk variabel  $X_5$  dengan 4 (Empat) butir item pertanyaan ternyata semua pertanyaan dinyatakan valid dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05.

**Tabel 5.9**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
$X_1$	.752	5
$X_2$	.608	4
$X_3$	.633	4
$X_4$	.713	4
$X_5$	.601	7
$X_6$	.657	4
$X_7$	.653	4
Y	.733	7

*Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

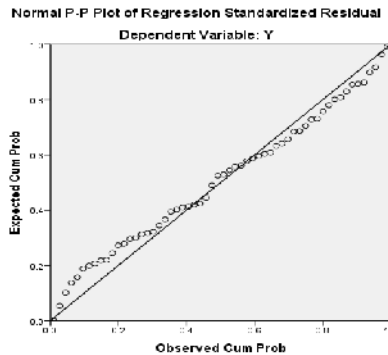
Dari hasil uji reliabilitas diatas, dapat dilihat pada output *reability statistics* dari nilai *cronbach alpha* untuk semua variabel baik variabel dependen maupun variabel independen berada diatas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini reliable.

**Pengujian asumsi klasik**

1. Uji Normalitas

Proses pengujian normalitas data dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data (titik) pada normal *P-plot of regression standardized* residual dari variabel independen.

**Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas**



*Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi dengan normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas

2. Uji Multikolinearitas

**Tabel 5.10 Hasil uji Multikolineritas**

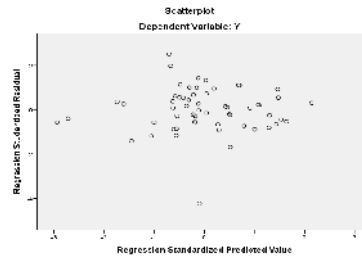
Model	Collinearity Statistics	
	VIF	Tolerance
(Constant)		
X1	1.745	.740
X2	1.873	.714
X3	1.647	.661
X4	1.637	.625
X5	2.147	.463
X6	1.984	.613
X7	1.536	.693

*Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Dari tabel 5.10 terlihat bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Hasil uji VIF juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam persamaan regresi.

1. Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 5.2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012

Dari gambar diatas terlihat bahwa dalam persamaan regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari penyebaran titik-titik yang tidak memiliki pola yang jelas, serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam persamaan ini.

4. Uji Autokorelasi

**Tabel 5.11**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.716 <sup>a</sup>	.683	.596	3.57179	2.017

a. Predictors: (Constant), X7, X1, X2, X6, X3, X4, X5

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS

Dari pengujian Durbin-Watson dalam penelitian ini dihasilkan nilai DW sebesar 2,017. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikasi 5%, jumlah data 58 (n) dan jumlah variabel independen 7 (k=7), maka terletak diantara batas atas (du=1,8542) dan batas bawah (dl=1,3193). Oleh karena nilai DW 2,017 lebih besar dari batas atas (du) 1,8542 dan kurang dari 2,146 (4-du) maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi ini tidak terdapat autokorelasi.

**Pengujian Statistik**

1. Koefisien Korelasi dan Determinasi

**Tabel 5.12**  
**Koefisien Korelasi dan Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716 <sup>a</sup>	.683	.596	3.57179

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi adalah 0.716 hal ini menandakan bahwa antar variabel dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi yang positif dan cukup kuat satu sama lain. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh dari penelitian ini sebesar 0.683%. Hal ini berarti variabel-variabel independen dalam model regresi dapat menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 68,3%. Sedangkan sisanya 31.7,% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji statistik F

Hasil pengujian tabel F dapat dilihat dalam tabel 5.16 berikut ini:

**Tabel 5.13**  
**Hasil Uji Statistik F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	395.772	8	56.539	4.432	.001 <sup>b</sup>
Residual	637.884	50	12.758		
Total	1033.655	58			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X7, X1, X2, X6, X3, X4, X5

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012

Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa tingkat signifikansi untuk pengujian pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen adalah sebesar 0.001 hal ini berarti lebih kecil dari 0.05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa PPAk untuk berprofesi sebagai akuntan.

3. Uji statistik t

Berikut tabel hasil pengujian pengaruh variabel independent ke variebel dependen secara parsial.

**Tabel 5.14**  
**Hasil Uji Statistik t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.052	4.976		1.618	.112
Penghargaan Finansial	.001	.032	-.001	2.209	.039
Pelatihan Profesional	.103	.229	.009	2.049	.045
Pengakuan profesional	-.170	.233	-.100	-.729	.469
Nilai-nilai social	.444	.198	.316	2.246	.029
Lingkungan Kerja	.333	.194	.280	2.212	.033
Pertimbangan psr kerja	-.066	.261	-.036	-.252	.802
Personalitas	.612	.278	.294	2.204	.032

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel independen penghargaan finansial berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi variabel penghargaan finansial yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,039 dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis  $H_{a1}$  yang menyatakan bahwa penghargaan finansial berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan.

Variabel independen pelatihan profesional berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi variabel pelatihan profesional yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,045 dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis  $H_{a2}$  yang menyatakan bahwa pelatihan profesional berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan. Variabel independen pengakuan profesional tidak berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi variabel pelatihan profesional yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,469 dengan demikian,

**Tabel 5.7**  
**Hasil Pengujian Validitas ( $X_7$ )**

Pertanyaan	Person Corelation	Signifikansi
P1	0.604	.000
P2	0.620	.000
P3	0.623	.000
P4	0.618	.000

*Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Berdasarkan Tabel 5.10 diketahui bahwa hasil uji validitas untuk variabel  $X_5$  dengan 4 (Empat) butir item pertanyaan ternyata semua pertanyaan dinyatakan valid dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05

**Tabel 5.8**  
**Hasil Pengujian Validitas (Y)**

Pertanyaan	Person Corelation	Signifikansi
P1	0.594	.000
P2	0.518	.000
P3	0.603	.000
P4	0.797	.000
P5	0.631	.000
P6	0.639	.000
P7	0.634	.000

*Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2012*

Dari Tabel 5.11 diketahui hasil uji validitas untuk variabel pemilihan karir sebagai akuntan dengan tujuh butir item pertanyaan ternyata semuanya dinyatakan valid dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keajegan atau konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner, dengan ukuran reliabilitas diatas 0.6 (Priyatno, 2012)

penelitian ini menerima hipotesis  $H_{03}$  yang menyatakan bahwa pengakuan profesional tidak berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan.

Variabel independen nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi variabel nilai-nilai sosial yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,029 dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis  $H_{a4}$  yang menyatakan bahwa nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan.

Variabel independen lingkungan kerja berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi variabel lingkungan kerja yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,033 dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis  $H_{a5}$  yang menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan.

Variabel independen pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi variabel pertimbangan pasar kerja yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,802 dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis  $H_{06}$  yang menyatakan bahwa pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan.

Variabel independen personalitas berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi variabel personalitas yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,032 dengan demikian, penelitian ini menerima hipotesis  $H_{a7}$  yang menyatakan bahwa personalitas berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan.

#### 4. Interpretasi Model Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 8,052 + 0,001 X_1 + 0,103 X_2 - 0,170 X_3 + 0,444 X_4 + 0,333 X_5 - 0,066 X_6 + 0,612 X_7$$

Y = Persepsi pemilihan karier sebagai akuntan

$X_1$  = Penghargaan Finansial

$X_2$  = Pelatihan Profesional

$X_3$  = Pengakuan Profesional

$X_4$  = Nilai-nilai sosial

$X_5$  = Lingkungan Kerja

$X_6$  = Pertimbangan Pasar kerja

$X_7$  = Personalitas

Persamaan diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta 8,052 hal ini mengindikasikan apabila variabel penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas adalah 0 maka nilai persepsi mahasiswa untuk memilih karier sebagai akuntan adalah 8,052 atau dengan kata lain variabel dependent mempunyai nilai sebesar 8,052 apabila tidak dipengaruhi oleh variabel independent.
2. Koefisien penghargaan finansial ( $X_1$ ) = 0,001 hal ini mengindikasikan bahwa apabila variabel independen lainnya nilainya tetap dan penghargaan finansial meningkat sebesar 1%, maka pemilihan profesi akuntansi akan meningkat sebesar 0,001
3. Koefisien pelatihan profesional ( $X_2$ ) = 0,103 hal ini mengindikasikan bahwa apabila variabel independen lainnya nilainya tetap dan pelatihan profesional meningkat sebesar 1%, maka pemilihan profesi akuntansi akan meningkat sebesar 0,103
4. Koefisien pengakuan profesional ( $X_3$ ) = -0,170 hal ini mengindikasikan bahwa apabila variabel independen lainnya nilainya tetap dan pengakuan profesional meningkat sebesar 1%, maka pemilihan profesi akuntansi akan menurun sebesar 0,170
5. Koefisien nilai-nilai sosial ( $X_4$ ) = 0,444 hal ini mengindikasikan bahwa apabila variabel independen lainnya nilainya tetap dan variabel nilai-nilai sosial meningkat sebesar 1%, maka pemilihan profesi akuntansi akan meningkat sebesar 0,444
6. Koefisien lingkungan kerja ( $X_5$ ) = 0,333 hal ini mengindikasikan bahwa apabila variabel independen lainnya nilainya tetap dan variabel lingkungan kerja meningkat sebesar 1%, maka pemilihan profesi akuntansi akan meningkat sebesar 0,333 Koefisien pertimbangan pasar kerja ( $X_6$ ) = -0,066 hal ini mengindikasikan bahwa apabila variabel independen lainnya nilainya tetap dan variabel pertimbangan pasar kerja meningkat sebesar 1%, maka pemilihan profesi akuntansi akan menurun sebesar 0,066

7. Koefisien personalitas ( $X_7$ ) = 0,612 hal ini mengindikasikan bahwa apabila variabel independen lainnya nilainya tetap dan variabel personalitas meningkat sebesar 1%, maka pemilihan profesi akuntansi akan meningkat sebesar 0,612

#### Uji Kovarians

Selain menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karier sebagai akuntan, penulis juga berusaha menganalisis apakah terdapat perbedaan persepsi pemilihan karier pada mahasiswa yang sudah bekerja dan belum bekerja pada program pendidikan profesi akuntansi universitas Samratulangi.

Berdasarkan perhitungan pada jumlah kuesioner yang dikembalikan, maka diketahui bahwa 21 orang responden belum memiliki pekerjaan dan sisanya 37 orang telah memiliki pekerjaan. Hasil uji kovarians dapat dilihat dalam tabel 5.18

Berdasarkan tabel 5.15 diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi variabel X (sudah/belum bekerja) berada di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemilihan karir pada mahasiswa yang sudah bekerja dan belum bekerja, dengan demikian penelitian ini menerima hipotesis  $H_{a8}$  yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pada faktor faktor yang mempengaruhi persepsi pemilihan karir pada mahasiswa yang sudah bekerja dan belum bekerja di program pendidikan profesi akuntansi Universitas Sam ratulangi.

#### 5.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diatas, diperoleh hasil bahwa penghargaan finansial, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja dan personalitas berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan sedangkan variabel lainnya yaitu pengakuan profesional, dan pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan.

Variabel penghargaan finansial ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap pemilihan karier sebagai akuntan hal ini sesuai dengan penelitian Wie sie wudjud (2010) yang menyatakan bahwa penghargaan finansial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan. Hal ini berarti pemilihan karier sebagai akuntan pada mahasiswa pendidikan profesi akuntansi Universitas Sam Ratulangi akan dipengaruhi oleh jumlah gaji yang tinggi, adanya dana pensiun, kenaikan gaji yang lebih cepat, mendapatkan uang lembur dan bonus akhir tahun.

Variabel pelatihan profesional berpengaruh terhadap pemilihan karier sebagai akuntan Berdasarkan hasil penelitian ini maka mahasiswa pendidikan profesi akuntansi akan mempertimbangkan indikator-indikator pelatihan profesional yaitu pelatihan sebelum mulai bekerja, seringkali mengikuti pelatihan diluar, pelatihan rutin dalam lembaga dan untuk memperoleh pengalaman kerja yang bervariasi sebagai dasar untuk memilih karier menjadi seorang akuntan.

Pengakuan profesional tidak berpengaruh terhadap pemilihan karier sebagai akuntan pada mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Sam Ratulangi. Nilai- nilai sosial berpengaruh terhadap pemilihan karier sebagai akuntan pada mahasiswa pendidikan profesi akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa indikator nilai-nilai sosial seperti kesempatan untuk melakukan kegiatan sosial, kesempatan berinteraksi dengan orang lain, kesempatan menjalankan hobi dan kesempatan bekerja dengan ahli di bidang lain mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan untuk memilih karier sebagai akuntan.

Lingkungan kerja berpengaruh terhadap pemilihan karier sebagai akuntan hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wie sie wudjud (2010) yang menyatakan bahwa lingkungan kerja akan mempengaruhi pemilihan karier sebagai akuntan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa indikator lingkungan kerja seperti pekerjaan yang bersifat rutin, pekerjaan yang cepat dan dapat diselesaikan, pekerjaan yang lebih atraktif, lingkungan kerja yang menyenangkan, seringkali lembur, tingkat kompetisi antar karyawan yang tinggi dan tekanan kerja akan mempengaruhi secara signifikan pemilihan karier sebagai akuntan.

Personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karier sebagai akuntan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa personalitas mempengaruhi pemilihan karier

sebagai akuntan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa indikator personalitas seperti profesionalisme, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kinerja, dan keyakinan akan mempengaruhi terhadap pemilihan karier sebagai akuntan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori perkembangan karir yang dikenal dengan teori kepribadian, Dalam teori ini memandang bahwa pilihan jabatan / pekerjaan merupakan ekspresi dari kepribadian.

Dari hasil uji F diketahui bahwa secara bersama-sama, variabel independent berpengaruh terhadap pemilihan karier sebagai akuntan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya dari W. S Wudjud (2010) yang menyatakan bahwa penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemilihan karier sebagai akuntan pada mahasiswa pendidikan profesi akuntansi universitas Sam Ratulangi. Dari hasil pengujian menggunakan uji korelasi dan determinasi, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0.716 hal ini menandakan bahwa antar variabel dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi yang positif dan cukup kuat satu sama lain. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh dari penelitian ini sebesar 0.683%. Hal ini berarti variabel-variabel independen dalam model regresi dapat menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 68,3%.

Dari hasil analisis kovarians (ANKOVA) yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemilihan karir pada mahasiswa yang sudah bekerja dan belum bekerja. Berdasarkan teori perkembangan karir yang dikemukakan oleh Donald Super dalam Sunardi (2008), manusia melewati proses perkembangan karir yang terdiri atas lima tahap berdasarkan pengelompokan umur, dimana untuk setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang khas. Rata-rata umur untuk mahasiswa yang belum bekerja yaitu 22-24 tahun sehingga melihat teori perkembangan karir yang dikemukakan oleh Super dalam Sunardi (2008) diketahui bahwa mahasiswa yang belum bekerja berada pada tahap ketiga yaitu Tahap Eksplorasi (15-24 tahun) sedangkan pada mahasiswa yang sudah bekerja berada pada rentang umur 25-44 tahun. Dimana berdasarkan teori perkembangan karir yang dikemukakan oleh Donald Super dalam Sunardi (2008), pada tahap ini orang dewasa sudah memantapkan diri untuk menjalani karir tertentu dengan usaha tekun terhadap pengalaman kerja yang telah dialui.

## **6.KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penghargaan finansial, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja dan personalitas berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan sedangkan variabel lainnya yaitu pengakuan profesional, dan pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh terhadap persepsi pemilihan karier sebagai akuntan pada mahasiswa pendidikan profesi akuntansi Universitas Sam Ratulangi. Secara bersama-sama, penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karier sebagai akuntan pada mahasiswa pendidikan profesi akuntansi Universitas Sam Ratulangi.
2. Berdasarkan pengujian menggunakan uji t dengan memisahkan sampel berdasarkan jumlah mahasiswa yang sudah memiliki pekerjaan dan mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan, maka diketahui bahwa untuk mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan, faktor yang mempengaruhi adalah pelatihan profesional, lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja. Sedangkan untuk mahasiswa yang sudah memiliki pekerjaan, faktor yang mempengaruhi adalah penghargaan finansial, pelatihan profesional dan lingkungan kerja.

### **Saran**

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini perlu diperluas sesuai dengan kebutuhan pasar dari perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga spesifikasi profesionalisme seorang akuntan lebih intelektual.



2. Bagi akademisi guna meningkatkan mutu lulusan sebagai pekerja intelektual, yang siap pakai perlu diupayakan keseragaman kurikulum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilian, Lara Absara, (2011), **Faktor–faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik**, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Penelitian UNDIP, Semarang
- Andersen, William, (2012), **Analisis Persepsi Mahasiswa Akuntansi Dalam Memilih Profesi Sebagai Akuntan**, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Univesitas Diponegoro, Penelitian UNDIP, Semarang
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). **Manajemen Sumber daya Manusia**. Rineka Cipta, Jakarta.
- Haryono, Jusup, (2001) **Auditing (Pengauditan)**. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN
- Gomes, Faustino Cardoso, (2000), **“Manajemen Sumber Daya Manusia”**, Penerbit Andi offset, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, (2009), **Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis**, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, (2007). **Perencanaan dan pengembangan SDM**, Cetakan Ketiga, penerbit PT. Refika Aditama, Bandung
- Mendiknas RI, (2001), Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 179/U/2001. **Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi**
- Merdekawati, Dian Putri dan Ardiani Ika Sulistyawati, (2010), **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Akuntan Publik dan Non Akuntan Publik**, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
- Oetomo, Tri Widodo, (1998). **Diktat akuntansi perilaku**. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, Bandung
- Priyatno, Duwi, (2012). **Belajar cepat olah data statistik dengan SPSS**. Penerbit Andi offset, Yogyakarta.
- Rasmini, Ni Ketut, (2007), **”Faktor-faktor yang berpengaruh pada Keputusan Pemilihan Profesi Akuntan Publik dan Non Akuntan Publik pada mahasiswa Akuntansi di Bali”**, Buletin Studi Ekonomi, Volume 12 Nomor 3, Univ. Udayana Denpasar, hal. 351-366.
- Rahayuningsih, Deasy Ariyanti, (2002), **”Harapan dan Kenyataan dalam Berkarir di Kantor Akuntan Publik: Suatu Perbandingan antara Mahasiswa Akuntansi dan Auditor”**. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 4 dan No. 3, Desember 2002.
- Rahayu, Sri dkk, (2002), **”Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilihan Karir”**, **Simposium Nasional Akuntansi IV**, 16-17 Oktober 2001, Hal. 821 – 838, Surabaya.
- Sembiring, M. Simba, (2009), **Faktor–faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik Oleh Mahasiswa Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi USU Medan**, Penelitian USU, Medan
- Setiyani, Redianan, (2005), **Faktor–Faktor Yang Membedakan Mahasiswa Akuntansi Dalam Memilih Profesi Sebagai Akuntan Publik Dan Non Akuntan Publik**, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Penelitian UNDIP, Semarang
- Sunardi, (2008), **Makalah Hakekat Karier**, Fakultas Ilmu Pendidikan, UPI, Hal 212
- Wudjud, Wie Shi, 2010, **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pemilihan Karir Menjadi Akuntan Oleh Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) Universitas Sumatera Utara**. Fakultas Ekonomi USU Medan, Penelitian USU, Medan
- Wijayanti, (2001), **”Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa Akuntansi di Yogyakarta”**, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 3, No. 2, Juli, Hal. 13-16.

**ANALISIS PENGARUH KREDIT CEPAT AMAN (KCA), KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI), KREDIT ANGSURAN SISTEM GADAI (KRASIDA), DAN KREDIT SERBA GUNA (KRESNA) TERHADAP PENDAPATAN SEWA MODAL PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL VI MANADO**

Oleh :  
Jane Eiva Siwu  
Herman Karamoy  
Sifrid Pangemanan

***ABSTRACT***

The services product of PT. Pegadaian (Persero), are Credit Fast Secure, Installment Loans Fiduciary System, Installment Loans Pawn System, and Multipurpose Loan. Customer will repay the loan with interest in this case is a capital lease is revenue that received of PT. Pegadaian (Persero) by loans extended. In line with the growth of the existing business can be seen the increase of lease income on lending capital that during 2006 to 2011. This research is analyze the causal's relationship to examine the effect of the fact and phenomena and seek factual information to research that explained on the effect of Credit Fast Secure, Installment Loans Fiduciary System, Installment Loans Pawn System, Multipurpose Loan on Capital Lease Revenue at PT. Pegadaian (Persero) Regional Office VI Manado which is a services products on offer to the public. From these research it can be concluded that Credit Fast Secure, Installment Loans Fiduciary System, Installment Loans Pawn System, Multipurpose Loan, have influence on Capital Lease Revenue at PT. Pegadaian (Persero) Regional Office VI Manado have increase from year to year.

***Key words*** : *Capital Lease Revenue, Credit*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Setiap Perusahaan perlu menyadari bahwa konsumen sebagai pasar sangat menentukan jenis produk dalam setiap kategori, serta memiliki beragam kebutuhan dalam kombinasi serta harga barang dan jasa yang berbeda. Harapan mereka akan mutu dan pelayanan yang tinggi terus meningkat. Di tengah pilihan yang begitu banyak, pelanggan cenderung memilih tawaran yang paling sesuai dengan kebutuhan serta harapan masing-masing mereka dan membeli berdasarkan tata nilai mereka. PT. Pegadaian (Persero) telah menapaki hari-hari panjang sebagai perusahaan yang mengemban amanat Pemerintah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang mudah dan gampang diakses oleh masyarakat menengah ke bawah berdasarkan hukum gadai dan fidusia. Pemanfaatan jasa gadai di Indonesia saat ini telah tersegmentasi berdasarkan geografi dan demografi. PT. Pegadaian (Persero) dalam bisnisnya menyalurkan kredit antara lain Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA), dan Kredit Serba Guna (KRESNA). Kredit menurut Malayu S.P. Hasibuan (2009) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Begitu pula PT. Pegadaian (Persero) atas kredit yang disalurkan maka peminjam mengembalikan pinjaman bersama bunga dalam hal ini sewa modal. Sewa modal adalah merupakan pendapatan yang diterima PT. Pegadaian (Persero) atas kredit yang disalurkan. Dengan adanya perubahan status dari perusahaan umum ke perusahaan perseroan dan akan di keluarkannya Undang-undang monopoli oleh pemerintah maka PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado harus mampu mempertahankan bisnis yang ada dan tetap diminati masyarakat. Karena tidak menutup kemungkinan akan bermunculan lembaga-lembaga gadai lain yang akan menjadi ancaman bagi PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado. Dalam menghadapi persaingan dan mempertahankan bisnis yang ada dimana produk-produk tersebut yang merupakan sumber pendapatan perusahaan maka perusahaan harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sumber pendapatan perusahaan yang mempengaruhi perusahaan tetap bertahan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA), dan Kredit Serba Guna (KRESNA) terhadap pendapatan sewa modal, dengan pertimbangan teoritis faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap pendapatan sewa modal dalam hal ini pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kredit Cepat Aman (KCA) berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado ?
2. Apakah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado ?
3. Apakah Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado ?
4. Apakah Kredit Serba guna (KRESNA) berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa besarnya pengaruh Kredit Cepat Aman (KCA) terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado.
2. Untuk menganalisa besarnya pengaruh Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado.
3. Untuk menganalisa besarnya pengaruh Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado.
4. Untuk menganalisa besarnya pengaruh Kredit Serba Guna (KRESNA) terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sewa modal PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado, maka penelitian ini dapat memberi manfaat kepada:

1. PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam membuat perencanaan ke depan bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan pendapatan sewa modalnya.
2. Para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dapat pula memanfaatkan hasil penelitian ini.
3. Bagi penulis sangat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pelengkap dasar-dasar teori sekaligus dalam rangka upaya mencoba menerapkan ilmu pengetahuan teoritis ke dalam praktek nyata dalam menambah wawasan pengetahuan praktis.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pendapatan**

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 23 memberikan pengertian Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

### **2.2. Kredit**

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### **2.3. Pegadaian**

Menurut Kitab Undang-undang hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Sigit dan Totok, 2006).

### **2.4. Produk PT. Pegadaian (Persero)**

Berikut ini adalah beberapa produk PT. Pegadaian (Persero) yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini. Produk-produk ini berpengaruh pada Pendapatan Sewa Modal.

#### **1. Kredit Cepat Aman (KCA)**

Kredit Cepat dan Aman (KCA) adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan sistem gadai dengan jaminan barang bergerak. Pemberian kredit ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam bidang perekonomian, untuk membantu masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

#### **2. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)**

Kredit Kreasi adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara fidusia, yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya.

#### **3. Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)**

Kredit angsuran sistem gadai (Krasida) adalah bentuk layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai usaha mikro dan kecil untuk pembiayaan kegiatan usahanya atas dasar hukum gadai yang pelunasannya diangsur setiap bulan sesuai jangka waktu pinjaman. (Pedoman Operasional Kredit KRASIDA 2004).

#### **4. Kredit Serba Guna (Kresna)**

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006) dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain menyatakan bahwa Kredit serba guna adalah merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.

### **2.5. Pendapatan Sewa Modal Pegadaian**

Sewa Modal adalah pendapatan yang di terima PT. Pegadaian (Persero) atas kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Menurut Kasmir dalam Sucipto (2006) menyatakan bahwa salah satu tujuan utama dari pemberian kredit yaitu mencari keuntungan atau mendapatkan laba. Mencari keuntungan atau laba maksudnya untuk memperoleh hasil pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh perusahaan sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

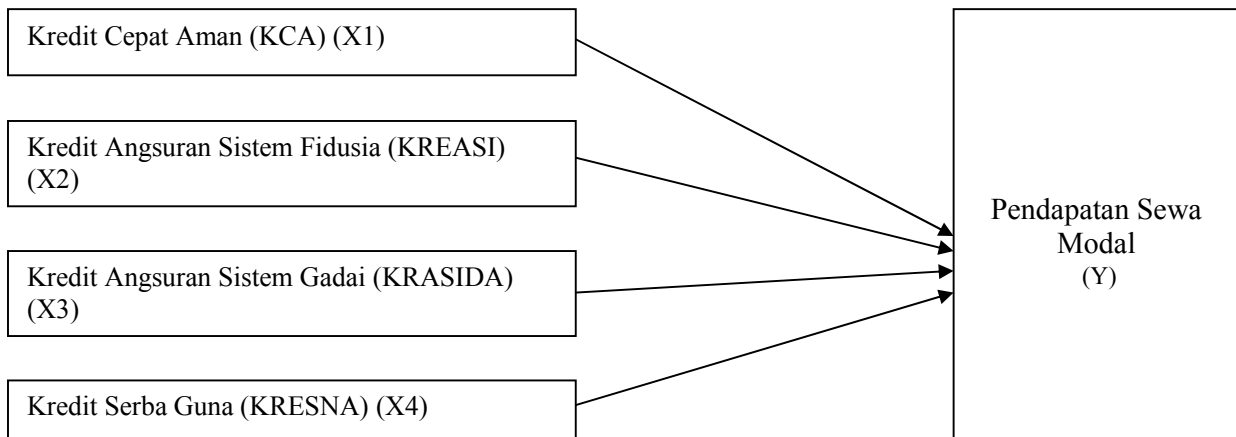
Suci Dwikania S (2011) dalam penelitian “Pengaruh Pemberian Kredit Gadai KCA terhadap Pendapatan Sewa Modal pada Pegadaian Cabang Pungkur Bandun” menyimpulkan bahwa pemberian kredit gadai KCA berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan sewa modal, serta memiliki tanda negatif antara pemberian kredit gadai dengan pendapatan sewa modal, dimana semakin besar kredit yang disalurkan, maka pendapatan semakin rendah.

Sucipto (2006) melakukan penelitian dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sewa modal pada Cabang Perum Pegadaian Kota Surakarta”. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis besarnya pengaruh kredit gadai konvensional, KREASI dan KRASIDA terhadap pendapatan sewa modal pada Cabang Perum Pegadaian Surakarta (2) mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap pendapatan sewa modal pada Cabang Perum Pegadaian Surakarta

Pengujian hipotesis ini menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS 10, yaitu analisis regresi dengan uji pengaruh (uji t) dan uji kebaikan model (uji F dan R<sup>2</sup>) juga dengan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinearitas. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel independen (kredit gadai konvensional dan KREASI) secara individu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan sewa modal pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Surakarta. Sedangkan untuk variabel KRASIDA secara individu mempunyai pengaruh negatif terhadap pendapatan sewa modal pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Surakarta. Dari ketiga variabel independen yang ada yang mempunyai pengaruh paling dominan adalah variabel kredit gadai konvensional kemudian KREASI dan yang terendah adalah variabel KRASIDA. Semua variabel independen, yaitu kredit gadai konvensional, KREASI dan KRASIDA pada saat diuji secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan sewa modal. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji F. Hasil uji F diketahui bahwa nilai F hitung sebesar  $23,751 > F$  tabel 3,32. Pemilihan variabel independen untuk mengukur pendapatan sewa modal sudah bagus, hal ini bisa dilihat dari hasil analisis dimana nilai *Adjusted R square* sebesar 0,922. Artinya 92,2% variabel pendapatan sewa modal dipengaruhi variabel kredit gadai konvensional, KRASIDA dan KREASI, sedangkan 7,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa data berdistribusi normal, model tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak mengalami autokorelasi dan tidak mengalami multikolinearitas.

## 3. KERANGKA KONSEPTUAL

### 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian



**Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian**

### 3.2. Hipotesis

- H1 : Kredit Cepat Aman (KCA) berpengaruh terhadap pendapatan sewa modal pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado
- H2 : Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) berpengaruh terhadap pendapatan sewa modal pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado
- H3 : Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) berpengaruh terhadap pendapatan sewa modal pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado

H4 : Kredit Serba Guna (KRESNA) berpengaruh terhadap pendapatan sewa modal pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado

**4. METODE PENELITIAN**

**4.1. Jenis/Rancangan Penelitian yang Digunakan**

Penelitian ini merupakan penelitian hubungan kausal (*causal effect*) penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh fakta dan fenomena serta mencari keterangan secara faktual yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sewa modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado.

**4.2. Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Pegadaian (Persero) yang terdiri dari 12 Kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Dimana sampel yang diambil adalah PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado. Kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Kemudahan dalam pengambilan data Laporan Keuangan.
2. Keterbatasan waktu, materi dan lokasi.

**4.3. Cara Pengolahan dan Analisis Data**

Cara pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Uji Asumsi Klasik
2. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi
3. Analisis Regresi Linear Berganda :  $Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7 + e$
4. Uji F dan Uji t

**5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

**5.1. Uji Asumsi Klasik**

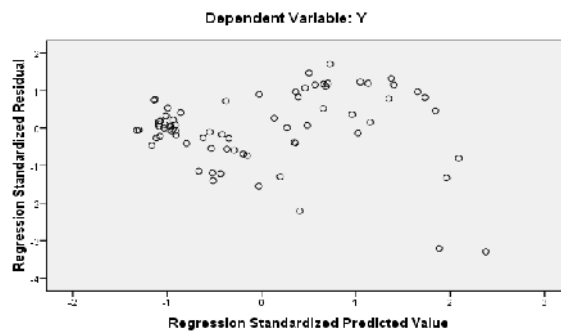
**1. Uji Normalitas**

**Tabel 5.1 Uji Normalitas**


(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov pada Tabel 5.1 menunjukkan, dimana tingkat signifikansi residual error adalah  $0.200 > 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa residual error data terdistribusi dengan normal. Maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

**2. Uji Heteroskedastisitas**



(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

**Gambar 5.1 Uji Heteroskedastisitas**

Pada Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, hal ini membuktikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

**3. Uji Multikoleniaritas**

**Tabel 5.2 Uji Multikoleniaritas**


(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Berdasarkan hasil *coefficients* yang terdapat pada tabel 5.2 dapat dilihat pada *output coefficients* model, dikatakan tidak terjadi gejala multikoleniaritas jika VIF < 5 dan nilai *tolerance* > 0,10.

**4. Uji Autokorelasi**

Berdasarkan tabel 5.3 dengan melihat angka Durbin Watson sebesar 1.496, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berada di daerah ragu-ragu yang mana tidak ada korelasi.

**Tabel 5.3 Uji Autokorelasi**


(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

**5.2. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Berdasarkan hasil analisis nilai korelasi adalah sebesar 0.979 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah sangat kuat dari nilai angka koefisien korelasi berkisar 0 sampai dengan ± 1.00 (artinya paling tinggi ± 1.00 dan paling rendah 0). Hasil analisis korelasi tersebut positif dan arah korelasi satu arah.

**Tabel 5.4 Koefisien Determinasi**


(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Dengan melihat tabel 5.4 maka dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah sebesar 0.959 yang berarti bahwa kontribusi variabel independen untuk menjelaskan model variabel dependen adalah sebesar 95.7 %, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

**5.3. Analisis Regresi Linear Berganda**

$$Y = -4.003 + 2.471 KCA + 0.104 KREASI + 0.022 KRASIDA + 48.336 KRESNA$$

Pendapatan Sewa Modal (PSM). Dengan implikasi manajerial sebagai berikut :

1. Nilai PSM adalah sebesar -4.003 yang berarti nilai PSM tidak akan memiliki nilai apabila variabel independen yang lain adalah konstan.
2. Nilai PSM akan mengalami kenaikan Rp. 2.741 apabila terjadi kenaikan Rp. 1 atas KCA sedangkan variabel independen yang lain adalah ceteris paribus.
3. Nilai PSM akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 0.104 apabila terjadi kenaikan Rp. 1 atas KREASI sedangkan variabel independen yang lain adalah ceteris paribus.
4. Nilai PSM akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 0.022 apabila terjadi kenaikan Rp. 1 atas KRASIDA sedangkan variabel independen yang lain adalah ceteris paribus.
5. Nilai PSM akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 48.336 apabila terjadi kenaikan Rp. 1 atas KRESNA sedangkan variabel independen yang lain adalah ceteris paribus.

Hasil regresi ini menunjukkan pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tergantung pendapatan sewa modal. Nilai konstan sebesar -4.003 menunjukkan bahwa jika variabel Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Angsuran Sistem fidusia (KREASI), Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) dan Kredit Serba Guna (KRESNA) dianggap konstan atau sama dengan nol (0) maka pendapatan sewa modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado adalah sebesar -4.003 satuan rupiah.

Koefisien regresi  $X_1$  sebesar 2.741 mengartikan bahwa jika faktor Kredit Cepat Aman (KCA) meningkat sebesar 1 rupiah dari kondisi sebelumnya maka pendapatan sewa modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado akan meningkat sebesar 2.741 rupiah dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain ( $X_2, X_3$ , dan  $X_4$ ) yang diteliti adalah ceteris paribus.

Koefisien regresi  $X_2$  sebesar 0.104 mengartikan bahwa jika faktor Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) meningkat sebesar 1 rupiah dari kondisi sebelumnya maka pendapatan sewa modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado akan meningkat sebesar 0.104 rupiah dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain ( $X_1, X_3$ , dan  $X_4$ ) yang diteliti adalah ceteris paribus.

Koefisien regresi  $X_3$  sebesar 0.022 mengartikan bahwa jika faktor Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) meningkat sebesar 1 rupiah dari kondisi sebelumnya maka pendapatan sewa modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado akan meningkat sebesar 0.022 rupiah dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain ( $X_1, X_2$ , dan  $X_4$ ) yang diteliti adalah ceteris paribus.

Koefisien regresi  $X_4$  sebesar 48.336 mengartikan bahwa jika faktor Kredit Serba Guna (KRESNA) meningkat sebesar 1 rupiah dari kondisi sebelumnya maka pendapatan sewa modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado akan meningkat sebesar 48.336 rupiah dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain ( $X_1, X_2$ , dan  $X_3$ ) yang diteliti adalah ceteris paribus.

**Tabel 5.5 Uji Regresi Linear Berganda uji Hipotesis**


(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Berdasarkan tabel 5.5. di ketahui bahwa variabel  $X_1$  (KCA) berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal hal ini dapat di lihat dari tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 sehingga penelitian ini menerima hipotesis  $H_{a1}$  yang menyatakan bahwa Kredit Cepat Aman (KCA) berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal (PSM).

Dari tabel 5.5. di ketahui bahwa variabel  $X_2$  (KREASI) berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal hal ini dapat di lihat dari tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 sehingga penelitian ini



menerima hipotesis Ha2 yang menyatakan bahwa Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal (PSM)

Dari tabel 5.5. di ketahui bahwa variabel  $X_3$  (KRASIDA) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal hal ini dapat di lihat dari tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,229 sehingga penelitian ini menerima hipotesis  $H_03$  yang menyatakan bahwa Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KRASIDA) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal (PSM).

Dari tabel 5.5. di ketahui bahwa variabel  $X_4$  (KRESNA) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal hal ini dapat di lihat dari tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,104 sehingga penelitian ini menerima hipotesis  $H_04$  yang menyatakan bahwa Kredit Serba Guna (KRESNA) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal (PSM).

#### 5.4. Pembahasan

Pengaruh Kredit Cepat Aman (KCA) terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado dapat dijelaskan sebagai berikut; Pengelolaan Kredit Cepat Aman harus lebih efektif dan efisien agar memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Walaupun berdasarkan data yang diperoleh dimana Kredit Cepat Aman (KCA) terus mengalami kenaikan periode tahun 2006 sampai 2011, namun perusahaan tidak hanya diam saja menikmati peningkatan yang ada akan tetapi tetap melakukan perubahan dan inovasi untuk lebih meningkatkan pencapaian.

Perubahan status badan hukum pegadaian dan perubahan pangsa pasar, kondisi perekonomian serta timbulnya peluang bagi kompetitor perlu di tanggap dan diberi perhatian khusus oleh PT. Pegadaian (Persero). Walaupun kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan oleh karena harga emas yang terus mengalami peningkatan, penting bagi perusahaan untuk menampilkan keunggulan kompetitifnya guna mempertahankan pangsa pasar.

Oleh karena Kredit Cepat Aman (KCA) yang merupakan produk utama PT. Pegadaian (Persero) perusahaan harus lebih agresif meningkatkan produk Kredit Cepat Aman (KCA). Dengan peningkatan pemberian produk Kredit Cepat Aman (KCA) kepada nasabah akan meningkatkan pula pendapatan sewa modal perusahaan yang baik untuk pertumbuhan perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dimana KCA berpengaruh terhadap PSM, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Sucipto (2006) dengan judul "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sewa modal pada Cabang Perum Pegadaian Kota Surakarta" dimana Kredit Cepat Aman (KCA) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan sewa modal pada Cabang Perum Pegadaian Kota Surakarta.

Pengaruh Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado adalah sebagai berikut; Pengelolaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) perlu untuk di tingkatkan mengingat semakin banyak kompetitor yang bergerak di bidang industri jasa keuangan yang sama seperti perbankan, *finance* yang juga semakin agresif memperluas pangsa pasar.

Perlu dilakukan evaluasi terhadap produk yang disalurkan, strategi pemasaran, mempertahankan nasabah yang ada dengan memberikan pelayanan prima yang baik guna meningkatkan penjualan atas produk tersebut. Peningkatan pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal (PSM) dimana jika kredit KREASI mengalami peningkatan maka Pendapatan Sewa Modal akan mengalami peningkatan dan berpengaruh terhadap kelangsungan akan perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dimana KREASI berpengaruh terhadap PSM, dan hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sucipto (2006) dengan judul "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sewa modal pada Cabang Perum Pegadaian Kota Surakarta" dimana Kredit Angsuran sistem Fidusia (KREASI) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan sewa modal pada Cabang Perum Pegadaian Kota Surakarta.

Pengaruh Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado sebagai berikut; Di era sekarang ini kepemilikan atas barang emas mengalami peningkatan, keinginan masyarakat untuk memiliki emas semakin banyak. Kondisi tersebut digunakan PT. Pegadaian (Persero) sebagai sasaran pemberian kredit bagi nasabah yang memiliki barang emas yang banyak lewat produk KRASIDA. Pengelolaan Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) harus efektif dan efisien agar memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Dalam penelitian ini Kredit Angsuran Sistem Gadai tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal. Hal tersebut disebabkan oleh penyaluran Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) sedikit dari tahun ke tahun di bandingkan penyaluran Kredit Cepat Aman dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia dapat dilihat pada

tabel 5.3. Oleh karena itu perlu di lakukan strategi pemasaran yang baik, pelayanan prima kepada nasabah, dan promosi akan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan minat mereka atas produk yang diperkenalkan oleh karena kebutuhan hidup yang meningkat karena perubahan ekonomi yang terjadi.

Pengaruh Kredit Serba Guna (KRESNA) terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado sebagai berikut; Kredit Serba Guna adalah merupakan produk perusahaan yang di peruntukan bagi pegawai. Pengelolaan yang efektif dan efisien akan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Peningkatan peyaluran Kredit Serba Guna (KRESNA) akan meningkatkan Pendapatan Sewa Modal (PSM).

Dalam penelitian ini Kredit Serba Guna tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal. Hal tersebut disebabkan oleh penyaluran Kredit Serba Guna (KRESNA) sedikit dari tahun ke tahun di bandingkan penyaluran Kredit Cepat Aman dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia.

## **6. PENUTUP**

### **6.1. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

3. Kredit Cepat Aman ( $X_1$ ) dimana dalam penelitian ini pengukuran variabel adalah jumlah kredit yang disalurkan dari Januari 2006 sampai Desember 2011 berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal ( $Y$ ) dimana dalam penelitian ini pengukuran variabel adalah jumlah pendapatan sewa modal dari Januari 2006 sampai Desember 2011 pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado. Dimana dikatakan berpengaruh oleh karena besarnya jumlah kredit yang disalurkan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, kenaikan harga emas dari tahun ke tahun, penyebaran outlet-outlet yang mudah di jangkau oleh masyarakat, semakin banyak nasabah yang menggadai. Kenaikan kredit yang disalurkan berpengaruh terhadap pendapatan sewa modal yang terus meningkat seiring kenaikan jumlah kredit yang disalurkan.
4. Kredit Angsuran Sistem Fidusia ( $X_2$ ) dimana dalam penelitian ini pengukuran variabel adalah jumlah kredit yang disalurkan dari Januari 2006 sampai Desember 2011 berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal ( $Y$ ) dimana dalam penelitian ini pengukuran variabel adalah jumlah pendapatan sewa modal dari Januari 2006 sampai Desember 2011 pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado. Dimana dikatakan berpengaruh oleh karena besarnya jumlah kredit yang disalurkan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, kepemilikan kendaraan bermotor oleh masyarakat yang meningkat, penyebaran outlet-outlet yang mudah di jangkau oleh masyarakat, semakin banyak nasabah yang membutuhkan dana untuk menambah modal usaha. Kenaikan kredit yang disalurkan berpengaruh terhadap pendapatan sewa modal yang terus meningkat seiring kenaikan jumlah kredit yang disalurkan.
5. Kredit Angsuran Sistem Gadai ( $X_3$ ) dimana dalam penelitian ini pengukuran variabel adalah jumlah kredit yang disalurkan dari Januari 2006 sampai Desember 2011 tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal ( $Y$ ) dimana dalam penelitian ini pengukuran variabel adalah jumlah pendapatan sewa modal dari Januari 2006 sampai Desember 2011 pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado. Dimana dikatakan tidak berpengaruh oleh karena besarnya jumlah kredit yang disalurkan sedikit dibandingkan dengan KCA dan KREASI, kepemilikan masyarakat atas emas kebanyakan dalam jumlah sedikit sehingga tidak dapat dijadikan agunan KRASIDA. Jumlah kredit yang disalurkan kecil berpengaruh terhadap pendapatan sewa modal yang kecil dari jumlah pendapatan sewa modal yang diterima perusahaan.
6. Kredit Serba Guna (KRESNA) dimana dalam penelitian ini pengukuran variabel adalah jumlah kredit yang disalurkan dari Januari 2006 sampai Desember 2011 berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal ( $Y$ ) dimana dalam penelitian ini pengukuran variabel adalah jumlah pendapatan sewa modal dari Januari 2006 sampai Desember 2011 pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado. Dimana dikatakan tidak berpengaruh oleh karena jumlah kredit yang disalurkan sedikit dan pemberian kredit yang dibatasi. Jumlah kredit yang disalurkan kecil berpengaruh terhadap pendapatan sewa modal yang kecil dari jumlah pendapatan sewa modal yang diterima perusahaan.
7. Secara bersama-sama, Kredit Cepat Aman ( $X_1$ ), Kredit Angsuran Sistem Fidusia ( $X_2$ ), Kredit Angsuran Sistem Gadai ( $X_3$ ), Kredit Serba Guna ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal ( $Y$ ) pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado.

### **6.2. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya maka penulis menyarankan :

3. Bagi PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Manado hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan usaha. Untuk Variabel yang diteliti dalam penelitian Kredit Cepat Aman ( $X_1$ ) dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia ( $X_2$ ) penyaluran tetap dipertahankan dan di tingkatkan, peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, penaksiran barang jaminan yang harus lebih teliti, pemanfaatan kenaikan harga emas dengan optimalisasi uang pinjaman, menghubungi nasabah yang jatuh tempo agar barang tidak di eksekusi lewat pelelangan.
4. Sedangkan untuk variabel Kredit Angsuran Sistem Gadai ( $X_3$ ) dan Kredit Serba Guna ( $X_4$ ) ini perlu diperluas sesuai dengan kebutuhan pasar dengan melakukan promosi dan strategi pemasaran yang baik. Mengkaji kembali sistem dan prosedur pemberian kredit.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdula, Th., dan F. Tantri, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : PT. RajaGravindo Persada.
- Divisi Litbang. 2009. Pemasaran Kantor Pusat Perum Pegadaian.
- Divisi Usaha Syariah. 2005. Perum Pegadaian.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 (revisi 2009). Jakarta Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Ketiga*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Melayu Hasibuan, 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Gramedia
- Pedoman Operasional Kredit KRASIDA. 2004.
- Priyatno, Duwi, 2012. *Belajar Cepat olah Data Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi offset.
- Republik, Indonesia, 1998. *Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992*. Lembaga Negara RI Tahun 1998. Kementerian Keuangan Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2002. *Dasar-dasar dan Teknik manajemen Kredit*. Jakarta:PT. BinaAksara.
- Suci, Dwikania S, 2011, *Pengaruh Pemberian Kredit Gadai KCA terhadap Pendapatan Sewa Modal Pada Pegadaian Cabang Pungkur Bandung*, Fakultas Ekonomi Komputer Indonesia, Penelitian Komputer Indonesia, Bandung.
- Sucipto, 2006, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Sewa Modal Pada Cabang Perum Pegadaian Kota Surakarta*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Penelitian Muhammadiyah, Surakarta.
- Triandaru, S., dan T. Budisantoso, 2006. *Dasar-dasar dan Teknik manajemen Kredit*. Jakarta:PT. BinaAksara.
- Tim OPP Kanwil Malang. 2006.

---

**Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Fungsi Dewan dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

**Ferdinant Nuru  
David P. E. Saerang  
Jenny Morasa**

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to examine the effect of the knowledge of budget, public participation and public policy transparency towards the local council function within budget control. The results shows that budgets knowledge, public participation and public policy transparency affect the council functions within local budget control. Only transparency of public policies that affect partially the council functions within regional budget control, while the budget knowledge and public participation did not affect the function of the local council within the budget control. The budget knowledge did not affect the council functions within budget control because it poorly supported by the competency level of councilors, while the public participation had no effect because the overall respondents answer can be concluded that public critique and suggestions is less accommodated especially public involvement in the budget advocacy.*

**Key words** : *The knowledge of budget, public participation, public policy transparency, the local council functions, regional budget control.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Fungsi APBD pada awalnya sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat, oleh karena itu fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Sopannah, 2005).

Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi daerah adalah masalah pengelolaan keuangan secara khusus dan masalah Pengelolaan APBD secara umum. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Sopannah, 2005). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah akuntabilitas publik, transparansi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian serta penjelasan di atas, maka sangat jelas bahwa fungsi legislatif atau DPRD dalam pengawasan APBD sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan APBD secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun kenyataan yang terjadi selama ini, bahwa masih banyak permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan APBD yang dilaksanakan lembaga eksekutif yang tidak dapat dikontrol dengan baik oleh lembaga legislatif karena masih rendahnya peranan legislatif atau DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. Rendahnya peran legislatif ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah diuraikan di atas yaitu pengetahuan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Dewan dalam pengawasan APBD.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memutuskan dalam penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Fungsi Dewan dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong?
3. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong?

4. Apakah pengetahuan anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik secara simultan berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggaran terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik secara simultan terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pikiran dan memberikan manfaat yang berarti, yaitu :

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan kinerja DPRD dalam pengawasan APBD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*); sedangkan bagi partai politik dapat dijadikan acuan pada saat rekrutment anggota dewan dan pengembangan kader partai.
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang sistem akuntansi sektor publik dan fungsi dewan dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengetahuan Anggaran

Mahsun (2012 : 145), menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan peraturan daerah tentang APBD.

### 2.2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari tahap persiapan anggaran (*preparation*), ratifikasi (*approval/ratification*), implementasi (*implementation*), dan pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*) (Mardiasmo, 2009: 70).

### 2.3. Transparansi Kebijakan Publik

*Transparency* merupakan salah satu Karakteristik *Good Governance* menurut *United Nation Development Program (UNDP)*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan

memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, (Mardiasmo, 2009: 20).

#### 2.4. Fungsi DPRD sebagai Pengawas APBD

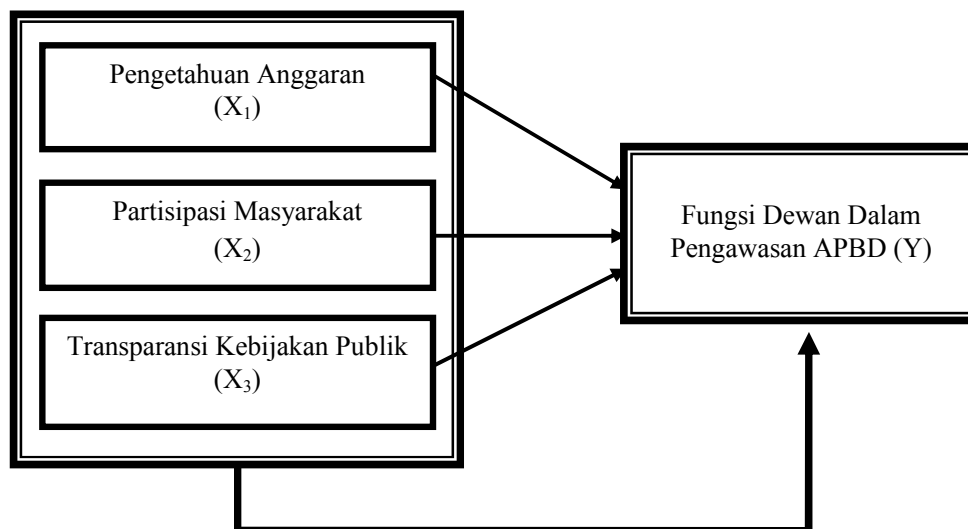
Pengawasan merupakan tahap yang integral dari keseluruhan tahapan dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2009). Pengawasan oleh dewan terhadap APBD dimulai pada saat proses penyusunan, pelaksanaan, perubahan dan pertanggungjawaban APBD.

#### 2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Anggaran dan Pengawasan APBD telah banyak dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Warimon (2005) yang meneliti mengenai “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) atau dengan kata lain semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat. (2) interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD, (3) interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD, (4) interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.

### 3. KERANGKA KONSEPTUAL

#### 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

#### 3.2. Hipotesis

- H1 : Pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.
- H2 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.
- H3 : Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.

H4 : Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.

#### 4. METODE PENELITIAN

##### 4.1. Jenis/Rancangan Penelitian yang Digunakan

	(X <sub>1</sub> )	(X <sub>2</sub> )	(X <sub>3</sub> )	(Y)
Corrected Item-Total Correlation P1	.566	.622	.579	.597
Corrected Item-Total Correlation P2	.782	.490	.432	.658
Corrected Item-Total Correlation P3	.684	.490	.553	.492
Corrected Item-Total Correlation P4	.615	.604	.719	.522
Corrected Item-Total Correlation P5	.640	.475	.775	.724
Corrected Item-Total Correlation P6	.422	.735	.720	.476
Corrected Item-Total Correlation P7	.825	.689	.446	.725
Corrected Item-Total Correlation P8	.474	.733	.694	.365
Corrected Item-Total Correlation P9	.580	.663	.442	.492
Corrected Item-Total Correlation P10	.738	.475	.327	.339
Corrected Item-Total Correlation P11	.605	.725	.448	.381
Corrected Item-Total Correlation P12	.471	.541	.557	.614
Corrected Item-Total Correlation P13	.449	.663	.849	.415
Corrected Item-Total Correlation P14	.843	.539	.652	.302
Cronbach's Alpha	.759	.756	.754	.740

Jenis penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kausal yaitu untuk melihat hubungan beberapa variabel yang belum pasti. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang dikuantitatifkan yaitu data mengenai pengetahuan tentang anggaran, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan dan pengalaman politik terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah/APBD yang diangkakan (*scoring*) dengan menggunakan skala likert. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden yaitu seluruh anggota DPRD Kota Sorong periode 2009-2014.

##### 4.2. Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian, (Masyhuri, Zainuddin M., 2009 : 151). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang berada di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong sebanyak 30 orang.

Sedangkan sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi. Metode pengambilan sampel adalah observasi, wawancara dan sensus atau kuesioner, yang mana seluruh populasi yaitu 30 orang anggota DPRD Kota Sorong dijadikan sebagai sampel.

##### 4.3. Cara Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Menentukan profil responden.
2. Pengujian kualitas data
3. Pengujian Gejala Penyimpangan Asumsi Klasik.
4. Pengujian Hipotesis
5. Menentukan Koefisien Korelasi dan Determinasi
6. analisis regresi linier berganda



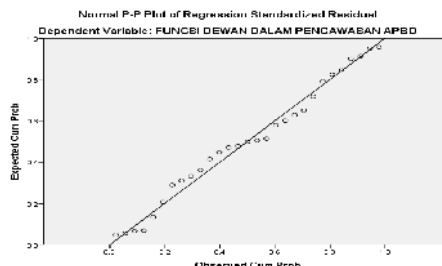
**5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

**5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data**

Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk pertanyaan 1-14 untuk variabel  $X_1$   $X_2$   $X_3$  dan  $Y$ , mempunyai nilai korelasi di atas 0,30 dan *cronbach alpha* 0,743. Semua dinyatakan reliabel dan valid.

**5.2. Uji Asumsi Klasik**

**4. Uji Normalitas**

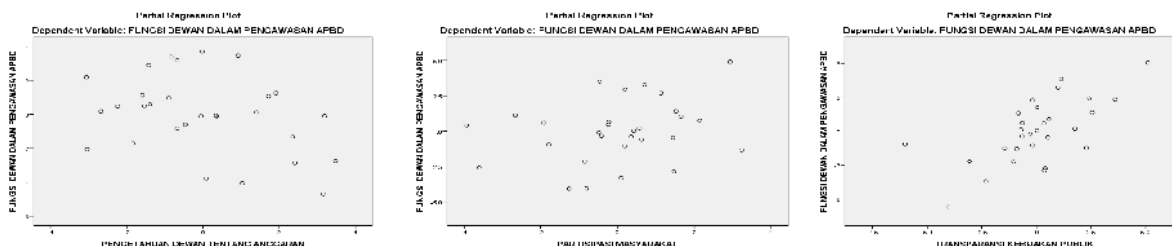


(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

**Gambar 5.1 Uji Normalitas**

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa grafik *Normal P-P of regression standardized residual* memenuhi asumsi *normalitas* dimana penyebaran data di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut.

**5. Uji Heteroskedastisitas**



(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

**Gambar 5.2 Uji Heteroskedastisitas**

Pada gambar 5.2 dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu  $Y$ , hal ini membuktikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

**6. Uji Multikoleniaritas**

**Tabel 5.2 Hasil uji multikoleniaritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.120	8.326
Partisipasi Masyarakat	.109	9.142
Transparansi Kebijakan Publik	.192	5.209

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Berdasarkan hasil *coefficients* yang terdapat pada tabel 5.2 dapat dilihat pada *output coefficients* model, dikatakan tidak terjadi gejala multikoleniaritas jika  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$ .

### 5.3. Koefisien Korelasi (r)

**Tabel 5.3 Koefisien Korelasi**

		Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD
Pearson Correlation	Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD	1.000
	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.693
	Partisipasi Masyarakat	.769
	Transparansi Kebijakan Publik	.857
Sig. (1-tailed)	Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD	.
	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.000
	Partisipasi Masyarakat	.000
	Transparansi Kebijakan Publik	.000
N	Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD	29
	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	29
	Partisipasi Masyarakat	29
	Transparansi Kebijakan Publik	29

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Hasil olahan data menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran ( $X_1$ ) mempunyai korelasi yang bersifat kuat, positif dan signifikan dengan fungsi dewan dalam pengawasan APBD (Y). Untuk variabel Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ ) mempunyai korelasi yang bersifat kuat, positif dan signifikan dengan fungsi dewan dalam pengawasan APBD (Y). Untuk variabel Transparansi Kebijakan Publik ( $X_3$ ) mempunyai korelasi yang bersifat sangat kuat, positif dan signifikan dengan fungsi dewan dalam pengawasan APBD (Y).

### 5.4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 5. Hasil uji koefisien korelasi dan determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 <sup>a</sup>	.768	.740	2.248

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Dengan melihat tabel output SPSS *model Summary* maka dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) terlihat dari nilai *Adjusted R Square* karena penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel bebas yaitu sebesar 0,768 atau 76,8%, sedangkan 23,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### 5.5. Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = 14,567 - 0.431X_1 + 0.361 X_2 + 0.831 X_3 + e$$

**Tabel. 5.5 Koefisien Regresi**

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	14.567	5.340
	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	-.431	.225
	Partisipasi Masyarakat	.361	.249
	Transparansi Kebijakan Publik	.831	.192
	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran		

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Konstanta  $\alpha$  sebesar 14,567 memberikan pengertian bahwa jika pengetahuan anggaran ( $X_1$ ), Partisipasi masyarakat ( $X_2$ ), dan transparansi kebijakan publik ( $X_3$ ) sama dengan nol (0), maka efektivitas fungsi dewan dalam pengawasan APBD di DPRD Kota Sorong adalah 14,567 satuan skor.

Variabel pengetahuan anggaran ( $X_1$ ), memiliki nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar -0,431, ini berarti bahwa jika variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin (1%) variabel pengetahuan anggaran ( $X_1$ ) maka fungsi dewan dalam pengawasan APBD akan berkurang

sebesar 0,431 dari kondisi sebelumnya. Koefisien variabel pengetahuan anggaran ( $X_1$ ) bernilai negatif, artinya terdapat hubungan negatif antara ( $X_1$ ) pengetahuan anggaran dengan ( $Y$ ) fungsi dewan dalam pengawasan APBD. Artinya bahwa semakin berkurang nilai pengetahuan dewan tentang anggaran, maka akan berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap APBD di DPRD Kota Sorong.

Variabel Partisipasi masyarakat ( $X_2$ ), memiliki nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar 0,361, ini berarti bahwa jika variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin (1%) variabel Partisipasi masyarakat ( $X_2$ ), akan meningkatkan nilai fungsi dewan dalam pengawasan APBD sebesar 0,361 dari kondisi sebelumnya. Koefisien variabel Partisipasi masyarakat ( $X_2$ ), bernilai positif, artinya terdapat hubungan positif antara ( $X_2$ ) Partisipasi masyarakat dengan ( $Y$ ) fungsi dewan dalam pengawasan APBD. Artinya bahwa jika Partisipasi masyarakat ( $X_2$ ) semakin meningkat maka akan meningkatkan fungsi dewan dalam pengawasan APBD ( $Y$ ) di DPRD Kota Sorong.

Variabel transparansi kebijakan publik ( $X_3$ ), memiliki nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar 0,831, ini berarti bahwa jika variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin (1%) variabel transparansi kebijakan publik ( $X_3$ ), akan meningkatkan nilai fungsi dewan dalam pengawasan APBD sebesar 0,831 dari kondisi sebelumnya. Koefisien variabel transparansi kebijakan publik ( $X_3$ ), bernilai positif, artinya terdapat hubungan positif antara ( $X_3$ ) transparansi kebijakan publik dengan ( $Y$ ) fungsi dewan dalam pengawasan APBD. Artinya bahwa semakin meningkat nilai transparansi kebijakan publik ( $X_3$ ), maka akan meningkatkan fungsi dewan dalam pengawasan APBD ( $Y$ ) di DPRD Kota Sorong.

#### 5.6. Pengujian Hipotesis (Uji F)

**Tabel 5.6 Analysis Of Variance**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	418.935	3	139.645	27.625	.000 <sup>a</sup>
Residual	126.376	25	5.055		
Total	545.310	28			

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Dari tabel 5.25 diketahui nilai  $F_{hitung} = 27,625$ . Angka tersebut lebih besar dari  $F_{tabel} = 2,991$  ( $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $27,625 > 2,991$ ) pada tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya bahwa, Pengetahuan Anggaran ( $X_1$ ), Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ ) dan Transparansi Kebijakan Publik ( $X_3$ ), secara bersama-sama berpengaruh terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD ( $Y$ ).

#### 5.7. Pengujian Hipotesis (Uji t)

**Tabel 5.7 Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	14.567	5.340		2.728
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	-.431	.225	-.533	-1.920
Partisipasi Masyarakat	.361	.249	.423	1.451
Transparansi Kebijakan Publik	.831	.192	.949	4.319

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Dari tabel 5.26 dapat diketahui hasil uji t untuk masing-masing variabel secara parsial yaitu, nilai koefisien regresi  $X_1$  memiliki tingkat signifikansi 0,066, nilai ini lebih besar dari 0,05 ( $\text{sig} > \alpha$  atau  $0,066 > 0,05$ ); apabila menggunakan nilai  $t_{hitung}$  dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,920 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,060 ( $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-1,920 < 2,060$ ). Hal ini berarti bahwa Variabel Pengetahuan Anggaran ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD di DPRD Kota Sorong.

Nilai koefisien regresi  $X_2$  memiliki tingkat signifikansi 0,159, nilai ini lebih besar dari 0,05 ( $\text{sig} > \alpha$  atau  $0,159 > 0,05$ ); apabila menggunakan nilai  $t_{hitung}$  dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,451 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,060 ( $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $1,451 < 2,060$ ). Hal ini berarti bahwa Variabel Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD di DPRD Kota Sorong.

Nilai koefisien regresi X3 memiliki tingkat signifikansi 0,014, nilai ini lebih kecil dari 0,05 ( $\text{sig} < \alpha$  atau  $0,014 < 0,05$ ); apabila menggunakan nilai  $t_{\text{hitung}}$  dibandingkan dengan  $t_{\text{tabel}}$  dapat diketahui bahwa nilai  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 2,658 lebih besar dari nilai  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 2,060 ( $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  atau  $2,658 > 2,060$ ). Hal ini berarti bahwa Variabel Transparansi Kebijakan Publik ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan APBD di DPRD Kota Sorong.

## 5.8. Pembahasan

### 1. Pengetahuan anggaran tidak berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.

Pengetahuan anggaran tidak berpengaruh terhadap fungsi dewan dalam pengawasan APBD terjadi karena kurang didukung oleh pemahaman anggota dewan mengenai penganggaran.

### 2. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.

Keterlibatan masyarakat yang setiap tahunnya dilakukan melalui musrenbang untuk menjangkau aspirasi masyarakat sudah berjalan dengan baik. Problem nyata yang dihadapi adalah ternyata mekanisme partisipasi yang ada tidak cukup memberikan ruang apresiatif dari masyarakat karena partisipasi yang dijalankan hanyalah partisipasi yang semu, simbolis penuh dengan manipulasi karena aturan-aturan itu tidak bisa menjamin proses penganggaran, berdasarkan *people need assessment*.

### 3. Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

### 4. Pengetahuan anggaran, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh terhadap fungsi Dewan dalam pengawasan APBD pada DPRD Kota Sorong.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Isma Coryanata. (2007), Wardayani (2010), Sari (2010) menyimpulkan bahwa secara simultan pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Werimon (2005) dan Winarna & Murni (2007) menyatakan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.

## 6. PENUTUP

### 6.1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

3. Pengetahuan Anggaran ( $X_1$ ), tidak berpengaruh terhadap fungsi dewan dalam pengawasan APBD ( $Y$ ) adalah sebesar koefisien regresi ( $\beta$ ) -0,431, dengan nilai  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  atau  $-1,920 < 2,060$ . Artinya bahwa jika variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin (1%) variabel pengetahuan anggaran maka fungsi dewan dalam pengawasan APBD akan berkurang sebesar 0,431 dari kondisi sebelumnya. Koefisien variabel pengetahuan anggaran bernilai negatif, artinya terdapat hubungan negatif antara pengetahuan anggaran dengan fungsi dewan dalam pengawasan APBD.
4. Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ ), tidak berpengaruh terhadap fungsi dewan dalam pengawasan APBD ( $Y$ ) adalah sebesar koefisien regresi ( $\beta$ ) 0,361 dengan nilai  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  ( $1,451 < 2,060$ ). Artinya bahwa jika variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin (1%) variabel Partisipasi masyarakat, akan meningkatkan nilai fungsi dewan dalam pengawasan APBD sebesar 0,361 dari kondisi sebelumnya. Koefisien variabel Partisipasi masyarakat bernilai positif, artinya terdapat hubungan positif antara Partisipasi masyarakat dengan fungsi dewan dalam pengawasan APBD.
5. Transparansi Kebijakan Publik ( $X_3$ ), berpengaruh terhadap fungsi dewan dalam pengawasan APBD ( $Y$ ) adalah sebesar koefisien regresi ( $\beta$ ) 0,831, dengan nilai  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  atau  $2,658 > 2,060$ . Artinya bahwa jika variabel lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin (1%) variabel transparansi kebijakan publik, akan meningkatkan nilai fungsi dewan dalam pengawasan APBD sebesar 0,831 dari kondisi sebelumnya. Koefisien variabel

transparansi kebijakan publik, bernilai positif, artinya terdapat hubungan positif antara transparansi kebijakan publik dengan fungsi dewan dalam pengawasan APBD.

6. Secara bersama-sama Pengetahuan Anggaran ( $X_1$ ), Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ ), dan Transparansi Kebijakan Publik ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap fungsi dewan dalam pengawasan APBD ( $Y$ ) dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $27,625 > 2,991$ , pada tingkat signifikansi 0,05.
7. Kontribusi dari pengetahuan anggaran ( $X_1$ ), partisipasi masyarakat ( $X_2$ ), dan transparansi kebijakan publik ( $X_3$ ) terhadap variasi naik turunnya fungsi dewan dalam pengawasan APBD di Kota Sorong adalah sebesar koefisien determinasi  $R^2 = 0.740$  atau 74%. sedangkan sisanya sebanyak 26 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## 6.2. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan agar supaya sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan fungsi DPRD di bidang pengawasan sangat diperlukan pengetahuan dan kemampuan tentang anggaran, maka disarankan agar seluruh anggota DPRD diberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan DPRD dalam pengawasan APBD, dan secara khusus bagi anggota DPRD yang berhubungan dengan pengawasan dan anggaran.
2. Untuk memudahkan fungsi pengawasan yang bersifat kebijakan, sebaiknya DPRD memakai tenaga ahli yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing yang bertugas melakukan pengkajian guna memberikan *input*. Tenaga ahli ini dapat diambil dari perguruan tinggi yang memang ahli di bidangnya. Dengan menggunakan hasil kajian ini diharapkan DPRD tidak salah dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif B, Muchis, Iskandar, (2009) *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Akademia, Jakarta
- BAPEDA Kota Sorong, 2010, Profil Kota Sorong
- Coryanata I. 2007, *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar
- Mardiasmo, (2009); *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi IV, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Mahsun, Moh. (2012) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Edisi Pertama*, Penerbit BPFY Yogyakarta., Cetakan Ketiga Januari 2012.
- Masyhuri, Zainuddin, M., *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Cetakan kedua, Penerbit PT. Refika Aditama Bandung, 2009.
- Nafarin, M., (2004) *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat.
- Nordiawan D. *et. al*, 2012, Putra I.S dan Rahmawati M. *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat
- Nordiawan D. dan Hertianti A., 2012, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat
- Riduwan, H. Sunarto, (2009), *Pengantar Statistika*, Penerbit ALFABETA Bandung
- Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Sari I. 2010, *Pengaruh Personal Background dan Political Background Serta Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah/APBD*
- Sopannah, 2005, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)* Jurnal Logos, Vol 3 No. 1 Juli 2005.
- Sarjono, Haryadi & Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta : Salemba Empat.

- Wahjono, S.I., 2006, *Perilaku Organisasi*, penerbit Graha Ilmu
- Wardayani, 2010, *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Profesional Sebagai Variabel Moderasi*.
- Weney M., 2012, *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur SKPD*
- Werimon S, 2005, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*
- Werimon S, et al., 2007, Ghozali dan Nazir Moh., *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar.
- Winarna J dan S. Murni. 2007, *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar.
- Wibowo. A.E., 2012, *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian*, Penerbit Gaya Media Yogyakarta.
- Cendrawasi Pos, (Keerom, Papua) Kamis, 01 Maret 2012 , 18:12:00
- Suara Karya** (Sorong-Papua Barat), 12 September 2006

**PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN  
TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT KOTA TOMOHON  
DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

*Marietta Sylvie Bolang*

*Jullie J Sondakh*

*Jenny Morasa*

**ABSTRACT**

*This study examined the influence of the auditors' competency, independency, and experiences towards audit quality of financial auditing of the staff of inspectorate in Tomohon City as part of their supervision function. The finding of this study could be an important input for improving the quality of financial management of the local government since the policy of decentralization has given the local governments authority not only to manage natural resources but also their financial sector. However, as could be seen there are still a lot of problems related to financial management mostly caused by the poor knowledge and skills related to financial auditing of government officials responsible for this specific task. It is common to find inconsistency in the financial report of internal auditor (inspectorate) and external auditor, Supreme Audit Agency (Badan Pemeriksa Keuangan).*

*There were two variables in this study. Audit quality was the dependent variable (Y) while the independent variables elaborated into three variables, namely: auditor's competency (X1), auditor's independency (X2) and auditor's experiences (X3). There were 36 personnel of the Inspectorate's Office of Tomohon City participated as the sources of this study. Thus, the population of this research is the Tomohon City Regional Inspectorate officers. Data used in this study were primary and secondary data, while questioner and in-depth interview as well as document study used as the data collection methods. The first consecutive methods employed to obtain primary data while the last used for obtaining secondary data. Both data analyzed using the multiple linear regression techniques.*

*This study found that the influence of independent variable which were competency, independency and experiences towards dependent variables which was audit quality was significant. The 0.645 value of coeficient determination showed the significant relationship between both variables. This means that the equation model used in this study found the significancy at about 64,5%. The remaining proportion which was 35,5% explained by the other factors which were not part of this model. After examining the hypotheses, it can be concluded that partially competency had positive influence but not too significant to the quality of the inspectorate officer. However, independency and experiences had a positive and significant influence to the auditing quality of the public servant working in the inspectorate's office.*

*This study recommends to improving the knowledge and skills of the public apparatus by conducting short courses and training in accounting and auditing.*

**Keywords:** *audit quality, competency, independency and experiences*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kesadaran akan pentingnya lembaga inspektorat sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal (*auditor internal*) pemerintahan semakin meningkat. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan salah satu agenda utama reformasi sektor publik di Indonesia. Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2005 dalam Efendy 2010). Boynton (dalam Efendy, 2010) menjelaskan bahwa fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Untuk dapat menjalankan fungsi ini, seorang auditor harus memiliki kompetensi, independensi dan pengalaman. Hal ini sangat penting mengingat pengelolaan keuangan pemerintah daerah banyak mendapat sorotan dengan maraknya pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut *Peraturan Walikota Tomohon Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Inspektorat Kota Tomohon*, Inspektorat sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Tomohon mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Tomohon, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan kota. Namun ada indikasi bahwa kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Tomohon dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan daerah masih lemah. Indikatornya adalah masih banyak temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu BPK.

Berdasarkan hasil temuan BPK (Tahun Anggaran 2011) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, antara lain didapatkan hasil berupa adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan dan kesalahan administrasi dalam hal pelaporan keuangan. Pengalaman tiga tahun terakhir, Kota Tomohon memperoleh penilaian *disclaimer* dari BPK dalam hal pengelolaan keuangan. Dengan adanya temuan tersebut, berarti kualitas audit aparat inspektorat Kota Tomohon sebagai auditor internal pemerintah dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan daerah masih lemah dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis tertarik mengambil judul "Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah."

### 1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah ada pengaruh dari ketiga variabel, kompetensi independensi dan pengalaman terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah?

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel kompetensi, independensi dan pengalaman aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama.

### 1.3. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan



daerah, sehingga akan dapat dimanfaatkan oleh para pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat.

2. Sebagai masukan bagi Inspektorat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam meningkatkan kinerjanya sebagai internal auditor/aparat pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
3. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam Akuntansi Sektor Publik khususnya dalam hal pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
4. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

## **2. LANDASAN TEORITIS**

### **2.1. Pengertian *Good Governance***

*Good governance* menurut Sapariyah 2011, merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. Pemahaman *good governance* dapat didefinisikan dengan seberapa jauh pemahaman atas konsep tata kelola perusahaan atau organisasi yang baik oleh para auditor. Pemahaman *good governance* merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Pemahaman atas *good governance* adalah untuk menciptakan keunggulan manajemen kinerja baik pada perusahaan bisnis manufaktur (*good corporate governance*) ataupun perusahaan jasa, serta lembaga pelayanan publik atau pemerintahan (*good government governance*).

### **2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam azas umum Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga proses besar, yakni: perencanaan (termasuk didalamnya aktifitas penetapan APBD/penganggaran), penatausahaan (proses pelaksanaan APBD) dan pelaporan (pertanggungjawaban APBD). Proses akuntansi merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang mengharuskan setiap pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaporkan seluruh transaksi ke dalam laporan keuangan. Struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah yang dirinci berdasarkan urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan. Sampai sejauh ini, di Indonesia belum di atur mengenai standar akuntansi keuangan pemerintah yang merupakan acuan untuk menyusun dan membuat pelaporan keuangan pemerintah (Efendy, 2010).

### **2.3. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 308, dikatakan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, *good governance* dan *clean government* diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Cahyat, 2004 dalam Efendy 2010).

Cahyat (2004) dalam Efendy 2010, berdasarkan obyek pengawasan, pengawasan terhadap pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta produk hukum

dan kebijakan keuangan daerah. Tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah yaitu melakukan pengawasan keuangan. Beberapa kewenangan daerah yang menyangkut pengawasan terhadap keuangan dan aset daerah adalah pelaksanaan APBD, penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan/penghapusan barang/jasa, penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi, penyelesaian ganti rugi, serta inventarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

#### **2.4. Kualitas Audit**

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam lampiran 3 SPKN (Paragraf 7) disebutkan bahwa: "Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Hal pengukuran kualitas audit memerlukan indikator-indikator antara lain kualitas proses, apakah audit dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptis yang dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Probabilitas auditor untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi *auditee*, tergantung pada kemampuan teknis, independensi auditor dan pengalaman dalam melakukan pemeriksaan.

#### **2.5. Kompetensi**

Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek yang akan diaudit berupa pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi auditor. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat, intuitif, seksama dan jarang melakukan kesalahan.

#### **2.6. Independensi**

Arens, *et al.*, (2000) dalam Efendy (2010), mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai "Penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit". Sedangkan menurut Mulyadi (2008:26) dalam Sapariyah (2011) Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

#### **2.7. Pengalaman**

Knoers dan Haditono (1999) dalam Asih (2006: 12) mengatakan bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Variabel pengalaman akan diukur dengan menggunakan indikator lamanya bekerja, frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan, dan banyaknya pelatihan yang telah diikutinya.

#### **2.8. Tinjauan Pustaka**

Aji (2009) dalam Bawono (2010) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit ditinjau dari persepsi auditor atas independensi, pengalaman, dan akuntabilitas. Hasilnya adalah independensi, pengalaman, dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Selain itu, variabel independensi dan akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit dan variabel pengalaman tidak berpengaruh terhadap

kualitas audit. Rahman (2009) dalam Bawono (2010) meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan *due profesional care* terhadap kualitas audit. Hasilnya adalah ketiga variabel independen tersebut berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.

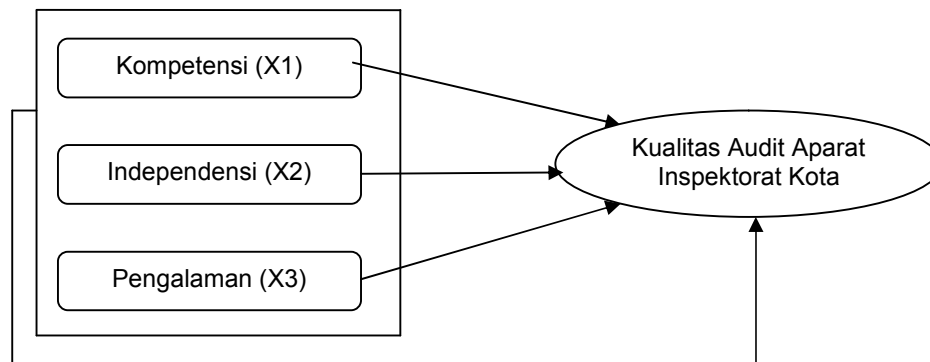
Fahdi (2012) meneliti tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, kompetensi, dan motivasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa independensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan untuk pengalaman kerja, obyektifitas, integritas, dan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Persamaan penelitian-penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel dependen yang digunakan, yaitu: kualitas audit dan objek penelitian pada sektor publik yakni Pemerintah Kota Tomohon. Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada variabel independen dimana penelitian ini fokus pada tiga variabel yakni: kompetensi, independensi dan pengalaman.

### 3. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 3.1. Kerangka konseptual pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman terhadap kualitas audit aparat Inspektorat Kota Tomohon



#### 3.2. Hipotesis

Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini:

- H<sub>1</sub> : Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat di Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.
- H<sub>2</sub> : Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat di Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.
- H<sub>3</sub> : Pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat di Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

### 4. METODE PENELITIAN

#### 4.1. Jenis/ Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory/confirmatory research*) karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan causal antara variabel-variabel dengan melalui pengujian hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu yang diambil dari kuesioner dan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara.

#### 4.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kota Tomohon yang ikut dalam tugas pemeriksaan, yaitu sebanyak 36 orang. Karena jumlah populasi sedikit, maka semua populasi akan dijadikan sampel. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus, dimana penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi.

#### 4.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen (kompetensi, independensi dan pengalaman auditor) dan satu variabel dependen yakni kualitas audit.

Variabel-variabel tersebut di atas menggunakan kuesioner yang terdiri dari 21 pertanyaan dan diukur dengan skala *Likert* 1-5 untuk setiap bobot pertanyaan yaitu :

1. Sangat setuju (SS) = Skor 5
2. Setuju (S) = Skor 4
3. Netral (N) = Skor 3
4. Tidak Setuju (TS) = Skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) = Skor 1

#### 4.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kota Tomohon pada bulan Maret 2012 sampai selesai di bulan September tahun 2012. Pemilihan Kota Tomohon sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masih diperlukannya upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat Kota Tomohon hal ini ditandai dengan adanya temuan dari BPK tentang pengelolaan keuangan daerah dan pemberian opini *Disclaimer* sejak tiga tahun berturut-turut (Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011).

#### 4.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data tentang variabel-variabel yang diungkapkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi melalui penyebaran kuesioner dan melakukan wawancara.

#### 4.6. Cara Pengolahan dan Teknik Analisis Data

##### 4.6.1. Cara Pengolahan Data

Statistik Deskriptif

##### 4.6.2. Teknik analisis Data

1. Uji asumsi klasik, terdiri atas: uji Normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas;
2. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan uji simultan (Uji F) dan uji parsial (Uji t).

## 5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 5.1. Statistik Responden

**Tabel 5.1. Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja responden**

Jenis Kelamin (%)		Usia (%)				Tingkat Pendidikan (%)				Masa Kerja (%)		
L	P	<30	30-40	40-50	>50	S2	S1	D3	SM A	<5th	5-10th	>10th
36,1	63,9	13,9	44,4	19,4	22,2	22,2	52,7	11,1	13,9	41,7	13,9	44,4

**Tabel 5.2. Latar Belakang Pendidikan Responden**

Latar Belakang Pendidikan							
Ekonomi (S1)						Non Ekonomi (D3, S1, S2)	
Akuntansi		Manajemen		Ek. Pembangunan			
Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2,77	6	16,66	1	2,77	28	77,77

**5.2. Uji Asumsi Klasik**

**5.2.1. Uji Normalitas**

**Gambar 5.1 Grafik Normal P-P Plot**



Sumber : Hasil Olahan, 2012. Data SPSS Version 20.00.

Berdasarkan gambar 5.1. grafik normal plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

**5.2.2. Uji Multikolinearitas**

**Tabel 5.3. Hasil Perhitungan Tolerance dan VIF Coefficients<sup>a</sup>**

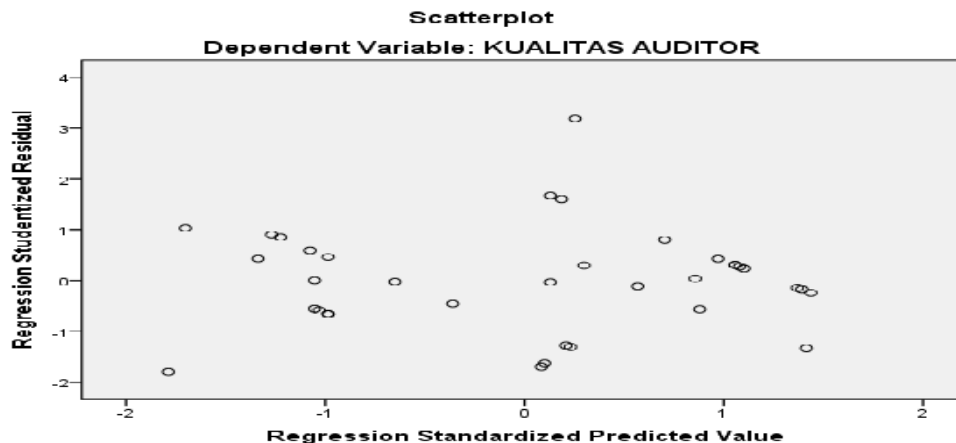
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 KOMPETENSI	.997	1.003
INDEPENDENSI	.925	1.081
PENGALAMAN	.925	1.081

Dependent Variable: KUALITAS AUDITOR

Sumber : data Hasil Olahan SPSS Version 20.00

5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 5.2 Grafik Scatterplot



Sumber : data Hasil Olahan SPSS Version 20.00

Berdasarkan Gambar 5.2, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat berdasarkan gambar 5.2, dimana titik-titik yang ada dalam grafik tidak membentuk pola yang teratur atau tertentu yang jelas dan titik-titik tersebut tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat diindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

5.3. Uji Hipotesis

5.3.1. Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi berganda yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan SPSS 20.00 tampak pada Tabel 5.3. Berdasarkan tabel 5.3, maka menghasilkan

$$Y = 2,694 + 0,58X_1 + 0,749X_2 + 1,086X_3 + e$$

Tabel 5.4. Hasil Regresi Berganda Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.694	4.955		.544	.590
	KOMPETENSI	.058	.150	.039	.390	.699
	INDEPENDENSI	.749	.186	.422	4.035	.000
	PENGALAMAN	1.086	.190	.600	5.728	.000

Sumber : Data Olahan, 2012

Berdasarkan persamaan regresi berganda pada Tabel 5.3, dapat dilihat nilai konstanta (a) sebesar 2,694 dan bernilai positif, hal ini berarti besarnya Kualitas Auditor (Y) mempunyai hubungan positif atau searah dengan variabel Independen yaitu variabel Kompetensi (X1), Independensi (X2), dan Pengalaman (X3). Koefisien regresi Kompetensi (X1), sebesar 0,058 dan mempunyai nilai positif atau searah yang menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan variabel Kompetensi (X1), maka akan mengakibatkan peningkatan Kualitas Auditor (Y) dengan asumsi faktor lain konstan. Koefisien regresi Independensi (X2), sebesar 0,749 dan mempunyai nilai positif atau mempunyai hubungan searah yang menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan variabel Independensi (X2), maka akan mengakibatkan peningkatan Kualitas Auditor (Y) dengan asumsi faktor lain konstan. Koefisien regresi Pengalaman (X3), sebesar 1.086 dan mempunyai nilai positif atau mempunyai hubungan searah yang menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan variable

Pengalaman ( $X_3$ ), maka akan mengakibatkan peningkatan Kualitas Auditor ( $Y$ ) dengan asumsi faktor lain konstan.

### 5.3.2. Uji F

Dari hasil *output* uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) dapat diketahui nilai F seperti pada Tabel 5.5 berikut ini:

**Tabel 5.5. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	233.258	3	77.753	22.222	.000 <sup>b</sup>
	Residual	111.965	32	3.499		
	Total	345.222	35			

a. Dependent Variable: KUALITAS AUDITOR

b. Predictors: (Constant), PENGALAMAN, KOMPETENSI, INDEPENDENSI

Sumber : *Data Olahan, 2012*

Berdasarkan Tabel 5.5, hasil uji F diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar  $22.222 > F_{tabel}$  1,764 dengan menggunakan tingkat signifikansi  $P = 0,000 < \alpha = 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi, independensi dan pengalaman secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat inspektorat di Kota Tomohon.

### 5.3.3. Uji t

Dari analisis regresi *output* dapat dilihat pada tabel 5.6, sebagai berikut:

**Tabel 5.6. Hasil Uji t**

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.694	4.955		.544	.590
1 KOMPETENSI	.058	.150	.039	.390	.699
INDEPENDENSI	.749	.186	.422	4.035	.000
PENGALAMAN	1.086	.190	.600	5.728	.000

sumber : *Data Olahan, 2012*

Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (uji 2 sisi), dengan derajat kebebasan  $df = (n-k-1)$  atau  $(36-3-1) = 32$ . Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 2,355, dengan kriteria pengujian:

- $H_0$  diterima jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$
- $H_0$  ditolak jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$

#### 1. Pengujian hipotesis 1

Nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,390 < 2,355$ ) dan signifikansi  $P = 0,699 > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima, dan  $H_a$  ditolak artinya secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan antara kompetensi ( $X_1$ ) dan Kualitas Audit ( $Y$ ).

#### 2. Pengujian hipotesis 2

Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,035 > 2,355$ ) dan signifikansi  $P = 0,000 < \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya secara parsial berpengaruh signifikan antara independensi ( $X_2$ ) dan Kualitas Audit ( $Y$ ).

#### 3. Pengujian hipotesis 3

Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,728 > 2,355$ ) dan signifikansi  $P = 0,000 < \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya secara parsial berpengaruh signifikan antara pengalaman ( $X_3$ ) dan Kualitas Audit ( $Y$ ).

### 5.3.4. Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan SPSS 20.00 tampak pada Tabel 5.7, sebagai berikut:

**Tabel 5.7. Hasil Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.822 <sup>a</sup>	.676	.645	1.87053	1.684

a. Predictors: (Constant), PENGALAMAN, KOMPETENSI, INDEPENDENSI

b. Dependent Variable: KUALITAS AUDITOR

Sumber : *Data Olahan, 2012*

Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,645. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi, independensi dan pengalaman terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit adalah sebesar 64,5%, sedangkan sisanya sebesar 35,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, misalnya akuntabilitas, etika, atau motivasi, tergantung penelitian yang dilakukan.

## 5.4. Pembahasan

### 5.4.1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama yang menyebutkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat Inspektorat di Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan. Hasil penelitian yang didapat adalah kompetensi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit namun mempunyai hubungan yang positif atau searah.

Hasil pengujian hipotesis ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Mansur (2007), Alim, dkk (2007), dan Efendy (2010) yang menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fahdi (2012) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, alasannya karena masih kurangnya pengetahuan auditor dalam memahami entitas yang diaudit, kemudian kurangnya kemampuan auditor dalam menganalisa permasalahan.

### 5.4.2. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua bahwa independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya independensi seorang auditor akan meningkatkan kualitas audit, artinya kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki independensi yang baik.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Mansur (2007), Alim dkk (2007), Aji (2009) dan Fahdi (2012) yang menyatakan bahwa variabel independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

### 5.4.3. Pengaruh Pengalaman terhadap Kualitas Audit

Hasil penelitian pada hipotesis ketiga ini menyatakan bahwa pengalaman secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Adanya pengaruh positif variabel pengalaman berarti semakin tinggi tingkat pengalaman auditor semakin tinggi pula tingkat kualitas auditnya. Auditor yang berpengalaman cenderung memiliki ketelitian dan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mansur (2007), yang menyebutkan bahwa pengalaman auditor berhubungan positif terhadap kualitas audit.



## **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman aparat Inspektorat Kota Tomohon terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi, independensi, dan pengalaman secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Tomohon.
2. Kompetensi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas audit, hal ini dapat dipahami sebab aparat inspektorat di Kota Tomohon (sesuai dengan data tingkat pendidikan yang diperoleh dalam kuesioner) banyak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang akuntansi ataupun auditing.
3. Independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya independensi seorang auditor akan meningkatkan kualitas audit, artinya kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki independensi yang baik.
4. Pengalaman secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Adanya pengaruh positif variabel pengalaman berarti semakin tinggi tingkat pengalaman auditor semakin tinggi pula kualitas auditnya. Auditor yang berpengalaman cenderung memiliki ketelitian dan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya.

### **6.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain:

1. Lembaga Inspektorat Kota Tomohon haruslah memperkuat timnya di dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan sumber daya berupa tenaga ahli di bidang audit internal ataupun yang memiliki pendidikan yang memadai dalam bidang akuntansi dan auditing.
2. Mutasi antar satuan kerja sebaiknya tidak dilakukan terhadap aparat yang telah memiliki pengalaman dan sudah mengikuti berbagai pelatihan dalam hal audit.
3. Pola penugasan auditor dalam melakukan audit, sebaiknya dilakukan oleh auditor yang sudah berpengalaman dan dipandang mempunyai pengetahuan yang memadai. Apabila diberikan pada junior auditor sebaiknya didampingi oleh minimal seorang senior auditor, dengan maksud untuk menjaga kualitas dan kredibilitas hasil audit di mata para pengguna informasi laporan keuangan, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada junior auditor untuk menambah pengalaman dan pengetahuannya sebagai seorang auditor. Disamping itu, harus dilakukan telaah hasil pemeriksaan auditor untuk menjamin bahwa pemeriksaan dan bentuk pelaporan yang dilakukan telah sesuai dengan standar profesional yang berlaku dan berkualitas.
4. Penempatan pegawai di lingkup Inspektorat Kota Tomohon sebaiknya berdasarkan fungsi dan kompetensi yang dimiliki.
5. Pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti (kompetensi, independensi dan pengalaman) berpengaruh terhadap variabel kualitas audit sebagai variabel dependen sebesar 64,5%, sedangkan sisanya sebesar 35,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini, misalnya akuntabilitas, etika, ataupun motivasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alim, M.N., T. Hapsari, dan L. Purwanti. 2007. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.

- Asih, Dwi Ananing Tyas. 2006. *Pengaruh Pengalaman Terhadap Peningkatan Keahlian Auditor Dalam Bidang Audit*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Skripsi. 2006.
- Badan Pusat Statistik Kota Tomohon bekerja sama dengan BAPPEDA Kota Tomohon, 2012. *Tomohon Dalam Angka (Tomohon in Figures) 2012*. BPS Kota Tomohon. 2012.
- Bawono, Icu Rangga dan Elisha Muliani Singgih, 2010. *Faktor-Faktor Dalam Diri Auditor dan Kualitas Audit: Studi Pada KAP 'Big Four' di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi 2010.
- Christiawan, Y.J. 2002. *Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris*. Journal Directory : Kumpulan Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unika Petra. Vol. 4 / No. 2.
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD), 2013. *300 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi*, diakses 23 April 2013, <[http://djkd.kemendagri.go.id/?jenis=news&p=detail\\_berita&id=861](http://djkd.kemendagri.go.id/?jenis=news&p=detail_berita&id=861)>
- Efendy, Muh. Taufiq. 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)*. Tesis 2010.
- Fahdi, Muhammad. 2012. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, Kompetensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*. Tesis 2012.
- Lastanti Sri, Hexana. 2005. *Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.5 No.1 April 2005.
- Mansur, Tubagus. 2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit ditinjau dari persepsi auditor atas pelatihan dan keahlian independensi dan penggunaan kemahiran profesional*. Tesis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, tentang *Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta. 2007.
- No. 13 Tahun 2006, tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. 2006.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta. 2008.
- Peraturan Walikota Tomohon Nomor 22 Tahun 2009. *Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Inspektorat Kota Tomohon*. Tomohon.
- Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM, *Reviu Laporan Keuangan, Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah*. 2007.
- Romli, Lili. 2006. *Efektivitas Pemerintah Daerah Era Otonomi: Studi Kasus Efektivitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Kota Semarang*. Jurnal Desentralisasi Vol. 7, No. 4. 2006.
- Saifuddin. 2004. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasi eksperimen pada Auditor dan Mahasiswa)*. Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sapariyah, Rina Ani. 2011. *Pengaruh Good Governance dan Independensi Auditor terhadap Kinerja Auditor dan Komitmen Organisasi (Survey Pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta)*. STIE "AUB", Surakarta. 2011.
- Singgih, EM, dan IR Bawono, 2010. *Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor di KAP "Big*

*Four” di Indonesia).* Universitas Jenderal Soedirman pada Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.

Tim Peneliti UNSRAT, Pemda SULUT, dan staf Bank Dunia, 2011. *Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Utara 2011, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.* Kantor Bank Dunia Jakarta. 2011.

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN  
PERAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TERHADAP  
KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD**

**Sinthia Anelia Kasili  
David P. E. Saerang**

***ABSTRACT***

*This research aims to discover the effects of Participation in Budget Preparation and the Role of Authority of the Budget User on the Regional Government Performance. The research was conducted in the Talaud Regency, one of the Autonomy Regions in North Sulawesi. The samples were taken using purposive sampling. The research sample was the Authorized Officials of Budget Users in Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud which were as many as 103 people.*

*The Multiple Linear Regression, descriptive statistics, classic assumption test, correlation coefficient (R), determination coefficient (R<sup>2</sup>) and hypothesis testing (t test and F test) were used to analyze the data. This method of analysis used the Software Statistical Products and Solution Services (SPSS) version 20.0.*

*The results of the research shows that the Participation in Budget Preparation and the Role of Authority of the Budget User on the Regional Government Performance both partially and simultaneously. Therefore, the hypotheses proposed in the research were accepted.*

*Key words : Participation in Budget Preparation, Role of Authority of the Budget User, Regional Government Performance.*

## 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan termasuk dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauhmana instrumen atau Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab (Darise, 2009:19).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah implementasi program pemerintah daerah yang mengkonsumsi sejumlah sumber daya tertentu dapat dievaluasi melalui kinerja yang dihasilkan oleh setiap satuan kerja. Penggunaan anggaran merupakan konsep yang sering digunakan untuk melihat kinerja organisasi publik.

Anggaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh satuan kerja yang ada dalam pemerintah daerah dengan sendirinya akan berinteraksi dengan individu-individu yang ada dalam pemerintahan. Kinerja dari masing-masing individu tersebut akan berpengaruh pada kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan secara menyeluruh tidak berhenti pada tahap penganggaran, namun dibutuhkan peran manajerial pimpinan daerah khususnya pengelola keuangan yang ada di daerah.

Partisipasi anggaran adalah salah satu cara untuk menciptakan sistem pengendalian manajemen yang baik sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan institusi yang terkait. Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penganggaran pemerintah daerah mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis hendak melakukan penelitian replikasi yang mengambil objek Kabupaten Kepulauan Talaud dengan judul penelitian “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud”.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian tujuan organisasi. Bawahan mempunyai kesempatan untuk melaporkan informasi yang dimiliki kepada atasannya, sehingga atasan dapat memilih keputusan yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Partisipasi merupakan cara efektif menyelaraskan tujuan pusat pertanggungjawaban dengan tujuan organisasi secara menyeluruh (Siegel dan Marconi, 1989 dalam Falikhatun, 2007).

Menurut Brownell (1982) dalam Sardjito dan Muthaheer (2007), partisipasi anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Partisipasi banyak menguntungkan bagi suatu organisasi, hal ini diperoleh dari hampir penelitian tentang partisipasi. Sord dan Welsch (1995) dalam Sardjito dan Muthaheer (2007) mengemukakan bahwa tingkat partisipasi yang lebih tinggi akan menghasilkan moral yang lebih baik dan inisiatif yang lebih tinggi pula. Partisipasi telah ditunjukkan berpengaruh secara positif terhadap sikap pegawai, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan meningkatkan kerja sama diantara manajer.

Selanjutnya menurut Sardjito dan Muthaheer (2007), partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran. Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

### 2.2 Peran Kuasa Pengguna Anggaran

Peran menunjukkan partisipasi seseorang dalam mewujudkan tujuan organisasi. Peran manajerial pengelola keuangan daerah menunjukkan tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Desentralisasi memberikan kesempatan Pengelola Keuangan Daerah untuk mendorong kreatifitas Pengelola Keuangan Daerah. Individu yang terlibat dan diberi tanggungjawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi akan semakin tinggi (Hansen dan Mowen, 2006 dalam Rohman, 2007).

Kuasa Pengguna Anggaran selain sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah juga bertanggungjawab atas pelaksanaan pemerintahan pada unit kerjanya masing-masing sesuai fungsinya sebagai sekretaris daerah, asisten, kepala bidang dan kepala kantor/satuan/unit kerja. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang memiliki kepentingan dalam menyusun, menggunakan dan melaporkan anggaran atau sebagai pelaksana keuangan dari Pemerintah Daerah.

### **2.3 Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu (Rohman, 2009).

Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua satuan kerja yang ada. Namun demikian, dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja ini harus tetap dimulai dari pengidentifikasian visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program, anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan (Mahsun 2009:198).

Pengukuran kinerja pemda berarti pengukuran kinerja terhadap satuan kerja atau entitas di lingkungan pemda. Fokus pengukuran kinerja untuk setiap satuan kerja atau entitas mencakup : (1) visi, misi, tujuan dan sasaran, (2) tugas pokok dan fungsi, (3) struktur organisasi dan personalia, (4) program kerja, (5) anggaran.

### **2.4 HIPOTESIS**

Berdasarkan uraian-uraian dalam landasan teori, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- H2 : Peran Kuasa Pengguna Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- H3 : Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Kuasa Pengguna Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Populasi dan Sampel**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui pembagian kuesioner dengan teknik sampling *purposive sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:85). Sampel penelitian ini adalah pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berjumlah 103 orang yang terdiri dari sekretaris daerah, asisten, kepala bidang, kepala kantor, kepala cabang dinas pendidikan, kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala UPTD dan lurah.

### 3.2 Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan *Software Statistical Products and Solution Services* (SPSS) dengan lima tahap. Tahap pertama, statistik deskriptif. Tahap kedua, pengujian kualitas data. Tahap ketiga, melakukan uji penyimpangan asumsi klasik. Tahap keempat, melakukan analisis regresi linear berganda dan tahap kelima melakukan pengujian hipotesis.

## 4 ANALISIS DAN EVALUASI

### 4.1 Gambaran Umum Responden

Berdasarkan kuesioner disebar dan yang dapat dikembalikan maka diperoleh rincian distribusi kuesioner sebagai berikut:

**Rincian Distribusi Kuesioner**

Keterangan	Total	Persentase
Kuesioner yang didistribusikan	100	100 %
Kuesioner yang tidak kembali	(5)	5 %
Kuesioner yang kembali	95	95 %
Kuesioner yang rusak	(6)	6 %
Kuesioner yang dapat diolah	89	89 %

*Sumber: Data primer yang diolah, 2012*

### 4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berhubungan dengan penggambaran atau peringkasan data penelitian sehingga data tersebut mudah dipahami. Data hasil tabulasi yang diolah dengan menggunakan *Software SPSS 20.0* menghasilkan deskripsi statistik variabel penelitian seperti pada tabel berikut:

**Statistik Deskriptif**

	Mean	Std. Deviation	N
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	27.1685	5.11734	89
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1)	25.1011	4.63447	89
Peran Kuasa Pengguna Anggaran (X2)	26.8315	4.68614	89

*Sumber : Output Software SPSS 20.0*

Tabel statistik deskriptif menginformasikan hal-hal berikut:

Untuk variabel  $X_1$  (Partisipasi Penyusunan Anggaran) diperoleh rata-rata hitung skor jawaban responden 25.1011 dengan standar deviasi sebesar 4.63447 dan jumlah responden sebanyak 89. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan data terkelompok dengan baik.

Untuk variabel  $X_2$  (Peran Kuasa Pengguna Anggaran) diperoleh rata-rata hitung skor jawaban responden 26.8315 dengan standar deviasi sebesar 4.68614 dan jumlah responden sebanyak 89. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan data terkelompok dengan baik.

Untuk variabel Y (Kinerja Pemerintah Daerah) diperoleh rata-rata hitung skor jawaban responden 27.1685 dengan standar deviasi sebesar 5.11734 dan jumlah responden sebanyak 89. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan data terkelompok dengan baik.

### 4.3 Uji Kualitas Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan kuesioner sebagai alat utama untuk memperoleh data. Untuk meyakinkan akan kualitas data yang akan diolah, terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya.

**Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X<sub>1</sub>)**

Indikator	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan	Tingkat Hubungan
Pertanyaan 1	0,543	0,000	Valid	Cukup Kuat
Pertanyaan 2	0,544	0,000	Valid	Cukup Kuat
Pertanyaan 3	0,550	0,000	Valid	Cukup Kuat
Pertanyaan 4	0,664	0,000	Valid	Kuat
Pertanyaan 5	0,803	0,000	Valid	Sangat Kuat
Pertanyaan 6	0,639	0,000	Valid	Kuat
Pertanyaan 7	0,104	0,529	Tidak Valid	Sangat Rendah
Pertanyaan 8	0,358	0,025	Valid	Rendah
Pertanyaan 9	0,321	0,046	Valid	Rendah
Pertanyaan 10	0,434	0,006	Valid	Cukup Kuat

Sumber : Data Olahan dari Output SPSS

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X<sub>1</sub>) menunjukkan bahwa hasil uji validitas untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran dengan 10 butir pertanyaan ternyata 1 pertanyaan yakni pertanyaan 7 dinyatakan tidak valid karena nilai signifikansinya 0,529 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai koefisien korelasinya 0,104 lebih kecil dari 0,30.

**Hasil Uji Validitas Variabel Peran Kuasa Pengguna Anggaran (X<sub>2</sub>)**

Indikator	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan	Tingkat Hubungan
Pertanyaan 1	0,748	0,000	Valid	Kuat
Pertanyaan 2	0,547	0,000	Valid	Cukup Kuat
Pertanyaan 3	0,606	0,000	Valid	Kuat
Pertanyaan 4	0,671	0,000	Valid	Kuat
Pertanyaan 5	-0,115	0,487	Tidak Valid	-
Pertanyaan 6	0,470	0,003	Valid	Cukup Kuat
Pertanyaan 7	0,781	0,000	Valid	Kuat
Pertanyaan 8	0,634	0,000	Valid	Kuat
Pertanyaan 9	0,498	0,001	Valid	Cukup Kuat
Pertanyaan 10	0,622	0,000	Valid	Kuat

Sumber : Data Olahan dari Output SPSS

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Peran Kuasa Pengguna Anggaran (X<sub>2</sub>) menunjukkan bahwa hasil uji validitas untuk variabel peran manajer pengelola keuangan daerah dengan 10 butir pertanyaan ternyata 1 pertanyaan yakni pertanyaan 5 dinyatakan tidak valid karena nilai signifikansinya -0,115 meskipun koefisien korelasinya 0,487.

**Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**

Indikator	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan	Tingkat Hubungan
Pertanyaan 1	0,713	0,000	Valid	Kuat
Pertanyaan 2	0,682	0,000	Valid	Kuat
Pertanyaan 3	0,503	0,001	Valid	Cukup Kuat
Pertanyaan 4	0,616	0,000	Valid	Kuat
Pertanyaan 5	0,648	0,000	Valid	Kuat
Pertanyaan 6	0,577	0,000	Valid	Cukup Kuat
Pertanyaan 7	0,633	0,000	Valid	Kuat
Pertanyaan 8	0,917	0,000	Valid	Sangat Kuat



Pertanyaan 9	0,857	0,000	Valid	Sangat Kuat
Pertanyaan 10	0,637	0,000	Valid	Kuat

Sumber : Data Olahan dari Output SPSS

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) menunjukkan bahwa hasil uji validitas untuk variabel kinerja pemerintah daerah dengan 10 butir pertanyaan semua dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi dibawah  $\alpha = 0,05$  dan koefisien korelasi diatas 0,30.

**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Standar	Keterangan	Kriteria
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X <sub>1</sub> )	0,672	0,6	Reliabel	Tinggi
Peran Kuasa Pengguna Anggaran (X <sub>2</sub> )	0,701	0,6	Reliabel	Tinggi
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,863	0,6	Reliabel	Sangat Tinggi

Sumber : Data Olahan dari Output SPSS

Tabel Hasil Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa ketiga variabel dinyatakan reliabel dengan penjelasan sebagai berikut:

Uji reliabilitas untuk variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X<sub>1</sub>) menunjukkan nilai Cronbach Alpha atau r hitung = 0,672 lebih besar dari r tabel = 0,316 dan juga lebih besar dari nilai yang distandarkan yakni 0,6.

Uji reliabilitas untuk variabel Peran Kuasa Pengguna Anggaran (X<sub>2</sub>) menunjukkan nilai Cronbach Alpha atau r hitung = 0,701 lebih besar dari r tabel = 0,316 dan juga lebih besar dari nilai yang distandarkan yakni 0,6.

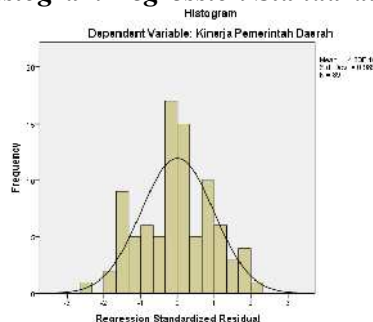
Uji reliabilitas untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) menunjukkan nilai Cronbach Alpha atau r hitung = 0,863 lebih besar dari r tabel = 0,316 dan juga lebih besar dari nilai yang distandarkan yakni 0,6.

**4.4 Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal.

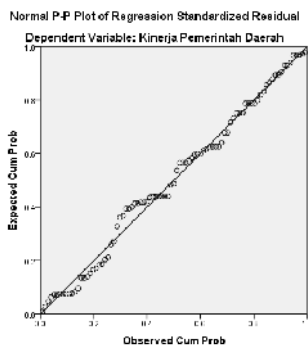
**Hasil Uji Normalitas menggunakan Histogram Regression Standardized Residual**



Sumber : Output Software SPSS 20.0

Gambar diatas menunjukkan bahwa data membentuk kurva yang jika digambarkan berbentuk lonceng (*bell shaped curve*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

### Hasil Uji Normalitas menggunakan *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*



Sumber : Output Software SPSS 20.0

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik yang berarti data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang merupakan perpotongan antara garis probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinearitas

Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas.

#### Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1)	0,430	2,324
Peran Kuasa Pengguna Anggaran (X2)	0,430	2,324

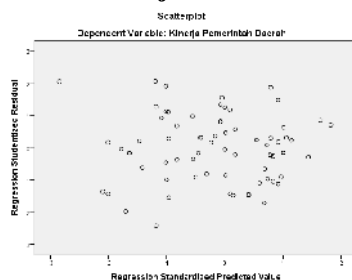
Sumber : Output Software SPSS 20.0

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 yaitu 2,324 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0.1 yaitu 0,430 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen terbebas dari gejala multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Dalam regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau homokedastisitas.

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output Software SPSS 20.0

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik yang berarti data dalam posisi menyebar dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain

#### Hasil Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,664	0,441	0,428	3,87054	1,918

Sumber : Output Software SPSS 20.0

Tabel Hasil Uji Autokorelasi menunjukkan bahwa nilai DW = 1,918. Berdasarkan tabel d (Durbin-Watson), nilai dL = 1,382 dan nilai dU = 1,597. Karena nilai DW = 1,918 berada pada kisaran dU sampai dengan 4 - dU yaitu 1,597 sampai dengan 2,403 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel terikat (*dependent*) dengan skala interval (Wijaya, 2010:6).

Persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi untuk X<sub>1</sub>

$\beta_2$  = Koefisien regresi untuk X<sub>2</sub>

$\varepsilon$  = Error term

X<sub>1</sub> = Partisipasi Penyusunan Anggaran

X<sub>2</sub> = Peran Kuasa Pengguna Anggaran

#### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7,142	2,495		2,863	0,005		
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X <sub>1</sub> )	0,473	0,136	0,429	3,486	0,001	0,430	2,324
Peran Kuasa Pengguna Anggaran (X <sub>2</sub> )	0,304	0,134	0,278	2,263	0,026	0,430	2,324

Sumber : Output Software SPSS 20.0

Berdasarkan tabel Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dapat dilihat persamaan regresi linear berganda adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$\text{Kinerja PEMDA} = 7,142 + 0,473\text{PPA} + 0,304\text{PKPA}$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Konstanta  $\alpha$  sebesar 7,142 mempunyai arti bahwa jika Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Kuasa Pengguna Anggaran konstan atau sama dengan nol (0), maka besarnya variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sebesar 7,142.

Nilai  $\beta_1$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_1$  (Partisipasi Penyusunan Anggaran) sebesar 0,473 mempunyai arti bahwa jika variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran mengalami peningkatan 1%, maka besarnya variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) juga akan ikut mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar 0,473 dengan asumsi variabel  $X_2$  (Peran Kuasa Pengguna Anggaran) tetap atau konstan.

Nilai  $\beta_2$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_2$  (Peran Kuasa Pengguna Anggaran) sebesar 0,304 mempunyai arti bahwa jika variabel Peran Kuasa Pengguna Anggaran mengalami peningkatan sebesar 1%, maka besarnya variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) juga akan ikut mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar 0,304 dengan asumsi variabel  $X_1$  (Partisipasi Penyusunan Anggaran) tetap atau konstan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang kuat dan searah antara variabel bebas  $X_1$  dan  $X_2$  dengan variabel terikat Y, dimana angka koefisien regresi yang diperoleh semuanya menunjukkan tanda positif (+).

#### Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1$ , dan  $X_2$ ) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak.

##### Koefisien Korelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,664	0,441	0,428	3,87054	1,918

Sumber : Output Software SPSS 20.0

Tabel Koefisien Korelasi menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,664 yang memberi arti bahwa terdapat hubungan yang kuat dan searah antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah nilai yang digunakan untuk melihat sejauh mana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya.

##### Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,664	0,441	0,428	3,87054	1,918

Sumber : Output Software SPSS 20.0

Tabel Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,441 atau 44,1% sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah (Y) mendapat kontribusi dari Partisipasi Penyusunan Anggaran ( $X_1$ ) dan Peran Kuasa Pengguna Anggaran ( $X_2$ ) sebesar 44,1% sedangkan sisanya 55,9% mendapat kontribusi dari faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 4.5 Pengujian Hipotesis

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

##### Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7,142	2,495		2,863	0,005		

Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1)	0,473	0,136	0,429	3,486	0,001	0,430	2,324
Peran Kuasa Pengguna Anggaran (X2)	0,304	0,134	0,278	2,263	0,026	0,430	2,324

Sumber : Output Software SPSS 20.0

Berdasarkan Tabel Hasil Uji t, dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

### **Pengujian H<sub>1</sub> Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil uji t variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1),  $t_{hitung} = 3,486$  dan  $t_{tabel} = 1,671$  dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai sig.  $< 0,05$  berarti Partisipasi Penyusunan Anggaran secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

### **Pengujian H<sub>2</sub> Peran Kuasa Pengguna Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil uji t variabel Peran Kuasa Pengguna Anggaran (X2),  $t_{hitung} = 2,263$  dan  $t_{tabel} = 1,671$  dan nilai signifikansi  $0,026 < 0,05$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai sig.  $< 0,05$  berarti Peran Kuasa Pengguna Anggaran secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F-test (*ANOVA test*). Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

#### **Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1016,098	2	508,049	33,913	0,000
Residual	1288,374	86	14,981		
Total	2304,472	88			

Sumber : Output Software SPSS 20.0

Berdasarkan Tabel Hasil Uji F, dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

### **Pengujian H<sub>3</sub> Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Kuasa Pengguna Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Uji ANOVA menunjukkan bahwa  $F_{hitung} = 33,913$  dan  $F_{tabel} = 3,32$  dan nilai signifikansi =  $0,000$ . Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai sig.  $< 0,05$  berarti Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Kuasa Pengguna Anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Pemerintah Daerah.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan mengenai pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Partisipasi Penyusunan Anggaran maka semakin meningkat Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Peran Kuasa Pengguna Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Peran Kuasa Pengguna Anggaran maka akan semakin meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Kuasa Pengguna Anggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sebaiknya mengoptimalkan penerapan anggaran partisipatif karena hal ini akan berdampak pada meningkatnya kinerja pemerintah daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sebaiknya menempatkan pegawai sesuai keahlian yang dimiliki agar pegawai dapat mengoptimalkan kinerjanya sehingga berdampak pada meningkatnya kinerja pemerintah daerah.
5. Untuk penelitian selanjutnya di instansi pemerintah sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Menggunakan variabel independen maupun dependen lain seperti motivasi, senjangan anggaran, kenaikan gaji, jam kerja, gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lainnya serta menambah variabel moderating, intervening yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan peran pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
  - 2) Menambah jumlah sampel yang diteliti agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih sehingga analisis akan lebih akurat.
  - 3) Memperhatikan penggunaan materi kuesioner agar lebih disesuaikan dengan kondisi pemerintahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. 2007. *Ketua BPK : Kinerja Pemda Masih Jauh dari Memuaskan*. Ambon : 30 April 2007.
- Antara News. 2007. *Untuk Raih Gelar Doktor di UGM, Fadel Muhammad Sampaikan Teori Kepemimpinan*. Gorontalo : 10 Agustus 2007.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta : PT Indeks
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : PT Indeks
- Falikhatus. 2007. *Interaksi Informasi Asimetri, Budaya Organisasi dan Group Cohesiveness dalam Hubungan antara Partisipasi Penganggaran dan Budgetary Slack (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah se-Jawa Tengah)*. Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.
- Herminingsih. 2009. *Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nurchayani, Kunwawiyah. 2010. *Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi sebagai Variabel Intervening*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.

- Ompusunggu, Krisler Bornardi dan Icuk Rangga Bawono. 2007. *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Job Relevant Information (JRI) terhadap Informasi Asimetris (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri di Kota Purwokerto Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 08 No. 01, Februari 2007.
- Putri, Natalia Dewinda. 2010. *Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Kabupaten Tegal)*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Rohman, Abdul. 2007. *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten dan Provinsi di Jawa Tengah)*. Jurnal Maksi, Vol. 7 No. 02, Agustus 2007 : 206-220.
- Rohman, Abdul. 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda di Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 9 No. 1, Februari 2009 : 21-32.
- Sabeni, Arifin dan Imam Ghozali. 2008. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta : BPFE.
- Santosa, Purbayu Budi dan Ashari. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Sardjito, Bambang dan Osmad Muthaher. 2007. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*. Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharyadi dan Purwanto. 2007. *Statistika Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Tim Redaksi Fokusmedia. 2008. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung : Fokusmedia.
- Wibowo, Agung Edy. 2012. *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian*. Yogyakarta : Gava Media.
- Wijaya, Toni. 2010. *Analisis Statistik Multivariat*. Bandung : Alfabeta.

## **The Effect of Verbal Discussion in Audit Working Paper Review To The Performance Auditors at BPK RI in North Sulawesi**

**Andrew P Marunduh**

**Lidya Mawikere**

### ***ABSTRACT***

*The implementation of accountability in public sector to the establishment of good governance and claeen governance in Indonesia was increasing. There are monitoring, control, and inspection as three main aspects to support a good governance. BPK has responsibilities in controlling and giving opinion to the governance financial reports.*

*This study purpose to find out the effect of the verbal discussion in audit working paper review, work experience and motivation to the performance auditors at BPK RI in North Sulawesi.*

*This study chosen BPK RI in North Sulawesi as an object research with population amount was 65 auditors, taken from census method.*

*The independent variables used in this study were verbal discussions (X1) as well as the dependent variable is the performance auditor (Y). This study uses simple linear regression analysis and the use of primary data in the form of questionnaires, whereas for hypothesis testing done partially.*

*Based on the analysis results can be known results for the variable Verbal Discussion (X1)  $t_{count} = 5777$  and significantly  $t_{Table} = 0.000$  and  $2.000$ . From these results it can be seen that  $t_{count} > t_{Table}$  can be stated that  $H_0$  refused and  $H_a$  is received and a significant level of  $0.000 < 0.05$  Therefore Verbal Discussion of significant effect on the Performance Auditor.*

*Key Word: BPK RI, performance auditor*



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* dan *clean governance* di Indonesia semakin meningkat. Salah satu faktor yang dapat mendukung terciptanya *good governance* dan *clean governance* adalah akuntabilitas sektor publik.

Akuntabilitas sektor publik erat hubungannya dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Menurut Mardiasmo (2008), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Dan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah. Dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah, auditor melakukan tahapan audit agar audit dilakukan dengan efektif dan efisien. Tahapan audit atau proses audit diantaranya adalah pembuatan kertas kerja audit. Oleh karena itu, pembuatan dan penyimpanan kertas kerja merupakan pekerjaan yang penting dalam audit. Kertas kerja merupakan bukti dilaksanakannya standar auditing dan program audit yang di telah ditetapkan (Mardiasmo 2008).

Untuk meyakinkan bahwa semua prosedur-prosedur audit telah dilaksanakan kertas kerja harus diriview oleh atasan agar dapat memberikan umpan balik dan pelatihan terhadap pekerjaan yang dilakujan oleh bawahan. Tujuan dari *review* kertas kerja adalah untuk memastikan bahwa audit yang dilakukan telah mengikuti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kebijakan serta prosedur. Ada beberapa penelitian tentang pengaruh diskusi sebagai bagian proses review akan tetapi jumlahnya sedikit. Ismail dan Trotman (1995) menemukan dalam penelitian bahwa kelompok yang melakukan proses diskusi menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dalam memecahkan masalah terhadap pemeriksaan analitis yang ada dibandingkan dengan tidak melakukan proses diskusi. Lebih lanjut lagi dalam Ismail dan Trotman (1995) proses diskusi memberikan kesempatan bagi staf auditor senior untuk melakukan penilaian atas pihak yang direview untuk memperbaiki kinerjanya setelah ditemukan adanya kesalahan. Berdasarkan latar belakang di atas yang memberikan gagasan dan motivasi bagi peneliti, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Diskusi Verbal Dalam Review Kertas Kerja Audit Terhadap Kinerja Auditor pada Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara".

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Apakah diskusi verbal atas *review* kertas kerja audit berpengaruh terhadap kinerja auditor?"

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data primer yang berupa kuisioner yang dibagikan langsung kepada auditor-auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *auditor* yang terdapat di BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara yang sebanyak 65 auditor. Oleh karena jumlah populasi yang relatif kecil, maka penelitian dilakukan terhadap seluruh populasi. Penelitian yang dilakukan terhadap seluruh populasi sering disebut sensus (*census*).

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan statistik induktif/iferensia dengan menggunakan metode analisis regresi linear sederhana dan pengujian hipotesis parsial atau uji t.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Audit

Ada beberapa pengertian audit yang diberikan oleh beberapa ahli di bidang akuntansi, antara lain: Menurut Arens dan Loebbecke (1995) “*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person*”.

Menurut Mulyadi (2002) “Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

### 2.2. Kertas Kerja Audit

Dalam menjalankan pemeriksaannya (*general audit*) Kantor Akuntan public harus berpedoman kepada Standar Profesi Akuntan Publik. Semua prosedur audit yang dilakukan dan temuan-temuan audit harus didokumentasikan ke dalam kertas kerja pemeriksaan. Sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia SA seksi 339 Kertas Kerja paragraph 03, definisi kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya.

memberikan keyakinan memadai bahwa audit yang layak telah dilakukan sesuai dengan standar audit yang layak telah dilakukan sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan IAI (Arens & Loebbecke 2006). Lebih spesifik Mulyadi (2008) menyebutkan tujuan dari pembuatan kertas kerja pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan dan juga merupakan bukti bahwa auditor telah melakukan audit yang memadai.
- b. Menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya jika kemudian hari ada pihak-pihak yang memerlukan penjelasan mengenai simpulan atau pertimbangan yang telah dibuat oleh auditor dalam auditnya.
- c. Mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit untuk menghasilkan berbagai macam bukti yang membentuk kertas kerja.
- d. Dalam audit yang berulang atas klien yang sama dalam periode akuntansi yang berlainan, kertas kerja dapat digunakan sebagai dasar penyusunan audit program dan perencanaan audit tahun-tahun yang akan datang.

#### 2.2.2. Review atas Kertas Kerja

Menurut Arens dan Loebbecke dalam terjemahan Jusuf (2006) Review atas kertas kerja adalah suatu review atas kertas kerja audit yang diselesaikan oleh staf audit lain untuk memastikan kualitas dan untuk menetralkan keterpihakan. Review atas kertas kerja dalam suatu kantor akuntan public dilakukan pada berbagai tingkatan. Pada tahap pertama review dilakukan oleh pengawas langsung (*supervisor*) dari sipembuat kertas kerja, misalnya auditor senior atau manajer. Review ini dilakukan apabila pekerjaannya atas suatu bagian audit tertentu telah selesai dikerjakan. Review terutama ditekankan pada pekerjaan apa yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai oleh pembuat kertas kerja (Jusuf 2006)

### 2.3. Konsep Diskusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) diskusi adalah bertukar pikiran, membahas suatu masalah dengan mengemukakan dasar-dasar alasannya atau membahas suatu masalah untuk memecahkannya. Dengan adanya diskusi, peserta diskusi diharapkan mampu bertukar pikiran dengan aktif dalam usaha membahas suatu masalah dan memperoleh pemecahannya. Menurut Sunaryo (2007) diskusi adalah bertukar pikiran atau membahas

suatu masalah dengan mengemukakan dasar-dasar alasannya atau membahas suatu masalah dengan mengemukakan dasar-dasar alasannya atau membahas suatu masalah untuk memecahkannya. Dengan adanya diskusi, peserta diskusi diharapkan mampu bertukar pikiran dengan aktif dalam usaha membahas suatu masalah dan memperoleh pemecahannya.

## **2.4. Kinerja Auditor**

### **2.4.1. Pengertian Kinerja**

Kinerja merupakan tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan tugas yang dapat diukur (Seymour, 2006). As'ad (2006) memberikan batasan bahwa kinerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan penulis lain, Byars dan Rue (2008) mendefinisikan kinerja merupakan derajat penyelesaian tugas yang menyertai pekerjaan seseorang. Kinerja adalah yang merefleksikan seberapa baik seseorang individu memenuhi permintaan pekerjaan. Berdasarkan definisi-definisi di atas, menunjukkan bahwa kinerja merupakan hasil yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

### **2.4.2. Auditor**

Auditor adalah orang yang bertugas melakukan audit. Sedangkan pengertian audit menurut Arens dan Loebbecke (1997) adalah : *Auditing is the process of accumulating and evaluating of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria Auditing should be done by competent independent person.*

## **3. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

### **3.1. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan RI**

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara dikota Magelang. Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

## **4 . ANALISIS DAN EVALUASI**

### **4.1. Analisis Data**

#### **4.1.1. Pengujian Validitas dan Reabilitas**

##### **a) Pengujian Validitas**

Dari hasil pengujian data dengan menggunakan *Software SPSS Version 18.0* diperoleh nilai *Pearson Correlation* untuk masing-masing item pertanyaan variable X dan variable Y lebih besar dari 0,244 maka dapat disimpulkan bahwa data X dan Y adalah valid.

### b) Pengujian Reliabilitas

Setelah data diolah dengan menggunakan bantuan *Software SPSS Version 18.0* untuk menguji tingkat reliabilitas, maka *output* yang dihasilkan untuk variable X nilai *cronbach alpha* = 0,682 dan untuk variable Y nilai *cronbach alpha* = 0,959 maka dapat disimpulkan bahwa data X dan Y adalah reliable.

#### 4.1.2. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji normalitas

Dari grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* menggambarkan penyebaran data disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

##### b. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1.  $1,65 < DW < 2,35$ , maka tidak ada autokorelasi.
2.  $1,21 < DW < 1,65$  atau  $2,35 < DW < 2,79$ , maka tidak dapat disimpulkan.
3.  $DW < 1,21$  atau  $DW > 2,79$ , maka terjadi autokorelasi.

Dengan melihat angka Durbin Watson sebesar 2,010, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berada di daerah ragu-ragu atau dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian tidak terdapat gejala autokorelasi.

##### c. Uji Multikolinearitas

Dengan melihat nilai VIF pada table 4.9, setiap variabel independen dibawah nilai 5, yaitu Diskusi Verbal (X1) sebesar 1,020, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel penelitian bebas efek multikolinearitas.

##### d. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil *scatterplot* parsial variabel X dan variabel Y terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu menunjukkan tidak ada pola yang terbentuk dengan kata lain grafik menggambarkan plot menyebar.

#### 4.1.3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan software SPSS version 18.00 seperti pada table 4.10, maka persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

$$Y = 71,534 + 1,996X_1$$

Dengan interpretasi bahwa :

Konstanta  $\alpha$  sebesar 71,534 memberikan pengertian bahwa jika Diskusi Verbal (X1), sama dengan nol (0), maka besarnya kinerja auditor BPK 71,534 satuan skor. Nilai  $\beta_1$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel Diskusi Verbal (X1) sebesar 1,996, ini mempunyai arti bahwa jika Diskusi Verbal meningkat sebesar 1 satuan skor, maka akan mengalami peningkatan Kinerja Auditor BPK sebesar 1,996 satuan skor dari kondisi sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

#### 4.1.4. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Dari Tabel Koefisien Korelasi dan Determasi dapat dilihat bahwa koefisien korelasi linier  $R$  yang dihasilkan antara variabel diskusi verbal (X1) dan kinerja auditor (Y) adalah sebesar 0,623. Nilai korelasi (R) sebesar 0.623 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sedang/cukup antara variabel X1 dengan variabel Y. Sedangkan nilai R Square atau koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.388 menunjukkan bahwa kontribusi variabel X1 untuk menjelaskan model variabel Y adalah sebesar 38.8% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

#### 4.1.5. Hasil Uji t

Hasil  $t_{hitung}$  untuk variabel Diskusi Verbal (X1) = 5.777 dan signifikan 0,000 serta  $t_{tabel}$  = 2,000. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dapat dinyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  Dengan demikian Diskusi Verbal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor.

#### 4.2. Evaluasi Data

Penelitian atas pengaruh diskusi verbal dalam review kertas kerja audit terhadap kinerja auditor badan pemeriksa keuangan RI perwakilan sulawesi utara menggunakan data kualitatif yang dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert dan bersumber dari data primer. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengedarkan kuisisioner oleh peneliti kepada responden yang ada di kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi utara. Kuisisioner yang diedarkan mulai tanggal 4 Januari 2012 dan dikumpulkan terakhir pada tanggal 25 Januari 2012.

Sebelum kuisisioner diedarkan telah dilakukan uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas melalui *Software SPSS Version 18.0* menunjukkan nilai tertinggi data yang terdapat pada kuisisioner untuk variable diskusi verbal (X1) dan kinerja auditor (Y) adalah 0,931, dan terendah 0,516. Hal ini dapat dikatakan seluruh data yang terdapat pada variable bebas dan terikat adalah valid karena nilai *Pearson Correlation* lebih besar dari 0,244. Hasil uji reliabilitas melalui metode *Cronbach Alpha* dalam *Software SPSS Version 18.0* menunjukkan nilai data yang terdapat pada kuisisioner untuk variable diskusi verbal (X1) 0,682 dan kinerja auditor (Y) 0,959. Nilai tersebut berada pada kelompok Alpha 0,60 s.d 0,80 dengan kategori reliabel. Hal ini dapat dikatakan seluruh data yang terdapat pada variable bebas dan terikat adalah reliabel karena nilai *Pearson Correlation* lebih besar dari 0,60.

Sehubungan dengan penggunaan metode analisis regresi sederhana, maka dilakukan pengujian asumsi klasik melalui uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* yang menggambarkan penyebaran data disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Untuk uji autokorelasi digunakan uji dengan Durbin-Watson. Hasil uji untuk 1 variable bebas dan 1 variabel terikat memperoleh nilai Durbin-Watson 2,010. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel yang diteliti tidak ada masalah dengan autokorelasi (data bebas autokorelasi), karena memenuhi ketentuan  $1,65 < 2,307 < 2,35$ . Hasil uji multikolinearitas diperoleh data VIF untuk variable Diskusi Verbal (X1) sebesar 1,020 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel penelitian bebas efek multikolinearitas. Pada uji heteroskedastisitas dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu menunjukkan tidak ada pola yang terbentuk dengan kata lain grafik menggambarkan plot menyebar.

Untuk mengetahui hubungan antar variable bebas dengan terikat, dan seberapa besar kontribusi variabel bebas menjelaskan model variabel terikat dilakukan pengujian koefisien korelasi dan determinasi. Pengujian koefisien korelasi linier  $R$  yang dihasilkan antara variabel diskusi verbal (X1) dan kinerja auditor (Y) adalah sebesar 0,623. Nilai korelasi (R) sebesar 0.623 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sedang/cukup antara variabel X1 dengan variabel Y. Sedangkan nilai R Square atau koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.388 menunjukkan bahwa kontribusi variabel X1 untuk menjelaskan model variabel Y adalah sebesar 38.8% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Untuk faktor lain yang dapat menjelaskan variabel kinerja auditor (Y) dapat berupa komitmen organisasi, kepuasan kerja, budaya organisasi, kepuasan kerja dan variabel lainnya.

Dengan menggunakan bantuan *software SPSS version 18*, maka persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 71,534 + 1,996X1$$

Persamaan tersebut dapat diartikan :

Konstanta  $\alpha$  sebesar 71,534 memberikan pengertian bahwa jika Diskusi Verbal (X1) sama dengan nol (0), maka besarnya kinerja auditor BPK 71,534 satuan skor. Nilai  $\beta_1$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel Diskusi Verbal (X1) sebesar 1,996, ini mempunyai arti bahwa jika Diskusi Verbal meningkat sebesar 1 satuan skor, maka akan mengalami peningkatan Kinerja Auditor BPK sebesar 1,996 satuan skor dari kondisi sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas/independen (X) terhadap variabel terikat/dipendenden (Y) secara parsial dengan menggunakan uji t memakai kriteria yaitu apabila signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima dan apabila signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak. Hasil pengujian secara parsial setiap variabel bebas terhadap variabel terikat adalah :

Pengaruh Diskusi Verbal terhadap Kinerja Auditor

Hipotesis pertama menyatakan bahwa diskusi verbal berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan Hasil  $t_{hitung}$  untuk variabel Diskusi Verbal = 5,777 dan signifikan 0,000 serta  $t_{tabel} = 2,000$ . Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dapat dinyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. dan tingkat signifikan 0,000  $< 0,05$  Dengan demikian Diskusi Verbal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat Ismail dalam Trotmen (1995) yang mengemukakan bahwa kelompok yang melakukan diskusi verbal menghasilkan kualitas hasil audit yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang tidak melakukan proses audit. Lebih lanjut dikatakan oleh Ismail dalam Trotmen (1995) proses diskusi memberikan kesempatan bagi staf auditor senior untuk melakukan penilaian terhadap pihak yang di review untuk memperbaiki kinerjanya setelah ditemukan kesalahan yang akan meningkatkan kinerja pihak yang di review. Hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Miller at.al (1999) bahwa diskusi verbal mempengaruhi kinerja audit terutama staf audit yang kurang berpengalaman. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yusni Wahyudi (2003) bahwa semakin intensif diskusi yang dilakukan kepada para staf auditor maka akan mendorong tercapainya kinerja yang semakin baik.

Hasil-hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama bahwa diskusi verbal berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Hal ini berarti bahwa kinerja auditor yang optimal dapat dicapai jika dilakukan diskusi verbal dalam review kertas kerja audit secara intensif dilakukan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengujian koefisien korelasi linier  $R$  yang dihasilkan antara variabel diskusi verbal (X1) dan kinerja auditor (Y) adalah sebesar 0,623. Nilai korelasi (R) sebesar 0.623 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sedang/cukup antara variabel X1 dengan variabel Y.
2. Nilai R Square atau koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.388 menunjukkan bahwa kontribusi variabel X1 untuk menjelaskan model variabel Y adalah sebesar 38.8% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3. Dari persamaan linier sederhana didapat persamaan  $Y = 71,534 + 1,996X_1$ . Konstanta  $\alpha$  sebesar 71,534 memberikan pengertian bahwa jika Diskusi Verbal ( $X_1$ ) sama dengan nol (0), maka besarnya kinerja auditor BPK 71,534 satuan skor. Nilai  $\beta_1$  yang merupakan koefisien regresi dari variabel Diskusi Verbal ( $X_1$ ) sebesar 1,996, ini mempunyai arti bahwa jika Diskusi Verbal meningkat sebesar 1 satuan skor, maka akan mengalami peningkatan Kinerja Auditor BPK sebesar 1,996 satuan skor dari kondisi sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4. Dari uji t dapat diketahui hasil  $t_{hitung}$  untuk variabel Diskusi Verbal ( $X_1$ ) = 5.777 dan signifikan 0,000 serta  $t_{tabel} = 2,000$ . Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dapat dinyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 Dengan demikian Diskusi Verbal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, adapun saran yang diajukan penulis, antara lain :

1. Ada baiknya jika Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, perlu memperhatikan, meningkatkan dan mengintensifkan diskusi verbal dalam review kertas kerja audit yang ada dalam Kantor BPK tersebut, karena terbukti memiliki hubungan yang erat dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor yang ada dalam Kantor BPK tersebut.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali faktor-faktor lain yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi, tentunya dengan mempertimbangkan segala keterbatasan yang ada dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim 2008, *Auditing I (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*, AMP YPKN, Yogyakarta.
- Aiken, L. S, and S. G West 1991, *Multiplw Regression: Testing and Interpreting Interactions Sage Publications*, Newbury Park, CA
- Arens, A.A., J.K. Loebbecke. 2000. *Auditing: An Integrated Approach. EightEdition. New Jersey: Prentice Hall International Inc.*
- As'ad Muchamad, 2008. *Psikologi Industri*, Liberty, Yogyakarta
- Goodson.J.R.G.W McGee dan A.Seers. 1992. *Giving Appropriate Performance Feedback to Managers: An Emperical Test of Conten and Outcome, The Journal of Bussines Communication: 329-342*
- Ilyas Meifida, dan Yudhi Herliansyah, 2009. *Diskusi Verbal Dalam Review Kertas Kerja, Motivasi, Interaksi antara Diskusi dan Pengalaman Pengaruhnya Terhadap Kinerja Auditor*. Jurnal Ilmiah Satya Negara Indonesia Vol. 2, No. 1, Juni 2009 : 32-49
- Ismail, Z, and K.T. Trotman. 1995. *The Impact of the Review Process in Hypothesis Generation Task, Accounting organization and Society* 12 : 345-357
- Karmer, M. W 1993. *Communication and Uncertaintly Reduction During Job Transfer Leaving and Joining Process*. Communication Monographs (juni) : 178-179
- Kuncorohadi, Drs, 2007. *Pokok-pokok Perilaku Organisasi*, Semarang Undip
- Libby, R dan J. Luft. 1993. *Determiant of Judgement Performance in Accounting Setting, Ability, Knowledge, Motivation and Environment. Organization and Society* 18:425-450
- Mardiasmo. 2008. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta

- Miller, C.C, L.M. Burke and W.H.H. Glick (1999), *Cognitive Diversity Among Upper Echelon Executive: Implication for Strategic Decision Process*, Strategic Management Journal, 19, pp.39-58
- Mulyadi. 2008. *Auditing*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi. 2008. *Pemeriksaan Akuntan*. Yogyakarta: Badan Penerbit STIE YKPN
- Ngalim Purwanto, 2008. *Psikologi Pendidikan*, Bandung. Penerbit PT. Remaja Rosdya Raya
- O'Reilly et al.1998 O'Reilly, R. C., Munakata, Y., & McClelland, J. L. (1998). *Computational Cognitive Neuroscience: Understanding the Mind by Simulating the Brain*. MIT Press, Cambridge, MA
- Sularso, Sri. 1998. *Pengaruh Pengalaman Akuntan Pemeriksa terhadap Pengetahuan dan Penggunaan Intuisinya Mengenai Kekeliruan*, Tesis.
- Sunarsip, 2008, *Coorporat Governance Audit : Paradigma Baru Profesi Akuntansi dalam Mewujudkan Good Coorporate Gvernance*, *Media Akuntansi*, No.17/Th. VII.pp. II-VII
- Sunaryo.1989. *Stategi Belajar Mengajar dalam Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta:Depdikbud
- Suwandi dan Nur Indriantoro, 1999. *Pengujian Model Turnover Pasewark dan Strawer : Studi Empiris pada Lingkungan Akuntansi Publik*, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol 2, No 2, pp 173-192
- Trotman, Ken T, and P.W Yetton, 1985. *The Effect of The Review Process on Audits Judgment*. *Journal of Accounting hResearch*, Vol 23, No. 2,pp. 257-266
- Wahyudi, Yusni, 2003. *Analisis Pengaruh Diskusi Verbal Dalam Riview Kertas Kerja dan Motivasi Serta Interaksinya Terhadap Kinerja Auditor Di Jawa Tengah*. Tesis [www.manado.bpk.go.id](http://www.manado.bpk.go.id)



## **Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peran Manajer Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Manado**

**Leydi Pandelaki  
Agus. T. Poputra**

### **ABSTRACT**

*Implementation of performance-based budgeting in government agencies in Indonesia, proclaimed through the enactment of Law No. 17 Year 2003 on State Finance and implemented in stages beginning in the budget 2005. Reformasi financial management resulted in a fundamental change in the financial management of the country / region. The research was conducted at the Regional Working Units Manado City Government. The study population was an employee who worked in Manado City Government on education. Samples were three and four echelons as the authorized users of government budget on education in the city of Manado. Officials in the city of Manado worked as secretary department / agency, department secretary, the head section, sub-section chief, the head of the field, sub-field head and section head who is considered able to describe the performance of each regional secretaries, departments and institutions as a whole technical area . This study aimed to determine the effect of organizational commitment and the role of manager of financial management on the performance of managerial work unit. Collecting data using primary data collection, namely the questionnaire by using purposive sampling technique. Samples were obtained from three-and four-echelon employees who work in regional work units Manado City Government who has served as secretary of the department / agency, the head section, sub-section chief, the head of the field, sub-field head and section head. Data analysis using SPSS software with five stages. First, descriptive statistics. The second phase, testing the quality of the data. The third phase, to test the assumptions of classical aberrations. The fourth stage, performing multiple regression analysis. And fifth stages, testing the hypothesis. The results showed that organizational commitment and significant positive effect on the performance of managerial work unit. While the role of manager of financial management has no effect and no significant effect on work unit performance.*

*Key Words: organizational commitment*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan/kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan UU 23 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dapat dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah, salah satunya terkait dengan manajemen keuangan negara maupun daerah. (dikutip oleh Tuasikal, 2007) menegaskan tuntutan publik akan pemerintah yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan negara, baik pada tahap penganggaran maupun pertanggungjawaban. Hal ini menandakan perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi kompleks. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (dikutip oleh Mardiasmo, 2002). Keterlibatan setiap personel yang kompeten dalam setiap level organisasi dapat mendorong peningkatan organisasi. Keterlibatan/partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, dimana para anggota organisasi yang dalam hal ini adalah manajer ikut serta dan mempunyai pengaruh dalam suatu pembuatan keputusan yang berkepentingan dengan mereka. Partisipasi dalam konteks penyusunan anggaran merupakan proses dimana para individu yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian anggaran, ikut serta dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan anggaran (dikutip oleh Brownell dan McInnes, 1986).

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang, dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika, (dikutip oleh Rahmawati, 2009). Jadi kinerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan atau organisasi serta pihak dari karyawan itu sendiri.

Kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan dan organisasi. Komitmen organisasi diperlukan sebagai salah satu indikator kinerja yang optimal. Seseorang yang bergabung dalam organisasi pada sebuah perusahaan dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Sebagai definisi yang umum (dikutip oleh Rahmawati, 2009) mengartikan komitmen organisasi sebagai sikap yang menunjukkan "loyalitas" karyawan dan proses berkelanjutan sebagai seorang organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya. Komitmen mencakup keterlibatan kerja sebagai derajat kemauan untuk menyatukan dirinya dengan pekerjaan, menginvestasikan waktu, kemampuan dan energinya untuk pekerjaan, dan menganggap pekerjaannya sebagai utama dari kehidupannya.

Manajer pengelolaan keuangan daerah merupakan seseorang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan ketrampilan yang diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengolah dan mengendalikan serta mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi untuk melakukan kegiatan tertentu, serta memberikan pengawasan dalam hal ini mengenal keuangan daerah.

Perumusan masalah dapat dirumuskan dalam pernyataan penelitian sebagai berikut .

1. Apakah Komitmen Organisasional berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Manado ?
2. Apakah Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Manado ?

Analisis data melalui lima tahap. *pertama* statistik deskriptif. *Kedua*, pengujian kualitas data. *Ketiga*, melakukan uji penyimpangan asumsi klasik. *Keempat*, melakukan analisis kuantitatif. *Kelima*, melakukan uji hipotesis.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1 Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga Pemerintah Daerah. (dikutip oleh Renyowijoyo, 2008:211).

### **2.2 Komitmen Organisasional**

Komitmen organisasional menurut Mathis dan Jackson memberikan definisi, “*organizational commitment is the degree to which employees believe in and accept organizational goals and desire to remain with the organizational*”. (Komitmen organisasional adalah derajat yang mana karyawan percaya dan menerima tujuan-tujuan organisasi dan tetap akan tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi). Komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Mowday *et. al.* ini memiliki ciri-ciri, yaitu: (1). *Belief* yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi; (2). Kesiapan untuk bekerja keras; (3). Keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi.

### **2.3 Peran Manejer Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan desentralisasi administratif, yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai pada tingkat hirarki yang paling rendah. Dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah diberi wewenang dalam batas yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, namun mereka memiliki elemen kebijaksanaan dan kekuasaan serta tanggung jawab tertentu dalam hal sifat dan hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya (Coralie dikutip oleh Rohman, 2007).

### **2.4 Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kinerja (*performance*) menurut Manning dan Curtis (dikutip oleh Rohman, 2009) adalah pencapaian kerja, tindakan, perbuatan, dan lain-lain (*accomplishment of work, acts, feat, etc*), dalam pengertian lain Manning dan Curtis mendefinisikan kinerja sebagai hasil yang telah dikerjakan (*something done or performed*). LAN (dikutip oleh Rohman, 2009) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic scheme*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu (dikutip oleh Boland dalam Rohman, 2009). Menurut PP Nomor 58 tahun 2005, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dan kuantitas dan kualitas yang teratur.

## **3. Gambaran Umum Responden**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui pengiriman daftar pertanyaan (kuesioner). Pengiriman kuesioner dimulai pada tanggal 25 juni 2012, dengan total kuesioner yang dikirim sebanyak 180. Kuesioner yang kembali sebanyak 120 termasuk 40 kuesioner yang tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap, sehingga kuesioner yang diolah sebanyak 80 kuesioner.

Adapun rincian jumlah pengiriman kuesioner dan data pengembalian kuesioner dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.1.1 berikut

**Tabel 4.1.1**  
**Rincian Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Total	Persentase
Kuesioner yang didistribusikan	180	100 %
Kuesioner yang tidak kembali	(60)	33.3%
Kuesioner yang kembali	120	66.7 %
Kuesioner yang gugur (tidak lengkap pengisiannya) sehingga tidak dapat diolah	(40)	33.3 %
Kuesioner yang dapat diolah	80	66.7 %

#### 4. ANALISIS DAN EVALUASI

##### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Dalam tabel 4.2 diketahui bahwa rata-rata (*mean*) total jumlah skor jawaban untuk variabel Kinerja Manajerial Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Y) adalah 18.5375 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam unit kerja responden baik.

Dalam tabel 4.2 diketahui bahwa rata-rata (*mean*) total jumlah skor jawaban untuk variabel Komitmen Organisasional ( $X_1$ ) adalah 15.1000 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden mengerti dan memahami tentang adanya Komitmen Organisasional dalam unit kerja responden.

Dalam tabel 4.2 diketahui bahwa rata-rata (*mean*) total jumlah skor jawaban untuk variabel Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah ( $X_2$ ) adalah 14.3125 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan Peran Manajer Pengelola Keuangan Daerah yang cukup baik menunjukkan kinerja Manajerial yang dicapai.

##### 4.2 Uji Kualitas Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan kuesioner sebagai alat utama untuk memperoleh data.

##### 4.2.1 Uji Validitas

Pada tabel 4.3.1 menunjukkan bahwa hasil uji validitas untuk variable pemahaman komitmen organisasional dengan tujuh butir item pertanyaan, variable peran manajer pengelolaan keuangan daeran dengan tujuh butir item pertanyaan, dan variable kinerja Manajerial dengan Sembilan butir item pertanyaan ternyata dinyatakan bahwa semua variable valid karena berada dibawah niali signifikansi  $\alpha = 0.05$  sehingga butir instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur variable penelitian.

##### 4.2.2 Uji Reliabilitas

Variabel	Croanbach's Alpha	Stand ar	Keterangan
Komitmen Organisasi (X1)	0,717	0,6	<b>Reliabel</b>
Peran Manajerial Pengelola keuangan Daerah (X2)	0,872	0,6	<b>Reliabel</b>
Kinerja SKPD (Y)	0,624	0,6	<b>Reliabel</b>

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Multikolinearitas

Gambar 4.4.3 merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan analisa grafik dan dari Gambar 4.4.3 dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa distribusi data residual normal.

#### 4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi

Dari Tabel 4.4.4 dapat dilihat bahwa nilai uji Durbin-Watson adalah 2.030 sehingga kesimpulannya tidak dapat disimpulkan terjadi autokorelasi.

### 4.4 Pengujian Statistik

#### 4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah Komitmen Organisasional dan Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara serentak terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Model analisis linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut .

Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Berdasarkan Tabel 4.5.1 dapat dilihat persamaan regresi linear berganda adalah

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = 13.611 + 0.0425 \text{ KO} - 104 \text{ PMPKD}$$

#### 4.4.2 Koefisien Korelasi (R)

Dari Tabel 4.5.2 dapat dilihat nilai R adalah 0,501 yang memberi arti bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.611	1.667		8.164	.000
KOMITMEN ORGANISASI	.425	.089	.540	4.782	.000
PKD	-.104	.125	-.094	-.831	.408

#### 4.4.3 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Dari Tabel 4.5.3 dapat dilihat nilai R<sup>2</sup> adalah sebesar 0.251 atau 25.1% sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) mendapat kontribusi dari Komitmen Organisasional (X<sub>1</sub>) dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah (X<sub>2</sub>) sebesar 25.1% sedangkan sisanya 74.9% mendapat kontribusi dari faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 4.4.4 Uji t

##### 3. Pengujian Hipotesis Pertama (H<sub>1</sub>)

Dari Tabel 4.5.4, nilai t hitung untuk variabel komitmen Organisasional 4.782 adalah dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) diterima. Hal ini menjelaskan tentang berpengaruh positif antara variabel Komitmen Organisasional terhadap variabel kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### 4. Pengujian Hipotesis Kedua ( $H_2$ )

Dari Tabel 4.5.4, nilai  $t$  hitung untuk variabel Peran Manajer pengelolaan Keuangan Daerah adalah  $-0.831$  dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0.405$ .

Karena probabilitas signifikansi lebih besar dari  $0,05$  dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak. Hal ini menjelaskan tentang pengaruh negative antara variabel Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### 4.4.5 Uji F

Dari uji ANOVA didapat nilai hitung  $F$  sebesar  $12.909$  dengan probabilitas signifikansi  $0,000$ . Probabilitas signifikansi tersebut lebih kecil dari  $0.05$ , maka variabel Komitmen Organisasi dan peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pembahasan

#### 4.4.6 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Manajer Satuan Kerja Perangkat Daerah berpengaruh sebesar  $4.782$  pada tingkat signifikansi  $0.000$ , yang berarti signifikan karena berada di bawah nilai signifikansi yang dipersyaratkan yaitu  $0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

#### 4.4.7 Pengaruh Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah berpengaruh negative sebesar  $-0.831$  pada tingkat signifikansi  $0.408$ , yang berarti tidak signifikan karena berada di atas nilai signifikansi yang dipersyaratkan yaitu  $0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa Peran Manajer Pengelolaan Keuangan daerah yang tinggi tidak dapat meningkatkan Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu SPSS yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan mengenai Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut

4. Berdasarkan pengujian yang dilakukan secara parsial maka dapat diketahui Komitmen Organisasional berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD dikarenakan probabilitas signifikansinya lebih kecil dari  $0.05$  hal ini menjelaskan berpengaruh positif antara variable Komitmen organisasi terhadap variable kinerja manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya Komitmen Organisasional maka semakin tinggi pula kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Berdasarkan pengujian yang dilakukan secara parsial maka dapat diketahui peran manajer pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajerial SKPD dikarenakan probabilitas signifikansinya lebih besar dari  $0.05$  hal ini menjelaskan berpengaruh negatif antara variable peran manajer pengelolaan keuangan daerah terhadap variable kinerja manajerial SKPD. Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah maka akan semakin menurunnya Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah.
6. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pengujian secara bersama-sama antara variable-variabel bebas terhadap variable terikat, diketahui terdapat hubungan yang cukup kuat antara variable  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap variable  $Y$  secara serentak. Hal ini menunjukkan bahwa jika

pengujian dilakukan bersama-sama maka hal ini menunjukkan pengaruh dan hubungan yang cukup terhadap kedua variable tersebut.

## 5.2 Saran

Dengan segala keterbatasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peran komitmen organisasi lebih berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat dari pada variabel manajer pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan karena kurangnya pengetahuan atau minimnya pegawai yang menguasai pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang digeluti masing-masing pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N. dan V. Govindrajana 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiharjo, C. 2008. "Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja, Kepemimpinan dan Komitmen Organisasional terhadap Semangat Kerja Karyawan (Studi pada Balai Latihan Kerja dan Industri Semarang)." *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Program Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.
- Brownel, P. dan McInnes M. 1986. "Budgetary Participation, Motivation, and Managerial Performance", *The Accounting Review*, Vol. LXI, No. 4. Milani, K. 1975. "The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes : A Field Study", *The Accounting Review* 50.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. dan T. Damayanti. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Herminingsih. 2009. "Pengaruh Partisipasi Anggaran dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja sector Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Nordiawan dan Hertianti. 2010. *Akuntansi sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Pangastuti, M. D, 2008. "Pengaruh Partisipasi Penganggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajemen Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Moderator (Studi pada Kabupaten Timur Tengah Utara). Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Rachmawati. S. R. 2009. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Bidang Keuangan Pada Pemda Kabupaten Sukoharjo." *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Robbins. S. P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi 10 Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. INDEKS Gramedia.
- Rohman, A. 2007. "Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah)." *Jurnal MAKSI*, Vol. 7, No. 2, pp.206-220
- Sekaran, U. 2007. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tuasikal, A. 2007. "Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*

## **Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara**

**Cristofer Sumiok  
Winston Pontoh**

### **ABSTRAK**

*In presenting a good financial governance, the Local Government must be able to present the financial statements in accordance with the local government Permendagri 13 of 2006 and the Government Accounting Standards (SAP). To obtain these results certainly not out of the factors that support the implementation of the financial statements as rules / regulations, education, experience, commitment to employees, and supporting tools that support the creation of the ability of the involved parties in the preparation of the financial statements of Local Government.*

*The purpose of this research aim to know the influence of competence and independence with quality audit regional inspectorate officers as financial control in the province of North Sulawesi.*

*The Data was collected by survey with questionnaire contain list of question that have to fill by internal auditors in inspectorate as respondent. Technique data analyzing to the test the hypothesis by multiple linear regression using SPSS Ver 19.0.*

*The result by using F-test shows that competence (X1) and independence (X2) on the test result indicate that the variabel F competence (X1) and independence (X2) has significant correlation with audit quality regional inspectorate officers in the province of north Sulawesi. the result of F test shows that  $F_{hit} = 6,016$  and  $F_{tab}$  with confidence level 95%  $df_1$  (2) and  $df_2$  (46) is 2,81 at level significance  $0,002 < \alpha: 5\%$  (0,05) it means  $H_a$  could accepted the result of t test show that pnyly competence variables that has influence with audit quality in regional inspectorate officers in the province of north Sulawesi. t hit, shows  $3,864 > t_{tab}$  2,014 at level significance  $0,000 < 0,05$  Independence variable shows  $t_{hit}$  0,986  $< t_{tab}$  2,014 at level significance  $0,329 > 0,05$  it means that independent variable didn't influence with audit quality regional inspectorate officer in the province of north Sulawesi.*

**Key Words :** *competence, independence*



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat inspektorat Provinsi Sulawesi Utara saat ini masih menjadi perhatian masyarakat, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). BPK masih menemukan adanya kegiatan yang merugikan keuangan negara di Provinsi Sulawesi utara, dan di sejumlah kabupaten/kota lain pada tahun 2010, bahkan di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado mendapat Opini Tidak Wajar. Dalam laporan keuangan tersebut ditemukan masih adanya Temuan-temuan berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan dan lemahnya pengendalian intern. Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti kualitas audit aparat inspektorat yang ada di kabupaten/kota Sulawesi utara masih kurang baik.

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah (BPKP, 2008). Keahlian auditor menurut Tampubolon (2005) dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit yang berkualitas.

Selain keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 2008). Pernyataan standar umum kedua SPKN adalah: "Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya". Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab mempertahankan independensinya sedemikian rupa sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Namun penelitian yang dilakukan oleh samelson *et al* dikutip oleh Efendy (2010) independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dengan pertimbangan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah khususnya di provinsi Sulawesi Utara.

Kuncoro Mudrajad (2003:124), jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

- a. Data Kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik (angka).
- b. Data Kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari respon tertulis ( kuesioner ) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sebagai responden dalam penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara dan kuisisioner yang diantarkan pada auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam buku, jurnal dan sumber lain dengan kategori data eksternal.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2004:55). Objek populasi dari penelitian ini adalah auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, Inspektorat Kota Manado dan Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2004:56). Metode pemilihan sampel adalah metode *purposive sampling* yang merupakan

metode pengambilan sampel dengan didasarkan pada kriteria tertentu (Sekaran, 2003), yaitu: 1) Auditor internal pemerintah yang melaksanakan pekerjaan di bidang auditing 2) Auditor internal pemerintah yang telah lulus sertifikasi pembentukan auditor maupun belum, namun pernah mengikuti diklat sertifikasi.

Dalam usaha untuk melengkapi penulisan hasil penelitian ini, penulis memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi melalui tahap-tahap sebagai berikut.

Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian dimana data diperoleh melalui penelitian langsung yang dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan, dimana data yang diambil sebagian besar diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Interview yaitu : Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak perusahaan mengenai data yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang di bahas.
2. Observasi yaitu : Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan terjun langsung ke objek yang diteiliti dari suatu pelaksanaan kegiatan sehingga dapat memperoleh bukti visual (fisik) mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kuesioner yaitu : Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan untuk kemudian di isi oleh responden tempat diadakannya penelitian, untuk menilai secara lebih lanjut mengenai pengaruh Kompetensi, dan Independensi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah**

pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga proses besar. Tiga proses tersebut adalah perencanaan (termasuk didalamnya aktifitas penetapan APBD/Penganggaran), penatausahaan (proses pelaksanaan APBD) dan pelaporan (pertanggungjawaban APBD). Proses akuntansi merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang mengharuskan setiap pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaporkan seluruh transaksi kedalam laporan keuangan. Struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah yang dirinci berdasarkan urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.

### **2.2 Audit Sektor Publik**

Secara etimologi, pemeriksaan (audit) berasal dari bahasa latin dengan kata "*audere*" yang berarti mendengar. Mendengar yang efektif adalah sebuah aktivitas menyerap informasi dalam suatu media dengan menggunakan alat pendengaran yang diikuti dengan respon yang terprogram. Dengan demikian agar kegiatan mendengar terjadi maka: harus ada informasi, media, alat pendengaran dan harus direspon. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemeriksaan adalah suatu kegiatan menyerap, mengolah, dan merespon data yang dilakukan oleh pihak yang dapat dipercaya dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Terkait dengan praktek akuntansi sebuah entitas, auditing lebih dikenal sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti dari informasi yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.. Arens dikutip oleh Murwanto, (2012).

### **2.3 Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean governance*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Chayat, 2004).

#### 2.4 Kualitas Audit.

De Angelo (dalam alim 2007) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. dimana Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KAP yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil. Sedangkan Deis dan Groux (dalam alim 2007) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.

#### 2.5 Kompetensi

Pernyataan standar umum pertama (SPKN dalam paragraf 02 dan 03) adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

#### 2.6 Independensi

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 04 (SA Seksi 220), standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, dalam hal ini dibedakan dengan auditor yang berpraktik sebagai auditor intern. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

### 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebarikan melalui *contact person* kepada aparat Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Inspektorat Kab Minahasa Selatan dan Kota Manado. pada tanggal 6 Desember 2011.

**Tabel 3.1. Populasi dan Sampel**

Pemerintah Daerah	Jumlah Auditor Internal
Pemerintah Prov Sulawesi Utara	24
Pemerintah Kab Minahasa Selatan	8
Pemerintah Kota Manado	27
<b>Total</b>	<b>59</b>

Sampai dengan batas akhir pengembalian yakni tanggal 30 Desember 2011, dari 59 kuisisioner yang disebarikan, 50 kuisisioner yang kembali dan 9 kuisisioner yang tidak kembali. Tingkat pengembalian (*response rate*) yang diperoleh adalah 84,7 % sedangkan sisanya 16,3 % tidak kembali. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang belum kembali dari pemeriksaan audit di SKPD, Cuti dan

dinas keluar kota pada saat penyebaran kuisisioner dilakukan, akibatnya perantara tidak sempat memberikan kuisisioner sampai batas waktu yang ditentukan.

## 4. ANALISIS DAN EVALUASI

### 4.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan  $t_{hitung}$  variabel kompetensi (X1) diperoleh angka  $3,864 > t_{tabel} 2,014$  dan nilai signifikansi variabel kompetensi =  $0,000 < 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. secara parsial (variabel X<sub>1</sub>) Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit (variabel Y).

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat Bonner dikutip oleh Alim (2007) menemukan bahwa bukti empiris bahwa auditor berpengalaman lebih banyak menemukan kesalahan atau item-item yang tidak umum dibandingkan auditor yang tidak berpengalaman. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berarti kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi tersebut terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki, agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Penerapan pengetahuan yang maksimal tentunya akan sejalan dengan semakin bertambahnya pengalaman yang dimiliki. Sesuai dengan standar umum bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti kliennya (Arens dan Loebbecke, 1997). Dalam Alim (2007) Pengalaman juga akan memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensinya. Jika auditor memiliki kompetensi yang baik maka auditor akan dengan mudah melakukan tugas-tugas auditnya dan sebaliknya jika rendah maka dalam melaksanakan tugasnya, auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan rendah pula.

### 4.2 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Hasil statistik pada analisis regresi linier berganda, dapat dilihat bahwa  $t_{hitung}$  variabel Independensi (X2) diperoleh angka  $0,986 < t_{tabel} 2,014$  dan nilai signifikansi variabel independensi (X2)  $0,329 > 0,05$  maka dapat dinyatakan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, Dengan demikian Independensi (variabel X2) Tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hasil pengujian hipotesis ini tidak sejalan dengan pendapat Tisnawati (2009) dan Deis dan Giroux, 1992 dalam Alim, (2007) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, bahwa lama waktu auditor melakukan kerjasama dengan klien (*tenure*) berpengaruh terhadap kualitas audit. dan bahwa kemungkinan dimana auditor akan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan Sukriah (2009), elfarini (2007), fachrudin (2008) Dan Efendy (2010) yang menyimpulkan bahwa independensi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit, Karena banyaknya tekanan auditor yang berasal dari pribadi dan ekstern sehingga mengakibatkan kualitas audit yang dihasilkan rendah. Sehingga

independensi yang dimiliki aparat inspektorat tidak menjamin apakah yang bersangkutan akan melakukan audit secara berkualitas.

Memang tidak mudah menjaga tingkat independensi agar tetap sesuai dengan jalur yang seharusnya. Diduga karena independensi aparat inspektorat masih terpengaruh dengan penentu kebijakan yang dapat mengintervensi hasil pemeriksaan, disamping itu Kerjasama dengan klien yang terlalu lama bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor karena auditor dan *auditee* sama-sama di lingkungan pegawai yang sama dalam hal ini provinsi Sulawesi utara sehingga menimbulkan hubungan interpersonal baik hubungan kekerabatan atau relasi kepentingan lainnya dan seringnya kepala daerah melakukan mutasi antar satuan kerja perangkat daerah. Belum lagi jika auditor melakukan pemeriksaan, mereka mendapatkan berbagai fasilitas yang disediakan *auditee* selama penugasan audit yang bisa saja mempengaruhi independensi dalam pemeriksaan, meskipun aparat acapkali mendapat fasilitas dari *auditee*, namun aparat tetap menganggap bahwa audit yang baik tetap harus dilaksanakan

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, dan independensi, aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Kompetensi dan Independensi, secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat inspektorat. Dan Pengaruh ini di tinjau dari koefisien determinasi diperoleh sekitar 23.5% Sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain.
2. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, sehingga semakin baik tingkat kompetensi, seperti penguasaan standar akuntansi dan auditing, wawasan tentang pemerintahan dan pengalaman seperti yang didapat melalui diklat auditor internal maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya.
3. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sehingga independensi yang dimiliki aparat inspektorat tidak menjamin apakah yang bersangkutan akan melakukan audit secara berkualitas. Karena banyaknya tekanan auditor yang berasal dari pribadi dan ekstern sehingga mengakibatkan kualitas audit yang dihasilkan rendah.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain sebagai berikut.

1. Peneliti juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas objek penelitian pada aparat inspektorat kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi utara, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.
2. Penentu kebijakan tidak boleh mempengaruhi independensi auditor dalam pemeriksaan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merugikan negara, sehingga diharapkan kualitas audit yang dihasilkan oleh aparat Inspektorat dapat semakin baik.
3. Perbandingan antara kualitas audit sektor swasta dan sektor publik adalah bahwa kualitas audit di sektor publik lebih rendah dibandingkan kualitas audit di sektor swasta, namun hal ini perlu diuji kembali di Indonesia, apakah akan menghasilkan temuan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M.N, T. Hapsari, dan L. Purwanti (2007), "Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi," *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Abdulloh, (2006), "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Makassar," *Tesis Universitas Hasanudin*

- Afiah, Nunuy Nur (2009), Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi. *Universitas padjajaran, Jawa Barat*.
- BPKP, (2008), Kode Etik dan Standar Audit edisi kelima, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawasan dan Pembangunan BPKP.
- Cahyat, A (2004), "Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan," *Governance Brief Number 3*
- Elvira, Zeyn (2011), "Akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemodernisasi"
- Elfarini, E.C (2007), "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit," *Universitas Negeri Semarang*
- Efendy, (2010), "Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah," *Tesis Universitas Diponegoro Semarang*
- Gujarati, Damodar (2003), *Basic Econometrics*, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York.
- Irawati, Nur (2011), "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik". Unhas Makasar
- Harhinto, T (2004), "Pengaruh Keahlian dan Independensi terhadap Kualitas Audit, Studi Empiris pada KAP di Jawa Timur," *Tesis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Haryanto, Salmuddin, dan Arifuddin (2007), *Akuntansi Sektor Publik. Edisi pertama*, Badan Penerbit *Universitas Diponegoro Semarang*
- Kuncoro, Mudrajat (2003), *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kasidi, (2007), "Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor," Jawa Tengah
- Mardiasmo, (2005), *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mayangsari, S (2003), "Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Suatu Kuasieksperimen," *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 6 No. 1. Januari*
- Mulyadi, (1992), *Pemeriksaan Akuntan*. Yogyakarta: Badan Penerbit STIE YKPN
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Murwanto, (2012), "Audit Sektor Publik suatu pengantar bagi pembangunan akuntabilitas instansi pemerintah"
- Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sri Lastanti, Hexana (2005), "Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan," *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.5 No.1 April 2005*.
- Siti NurMawar, (2010), "Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit," *Skripsi Universitas Negeri Semarang*
- Saifudin, (2008), "Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap opini audit *going concern*," *Skripsi Universitas Negeri Semarang*
- Sugiyono, (2004), *Statistika Untuk Penelitian*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Sunarsip, (2001), *Coorporat Governance Audit : Paradigma Baru Profesi Akuntansi dalam Mewujudkan Good Coorporate Gvernance*, *Media Akuntansi*, No. 17/Th. VII.pp. II-VII
- Tisnawati, (2009), "Pengaruh kompetensi, independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit aparat inspektorat," *Tesis Universitas Diponegoro*

**ANALISIS ATAS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OLEH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**Oleh :  
Iskandar Wonda  
Herman Karamoy  
Ventje Ilat**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the local financial management supervision by the local parliament members period 2009-2014 in Puncak Jaya regency and stuff underlying onset of these conditions. The data used in this research were the primary data using the instrument as a list of questions with in-depth interviews to the research informants. The subjects were legislators of Puncak Jaya Regency period of 2009-2014 totaling 24 people. The method used were qualitative descriptive analysis.*

*The results showed that the personal background would have less effect on the function of supervision of local financial management. The political background effect on the supervisory function of financial management at Puncak Jaya Regency legislators. The legislator knowledge about the budget effect to a good supervision of the local financial management. The legislator who have a good understanding of the local financial regulatory would easy to supervise whether the budget has been run according to predetermined objectives and to detect the occurrence of budget leaks.*

**Keywords:** *Personal Background, Political Background, Legislators Knowledge about the Budget, Supervisory Function of the Local Financial Management by the Local Legislators.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.2 Latar Belakang

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini ditujukan agar distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam konteks tersebut, manajemen keuangan daerah dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah.

Kedua undang-undang tersebut telah mengubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal, yaitu kepada pemerintah pusat menjadi pertanggungjawaban horisontal yaitu kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Halim dan Kusufi, 2012). Mengacu pada kedua undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan dan memberlakukan petunjuk teknis pelaksanaannya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga Permendagri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahunnya.

Berkaitan dengan itu, DPRD yang selanjutnya disebut Dewan harus lebih aktif dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat dan kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik dan anggaran di daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Pada umumnya, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan); (2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran); dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: (1) pengawasan atas keuangan daerah dilakukan oleh dewan, serta (2) adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna (Makeuda dikutip oleh Winarna dan Murni, 2007).

Untuk mendapatkan kinerja yang baik menuntut sumberdaya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator sumberdaya manusia berkualitas adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi akan mampu membantu seseorang menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kesesuaian latar belakang pendidikan juga berpengaruh dalam kinerja seseorang. Seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sama dengan bidang pekerjaannya cenderung lebih mengerti tentang masalah atau pekerjaan yang sedang dihadapinya. Kualitas sumberdaya manusia juga ditentukan oleh masa kerja atau lamanya menjabat sebagai anggota DPRD bagi para anggota dewan. DPRD akan dapat memainkan perannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya memiliki kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, wewenang dan fungsinya dan mampu mengaplikasikannya secara baik serta didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai (Yudono, 2002). Dengan masa kerja yang lebih lama bagi anggota legislatif tentunya telah lebih lama dan berpengalaman pula dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Selanjutnya, Yudono (2002) juga menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan



yang memadai. Akan tetapi kenyataannya, tingkat pendidikan para anggota DPRD masih rendah yang menyebabkan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah juga turut rendah. Selain itu, aparat daerah dengan latar belakang akuntansi dan/atau bergelar akuntan masih dapat dihitung dengan jari. Realitas ini mengakibatkan sebagian besar opini pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) selalu *disclaimer opinion* (tidak memberikan pendapat). Kejadian ini disebabkan oleh belum transparannya Pemerintah Daerah dalam mengungkapkan proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBD kepada publik, salah satunya laporan keuangan diumumkan di media massa.

Fenomena tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya**”.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka menarik untuk dikaji mengenai kondisi pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya. Kajian ini mencakup juga hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya kondisi tersebut.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya serta hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya kondisi tersebut.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat kebijakan; hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam implementasi fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sehingga bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah dari pihak legislatif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
2. Manfaat empirik; hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan kajian lebih lanjut dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah pada Anggota DPRD kabupaten/kota lainnya. Penelitian ini diharapkan juga berkontribusi untuk pengembangan literatur Akuntansi Sektor Publik di Indonesia khususnya bidang kajian Sistem Pengendalian Internal Sektor Publik.

## **2. LANDASAN TEORITIS**

### **2.1 Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yang berarti mekanisme teknik analisis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2005).

### **2.2 Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan daerah yang dapat dinilai dengan finansial termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya ke APBD (Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

### **2.3 Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan merupakan suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan politik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan

program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

#### **2.4 Fungsi DPRD sebagai Pengawas Keuangan Daerah**

Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Hal ini sesuai juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Hal ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut Alamsyah dalam Imelda Sari (2010), pengawasan terhadap APBD penting dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pemerintah dan diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, menjaga agar penggunaan APBD ekonomis, efisien dan efektif, serta menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran.

#### **2.5 Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah**

Kinerja DPRD dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai anggota dewan tergantung pada kompetensinya. Untuk dapat menjalankan kinerjanya dalam pengawasan keuangan daerah, anggota DPRD harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pengawasan keuangan daerah (Imelda Sari, 2010). Kualitas yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang.

#### **2.6 Latar Belakang Pribadi**

Latar belakang pribadi merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada individu yang meliputi banyak aspek, antara lain: nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Latar belakang pribadi berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Menurut Yuhertiana dalam Kombaitan (2009), kapasitas individu pada hakekatnya terbentuk dari proses pendidikan secara umum, baik melalui pendidikan formal, non-formal maupun informal.

#### **2.7 Latar Belakang Politik**

Latar belakang politik merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan (La Palombara, 2002). Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

#### **2.8 Pengetahuan Dewan tentang Anggaran**

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan dewan tentang anggaran erat kaitannya dengan

fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan (Yudono, 2002). Anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam 'membaca' anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

### 2.9 Konsep Dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menteri Negara Otonomi Daerah dan Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi UGM (2000) menyatakan bahwa APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. APBD harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, serta bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/investasi (PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah).

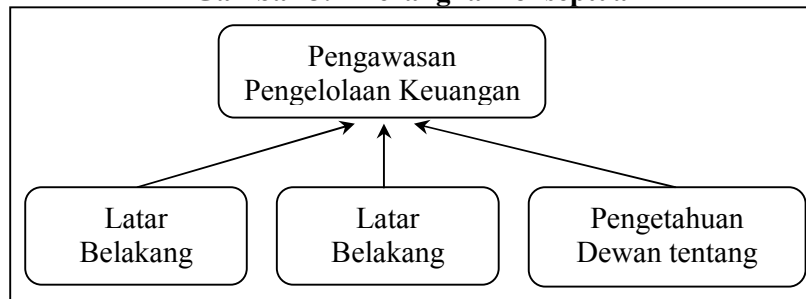
## 3. KERANGKA KONSEPTUAL

### 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik tergantung pada efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, maka perlu ditunjang oleh tiga aspek penting, yaitu latar belakang pendidikan, latar belakang politik, dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran.

Menurut Truman (1960) dikutip oleh Werimon (2007), pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Sehingga dapat dirumuskan dalam kerangka konseptual berikut ini.

**Gambar 3.1 Kerangka Konseptual**



Sumber: Data olahan (2013)

### 3.2 Proposisi

#### 1. Latar Belakang Pribadi Menunjang Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Latar Belakang Pribadi menyangkut banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Individu yang berkualitas adalah individu yang memiliki pengetahuan, salah satunya pengetahuan akan pentingnya pengendalian dalam pembuatan anggaran dari dalam diri pembuat anggaran itu sendiri. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting. Maka individu dalam peran sebagai DPRD harus memiliki pengetahuan yang

cukup untuk mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal, dengan demikian dapat memperkecil anggaran daerah.

## **2. Latar Belakang Politik Menunjang Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah**

Latar Belakang Politik merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan agar dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal dalam arti memahami benar hak, tugas dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang baik.

## **3. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Menunjang Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.**

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas, dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam memproduksi suatu kebijakan anggota Dewan diharapkan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

## **4. METODE PENELITIAN**

### **4.3 Jenis dan Sumber Data**

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu data primer dan data sekunder (Hasan, 2008:19).

1. Data Primer; biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Kuncoro, 2003:127). Dalam penelitian ini, data primer berupa pertanyaan peneliti dan jawaban responden melalui kuesioner yang akan dibagikan kepada responden.
2. Data Sekunder; biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2003:127). Dalam penelitian ini penulis mengambil data yang terkait relevan dengan masalah yang diangkat sebagai bahan dan materi dalam pembahasan dalam proposal tesis ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengukuran langsung yang bukan berasal dari data yang telah ada.

Peneliti telah mengambil data langsung dari responden dengan menggunakan metode wawancara langsung (*direct interview*) berdasarkan daftar pertanyaan yang dibagikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Jaya.

### **4.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini, serta sebagai bahan dan materi untuk keperluan dan pembahasan maka metode pengumpulan data yang diperoleh meliputi:

1. *Survei Pendahuluan*; langkah awal untuk mencari judul penelitian tesis dan masalah yang bisa diangkat menjadi bahan penelitian membaca Simposium Nasional Akuntansi (SNA), Jurnal Riset Akuntansi Indonesia (JRAI), maupun karya tulis ilmiah lainnya.
2. *Survei Lapangan*; penelitian langsung yang dilakukan pada DPRD Kabupaten Puncak Jaya dimana sebagian besar data diperoleh dengan teknik pengumpulan data berikut ini.
  - a. Pengamatan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung ke objek yang diteliti dan mengamati apa yang menjadi sasaran dalam pengambilan data.

- b. Daftar Pertanyaan atau Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan membagikan kuesioner tersebut untuk diisi oleh dewan.

Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara personal (*personally direct interview*). Wawancara ini terdiri dari tiga bagian, yaitu surat permohonan wawancara, data responden, dan daftar pertanyaan. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya merupakan lokasi penelitian atau yang merupakan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### 4.5 Obyek dan Waktu Penelitian

Obyek dalam penelitian ini mengambil lokasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Jaya dengan waktu penelitian selama enam bulan, yaitu mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Maret 2013.

#### 4.6 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Jaya periode tahun 2009-2014 yang berjumlah 24 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling*, dimana seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sensus yaitu penelitian yang dilakukan terhadap seluruh populasi.

#### 4.7 Metode dan Teknik Analisis

Berdasarkan pada jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan data maka, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik analisis perbandingan antara indikator yang telah ditentukan dengan jawaban yang diberikan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

## 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 5.3 Latar Belakang Pribadi Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya

Dalam menilai latar belakang pribadi Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya digunakan indikator: tingkat pendidikan, bidang pendidikan, pekerjaan sebelum menjadi anggota dewan, dan preferensi metode dalam proses pengambilan keputusan.

**Tabel 5.1 Latar Belakang Tingkat Pendidikan**

No.	Uraian	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	Magister (S2)	2 orang	8,33 %	
2	Sarjana (S1)	16 orang	66,66 %	
3	Diploma (DIII)	1 orang	4,17 %	
4	SMA/ sederajat	5 orang	20,84 %	
	Jumlah	24 orang	100,00 %	

Sumber data: Hasil olahan (2013)

Berdasarkan rincian yang telah dijabarkan dalam Tabel 5.1, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar anggota Dewan memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, yaitu 16 orang sarjana, 1 orang Ahli Madya (Diploma III) dan 2 orang lulusan pascasarjana. Kenyataan ini menunjukkan hal yang positif sebab anggota Dewan yang berpendidikan sarjana memiliki ide dan solusi serta sikap yang lebih responsif terhadap suatu permasalahan dibandingkan dengan yang berpendidikan dibawahnya.

**Tabel 5.2 Latar Belakang Pekerjaan Sebelum Menjadi Anggota DPRD**

No.	Uraian	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	Wiraswasta	22 Orang	91,67 %	
2	Pegawai Negeri	2 Orang	8,33 %	
	Jumlah	24 Orang	100,00 %	

Sumber data: Hasil olahan (2013)

Anggota Dewan merupakan status politik yang memiliki *prestise* dan *previlese* tersendiri. Status politik tersebut menguat apabila anggota DPRD juga telah memiliki status sosial di tengah masyarakat. Para anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya sebelum mengemban amanah sebagai wakil rakyat telah memiliki pekerjaan yang dapat menunjang kehidupannya sehari-hari beserta keluarga. Berdasarkan tabel 5.4, sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya, yaitu 22 orang berlatar belakang sebagai wiraswasta, sedangkan 2 orang sebelumnya bekerja sebagai Pegawai Negeri (PNS/Anggota TNI/POLRI).

**Tabel 5.3 Latar Belakang Preferensi Pengambilan Keputusan**

No.	Uraian	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	Musyawarah	19 Orang	79,12 %	
2	Pemungutan Suara ( <i>voting</i> )	5 Orang	20,88 %	
	Jumlah	24 Orang	100,00 %	

Sumber data: Hasil olahan (2013)

Selain faktor pendidikan dan pekerjaan, latar belakang pribadi yang turut mempengaruhi fungsi pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah pada Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya adalah preferensi dalam mengambil keputusan. Sebagian besar Anggota Dewan cenderung memilih sistem musyawarah dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan fungsi pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian pada tabel 5.1 dimana 19 orang Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya memilih sistem musyawarah sedangkan sisanya (5 orang) memilih sistem pemungutan suara (*voting*).

#### 5.4 Latar Belakang Politik Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya

Latar belakang politik anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya dapat ditinjau dari asal partai politik, jabatan di partai politik, lama keanggotaan, dan pengalaman menjadi anggota DPRD.

**Tabel 5.4 Asal Partai Politik**

No.	Uraian	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	Koalisi	19 orang	79,16 %	
2	Oposisi	5 orang	20,84 %	
	Jumlah	24 orang	100,00 %	

Sumber data: Hasil olahan (2013)

Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan dalam Tabel 5.4, maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya (19 orang) adalah anggota dari kelompok koalisi dengan partai pemenang Pemilu Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu partai yang mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya terpilih. Untuk mengimbangi kekuatan tersebut, maka lima orang Anggota Dewan memilih sikap beroposisi terhadap pihak petahana (*incumbent*).

**Tabel 5.5 Latar Belakang Jabatan di Partai Politik**

No.	Uraian	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	Ketua	2 orang	8,33 %	
2	Sekretaris	1 orang	4,17 %	
3	Bendahara	4 orang	16,67 %	
4	Pengurus Biasa	17 orang	70,83 %	
	Jumlah	24 orang	100,00 %	

Sumber data: Hasil olahan (2013)

Dari 24 orang Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya, sebanyak 2 orang sedang memegang tampuk kepemimpinan pada partai politik asal masing-masing, 1 orang memangku jabatan sekretaris parpol, 4 orang bendahara, dan sisanya sebanyak 17 orang berkedudukan sebagai pengurus pada masing-masing parpol asal.

**Tabel 5.6 Latar Belakang Lama Keanggotaan Partai Politik**

No.	Uraian	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	> 5 tahun	14 orang	58,33 %	
2	1-5 tahun	8 orang	33,34 %	
3	< 1 tahun	2 orang	8,33 %	
	Jumlah	24 orang	100,00 %	

Sumber data: Hasil olahan (2013)

Berdasarkan tingkat senioritas berkiprah dalam partai politik sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.8, Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya didominasi oleh kader partai politik senior dalam artian bahwa 14 orang Anggota Dewan telah berkiprah selama lebih dari lima tahun dalam partai politik masing-masing. Kemudian 8 orang telah berkiprah antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun sebagai anggota partai politik yang bersangkutan. Hanya dua orang Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya yang masih minim pengalaman politik karena berkiprah kurang dari satu tahun.

**Tabel 5.7 Latar Belakang Pengalaman Menjadi Anggota DPRD**

No.	Uraian	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	pertama kali	20 orang	83,33 %	
2	> 1 periode	4 orang	16,67 %	
	Jumlah	24 orang	100,00 %	

Sumber data: Hasil olahan (2013)

Berkaitan dengan itu, 20 orang Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya masih dalam tahapan pemula, artinya mereka baru pertama kali terpilih menjadi Anggota Dewan. Sedangkan masa jabatan empat orang lainnya adalah kelanjutan dari periode sebelumnya, yaitu periode 2004-2009.

### 5.5 Pengetahuan Anggota DPRD tentang APBD Kabupaten Puncak Jaya

Indikator dalam menilai faktor pengetahuan anggota Dewan tentang APBD Kabupaten Puncak Jaya berupa pemahaman aturan tentang siklus pengelolaan keuangan daerah yaitu tahap penyusunan, penatausahaan, dan pertanggungjawab-an APBD, pemahaman regulasi yang mengatur tentang fungsi pengawasan keuangan oleh DPRD, serta pemahaman atas tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan struktur organisasi DPRD.

**Tabel 5.8 Pemahaman Aturan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah**

No.	Uraian	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	Komprehensif (seluruh tahapan)	8 orang	33,33 %	
2	Parsial (hanya sebagian tahapan)	16 orang	66,67 %	
	Jumlah	24 orang	100,00 %	

Sumber data: Hasil olahan (2013)

Rincian indikator pemahaman Anggota DPRD atas APBD Kabupaten Puncak Jaya dalam Tabel 5.3, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil (8 orang atau 33,33%) Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya yang menguasai pemahaman atas seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, yaitu sejak tahap perencanaan, kemudian ditindaklanjuti dengan tahap penatausahaan atau pelaksanaan APBD, lalu dilanjutkan dengan tahap pertanggungjawaban APBD Kabupaten Puncak Jaya pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan mayoritas Anggota DPRD (66,67% atau 16 orang) tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh atas siklus pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 5.9 Pemahaman Regulasi tentang Fungsi Pengawasan Keuangan**

No.	Uraian	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	Paham	3 orang	12,5 %	
2	Kurang paham	21 orang	87,5 %	
	Jumlah	24 orang	100,00 %	

Sumber data: Hasil olahan (2013)

Guna memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Puncak Jaya, maka para Anggota Dewan sebaiknya memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap regulasi-regulasi yang mengatur tentang pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.9 menunjukkan bahwa sebagian besar Anggota Dewan (21 orang) masih belum menguasai peraturan yang terkait dengan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya, fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah cenderung bertumpu kepada empat orang Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya Periode 2009-2014 yang memiliki pemahaman paripurna atas peraturan berkaitan dengan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 5.10 Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Struktur Organisasi**

No.	Uraian	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	Paham	24 orang	100,00 %	
2	Kurang paham	0 orang	0 %	
	Jumlah	24 orang	100,00 %	

Sumber data: Hasil olahan (2013)

Meskipun demikian, semua anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya telah mengetahui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta struktur organisasi DPRD Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini berimplikasi positif terhadap kelancaran pelaksanaan tugas DPRD sebagai representasi (perwakilan) rakyat di kabupaten Puncak Jaya.

## 5.6 Pembahasan

Wasistiono dan Wiyoso (2009) sebagaimana dikutip oleh Muhi (2011) mengungkapkan bahwa kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah mengalami perubahan yang sangat dinamis. Pada saat sistem pemerintahan sangat desentralistik, maka kedudukan DPRD dibuat lemah. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan sangat desentralistik, maka kedudukan DPRD dibuat sangat kuat.

Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi terpenting DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) selain fungsi legislasi dan anggaran. Seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada eksekutif substansinya adalah mengarah pada pengawasan politik atau kebijakan. Namun demikian, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD dinilai sebagian masyarakat belum optimal. Masyarakat mengkritik bahwa anggota DPRD dinilai tidak profesional karena belum/tidak mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, sehingga penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya bermanfaat untuk rakyat, cenderung dilaksanakan secara "asal-asalan" oleh pemerintah daerah. Berbagai fenomena di atas menunjukkan bahwa anggota DPRD saat ini belum memberikan kontribusi maksimal bahkan kredibilitas dan eksistensinya semakin diragukan oleh rakyat.

### 5.8.1 Pengaruh Latar Belakang Pribadi terhadap Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Puncak Jaya

Seseorang menjadi anggota DPRD merupakan pilihan rakyat, bukan seleksi seperti yang dilakukan oleh pemerintah (seleksi CPNS) maupun rekrutmen karyawan oleh perusahaan. Dengan demikian, tingkat pendidikan bukan dijadikan dasar seseorang dipilih menjadi anggota DPRD. Oleh karena itu, tingkat pendidikan akan kurang berpengaruh dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya tingkatan jabatan berdasarkan klasifikasi



pendidikan pada lembaga DPRD, seperti layaknya pada jajaran pemerintah daerah (pihak eksekutif) dan perusahaan. Dengan kata lain, seluruh anggota DPRD memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam melakukan pengawasan walaupun tingkat pendidikan yang dimiliki berbeda.

Relevansi bidang pendidikan juga akan kurang berpengaruh terhadap fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini disebabkan oleh beberapa responden tidak berasal dari bidang pendidikan yang relevan dengan bidang pengawasan dan keuangan seperti hukum, ekonomi, administrasi pemerintahan, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan peran yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Puncak Jaya dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah menjadi tidak maksimal. Selain itu penempatan seorang anggota dewan ke dalam komisi yang membidangi pengawasan pengelolaan keuangan daerah biasanya berdasarkan rekomendasi fraksi anggota dewan yang ada di DPRD, bukan melihat bidang pendidikan yang dimiliki.

Latar belakang pekerjaan juga akan kurang berpengaruh dalam fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki latar belakang pekerjaan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan. Selain itu, latar belakang pekerjaan turut berpengaruh terhadap motif-motif ekonomi untuk mendapatkan finansial lebih banyak melalui program kerja keluar daerah seperti bimbingan teknis (bimtek), kunjungan kerja, dan studi banding.

### **5.8.2 Pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Puncak Jaya**

Asal parpol (koalisi atau oposisi) berpengaruh terhadap fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Anggota DPRD yang berasal dari partai koalisi memiliki peran yang lebih besar dalam pengawasan keuangan daerah dibanding partai oposisi. Pada lembaga legislatif (DPRD) sering kali perumusan dan pengesahan kebijakan pemerintah dilakukan secara *voting* (pemungutan suara). Dalam kondisi seperti ini biasanya suara partai koalisi akan lebih dominan dibanding partai oposisi. Hal ini mengakibatkan anggota DPRD yang berasal dari partai koalisi akan memiliki peran pengawasan keuangan daerah yang lebih besar dibanding anggota DPRD yang berasal dari partai oposisi.

Pengalaman di DPRD berpengaruh terhadap fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah pada anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya. Semakin lama seseorang menjadi anggota DPRD, maka semakin besar pula pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.

### **5.8.3 Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Puncak Jaya**

Pemahaman regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya. Anggota DPRD yang memiliki pemahaman regulasi yang baik mengenai keuangan daerah akan mudah mengawasi apakah APBD telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mendeteksi terjadinya kebocoran anggaran. Hal ini dikarenakan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota dewan dalam memastikan apakah pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

## **6 SIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan berikut ini.

1. Latar belakang pribadi Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya akan kurang berpengaruh terhadap fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tingkat pendidikan akan kurang berpengaruh terhadap fungsi pengawasan yang baik karena tidak adanya tingkatan

jabatan berdasarkan klasifikasi pendidikan pada lembaga DPRD, seperti layaknya pada jajaran pemerintah daerah (pihak eksekutif) dan perusahaan. Selain itu, penempatan seorang anggota dewan ke dalam komisi yang membidangi pengawasan pengelolaan keuangan daerah biasanya berdasarkan rekomendasi fraksi anggota dewan yang ada di DPRD, bukan melihat bidang pendidikan yang dimiliki. Sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki latar belakang pekerjaan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan.

2. Latar belakang politik anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya berpengaruh terhadap fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Anggota DPRD yang berasal dari partai koalisi memiliki peran yang lebih besar dalam pengawasan keuangan daerah dibanding partai oposisi. Semakin lama seseorang menjadi anggota DPRD, maka semakin besar pula pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengetahuan anggota Dewan tentang APBD Kabupaten Puncak Jaya berpengaruh dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Anggota DPRD yang memiliki pemahaman regulasi yang baik mengenai keuangan daerah akan mudah mengawasi apakah APBD telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mendeteksi terjadinya kebocoran anggaran.

## 6.2 Saran

Berdasarkan perbandingan antara kondisi ideal berdasarkan teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, maka disarankan hal-hal berikut ini.

1. Salah satu aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya adalah pengelolaan keuangan daerah karena anggaran daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung siklus penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD dianggap kurang maksimal. Terbukti dengan banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
2. DPRD Kabupaten Puncak Jaya hendaknya rutin melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang pengawasan pengelolaan keuangan daerah bagi para anggota dewan secara terarah dan berkesinambungan sehingga mereka dapat memahami tugas dan fungsinya.
3. DPRD seyogyanya membuat pedoman pokok pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dapat menguatkan posisi DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar bisa berperan dalam fungsi pengawasan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (SAP Berbasis Akrua) Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kombaitan, Yanty. 2009. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Kapasitas Individu, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Partisipasi Anggaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Unsrat Manado.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- La Palombara, J. 2002. *Politics with in Nation*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.

- Menteri Negara Otonomi Daerah dan Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi UGM. 2000. *Modul Pembekalan Teknis Manajemen Strategik dan Teknik Penganggaran/Keuangan Bagi Anggota DPRD dan Pejabat Pemerintahan Daerah*.
- Muhi, Ali Hanapiah. 2011. *Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Bahan Kuliah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor.
- Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022)*.
- Republik Indonesia. 2001. *Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sari, Imelda. 2010. *Pengaruh Personal Background dan Political Background serta Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah/APBD*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara Medan, Agustus 2010.
- Werimon, Simson, Imam Ghazali, dan Mohamad Nazir. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi 10, Unhas Makassar.
- Winarna, Jaka dan Sri Murni. 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 10, Unhas Makassar.
- Yudono, Bambang. 2002. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm>.